Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2013-2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya menyambut gembira terbitnya buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 ini. Buku ini memuat sejumlah revisi atas indikator kinerja yang dirumuskan sebagai respon atas dinamika internal dan eksternal yang terjadi dalam perjalanan pembangunan NTB periode 2013-2018. Revisi atau perubahan disahkan dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

RPJMD 2013-2018 merupakan RPJMD periode lima tahun kedua pada pemerintahan yang saya pimpin. Kedua RPJMD ini dirancang dengan satu semangat keberlanjutan yang mengedepankan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai titik fokus utamanya. Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mendorong sejumlah program prioritas dan unggulan di sektor pariwisata, pertanian dan pembenahan infrastruktur dasar. Apa yang sudah dicapai pada periode pertama hendak ditingkatkan dan dipercepat realisasinya pada periode kedua ini.

Saya menekankan betul pentingnya RPJMD 2013-2018 ini dijalankan dengan penuh kesungguhan dan keihlasan. Kita bersyukur sejumlah capian telah kita hasilkan dan mendapatkan apresiasi

banyak kalangan. Penurunan angka kemiskinan kita salah satu yang progresif secara nasional, angka putus sekolah kita menurun tajam, sektor pariwisata kita tumbuh dengan menyakinkan dan sejumlah kawasan strategis dengan potensi yang besar kita sedang kembangkan. Semua itu harus terus kita pastikan berjalan sesuai skenario percepatan yang kita rancang.

Tantangan pembangunan kita di NTB masihlah sangat besar. Kita dituntut untuk terus meningkatkan ikhtiar, menjaga kebersamaan dan terus-menerus melakukan terobosan. Saya percaya sepenuhnya masa depan NTB ditentukan sejaauh mana ikhtiar yang kita lakukan saat ini. Kita wajib memberikan kinerja yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat NTB ke depan. Insha Allah segenap ikhtiar kita dimudahkan oleh *Allah Subhanahu'Wataala*. Tuhan Yang Maha Kuasa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 10 Maret 2017
Gubernur Nusa Tenggara Barat

Dr. TGH. M. Zainul Majdi

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari isi visi misi dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa dengan diimplementasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyebabkan

adanya perubahan kebijakan nasional sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 perlu dirubah dan disesuaikan kembali;

c. bahwa dalam rangka pengintegrasian, sinkronisasi, dan sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah kedalam sistem Pembangunan Nasional, maka diperlukan keselasaran antar dokumen perencanaan nasional dengan daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu melakukan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 untuk menyesuaikan target pembangunan daerah, penyesuaian perubahan kewenangan pemerintah Provinsi NTB sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan penyesuaian adanya beberapa strategi, kebijakan dan program prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB terkait dengan upaya percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2018;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelakssanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RPJMD Provinsi merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mempedomani RPJPD Provinsi sebagai wujud dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya daerah otonom Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Januari 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR:

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (1/2/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Revisi atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1) adanya perubahan target pencapaian pembangunan di Provinsi NTB dalam target pembagian peran pencapaian indikator kinerja pembangunan Nasional 2015-2019, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; (2) adanya perubahan kewenangan pemerintah Provinsi NTB sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan (3) adanya beberapa strategi, kebijakan dan program baru dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan upaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang secara cepat serta upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019, penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan antara lain (1) untuk menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi prioritas dalam RPJMD terkait; (2) untuk meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR:

Daftar Isi

Sambutan	iii
Peraturan Daerah RPJMD	v
BAB I PENDAHULUAN	**3**
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	11
1.4. Sistematika Penulisan	15
1.5. Maksud dan Tujuan	18
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	**21**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	21
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	40
2.3. Aspek Pelayanan Umum	90
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	132
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	**169**
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	169
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	177
3.3. Kerangka Pendananaan	181
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	**191**
4.1. Permasalahan Pembangunan	191
4.2. Isu Strategis	202
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	**215**
5.1. Visi	215
5.2. Misi	216
5.3. Tujuan dan Sasaran	220

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH **227**

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH **249**
7.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 249
7.2. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 253
7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 260

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN **355**

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH **499**

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN **507**
10.1. Pedoman Transisi 507
10.2. Kaidah Pelaksanaan 507

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Hubungan Antara Dokumen

1.4. Sistematika Penulisan

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini telah memiliki dokumen RPJPD 2005-2025 dan dokumen RPJMD 2009-2013. Dengan dilantiknya Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA selaku Gubernur NTB dan H. Muhammad Amin, SH, M.Si selaku Wakil Gubernur NTB terpilih periode 2013-2018 pada tanggal 17 September 2013, pemerintah daerah NTB harus menyusun RPJMD periode 5 tahun berikutnya yakni tahun 2013-2018. Dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, maka RPJMD Provinsi NTB 2009-2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan

Pasal 150 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Penyusunan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 mempertimbangkan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB 2009-2013, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2009-2029, Pra Renstra SKPD 2013-2018 dan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti MDGs, RAD pengentasan kemiskinan, MP3Ei, RAD Gas Rumah Kaca dan sebagainya.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, membawa konsekuensi logis terhadap adanya perubahan kebijakan Nasional dan Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi NTB perlu menyesuaikan dan menyelaraskan perubahan kebijakan tersebut untuk dituangkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB perlu merevisi dokumen RPJMD Provinsi NTB 2013-2018.

Revisi atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013-2018 ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1) adanya perubahan target pencapaian pembangunan di Provinsi NTB dalam target pembagian peran pencapaian indikator kinerja pembangunan Nasional 2015-2019, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; (2) adanya perubahan kewenangan pemerintah Provinsi NTB sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan (3) adanya perubahan perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; (4) adanya beberapa strategi, kebijakan dan program baru

dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB terkait dengan upaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang secara cepat serta upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2018.

Revisi dokumen RPJMD Provinsi NTB ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 50 ayat (1), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 282 ayat (1), yang menegaskan bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah apabila : (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) terjadi perubahan yang mendasar.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan antara lain (1) untuk menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi prioritas dalam RPJMD terkait; (2) untuk meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Tahapan proses penyelarasan dokumen RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMN 2015-2019 lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.

Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, secara substantif memuat visi dan misi pasangan kepala daerah yang disampaikan saat kampanye yang diformulasi ke dalam tata susunan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sedangkan pokok-pokok revisi memuat 3 (tiga) substasi yakni terkait (1) gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan (BAB III); (2) indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan (BAB VIII) dan (3) penetapan indikator kinerja daerah (BAB IX) yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan

nasional sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Revisi dokumen RPJMD tersebut merupakan pedoman pelaksaaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan dan acuan penyusunan RKPD sebagai dokumen rencana pembangunan yang bersifat tahunan. Sistematika pelaporan RPJMD memuat gambaran umum wilayah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah, masalah dan isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, dan program dan pendanaan pembangunan daerah serta dibagian akhir menyajikan indikator kinerja daerah.

Gambar 1.1
Tahapan Penyelerasan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 dengan RPJMN 2015-2019

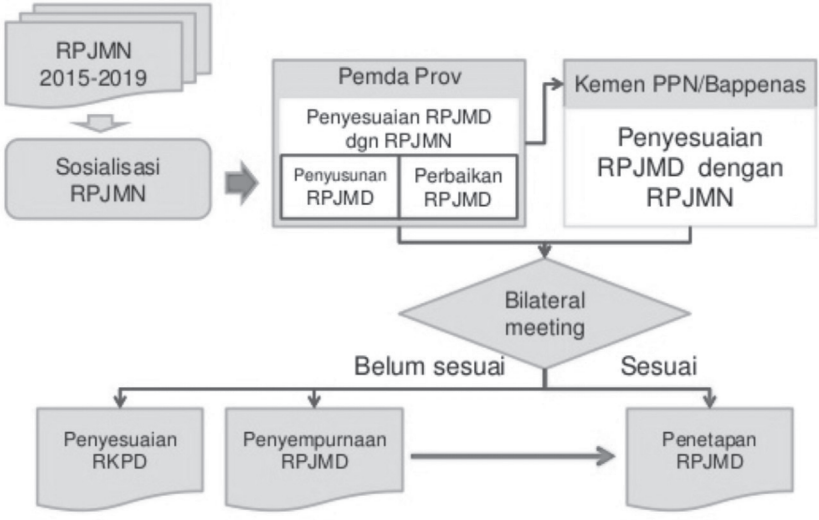

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen PPN 3/6/2014

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembar Negara nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembar Negara 5495);
14.
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 67 Tahun 2012 tantang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atas Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 1 Tahun 2014 tantang Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26).

32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 71);

33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 72);

34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 73).

35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 78);

36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rencana pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan provinsi, demikian pula rencana pembangunan provinsi adalah bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Nasional merupakan pedoman penyusunan RPJP Provinsi, dan dokumen RPJP Provinsi merupakan pedoman bagi penyusunan RPJP Kabupaten/Kota. Apabila RPJM Nasional merupakan turunan dari RPJP Nasional, maka RPJMD merupakan turunan dari RPJPD. Demikian halnya RPJM Nasional dijabarkan dalam RKP dan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang bersifat perencanaan tahunan. RPJM Nasional juga dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga berdurasi 5 tahunan, dan RPJM Daerah dijabarkan secara implementatif dalam Rencana Strategis SKPD.

Dengan posisi tersebut, Revisi dokumen RPJMD Provinsi berpedoman pada RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015 – 2019 dengan visi **Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan.** Selain memperhatikan RPJPN dan mempedomani RPJMN 2015-2019, dokumen RPJMD juga mengacu dan mempedomani dokumen pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB 2005-2025 dengan visi **Mewujudkan Masyarakat yang**

Beriman, Maju dan Sejahtera. Selama ini telah pula disusun berbagai dokumen pendukung perencanaan seperti Pepres Nomor 56 Tahun 2014 tentang RTRW Kepulauan Nusa Tenggara, RTRW Provinsi NTB, RAD GRK, MDGs, RAD Penurunan Angka kemiskinan dan dokumen lainnya, juga sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD. Demikian pula bahwa RPJMD Provinsi NTB mempertimbangkan keterhubungannya dengan RPJMD Provinsi Tetangga atau berdekatan yaitu RPJMD Provinsi Bali dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sinergitas RPJMD dengan berbagai dokumen tersebut diatas sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, meliputi :

a. Visi, misi, arah, tujuan, kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan serta pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;

b. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW;

c. Arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya;

d. Jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah Provinsi terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan, dan;

e. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Provinsi. Selanjutnya hubungan antar dokumen perencanaan tersebut lebih jelas tertera pada gambar 1.2.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

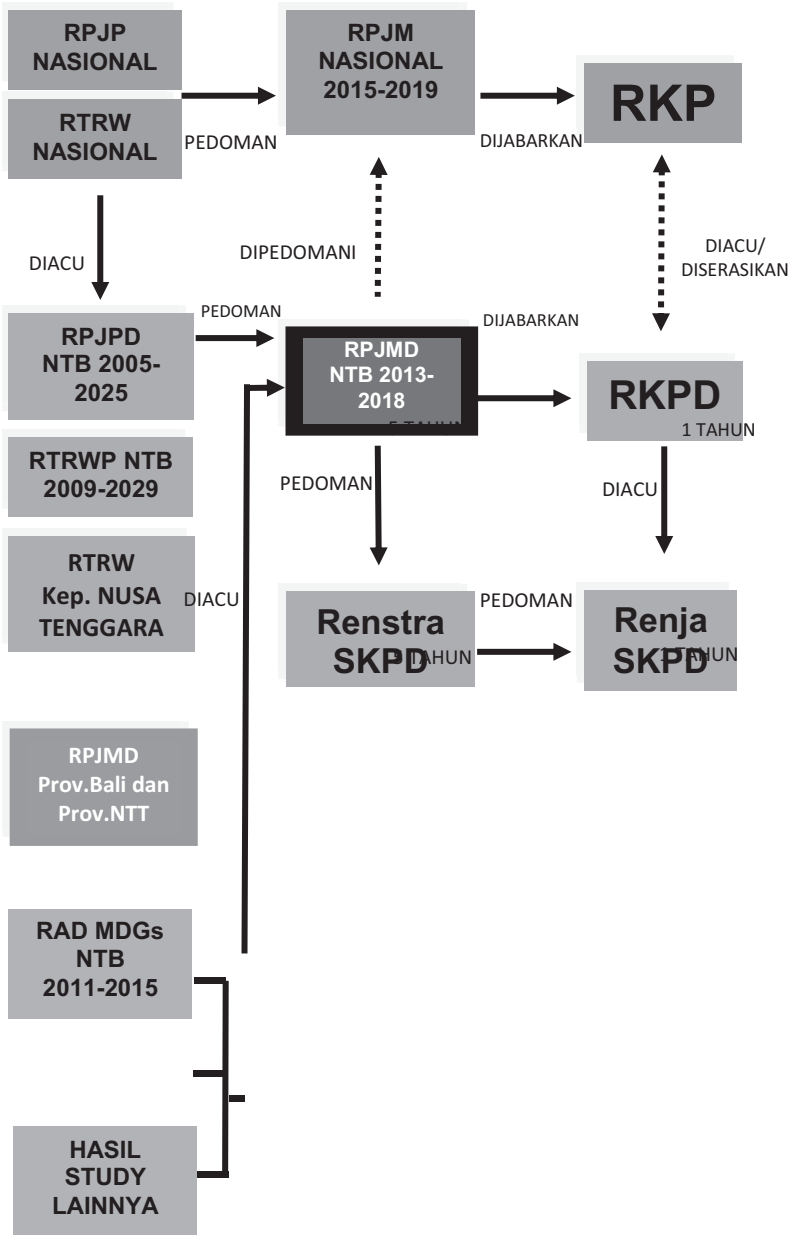

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dala-Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2019) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Provinsi dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan yang tertuang dalam agenda NAWACITA menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

1.1.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2013-2018 merupakan RPJMD Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2013-2018, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

1.1.3. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.1.4. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program

dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.1.5. Hubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

1.1.6. Hubungan RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Provinsi Tetangga

Penyusunan dan Pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, sebagai upaya menjaga kesinambungan regional, diperlukan adanya koordinasi pembangunan dengan RPJMD dan RTRW Provinsi tetangga yakni Provinsi Bali dan NTT, baik yang menyangkut teritorial maupun isu strategis regional lainnya terutama isu lingkungan, kemaritiman dan sosioekonomi.

1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 terdiri dari 10 Bab, secara garis besar menguraikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

1. Menguraikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan. Dalam Revisi ini, beberapa hal yang mengalami perubahan diantaranya pada latar

belakang dengan menambah narasi alasan dilakukannya Revisi, adanya perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

BAB II **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menguraikan kondisi geografis, administratif, sosial kependudukan serta pencapaian pembangunan 5 tahun terakhir di Provinsi NTB yang dikelompokkan ke dalam tinjauan aspek Geografi dan demografi, Kesejahteraan masyarakat, Pelayanan umum, Daya saing daerah. Dalam Revisi ini, dilakukan pemutakhiran data kondisi daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir 2009-2013.

BAB III **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Menguraikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Dalam Revisi ini, dilakukan pemutakhiran data kondisi keuangan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir 2009-2013.

BAB IV **ANALISA ISU-ISU STRATEGIS**

Menguraikan Permasalahan dan Isu strategis yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam Revisi ini, dilakukan pemutakhiran data dan informasi terkait dengan isu strategis daerah.

BAB V **VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN**

Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD.

BAB VI **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai kewenangan pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan.

BAB VII **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM DAERAH**

Menguraikan kebijakan umum dan program pembangunan dari masing-masing strategi dan arah kebijakan daerah yang dipaparkan pada bab sebelumnya menuju terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB VIII **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Menguraikan indikator kinerja berikut program dan kegiatan prioritas mengacu Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendari Nomor 59 tahun 2007 yang dikelompokkan pada masing-masing urusan beserta target dan kebutuhan pendanaan menuju terwujudnya kebijakan umum pembangunan, arah kebijakan, sasaran tujuan dan visi-misi pembangunan daerah.

BAB IX **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Menyajikan indikator kinerja pembangunan daerah beserta target capaian indikator kinerja per tahun.

BAB X **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Menguraikan Pedoman transisi berupa aturan untuk mengatasi kekosongan acuan perencanaan pembangunan daerah pada masa peralihan sejak akhir berlakunya RPJMD 2013-2018 sampai dengan ditetapkannya RPJMD 2019-2023 serta menguraikan kaidah pelaksanaan RPJMD ini, bilamana terjadi keadaan yang bersifat luar biasa.

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, disusun dengan maksud mengarahkan penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, pelaksanaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018 dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan daerah jangka menengah serta indikator kinerja pembangunan daerah;
2. Menetapkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-NTB;
4. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional, antara provinsi dengan kabupaten/kota serta antar provinsi yang berbatasan.

BAB II

GAMBAR UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar, yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 277 pulau-pulau kecil. Dari 279 pulau yang ada, terdapat 44 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km^2 terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km^2 (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km^2 (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 2/3 dari luas provinsi Nusa Tenggara Barat atau sekitar 15.414,5 km^2 (76,49 %), sedangkan luas Pulau Lombok mencapai 1/3 dari luas provinsi Nusa Tenggara Barat atau sekitarseluas 4.738,70 Km^2 (23,51%).

b. Letak dan kondisi geografis

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Secara Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota yang meliputi 116 wilayah kecamatan dan 1.137 desa/kelurahan, dengan pusat pemerintahan Provinsi NTB terdapat di Kota Mataram Pulau Lombok. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan, sebagaimana terlihat padatabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah (Tahun2013)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas wilayah (Km^2)	Persentase (%)
1	Lombok Barat	10	122	1.053,92	5,23
2	Lombok Tengah	12	139	1.208,40	6,00
3	Lombok Timur	20	254	1.605,55	7,97
4	Lombok Utara	5	33	809,53	4,02
5	Sumbawa	24	165	6,643,98	32,97
6	Dompu	8	81	2.324,60	11,53
7	Bima	18	191	4.389,40	21,78
8	Sumbawa Barat	8	64	1.849,02	9,17
9	Kota Mataram	6	50	61,30	0,30
10	Kota Bima	5	38	207,50	1,03
Jumlah		116	1.137	20.153,15	100

Sumber: BPMPD Prov. NTB

c. Topografi

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0-3.726 m dpl untuk Pulau Lombok, dan 0-2.755 m dpl untuk Pulau Sumbawa. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan 11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat ibukotaProvinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl.

Berdasarkan pada klasifikasi ketinggian wilayah maka diketahui bahwa wilayah yang memiliki ketinggian 0-100 m dpl sekitar 23,76% atau seluas 478.911 Ha, ketinggian 100-500 m dpl sekitar 37,39% atau seluas 753.612 Ha, ketinggian 500-1.000 m dpl sekitar 15,25% atau seluas 307.259 Ha dan lebih dari 1.000 m dpl seluas 475.533 Ha 23,60%. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.726 mdpl, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 mdpl dari sembilan gunung yang ada (NTB Dalam Angka 2014).

Kemiringan tanah didominasi oleh kemiringan tanah berkisar antara 15-40% seluas 704.619 Ha (34,96%) sedangkan yang paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0-2% seluas 338.552 Ha (16,80%). Untuk Pulau Lombok klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2-15% seluas 198.616 Ha (9,85%) sedangkan yang paling sempit klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40% seluas 20.175 Ha (1,01%). Sedangkan Pulau Sumbawa klasifikasi kemiringan tanah yang paling luas berkisar antara 15-40% seluas 573.903 Ha (28,48%) dan yang paling sempit kemiringan tanah 0-2% seluas 214.194 Ha (10,63%).

d. Geologi

Keadaan geologi wilayah NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium(*resent*). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuarter. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan. Batuan kuarter di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan kuarter di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung api tua, gunung api Sangiang, gunungapi Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral. Aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di

Pulau Sumbawa dan Lombok.

e. Hidrologi

DAS (Daerah Aliran Sungai)

Sesuai SK Gubernur NTB No. 147 Tahun 1999 tentang pembagian Sub Satuan Wilayah Sungai/Daerah Aliran Sungai di Satuan Wilayah Sungai Lombok dan Satuan Wilayah Sungai Sumbawa, wilayah NTB dibagi menjadi 18 Sub Satuan Wilayah Sungai/Daerah Aliran Sungai (SSWS/DAS). Satuan Wilayah Sungai (SWS) Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi, Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P. Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh. Luas SWS dan SWSS di Provinsi NTB.

Cekungan Air Tanah

Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB dapat sebagaimana dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air Tanah (CAT)	Luas (km^2)	Air Tanah Bebas (juta m^3 / tahun)	Air Tanah Tertekan (juta m^3 / tahun)
1.	Mataram - Selong	2.366	662	8
2.	Tanjung - Sambelia	1.124	224	22
3.	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4.	Empang	345	35	3
5.	Pekat	977	220	10
6.	Sanggar – Kilo	1.419	320	14
7.	Dompu	375	63	6
8.	Bima	1.102	165	16
9.	Tawali – Sape	363	36	3

Sumber : Perda RTRW Provinsi NTB, 2009-2029

f. Klimatologi

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), temperatur udara di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013

temperatur maksimum berkisar antara 31,4° C – 33,8° C dan temperatur minimum antara 17.0° C – 23,6° C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan November dan temperatur terendah terjadi pada bulan Agustus. Rata-rata kelembaban udara relatif tinggi, yaitu antara 77-87%,kelembaban terendah terjadi pada bulan Agustus hingga September sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan kecepatan angin rata-rata mencapai kisaran 1 – 6knots dan kecepatan angin maksimum mencapai 27knots yang terjadi pada bulan Februari dan kecepatan angin terendah 7knots terjadi pada bulan Mei. Tekanan udara berkisar 1008,3 – 1012,6 mb, tekanan udara terbesar terjadi pada bulan Agustus dan terendah terjadi pada bulan Februari. Lamanya penyinaran matahari berkisar 40-89%, lamanya penyinaran matahari terbesar terjadi pada bulan September dan terendah terjadi pada bulan Desember. Jumlah hari hujan terendah yaitu 2 hari pada bulan September dan yang terbanyak adalah pada bulan Januari dengan jumlah 29 hari.

g. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan yang terluas adalah hutan seluas 1.163.941,51 Ha (57,75%) dan persawahan seluas 240.925,05 ha (11,95%). Sedangkan penggunaan lahan yang terkecil adalahpertambangan seluas 591,96 Ha (0,03%). Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi NTB Tahun 2013

No	Penggunaan Lahan	Kabupaten/Kota (Ha)										Provinsi (Ha)
		Mataram	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Lombok Utara	Sumbawa	Sumbawa Barat	Dompu	Bima	Kota Bima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Permukiman	3.263,93	5.197,58	6.185,29	7.176,42	2.002,46	4.150,69	1.374,47	2.502,39	3.097,83	817,39	35.768,44
2	Industri	843,53	-	-								843,53
3	Pertambangan				80,56		50,34	461,06				591,96
4	Persawahan	1.881,56	16.421,46	64.354,66	51.602,89	6.041,74	46.102.83	9.000,27	14.482,29	27.337,80	3.699,54	240.925,05
5	Pert. Tanah Kering semusim		22.845,42	10.100,78	26.956,69	3.240,45	76.666,40	6.828,59	12.928,66	40.144,78	10.205,09	209.916,85
6	Kebun		10.542,49	13.570,95	11.369,90	27.388,02	13.856,10	1.942,89	4.802,92	420,70	466,81	84.360,78
7	Perkebunan					4.840,91	493,15	5,20	8.901,78	2603,54	668,52	17.513,10
8	Padang		9.072,13	4.686,40	10.120,31	1.668,58	75.507,10	8.252,56	41.337,83	74.517,69	382,14	225.544,73
9	Hutan		29.173,47	19.660,45	51.584,33	34.350,55	438.440,21	155.125,44	143.761,26	287.461,02	4.384,79	1.163.941,51
10	Perairan Darat	94,43	1.009,29	2.281,47	1.177,60	1.065,86	4.935,77	1.616,85	2.689,74	1.817,67	78,30	16.766,99
11	Tanah Terbuka	46,45	305,16		482,96	213,88	4.195,63	294,65	21,75	998,37		6.558,86
12	Lain-lain		10.820,00		3,23	141.00			1.031,38	540,60	47,43	12.583,64
PROVINSI NTB		6.129,91	105.387,00	120.840,00	160.554,87	80.953,45	664.398,23	184.901,99	232.460,00	438.940,00	20.750,00	2.015.315,45

Sumber : Kanwil BPN Provinsi NTB

h. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 dari kepentingan pertumbuhan ekonomi,yaitu :

1. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan, jasa, industri dan pariwisata;
2. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
3. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri dan pariwisata;
4. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
5. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
6. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata;
7. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
8. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beseerta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan dan industri;
9. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor

unggulan pertanian, perkebunan dan industri;

10. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian dan perikanan;
11. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;
12. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :

1. Kawasan ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
2. Kawasan ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
3. Kawasan ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Bima;
4. Kawasan ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima.

Rencana Pembagian Zona Wilayah Pesisir dan Laut

Sesuai kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah pesisir dan laut Provinsi NTB dikelompokan ke dalam 18 (delapan belas) kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Gili Indah dan sekitarnya;
2. Kawasan Senggigi dan sekitarnya;
3. Kawasan Labuan Lembar dan sekitarnya;
4. Kawasan Gili Gede dan sekitarnya;
5. Kawasan Teluk Sepi dan sekitarnya;
6. Kawasan Kuta dan sekitarnya;
7. Kawasan Teluk Ekas dan Teluk Serewe dan sekitarnya;
8. Kawasan Tanjung Luar dan sekitarnya;
9. Kawasan Labuan Lombok dan sekitarnya;
10. Kawasan Gili Sulat dan sekitarnya;

11. Kawasan Maluk dan sekitarnya;
12. Kawasan Pantura Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya;
13. Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya;
14. Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya;
15. Kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya;
16. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya;
17. Kawasan Sape dan sekitarnya;
18. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya.

Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Jenis dan Lokasi Kawasan Rawan Bencana

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor	
Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor Tipe A	
Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
Kabupaten Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
Kabupaten Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kabupaten Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
Kabupaten Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Kabupaten Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane
Kab dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu
Rawan Tanah Longsor Tipe B	
Kabupaten Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
Kabupaten Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
Kabupaten Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kabupaten Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
Kabupaten Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber : RTRW Provinsi NTB 2009-2029

2. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Gunung Rinjani	
Kabupaten Lombok Utara	Daerah Bahaya : Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
Kabupaten Lombok Timur	Daerah Bahaya : Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
Gunung Tambora	
Kabupaten Dompu	Daerah Bahaya : Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km^2
Kota Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
Kabupaten Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
Gunung Api Sangiang	
Kabupaten Bima	Daerah terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km^2 yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sori Panda, Sori Iso dan Sori Berano
	Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian selatan
	Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB 2009-2029

3. Kawasan Rawan Banjir

Lokasi	**Kawasan Rawan Banjir**
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar
Kabupaten Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kabupaten Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
Kabupaten Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber : RTRW Provinsi NTB 2009-2029

4. Kawasan Rawan Tsunami

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Kabupaten Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
Kabupaten Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
Kabupaten Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejorong dan Sekongkang
Kabupaten Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kabupaten Dompu	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kabupaten Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB 2009-2029

5. Kawasan Rawan Angin Topan

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Kabupaten Lombok Barat dan lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kabupaten Lombok Timur	Kecamatan Keruak dsk, Jerowaru dsk dan Sambelia dsk

Kabupaten Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kabupaten Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
Kabupaten Bima	Kecamatan Woha dsk, monta dsk, Woja dsk

Sumber : RTRW Provinsi NTB 2009-2029

6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagaian barat yaitu Sekip dan Ampenan
Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Sepanjang Pesisir Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara
Kabupaten Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
Kabupaten Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
Kabupaten Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejorong dan Sekongkang
Kabupaten Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kabupaten Dompu	Pantai bagian barat Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kabupaten Bima	Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB 2009-2029

7. Kawasan Rawan Kekeringan

Lokasi	Kawasan Rawan Kekeringan
Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang dan sekitarnya, Tanjung, Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
Kabupaten Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya
Kabupaten Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dsk
Kabupaten Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong-Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh

Kabupaten Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturotok-Punik, Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat, Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-kalaning-Tanjungberu-Pungkit, Plampang-Empang
Kabupaten Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo dan Mbawi
Kabupaten dan Kota Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB 2009-2029

8. Kawasan Rawan Abrasi Pantai

Lokasi	Kawasan Rawan Abrasi Pantai
Tersebar di wilayah pesisir di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	

Sumber : RTRW Provinsi NTB 2009-2029

9. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Lokasi	Kawasan Rawan Gempa Bumi
Tersebar di wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.d XII MMI (*modified mercally intensity*)	

Sumber : RTRW Provinsi NTB 2009-2029

2.1.2. Demografi

a. Jumlah penduduk

Penduduk Nusa Tenggara Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, jumlah penduduk NTB mencapai 4.434.012 jiwa, sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 4.630.302 jiwa atau mengalami pertambahan penduduk sebesar 196.290 jiwa selama periode 2009 – 2013. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2013 sebanyak 2.244.721 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 2.385.581, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,1.Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.130.365 jiwa atau 24,41% dan yang terkecil berada di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 121.167 jiwa atau 2,62% dari total penduduk NTB.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/ Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio JK
1	Lombok Barat	303.210	317.202	620,412	95,59
2	Lombok Tengah	416.774	464.912	881,686	89,65
3	Lombok Timur	526.179	604.186	1,130,365	87,09
4	Sumbawa	217.257	208.871	426,128	104,01
5	Dompu	114.186	112.032	226,218	101,92
6	Bima	224.454	226.522	450,976	99,09
7	Sumbawa Barat	61.353	59.814	121,167	102,57
8	Lombok Utara	100.953	104.111	205,064	96,97
9	Kota Mataram	207.440	212.201	419,641	97,76
10	Kota Bima	72.915	75.730	148,645	96,28
Total 2013		2,244,721	2.385.581	4.630.302	94.1
2012		2,228,493	2.359.069	4.587.562	94.46
2011		2,207,016	2.338.634	4.545.650	94.37
2010		2,183,646	2.316.566	4.500.212	94.26
2009		2,119,538	2.314.474	4.434.012	91.58

Sumber: BPS Provinsi NTB

b. Pertumbuhan penduduk

Penduduk Nusa Tenggara Barat terdistribusi tidak merata, karena 70,4%(3.257.168 jiwa) berdomisili di Pulau Lombok dan selebihnya 29,6%(1.373.134 jiwa). Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

PenyebaranPenduduk Berdasarkan Kabupaten/KotaTahun 2009-2013 (jiwa)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Lombok Barat	829.777	599.986	606.044	613.161	620.412
2	Lombok Utara	-	200.072	202.092	203.564	205.064
3	Lombok Tengah	856.675	860.209	868.895	875.231	881.686
4	Lombok Timur	1.080.237	1.105.582	1.116.745	1.123.488	1.130.365
5	Kota Mataram	375.506	402.843	406.910	413.210	419.641
Pulau Lombok		3.142.195	3.168.692	3.200.686	3.228.654	3.257.168

6	Sumbawa Barat	101.089	114.951	116.112	118.608	121.167
7	Sumbawa	420.750	415.789	419.987	423.029	426.128
8	Dompu	217.479	218.973	221.184	223.678	226.218
9	Bima	420.207	439.228	443.663	447.286	450.976
10	Kota Bima	132.292	142.579	144.018	146.307	148.645
Pulau Sumbawa		1.291.817	1.331.520	1.344.964	1.358.908	1.373.134
Provinsi NTB		4.434.012	4.500.212	4.545.650	4.587.562	4.630.302

Sumber : BPS NTB (NTB Dalam Angka 2014)

Selama periode tahun 2009-2013Penduduk Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan disebabkan olehkelahiran alami dan migrasi penduduk. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,19%. Pentumbuhan penduduk di pulau Sumbawa lebih besar dibandingkan dengan di pulau Lombok yang mencapai rata-rata sebesar 1,54%, sedangkan pulau Lombok mencapai rata-rata sebesar 1,05%. Sementara itu, ditinjau dari jenis kelamin, walaupun proporsi jumlah penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki atau *sex ratio* rata-rata mencapai 93,14. Artinya bahwa 100 orang penduduk perempuan, penduduk laki-laki sejumlah 93 orang,namunpertumbuhan penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang mencapai rata-rata sebesar 0,92%, sedangkan laki-laki mencapai rata-rata sebesar 1,50%.

Dilihat dari tingkat kepadatan Penduduk, kepadatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai220 jiwa per km^2 pada tahun 2009 meningkat menjadi 230 jiwa per km^2, penduduk di pulau Lombok lebih padat dibandingkan dengan pulau Sumbawa, yang mencapai 687 jiwa per km^2. Sementara itu, menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kepadatan penduduk terendah. Lebih jelas dapat kita lihat pada tabel 2.7.

Tabel2.7
Kepadatan Penduduk Tahun 2009-2013

No.	Kabupaten/ Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Lombok Barat	445	569	575	582	589
2	Lombok Utara	-	247	250	251	253
3	Lombok Tengah	709	712	719	724	730
4	Lombok Timur	673	689	695	700	704
5	Kota Mataram	6.126	6.572	6.638	6.741	6.846
	Pulau Lombok	**663**	**669**	**675**	**681**	**687**
6	Sumbawa Barat	55	62	63	64	66
7	Sumbawa	63	63	63	64	64
8	Dompu	94	94	95	96	97
9	Bima	96	100	101	102	103
10	Kota Bima	637	687	694	705	716
	Pulau Sumbawa	**84**	**86**	**87**	**88**	**89**
	Provinsi NTB	220	223	226	228	230

Sumber: BPS Provinsi NTB

Pertumbuhan penduduk tahun 2009 – 2013terlihat dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Penduduk Nusa Tenggara Barat tahun 2009 - 2013 (%)

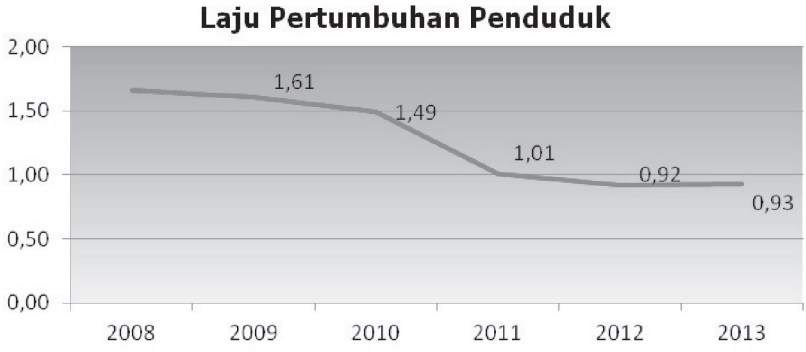

Berdasarkan grafik pada gambar 2.2 diatas, pertumbuhan penduduk Provinsi NTB sebesar1,61% pada tahun 2009, menurun pada tahun 2013menjadi 0,93. Hal ini mengindikasikan bahwa selama kurun

waktu tersebut program pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan berbagai paket kebijakan telah dapat direspon positif oleh masyarakat salah satunya adalah menjadi peserta KB aktif atau dengan kesadaran sendiri mengatur jarak kelahiran maupun membatasi jumlah anak.

c. Struktur dan komposisi penduduk

Menurut kelompok umur, komposisi penduduk Provinsi NTB terbanyak pada umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 489.623 jiwa, sedangkan penduduk terkecil pada kelompok umur 60-64 tahun sebanyak 123.143 jiwa. Secara keseluruhan penduduk yang produktif atau kelompok umur 15-64 tahun mencapai 64,46%, sedangkan penduduk yang tidak produktif atau usia kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 64 tahun mencapai 35,54%Sampai saat ini, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	250.841	238.782	489.623
5-9	242.413	230.759	473.172
10-14	239.104	227.929	467.033
15-19	220.729	218.707	439.436
20-24	182.231	213.729	395.960
25-29	184.471	223.886	408.357
30-34	169.565	200.139	369.704
35-39	162.726	184.169	346.895
40-44	139.037	155.054	294.091
45-49	116.904	127.521	244.425
50-54	102.514	110.663	213.177
55-59	74.305	75.008	149.313
60-64	59.934	63.209	123.143
65+	99.947	116.026	215.973
Jumlah	2.244.721	2.385.581	4.630.302

Sumber : BPS Provinsi NTB

Tabel 2.9

Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Tdk/Blm Pernah Sekolah (%)		Tdk/Blm Tamat SD (%)		SD/MI (%)		SMP (%)		SMA (%)		Akademi/ Diploma (%)		Universitas (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Lombok Barat	13,1	23,3	23,4	23,6	27,4	26,2	16,1	13,9	17,0	9,9	0,6	0,8	2,5	2,3
2	Lombok Tengah	11,5	23,6	25,9	21,6	26,5	24,9	15,4	15,1	16,1	11,6	0,9	1,2	3,9	2,0
3	Lombok Timur	7,0	12,9	26,5	25,2	27,8	29,3	16,3	18,6	16,5	10,4	1,5	1,1	4,5	2,5
4	Sumbawa	3,6	6,5	19,1	21,3	30,9	34,0	21,8	17,6	19,4	15,6	0,7	1,5	4,4	3,5
5	D o m p u	5,8	9,8	22,1	19,4	22,0	21,0	17,3	20,1	24,4	22,0	2,3	3,0	6,1	4,7
6	B i m a	5,0	8,8	27,7	25,2	27,4	25,0	14,5	14,7	20,7	21,6	1,8	1,8	2,9	2,9
7	Sumbawa Barat	3,0	7,5	23,3	22,3	26,3	32,3	13,4	15,5	27,5	16,8	2,0	0,6	4,4	5,0
8	Lombok Utara	16,0	26,1	26,7	25,5	27,3	25,0	12,1	14,1	15,3	7,5	0,9	1,4	1,8	0,4
9	Kota Mataram	3,6	9,6	15,3	15,9	20,0	21,7	16,4	16,8	32,8	26,6	1,9	3,4	10,1	6,0
10	Kota Bima	2,9	5,2	15,5	15,6	17,4	20,0	17,8	15,5	36,9	35,4	0,9	1,1	8,7	7,2
Nusa Tenggara Barat		7,9	15,2	23,6	22,5	26,3	26,5	16,3	16,4	20,1	14,9	1,3	1,5	4,6	3,1

Sumber : Susenas BPS, 2013

Berdasarkan persentase penduduk usia 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukan bahwa penduduk perempuan memiliki jumlah terbanyak dalam hal tidak/belum pernah sekolah yang mencapai15,2% terutama terdapat di Kabupaten Lombok Utara, Lombok tengah, dan Lombok Barat. Apabila dilihat dari setiap jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan semakin kecil, begitu juga sebaliknya, semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikan semakin besar. Namun demikian, penduduk NTB yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (akademi/diploma dan universitas) baru mencapai 10,5% dari total penduduk usia 10 tahun keatas, sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.9.

Angka beban tanggungan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan perbandingan dari 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung penduduk bukan usia produktif (0 -14 tahun dan 65+). Angka beban tanggungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dikelompokkan menurut *sex ratio* antara laki-laki dengan perempuan, dimana rasio beban tanggungan pada tahun 2013mencapai 55,14, dan yang paling besar beban tanggungan pada jenis kelamin laki-laki yang mencapai 58,93 sementara perempuan mencapai 51,75. Bila dibandingkan dengan tahun 2012, beban tanggungan pada tahun 2013 menurun sebesar 0,03 dibanding rasio yang sama pada tahun 2011. Namun, secara umum beban tanggungan penduduk usia produktif di NTB dari tahun 2008—2013 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rasio beban tanggungan penduduk NTB sebanyak 55 orang per 100 orang tahun 2008 – 2013 sebagaimana terlihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Angka Beban Tanggungan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2009-2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	732.358	697.470	1.429.828
15-64	1.412.416	1.572.085	2.984.501
65+	99.947	116.026	215.973

Angka Beban Tanggungan 2013	58,93	51,75	55,14
2012	58,94	51,75	55,17
2011	59,47	52,02	55,55
2010	57,32	51,52	54,24
2009	58,07	52,05	54,86

Sumber: BPS Provinsi NTB

Selama kurun waktu tahun 2009- 2013 jumlah penduduk usia kerja (umur 15-64 tahun)mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk usia kerja ini menunjukkan semakin banyaknya tuntutan lapangan kerja yang harus ada untuk menampung pertambahan usia produktif tersebut, sebagimana terlihat padatabel 2.11.

Tabel 2.11

Penduduk Yang Berusia 15 tahun ke atas Tahun 2009 – 2013

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Penduduk ≥15 thn	3.048.762	3.098.418	3.136.600	3.163.692	3.200.474
2.	Laki-laki (%)	1.426.407 (46.79)	1.464.623 (47.27)	1.481.762 (47,24)	1.501.331 (47,35)	1.512.363 (47,25)
3.	Perempuan (%)	1.622.355 (53.21)	1.633.795 (52.73)	1.654.838 (52,76)	1.669.324 (52,64)	1.688.111 (52,75)
Pertumbuhan (%)		**2.01**	**1,63**	**1.23**	**0,86**	**1,16**

Sumber : BPS Prov. NTB

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Perkembangan nilai PDRB Provinsi NTB dari tahun ke tahun terus mengalami

peningkatan, hal ini mengindikasikan adanya pertambahan terhadap nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan nilai PDRB Provinsi NTB dapat dilihat dari nilai PDRB Provinsi NTB pada tahun 2010 mencapai 70,12 triliun (termasuk tambang bijih logam) menurun menjadi 69,76 triliun pada tahun 2013. Penurunan nilai PDRB Provinsi NTB disebabkan berkurangnya produksi bijih logam yang diproduksi oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Meskipun kontribusi sektor pertambangan sangat besar terhadap PDRB Provinsi NTB yaitu mencapai 18,71 triliun pada tahun 2010, namun kontribusi tersebut terus menurun setiap tahun seiring dengan semakin berkurangnya jumlah produksi tambang pada PT Newmont Nusa Tenggara, sehingga menurunkan juga kontribusi sektor tambang dari 29,16% pada tahun 2010 menjadi 16,16% pada tahun 2013. Sedangkan PDRB provinsi NTB tanpa tambang bijih logam mencapai 51,41 triliun pada tahun 2010 meningkat menjadi 60,63 triliun pada tahun 2013 atau mengalami penambahan sebesar 9,22 triliun dalam 4 (empat) tahun. Pertumbuhan PDRB tanpa tambang bijih logam lebih signifikan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena sektor primer pertanian masih mendominasi perekonomian Provinsi NTB mencapai 23,54%. Peran sektor sekunder seperti industri pengolahan masih relatih kecil mencapai 5,06%. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motorsudah mulai tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian provinsi NTB, dengan kontribusi mencapai 13,86%. Adapun PDRB Provinsi NTB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut 17 sektor tahun 2010-2013 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.12

PDRB Provinsi NTB

Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2010-2013

No	Sektor	Tahun (Rp. Juta)			
		2010	2011	2012	2013
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,939,022	15,691,914	16,407,442	16,937,550
2	Pertambangan dan Penggalian	20,471,115	14,709,393	10,788,742	11,273,516
3	Industri Pengolahan	3,210,934	3,277,041	3,414,873	3,549,107
4	Pengadaan Listrik dan Gas	34,905	38,398	43,051	47,818
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	51,749	54,924	56,862	59,363
6	Konstruksi	5,715,145	6,139,781	6,366,307	6,689,837
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,136,898	7,662,944	8,393,103	9,021,982
8	Transportasi dan Pergudangan	4,140,342	4,427,516	4,717,941	4,965,042
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	988,890	1,065,282	1,143,812	1,242,595
10	Informasi dan Komunikasi	1,211,821	1,335,853	1,447,895	1,554,875
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,490,068	1,702,030	1,928,494	2,112,329
12	Real Estate	1,695,622	1,813,371	1,934,433	2,086,022
13	Jasa Perusahaan	97,949	104,931	114,698	122,637
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan Sosial Wajib	3,812,957	3,856,519	3,889,689	4,007,372
15	Jasa Pendidikan	2,643,366	2,846,530	2,961,931	3,140,606
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,198,736	1,266,470	1,313,481	1,412,878
17	Jasa lainnya	1,283,208	1,386,242	1,418,059	1,532,031
	PDRB dengan Tambang Bijih Logam	**70,122,726**	**67,379,141**	**66,340,812**	**69,755,562**
	PDRB tanpa Tambang Bijih Logam	**51,405,721**	**54,511,958**	**57,521,372**	**60,629,190**

Sumber : BPS Prov. NTB

b. Laju inflasi

Laju inflasi tahunan di Provinsi NTB mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2009 laju inflasi mencapai angka 3,34%, kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 10,08% pada tahun 2010, kemudian inflasi dapat diteken pada level 3,99% pada tahun 2012, namun kembali naik dan berada pada posisi 9,51% pada tahun 2013. Secara umum, adanya fluktuasi laju inflasi di Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor tekanan yang memicu terjadinya inflasi seperti kegiatan konversi minyak tanah ke gas. Pencabutan subsisdi minyak tanah dan terbatasnya ketersediaan pasokan gas mengakibatkan harga bahan bakar rumah tangga melonjak, adanya kebijakan yang menaik harga Bahan Bakar Minyak (BBM), berakhirnya musim panen padi dan tibanya momen hari raya keagamaan serta meningkatnya kebutuhan bahan makanan yang tidak diimbangi oleh pasokan bahan makanan yang relatif terbatas.

Adapun perkembangan laju inflasi tahunan yang terjadi di Provinsi NTB dalam kurun waktu 2009-2013 yang mengalami fluktuasi sebagaimana terlihat pada gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3
Laju Inflasi Tahunan NTB Tahun 2009 – 2013

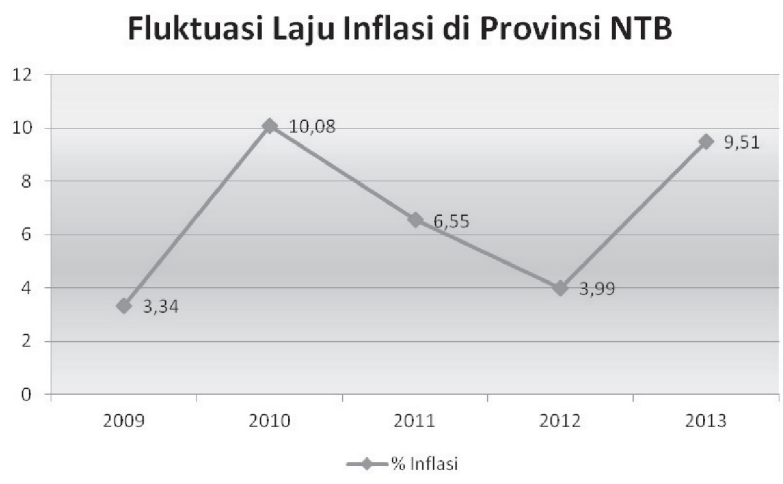

Sumber: BPS Provinsi NTB

c. Perkembangan investasi

Minat investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berjumlah Rp 2,35 Triliun. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 mengalami peningkatan. Jumlah investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sampai tahun 2013adalah $US 1.080.526.674,00 atau Rp 10,27 Triliun. Dilihat dari jumlah perusahaan yang melakukan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada kecenderungan jumlah unit perusahan dalam negeri menurun, disisi lain jumlah unit perusahaan asing semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari investor asing dan didukung oleh iklim investasi yang kondusif di Nusa Tenggara Barat. Adapun realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2009 sampai 2013, sebagaimana tabel 2.13.

Nilai investasi PMDN dan PMA pada tahun 2009 sebesar Rp. 20.149.746.482,mengalami peningkatan menjadi Rp. 3.374.844.350.000 tahun 2013. Sedangkan jumlah perusahaan pada tahun 2009 sebanyak 404, bertambah menjadi 435 perusahaan pada tahun 2013, dengan serapan tenaga kerja mencapai 13.274 orang pada tahun 2009bertambah menjadi 14.986 orang tahun 2013.

Tabel 2.14

Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
PMDN (%)	-68,82	142,11	-90,46	0,13	289,71
PMA (%)	381,11	24,43	44,99	-23,54	223,21
Total	156,15	83,27	-22,74	-11,71	256,46

Sumber : BKPMPT Prov. NTB

Laju petumbuhan investasi PMDN di Provinsi NTB mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah unit perusahaan yang melakukan investasi, namun tidak diikuti oleh kenaikan nilai investasi setiap tahunnya. Pada tahun 2009 menurun sebesar 68,82%, meskipun pada tahun

Tabel 2.13

Realisasi Investasi Tahun 2009-2013

	2009	2010	2011	2012	2013
PMDN (Rp)	293.982.482	418.063.753.053	398.156.381.333	398.679.160.609	1.537.177.711.418
PMA ($ US)	220.619.000	260.075.015	143.058.143	115.447.250	336.983.000
PMA (Rp.000)	1.985.576.400,00	2.470.712.785,50	1.359.053.717,50	1.039.027.500,00	3.374.844.350,00
Total (Rp)	20.149.746.482	2.758.738.888.053	1.685.679.668.333	1.437.704.410.609	3.374.844.350.000
Jumlah Perusahaan (Unit)					
(1) PMDN	103	105	106	51	63
(2) PMA	301	331	342	349	372
Total	404	436	448	400	435
Serapan Tenaga Kerja (Orang)	13.274	13.274	8.466	9.550	14.986

Sumber : BKPMPT Prov.NTB

Kurs $US 1 = Rp. 9.000 s/d Rp. 10.500

2010 cenderung naik mencapai 142,11%, namun pada tahun 2011 kembali menurun sebesar 90,46%, dan hingga tahun 2013 dapat ditingkatkan yang mencapai 289,71%. Begitu juga halnya dengan laju pertumbuhan investasi PMA, dari tahun 2009 hingga tahun 2011 cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2012 tumbuh negatif sebesar 23,54%, namun tahun 2013 meningkat 223,21%.

d. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB dari tahun 2009-2013 yang diukur atas dasar harga konstan memperlihatkan kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB (tidak termasuk sektor pertambangan) berada pada kisaran angka 7,52%, kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2010sehingga tumbuh sebesar4,22%, namun pada tahun 2013 mengalami percepatan pertumbuhan yang mencapai 5,40%.Kemudian pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB (termasuk sektor pertambangan) sangat bervariatif, bahkan dalam periode 2011-2012 menyentuh pada pertumbuhan yang negatif, hal ini disebabkan oleh menurun drastisnya produksi tambang logam oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Secara rata-rata dalam periode yang sama tahun 2008 – 2013, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB (tidak termasuk sektor pertambangan bijih logam) mencapai 5,94%, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB (termasuk sektor pertambangan bijih logam) mencapai 3,49%. Lebih jelas lihat gambar 2.4.

Gambar 2.4

Pertumbuhan Ekonomi NTB ADHK Tahun 2009-2013

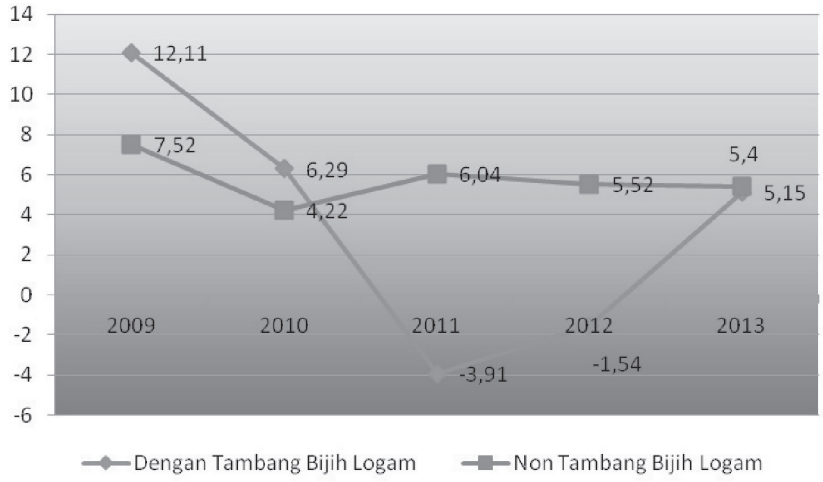

Sumber : BPS Provinsi NTB

e. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran Perkapita ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan daya beli (Purchasing Power Parity – PPP). Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari data Susenas. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar daerah/wilayah lain bisa berbeda-beda. Perbedaan kemampuan daya beli tersebut itu belum bisa dibandingkan, untuk itu perlu dibuat adanya standarisasi. Misalnya satu rupiah disuatu wilayahmemiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan adanya standarisasi ini maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah bisa dibandingkan

Gambar 2.5

Perkembangan Pengeluaran Perkapita Penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2013

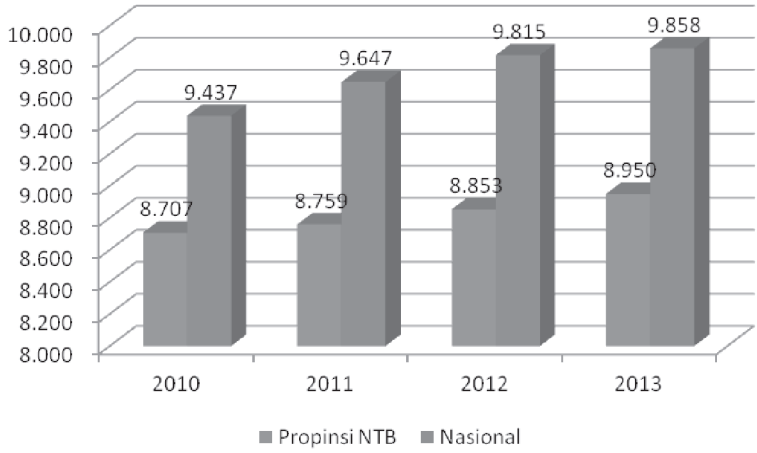

Sumber: BPS Provinsi NTB

Besaran pengeluaran masyarakat NTB tahun 2010 sebesar 8,7 juta lebih perorang pertahun, nilai meningkat pada tahun 2013 menjadi 8,9 juta lebih perorang pertahun. Jadi bila dilihat dalam kurun waktu 5 tahun besarannya meningkat setiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan angka nasional maka pengeluaran perkapita NTB berada di bawah pengeluaran perkapita nasional atau rata-rata masyarakat di Indonesia.

f. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita menggunakan pendekatan PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan nilai total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2013, PDRB per kapita Provinsi NTB (termasuk tambang bijih logam) mencapai 15,07 Juta Rupiah, meningkat 4,18 persen bila dibandingkan dengan PDRB Perkapita pada tahun 2012 yang hanya sebesar 14,46 Juta rupiah. Sementara itu PDRB per kapita Provinsi NTB (tidak termasuk tambang bijih logam) mencapai 13,09 Juta Rupiah pada tahun 2013, meningkat 4,43 persen bila dibandingkan dengan PDRB Perkapita pada tahun 2012 yang hanya sebesar 12,54 Juta rupiah. Lebih jelas lihat gambar 2.6.

Gambar 2.6

Pendapatan Perkapita NTB ADHK 2009 – 2013 (Rp. Juta)

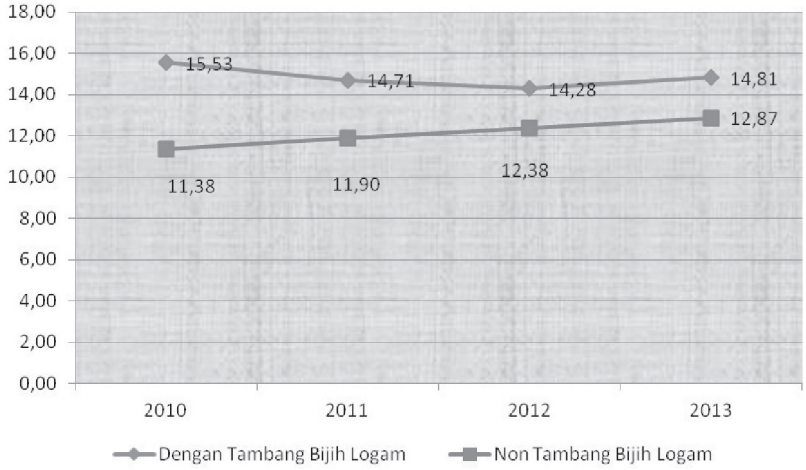

Sumber : BPS Provinsi NTB

g. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebesar 1.050.948jiwa atau 22,78% menurun menjadi sebesar 830.840 jiwa atau 17,25% pada tahun 2013. Dengan demikian selama periode tersebut, Provinsi NusaTenggara Barat telah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 247.773 jiwa atau 6,56%, artinya setiap tahun jumlah penduduk miskin yang telah dientaskan rata-rata 41.629 atau 1,09%. Lebih jelas lihat gambar 2.7.

Gambar 2.7

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2009 – 2013

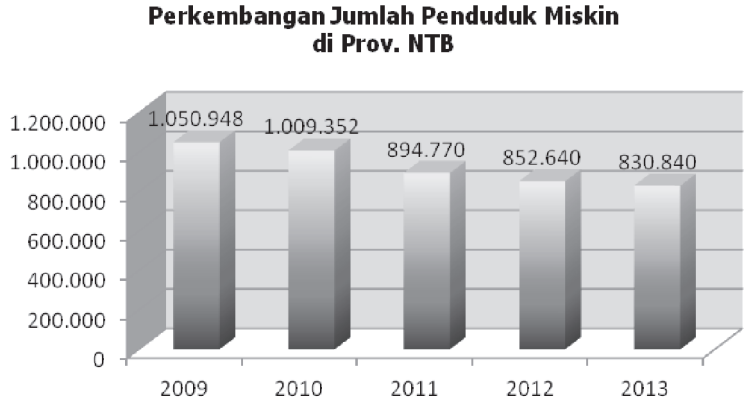

Sumber : BPS Provinsi NTB

Terkait dengan indikator penurunan angka kemiskinan,jumlah penduduk miskin baik secara *absolute* maupun relatif di Nusa Tenggara Barat cenderung menurun, hingga tahun 2013 jumlah penduduk miskin menurunsebesar 17,25%. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16

Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB tahun 2009 – 2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin	**Perubahan**
2009	1.050.948	22,78	-1,03 point
2010	1.009.352	21,55	-1,23 point
2011	894.770	19,67	-1,88 point
2012	852.640	18,63	-1,10 point
2013	830.840	17,25	-1,38 point

Sumber: BPS NTB

Jumlah penduduk miskin disetiap Kabupaten/Kota dari tahun ketahun menunjukkan penurunan yang positif, dari tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebesar 1.050.948 orang dengan persentase 22,78 % sampai dengan tahun 2013 menjadi 830.840 orang dengan persentase 17,25 %, sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 220.108 jiwa atau 5,53%. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel 2.17.

Tabel 2.17

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten/KotaTahun 2009 – 2013

No	Kab/Kota	Penduduk Miskin									
		2009		2010		2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Lombok Barat	208.485	24,02	129.794	21,59	119.639	19,70	110.542	17,91	110.986	17,43
2	Lombok Tengah	187.585	20,94	171.414	19,92	157.983	18,14	146.031	16,71	145.151	16,20
3	Lombok Timur	270.609	23,96	263.691	23,82	243.058	21,71	224.692	20,07	219.559	19,16
4	Sumbawa	104.980	23,85	90.453	21,75	83.416	19,82	77.085	18,25	73.786	17,04
5	Dompu	49.524	21,76	43.665	19,90	40.279	18,17	37.248	16,57	36.397	15,70
6	Kab. Bima	89.699	20,42	85.250	19,41	78.531	17,66	72.555	16,22	73.832	16,08
7	Sumbawa Barat	24.336	23,01	25.140	21,82	23.135	19,88	21.351	17,6	21.710	17,10
8	Lombok Utara	--	--	86.339	43,14	79.545	39,27	73.478	35,97	72.157	34,63
9	Mataram	60.637	15,41	58.272	14,44	53.736	13,18	49.633	11,87	46.674	10,75
10	Kota Bima	18.890	13,65	18.304	12,80	16.868	11,69	15.620	10,54	15.249	9,91
11	NTB	1.014.745	21,88	972.321	21,58	896.190	19,67	828.234	18,02	815.501	17,25

Sumber : BPS Provinsi NTB

h. Angka pengangguran

Jumlah angkatan kerja mengalami dinamika positif yaitu meningkat dari tahun 2009 – 2010 kemudian menurun pada tahun 2011 dan meningkat lagi pada tahun 2013, yang mencerminkan adanya fluktuasi pergeseran penduduk terutama pada kelompok umur muda yang memasuki golongan angkatan kerja. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah angkatan kerja terbesar adalah angkatan kerja dengan jenis kelamin laki-laki rata-rata mencapai 58,20% sedangkan sisanya sebesar 41,80% adalah perempuan. Dilihat dari tingkat pertumbuhannya pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 7,31 % terendah pada tahun 2011 sebesar negatif 7,94% dengan rata-rata pertumbuhan angkatan kerja sebesar 0,29 % dalam kurun waktu 2009 – 2013, sebagaimana tabel 2.18.

Tabel 2.18

Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2009 – 2013

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Angkatan kerja Laki-laki (%) Perempuan (%)	**2.098.636** 1.181.891 (56,32) 916.747 (43,68)	**2.252.076** 1.303.836 (57,89) 948.820 (42,11)	**2.072.782** 1.228.000 (59,24) 845.000 (40,76)	**2.088.712** 1.209.370 (57,90) 879.342 (42,10)	**2.094.550** 1.219.004 (58,20) 875.546 (41,80)
	pertumbuhan (%)	3,43	7,31	***-7,94***	***0,77***	***0,28***
2	Pengangguran Laki-laki (%) Perempuan (%)	**131.258** 77.763 (59,24) 53.495 (40,76)	**119.143** 72.493 (60,85) 46.650 (39,15)	**110.542** 44.000 (39,64) 66.000 (60,36)	**109.948** 64.571 (58.73) 45.377 (41,27)	**112.708** 72.264 (64,13) 40.424 (35.87)
	r (%)	***5,60***	***-9,21***	***-6,83***	**-0,54**	2,51
3	**TPT (%)**	***6,12***	***5,29***	***5,33***	**5.26**	**5,38**

Sumber : BPS Provinsi NTB.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pertumbuhan angkatan kerja yang positif berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang menganggur pada priode yang sama yang mencapai rata – rata -3,9 %. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan angkatan kerja yang positif telah dibarengi dengan terbukanya lapangan kerja sehingga memberikan kesempatan kerja.

i. Indeks Gini dan Indeks Williamson

Rasio Indeks Ginimenunjukkan besarnya ketimpangan pendapatan perkapita penduduk di NTB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 – 2013, terlihat dari nilai gini rasionya berkisar antara 0,33 – 0,40, sebagaimana tabel 2.19.

Tabel: 2.19

Rasio Indeks Gini Provinsi NTB tahun 2009-2013

No	Tahun	Indeks Gini
2	2009	0,350
3	2010	0,400
4	2011	0,356
5	2012	0,363
6	2013	0,358

Sumber : BPS Provinsi NTB

Berdasarkan tabel 2.19 menunjukkan bahwa rasio Indeks gini mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, namun rasio gini Provinsi NTB masih dikategorikan rendahke sedang. Rasio gini ProvinsiNTB pada tahun 2009 berada padaposisi rendah. Nilairasio menuju sedangpada tahun 2011dengan nilai 0.356dan terus berada padaskala tersebut sampai dengan tahun 2013.

Sementara itu, Rasio Indeks Wiliamsonyang menunjukkan besarnya ketimpangan pendapatan perekonomian / PDRB antar wilayah NTB terhadap Provinsi lainnya. Berdasarkan analisis Indeks Williamson yang dilakukan oleh BPS Provinsi NTB menunjukkan bahwa posisi Provinsi NTB bersama Bali dapat diklasifikasikan memiliki indeks ketimpangan rendah dalam periode Tahun 2009-2013,sebagaimana tabel 2.20.

Tabel: 2.20

Indeks Williamson Provinsi NTB tahun 2009-2013

No	Tahun	Indeks Williamson
1	2009	2,22
2	2010	1,65
3	2011	1,50
4	2012	1,00
5	2013	0,98

Sumber : BPS Provinsi NTB

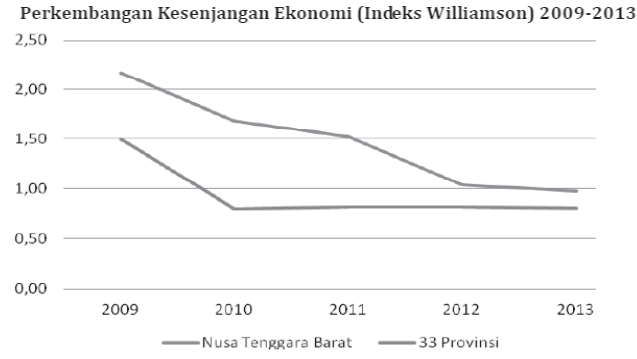

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

2.2.2. FokusKesejahteraan Sosial

a. Masalah Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan sosial juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah serta memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan dibidang dan sektor yang lainnya. Pembangunan kesejahteraan sosial dihajatkan untuk menanggulangi dan menuntaskan berbagai permasalahan diantaranya masalah kemiskinan, orang cacat, ketertinggalan, ketertelantaran, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, kekerasan dan korban akibat bencana alam maupun bencana sosal. Tabel 2.21 berikut memperlihatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi NTB dari tahun 2009 hingga tahun 2013.

Tabel 2.21

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Tahun 2009-2013

No.	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Anak Terlantar	Jiwa	200.630	201.699	205.116	205.116	120.506
2	Anak Jalanan	Jiwa	10.181	10.005	3.327	3.327	3.806
3	Penyandang cacat	Jiwa	397.569	161.147	28.690	16.098	5.274
4	Tuna Susila	Jiwa	446	440	508	508	438
5	Pengemis	Jiwa	558	339	274	274	342
6	Gelandangan	Jiwa	651	1.275	1.746	1.746	432
7	Korban Napza	Jiwa	2.238	1.530	2.707	2.707	766
8	Keluarga Fakir Miskin	KK	451.353	434.893	373.750	373.750	356.568
9	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	KK	117.492	178.904	172.825	172.825	Non PMKS
10	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	8.938	6.432	9.091	2.758	3.442
11	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	3	3	-	708	306

Sumber: Dinas Sosial kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB

b. Pendidikan

Kemajuan pembangunan bidang pendidikan tergambar dari berbagai data pada tabel 2.22 berikut. Seluruh indikator baik APK, APM, angka putus sekolah, angka melek huruf maupun angka melanjutkan sekolah menunjukkan nilai positif.

Tabel 2.22

Perkembangan Indikator Bidang Pendidikan Tahun 2009-2013

No.	Indikator Kinerja	Kondisi awal 2007/2008	Target dan Realisasi	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,7 Tahun	target	7,50	8,00	8,30	8,61	7,19
			realisasi	6,73	6,77	6,97	7,19	7,20
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	-TK/RA	34,78%	target	-	-	-		
			realisasi	35,68	36,98	39,32	51,24	50,06
	-SD/MI/Paket A	106,14%	target	109,03	110,47	111,91	119,91	114,79
			realisasi	117,10	111,02	114,79	113,62	113,95
	-SMP/MTs/Paket B	97,80%	target	99,00	99,60	100,20	100,20	104,81
			realisasi	103,74	104,28	104,81	104,85	106,76
	-SMA/MA/SMK	63,12%	target	67,83	73,24	77,29	82,67	80,54
			realisasi	69,28	74,43	80,54	82,69	84,40
3	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	-SD/MI/Paket A	97,66%	target	98,58	99,03	99,49	99,95	99,19
			realisasi	98,68	98,92	99,19	99,95	99,96
	-SMP/MTs/Paket B	79,57%	target	83,77	85,87	87,97	90,07	94,83
			realisasi	90,53	92,87	94,83	95,00	96,61
	-SMA/MA/SMK	48,89%	target	57,38	61,63	65,87	70,12	68,59
			realisasi	57,83	62,87	68,59	72,57	74,73
4	Angka Putus Sekolah (DO)							
	-SD/MI/Paket A	1,17%	target	0,79	0,60	0,41	0,20	0,33
			realisasi	1,02	0,90	0,33	0,20	0,19
	-SMP/MTs/Paket B	5,25%	target	3,35	2,40	1,45	0,50	0,65
			realisasi	1,46	0,92	0,65	0,48	0,47
	-SMA/MA/SMK	6,86%	target	3,53	2,85	2,18	1,50	1,77
			realisasi	2,13	1,88	1,77	1,50	1,15
5	Angka Melek Huruf	80,10%	target	88,45	92,10	96,70	100,00	84,96
			realisasi	92,54	97,95	98,81	100,00	84,67
6	Angka Melanjutkan							
	-SD/MI ke SMP/ MTs	98,58%	target	99,34	99,78	100,00	100,00	100,00
			realisasi	100,29	100,10	100,52	100,75	102,48
	-SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK	80,57%	target	93,20	94,99	96,76	98,50	
			realisasi	90,28	95,16	95,93	97,16	98,97

Sumber : Dinas Dikpora Provinsi NTB

Adapun angka partisipasi murni (APM) tingkat sekolah dasar dan sederajat per-Kabupaten/Kota sebagaimana tabel 2.23 menunjukkan semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTB mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008/2009 rata-rata APK mencapai 98,40%, kemudian meningkat menjadi 99,96% pada tahun 2013.

Tabel 2.23

Angka Partisipasi Murni (APM)Sekolah Dasar (SD) se-Derajat

Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Kondisi awal 2008/2009 (%)	Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (%)				
			2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014
1	Provinsi	98.40	98.68	98.92	99.19	99.95	99.96
2	Kab.Lombok Barat	97.85	98.39	98.54	98.70	99.93	99.94
3	Kab.Lombok Tengah	99.59	98.89	98.91	99.22	99.95	99.96
4	Kab.Lombok Timur	96.96	98.60	98.70	98.90	99.94	99.96
5	Kab.Sumbawa	99.43	98.89	98.38	98.87	99.93	99.96
6	Kab.Dompu	98.66	98.26	99.41	99.48	99.95	99.96
7	Kab. Bima	99.91	99.07	99.35	99.68	99.95	99.97
8	Kab.Sumbawa Barat	98.89	98.69	99.68	99.71	99.95	99.95
9	Kab.Lombok Utara		98.95	99.43	99.61	99.94	99.97
10	Kota Mataram	98.15	99.12	99.42	99.76	99.97	99.98
11	Kota Bima	98.02	96.34	98.90	99.51	99.98	99.98

Sumber:Dinas Dikpora Provinsi NTB

Tabel 2.24

Persentase Angka Melek Huruf Tahun 2013 menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Lombok Barat	80,63 (338.151)	419.361	78,59
2	Lombok Tengah	80,53 (492.490)	611.524	73,92
3	Lombok Timur	87,64 (661.310)	754.576	83,89
4	Sumbawa	93,37 (275.009)	294.522	90,87
5	Dompu	91,67 (132.690)	144.740	87,94
6	Bima	93,24 (275575)	295.555	87,02

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
7	Sumbawa Barat	93,33 (73.871)	79.147	92,50
8	Lombok Utara	80,80 (112.989)	139.839	77,00
9	Kota Mataram	90,29 (265.804)	294.390	92,25
10	Kota Bima	95,69 (96.842)	101.204	93,80
	Jumlah	**88,72 (2.781.214)**	**3.134.858**	**83,68**

Sumber:Dinas Dikpora Provinsi NTB

Penurunan persentase jumlah siswa putus sekolah terjadi pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2007/2008 persentase angka putus sekoah masih berada pada angka 1,17% pada tingkat SD/MI, 5,25% untuk SMP/MTs, dan 6,86% untuk SMA/MA/SMK, sementara pada tahun pelajaran 2013/2014 angka putus sekolah turun menjadi masing-masing persentasenya mencapai angka 0,19% pada tingkat SD/MI, 0,47% untuk SMP/MTs, dan 1,15% untuk SMA/MA/SMK dengan rata-rata penurunan pertahun 0,18% untuk SD/MI, 0,27% untuk SMP/MTs dan 0,28% untuk SMA/MA/SMK. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.8.

Gambar 2.8

Grafik Penurunan Angka *Drop Out* (DO) di Provinsi NTB

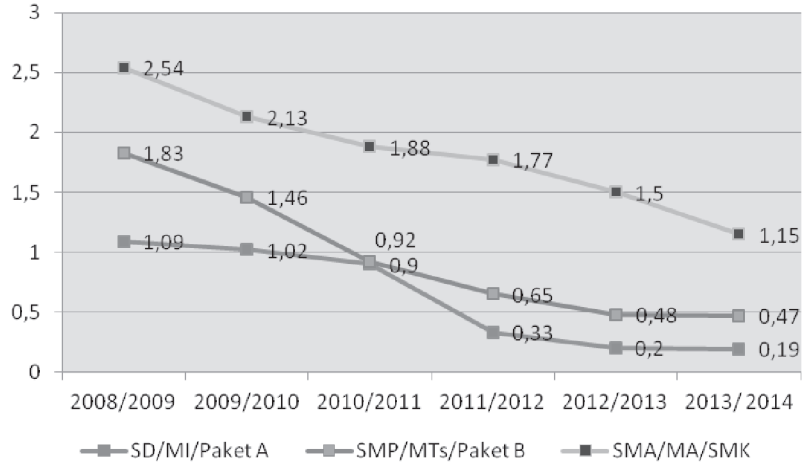

Sumber : Dinas Dikpora Provinsi NTB

Siswa yang lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga meningkat. Siswa yang melanjutkan dari jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs tahun pelajaran 2011/2012 sebesar 100,52% semnetara pada tahun pelajaran 2013/2014 meningkat menjadi 102,48, sedangkan lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK sebesar 95,93% tahun pelajaran 2011/2012 meningkat menjadi 98,97% pada tahun pelajaran 2013/2014. Realisasi angka melanjutkan untuk tamatan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs telah melampaui target tahun 2012/2013.

Rata-rata lama sekolah per kabupaten/kota menunjukkan bahwa pada tahun 2013 Kota Mataram memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 9,68 tahun sedangkan terendah adalah Kabupaten Lombok Utara masih 5,61 tahun, sebagaimana tabel 2.25.

Tabel 2.25

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota
Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Kondisi awal 2008/2009 (Tahun)	Indikator Kinerja Rata-rata lama Sekolah (Tahun)				
			2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	Provinsi	**7.10**	**7.50**	**8.00**	**8.30**	**8.61**	**7.19**
2	Kab.Lombok Barat	**6.70**	**6.73**	**6.77**	**6.97**	**7.19**	**7.20**
3	Kab.Lombok Tengah	5.73	5.87	5.74	5.96	5.96	6.01
4	Kab.Lombok Timur	5.35	5.64	5.64	5.87	6.10	6.09
5	Kab.Sumbawa	6.31	6.33	6.42	6.49	6.84	6.84
6	Kab.Dompu	7.10	7.12	7.37	7.62	7.49	7.78
7	Kab. Bima	7.00	7.20	7.87	7.91	7.94	8.40
8	Kab.Sumbawa Barat	7.23	7.24	7.20	7.16	7.56	7.55
9	Kab.Lombok Utara	7.00	7.16	7.55	7.63	7.97	7.93
10	Kota Mataram	4.68	4.98	5.17	5.76	5.53	5.67
11	Kota Bima	9.05	9.20	9.21	9.22	9.38	9.43

Sumber: Dinas Dikpora Provinsi NTB

Sampai dengan tahun ajaran 2013/2014 jumlah murid yang bersekolah di Provinsi NTB tercatat sebanyak 972.706 orang, terdiri dari 824.130 murid sekolah negeri dan 148.576 murid sekolah swasta. Jumlah terbanyak, sebesar 540.246 merupakan murid sekolah dasar.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk yang mengalami keterbatasan fisik dan mental, terdapat 29 sekolah luar biasa (SLB), dan 490 orang guru atau tenaga pengajar yang tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota. Gambaran mengenai banyaknya sekolah, murid dan guru menurut jenis sekolah terlihat sebagaimana tabel 2.26.

Tabel 2.26

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenis Sekolah 2009/2010-2013/2014

No.	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Murid		Guru	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	SLB	12	17	988	1.230	264	226
2.	TK	64	1.427	8.000	84.013	1.355	4.301
3.	SD	3.012	106	527.656	12.590	25.633	679
4.	SLTP	412	201	164.556	18.434	7.969	843
5.	SMA	147	135	78.724	18.514	3.626	961
6.	SMK	87	145	44.206	13.795	2.121	705
Jumlah/Total		3.734	2.031	824.130	148.576	40.968	7.715
2012/2013		**3.682**	**1.957**	**823.034**	**130.413**	**38.986**	**8.052**
2011/2012		**3652**	**1.753**	**565.123**	**367.594**	**38.109**	**7.092**
2010/2011		**3.623**	**1.619**	**820.580**	**106.481**	**38.051**	**6.720**
2009/2010		**3.565**	**1.481**	**837.756**	**78.538**	**37.953**	**6.841**

Sumber: Dinas Dikpora Provinsi NTB

Untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dibutuhkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi standar kualifikasi. Kualifikasi pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada jenjang SD yaitu 41,91% pada tahun 2012 menjadi 54,41% pada tahun 2013, meningkat sebesar 12,50%. Pada jenjang SMP dari 88,54% pada tahun 2012 meningkat menjadi 89,85 pada tahun 2013, meningkat sebesar 1,31%. Pada jenjang SMA dari 96,19% pada tahun 2012 menjadi 98,83% pada tahun 2013, meningkat sebesar 2,16%. Sedangkan pada SMK dari 95,14% pada tahun 2012, meningkat menjadi 96,41% pada tahun 2013. Walaupun terjadi peningkatan kualifikasi, masih 58,09% untuk Guru SD dan 11,46% untuk Guru SMP yang kualifikasi pendidikannya masih dibawah S1/D4, sebagaimana tabel 2.27.

Tabel 2.27

Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO.	Jenjang Pendidikan	2012					2013				
		GT	GTT	Jumlah	Kualifikasi ≥S1/D4	%	GT	GTT	Jumlah	Kualifikasi ≥S1/D4	%
1	TK	438	-	438	188	42.92	494	-	494	248	50.20
2	SLB	2,724	3,534	6,258	1,084	17.32	2,838	4,927	7,765	2,584	33.28
3	SD	23,908	17,708	41,616	17,441	41.91	23,262	19,819	43,081	23,440	54.41
4	SMP	8,544	7,542	16,086	14,245	88.56	8,812	9,668	18,480	16,604	89.85
5	SMA	4,567	4,510	9,077	8,731	96.19	4,587	4,927	9,514	9,212	96.83
6	SMK	2,612	3,456	6,068	5,773	95.14	2,838	4,438	7,276	7,015	96.41
Jumlah		**42,793**	**36,750**	**79,543**	**47,462**	**59.67**	**42,831**	**43,779**	**86,610**	**59,103**	**68.24**

Sumber: Dinas Dikpora Provinsi NTB

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks berbagai kompinen pembentuk IPM Provinsi NTB selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan sebagaimana tabel 2.28.

Tabel 2.28

Perkembangan Indikator IPM Provinsi NTB Tahun 2009-2013

1	**Angka Harapan Hidup (Tahun)**	61,80	62,11	62.41	62,73	63,21
2	**Indeks Pendidikan:**					
	a. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,73	6,77	6.97	7,19	7,20
	b. Angka Melek Huruf (%)	83,80	81,05	83.24	83,68	85,19
3	**Paritas Daya Beli (Rupiah)**	637.980	639.890	642.800	645.720	648.660
Indeks Pembangunan Manusia		**64.66**	**65.20**	**66.23**	**66,89**	**67,73**

Sumber: BPS Provinsi NTB

Perkembangan IPM periode 2009-2013 Seluruh Kabupaten/ kota mengalami peningkatan IPM dengan nilai bervariasi. IPM tertinggi terjadi di Kota Mataram, dengan nilai di atas rata-rata IPM Provinsi NTB, sebagaimana tabel 2.29.

Tabel 2.29

IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten/ Kota	IPM (0-100)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Lombok Barat	61,27	61,27	62.50	63,19	63,82
2	Lombok Tengah	60,26	60,73	61.66	62,57	63,51
3	Lombok Timur	62,21	62,68	63.93	64,91	65,78
4	Sumbawa	65,72	66,07	66.67	67,23	68,06
5	Dompu	64,93	65,51	66.70	67,58	68,31
6	Bima	64,81	65,18	65.74	66,52	67,34
7	Sumbawa Barat	66,16	66,47	67.08	67,85	68,50
8	Kota Mataram	71,82	72,32	72.83	73,70	74,58
9	Kota Bima	68,02	68,56	69.10	69,83	70,73
10	Lombok Utara	58,40	58,96	60.93	61,37	61,90
Provinsi NTB		**64,66**	**65,20**	**66.23**	**66,89**	**67,73**

Sumber: BPS Provinsi NTB

c. Kesehatan

Pemerintah telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang memberikan pelayanan persalinan gratis bagi ibu melahirkan di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintahdan swasta serta menetapkan anggaran pelayanan kesehatan gratis sebesar Rp 60 ribu per orang per tahun bagi 301.176 warga miskin yang belum terjaring Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas). Jumlah pasien yang telah terlayani oleh puskesmas dan jaringannnya se-NTB sebanyak 322.694 orang dan pelayanan di Rumah Sakit Provinsi dan kab/kota se-NTB sebanyak 78.089 orang.

Puskesmas sebagai salah satu layanan masyarakat yang mudah dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 157 unit yang sebelumnya mencapai 153 puskesmas. Bahkan guna mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah pulau Sumbawa, pemerintahpun telah membangun Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) di Sumbawa Besar, ibukota Kabupaten Sumbawa. RSUP ini telah beroperasi sejak 17 Desember 2011, termasuk pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi yang ada di Mataram.

Peningkatan fasilitas juga diiringi dengan peningkatan tenaga kesehatan. Hingga tahun 2013 jumlah tenaga kesehatan mencapai 10.536 orang atau terjadi peningkatan dari sebelumnya yang mencapai 9.881 orang. Namun pada tahun 2013 jumlah tenaga kesehatan turun menjadi 10.536 orangDampak semua gerakan ini ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi dari 68,96 per 1000 kelahiran hidup pada 2009 menjadi 54,08 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Sementara penurunan angka kematian ibu cukup signifikan dari 305,5 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menurun menjadi 240,9 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013, sebagaimana tabel 2.30.

Tabel 2.30

Indikator Kesehatan 2009-2013

No.	Indikator	Satuan	Realisasi tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	61,80	62,11	62,41	62,73	63,21
2	Angka Kematian bayi	Per 1000 KH	68,96	66,34	62,26	55,5	54,08
3	Angka Kematian ibu	Per 100.000 KH	305,5	294,3	280,5	242,9	240,9
4	Penanganan HIV dan AIDS	%	100	100	100	100	100
5	Prevalensi Gizi Buruk	%	5,49	4,77	4,57	3,52	3,75
6	Cakupan Jamban Keluarga	%	61,53	64,19	74,40	69,83	72,35

Ket. / Sumber:
- Usia Harapan Hidup : data BPS
- Angka kematian ibu dan angka kematian bayi : data estimasi berdasarkan indikator program (Dikes)

Tabel-tabel berikut menyajikan informasi tambahan terkait kemajuan pembangunan sosial 5 tahun lainnya, mulai dari angka usia harapan hidup, gizi buruk, sarana prasarana kesehatan, sampai kepada tenaga medis yang diurai per Kabupaten/kota.

Tabel 2.31

Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2009-2013

No.	Indikator Angka Usia Harapan Hidup	Satuan	Realisasi tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Provinsi	Tahun	61,80	62,11	62,41	62,73	63,21
2	Kab.Lombok Barat	Tahun	60,40	60,84	61,28	61,71	63,21
3	Kab.Lombok Tengah	Tahun	60,66	61,09	61,52	61,96	62,44
4	Kab.Lombok Timur	Tahun	60,26	60,75	61,32	61,88	62,14
5	Kab.Sumbawa	Tahun	60,61	60,72	60,82	60,93	61,43
6	Kab.Dompu	Tahun	60,94	61,05	61,16	61,26	61,68
7	Kab.Bima	Tahun	62,62	62,93	63,24	63,55	63,95
8	Kab.Sumbawa Barat	Tahun	61,11	61,28	61,45	61,61	62,13
9	Kab.Lombok Utara	Tahun	60,18	60,56	60,94	61,32	61,72
10	Kota Mataram	Tahun	66,15	66,64	67,13	67,62	68,12
11	Kota Bima	Tahun	62,86	62,98	63,10	63,22	63,62

Sumber : BPS- NTB, Tahun 2013

Tabel 2.32

Prosentase Balita Gizi Buruk Tahun 2009-2013

1	Provinsi	%	5,49	4,77	4,57	3,52	3,75
2	Kab.Lombok Barat	%	5,96	4,56	3,18	2,79	2,85
3	Kab.Lombok Tengah	%	3,65	2,91	3,27	2,69	2,73
4	Kab.Lombok Timur	%	5,48	4,88	3,71	3,50	3,61
5	Kab.Sumbawa	%	6,41	5,08	4,97	2,73	2,79
6	Kab.Dompu	%	3,30	4,70	4,86	4,46	4,52
7	Kab.Bima	%	7,46	6,17	6,66	5,19	5,31
8	Kab.Sumbawa Barat	%	2,27	1,95	2,84	1,31	1,98
9	Kab.Lombok Utara	%	5,27	6,19	6,77	5,70	5,81
10	Kota Mataram	%	4,27	4,21	2,94	2,03	2,23
11	Kota Bima	%	6,26	5,12	5,16	5,16	5,25

Sumber : PSG-Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Tahun 2013

Tabel 2.33
Rasio Posyandu per satuan Balita Tahun 2009-2013

No	Uraian	Satuan	Rasio Posyandu Per satuan Balita				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Provinsi	%	81	90	89	82	78
2	Kab.Lombok Barat	%	91	92	96	77	78
3	Kab.Lombok Tengah	%	62	64	65	60	59
4	Kab.Lombok Timur	%	91	88	88	90	78
5	Kab.Lombok Utara	%	-	85	85	72	64
6	Kab.Sumbawa	%	88	84	78	83	78
7	Kab.Dompu	%	90	91	105	74	63
8	Kab.Bima	%	101	105	103	99	98
9	Kab.Sumbawa Barat	%	70	73	71	68	66
10	Kota Mataram	%	116	115	115	94	91
11	Kota Bima	%	110	103	85	109	105

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Tabel 2.34

Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009- 2013

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit				
	Umum	Jiwa	Kusta	TNI/Polri	Swasta
Lombok Barat	1	0	0	0	0
Lombok Tengah	1	0	0	0	1
Lombok Timur	1	0	0	0	2
Sumbawa	1	0	0	0	0
Dompu	1	0	0	0	0
Bima	1	0	0	0	0
Sumbawa Barat	1	0	0	0	0
Lombok Utara	1	0	0	0	0
Kota Mataram	3	1	0	2	5
Kota Bima	0	0	0	0	2
Provinsi	2	1	0	2	0
Total 2013	**11**	**1**	**0**	**2**	**10**
Total 2012	11	1	0	2	8
Total 2011	10	1	0	0	8
Total 2010	8	1	1	2	6
Total 2009	7	1	1	2	6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Tabel 2.35

Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan Dasar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Dasar			
	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pos Kesehatan Desa	Pos Pelayanan Terpadu
Lombok Barat	16	57	116	802
Lombok Tengah	25	95	120	1 575
Lombok Timur	29	87	149	1 664
Sumbawa	25	93	50	647
Dompu	9	47	66	383
Bima	20	90	122	583
Sumbawa Barat	9	27	64	210
Lombok Utara	8	27	27	369
Kota Mataram	11	17	21	346
Kota Bima	5	19	27	163
Total 2013	**157**	**559**	**762**	**6.742**
Total 2012	157	554	721	6.598
Total 2011	153	550	546	6.102
Total 2010	150	527	577	5.903
Total 2009	147	534	565	5.881

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan tentunya juga harus diikuti oleh peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Hingga Tahun 2013 jumlah tenaga kesehatan mencapai 10.536 orang yang pada tahun sebelumnya mencapai 9.881 orang.

Tabel 2.36

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kategori Tahun 2009-2013

No	Kategori	2009	2010	2011
1.	Tenaga Medis	497	616	651
a.	Dokter Spesialis	71	83	95
b.	Dokter Umum	332	424	441
c.	Dokter Gigi	94	109	115
2.	Tenaga Kesehatan Lainnya	485	541	637
3.	Tenaga Paramedis	5.580	6.394	6.467
a.	Paramedis Perawatan	3.832	4.422	4.802
b.	Paramedis Non Perawatan	1.748	1.972	1.665
4.	Tenaga Non Paramedis	1.695	1.972	2.126
Jumlah/Total		**8.257**	**9.523**	**9.881**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, NTB Dalam Angka 2013

Tabel 2.37

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kategori Tahun 2012-2013

No	Kategori SDM Kesehatan	Tahun	
		2012	2013
1	Medis	673	773
a	Dokter spesialis	120	179
b	Dokter umum	438	454
c	Dokter gigi	115	140
2	Keperawatan	3,927	3,708
3	Kebidanan	1,508	1,624
4	Kefarmasian	375	340
5	Kesehatan masyarakat	414	442
6	Kesehatan lingkungan	829	421
7	Gizi	474	454

No	Kategori SDM Kesehatan	Tahun	
		2012	2013
8	Keterapian fisik	42	43
9	Keteknisian medis	558	514
10	Teknik biomedika	-	-
11	Psikologi klinis	-	-
12	Kesehatan tradisional	-	-
13	Nakes lainnya	-	-
14	Non kesehatan	-	2,217
	Jumlah total SDMK	**8,800**	**10,536**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Seni budaya

Keberadaan grup kesenian, dewan kesenian daerah, lembaga adat di Provinsi NTB masih rendah setidaknya tergambar dari rasio lembaga seni budaya per 10.000 penduduk hanya 0-1 lembaga seni budaya per 10.000 penduduk. Rendahnya jumlah lembaga seni budaya ini diantaranya masih kurangnya event kesenian dan budaya, belum singkronnya program pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan event-event budaya di kabupaten/kota, masih minimnya tenaga pelatih seni, sarana dan prasarana pertunjukan kesenian.

Tabel 2.38

Rasio Lembaga Seni Budaya per 10.000 penduduk di Prov.NTB Tahun 2009-2013

No	Lembaga Seni dan Budaya	2009	2010	2011	2012	2013
1	Grup Kesenian/ sanggar seni	201	235	272	307	337
2	Pusat Latihan Kesenian	-	-	-	-	-
3	Dewan Kesenian Daerah	13	13	13	13	13
4	Lembaga Adat	8	8	8	8	8
5	Jumlah Lembaga	222	256	293	328	358
6	Jumlah Penduduk	4.434.012	4.500.212	4.545.650	4.587.562	4.630.302
	Rasio Lembaga per 10.000 penduduk	0.50	0.57	0.64	0.71	0.77

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB

b. Olahraga

Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Barat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti: Pemberdayaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) sebagai wadah pembinaan atlet pelajar berbakat berusia 13-17 tahun dan PPLM bagi mahasiswa.

Peningkatan prestasi baik di even nasional maupun internasional sudah menunjukkan prestasi yang menggembirakan dengan mengangkat nama NTB diajang nasional dan mengharumkan nama bangsa ditingkat internasional yang dibuktikannya dengan perolehan medali dalam berbagai kejuaraan olahraga pelajar seperti POPNAS, POPWIL, Kejuaraan Nasional Antar Pelajar, Kejuaraan Sirkuit Yunior, Grand Jatim Sprint dan Asean School & Asean Yunior di Singapura, serta Arafura Youth Games di Australia ditingkat internasional. Rasio klub olahraga pada tahun 2013 sebesar 3,38 menunjukkan bahwa tersedia sebanyak 3-4 klub untuk tiap 10.000 penduduk, sedangkan hanya tersedia 0-1 gedung dan lapangan olahraga untuk setiap 10.000 penduduk di Prov.NTB. Lebih jelasnya dapat diihat pada tabel 2.39.

Tabel 2.39

Sarana dan Prasarana Olahraga di Provinsi NTB Tahun 2009 - 2013

No.	Sarana & Prasarana Olahraga	2009	2010	2011	2012	2013
1	Klub Olahraga	1.547	1.552	1.557	1.562	1.567
2	Gedung Olahraga	27	28	29	30	31
3	Lapangan Olahraga	108	115	122	129	136
	Jumlah Penduduk	4.434.012	4.500.212	4.545.650	4.587.562	4.630.302
4	Rasio klub olahraga	3,38	3,38	3,39	3,40	3,38
5	Rasio gedung & Lapangan olahraga	0,30	0,32	0,33	0,32	0,36

Sumber : Dinas Dikpora Provinsi NTB

Tabel 2.40

Rasio Sarpras Olahraga per 10.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota se Prov.NTB tahun 2009-2013

No	Kabupaten/ Kota	2009			2010			2011			Tahun 2012			Tahun 2013		
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Gedung & Lapangan Olahraga (unit)	Rasio per 10.000 Penduduk	Jumlah Penduduk (jiwa)	Gedung & Lapangan Olahraga (unit)	Rasio per 10.000 Penduduk	Jumlah Penduduk (jiwa)	Gedung & Lapangan Olahraga (unit)	Rasio per 10.000 Penduduk	Jumlah Penduduk (jiwa)	Gedung & Lapangan Olahraga (unit)	Rasio per 10.000 Penduduk	Jumlah Penduduk (jiwa)	Gedung & Lapangan Olahraga (unit)	Rasio per 10.000 Penduduk
1	Kota Mataram	375.506	7	0,19	402.843	7	0,17	406.910	8	0,20	413.210	8	0,12	419.641	8	0,19
2	Lombok Barat	829.777	27	0,33	599.986	20	0,33	606.044	21	0,35	613.161	22	0,36	620.412	23	0,37
3	Lombok Utara	-	-	-	200.072	9	0,45	202.092	9	0,45	203.564	10	0,44	205.064	11	0,54
4	Lombok Tengah	856.675	22	0,26	860.209	23	0,27	868.895	25	0,29	875.231	26	0,29	881.686	27	0,31
5	Lombok Timur	1.080.237	21	0,19	1.105.582	22	0,20	1.116.745	24	0,21	1.123.488	25	0,21	1.130.365	27	0,24
6	Kota Bima	132.292	5	0,38	142.579	5	0,35	144.018	6	0,42	146.307	6	0,34	148.645	6	0,40
7	Bima	420.207	14	0,33	439.228	15	0,34	443.663	16	0,36	447.286	17	0,38	450.976	17	0,38
8	Dompu	217.479	12	0,55	218.973	13	0,59	221.184	13	0,59	223.678	14	0,54	226.218	15	0,66
9	Sumbawa Barat	101.089	9	0,89	114.951	10	0,87	116.112	10	0,86	118.608	11	0,84	121.167	12	0,99
10	Sumbawa	420.750	17	0,40	415.789	18	0,43	419.987	19	0,45	423.029	20	0,47	426.128	21	0,49
	Jumlah	**4.434.012**	**135**	**0,30**	**4.500.212**	**143**	**0,32**	**4.545.650**	**151**	**0,33**	**4.587.562**	**159**	**0,32**	**4.630.302**	**167**	**0,36**

Sumber : Dinas Dikpora Provinsi NTB

2.2.4. Standar Pelayanan Minimal

Sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan SPM sebanyak 15 (lima belas) bidang urusan yang terdiri dari: 9 (sembilan) SPM diterapkan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan 15 (lima belas) SPM diterapkan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Masing – masing SPM yang telah ditetapkan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jumlah maupun jenis pelayanan, serta jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari 15 (lima belas) SPM yang sudah ditetapkan terdapat 13 (tiga belas) SPM yang target capaiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2016 dan 1(satu) dan SPM dengan target capaian tahun 2025.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja 9 (Sembilan) Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 – 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana tabel 2.41.

Tabel 2.41

Realisasi Pencapaian Target Kinerja 9 (Sembilan) Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Provinsi NTB Tahun 20010-2013

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sosial							
1.1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:							
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Provinsi	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2008-2015	0.67	0.91	9.06	0,31
	b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi	Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2008-2015	100	100	100	100
1.2	Penyediaan sarana dan prasarana social :							
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	Presentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2008-2015	100	100	100	100
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	Presentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	60%	2008-2015	32.41	39.57	39.70	28,09

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3	Penanggulangan korban Bencana:							
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/ kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	80%	2008-2015	100	100	100	100
	b. Evaluasi korban bencana skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80%	2008-2015	100	100	100	100
1.4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:							
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	40%	2008-2015	100	100	100	100
2	Lingkungan Hidup							
2.1	Jenis pelayanan Informasi status mutu air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	2013	100	100	100	85,71

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Persentase Jumlah Kabupaten/ Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya	100	2013	-	-	100	50
2.3	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013	100	100	100	100
3	Perumahan Rakyat							
3.1	Rumah layak huni dan terjangkau	a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2009-2025	69.30%	69.03%	-	
		b. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	70%	2009-2025	4.14%	6.98%	-	
3.2	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	2009-2025	38.72%	38.4%	37.3%	
4	Perempuan dan Anak							
4.1	Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu	100%	2014		24.31	26.08	

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/ laporan masyarakat				24.31	26.08	
4.2	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	2014				
		a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)				24.31	16.37	
		b. Cakupan RSU Vertikal/RSUD/ RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan			-	-	-	
		c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas			-	-	-	

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit			-	-	-	
4.3	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	2014	-	2.69	2.62	
		- Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih			-	-	-	
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	2014	-	-	-	
		- Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani			-	-	-	
4.4	Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	2014	-	52.34	24.98	

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		a. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian			-	-	-	
		b. Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta			-	-	-	
		c. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA			-	-	-	
		d. Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender			-	-	-	
		e. Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			-	-	-	
		f. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak			-	-	-	
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	50%	2014	-	52.34	24.98	

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak			-	-	-	
4.5	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50%	2014	-	-	-	
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	2014	-	1.22	3.54	
		- Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial			-	-	-	
5	Ketenagakerjaan							
5.1	Pelayanan Pelatihan Kerja	a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	-	57.63	40.66	81.00
		b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	-	86.76	72.78	128
		c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	-	59.52	75	29.00

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	-	91.36	93.75	102.00
5.3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	-	100	29.55	94.00
5.4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%	2016	-	100	86.29	82.00
5.5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	a. Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	2016	-	98.28	94.01	27.00
		b. Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016	-	99.59	102.85	50.00
6	Ketahanan Pangan							
6.1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	60%	2015	6.76	14.51	83.52	83,52
6.2	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100%	2015	-	-	92.69	97,31
6.3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	2015	-	-	61.11	100,00
6.4	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	2015	31.25	39.06	100	100
7	Kesenian							
7.1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	a. Cakupan Kajian Seni	50%	2014	107	120	107	
		b. Cakupan Kajian Seni	30%	2014	286%	286%	286%	

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		c. Cakupan Gelar Seni	75%	2014	133%	133%	133%	
		d. Misi Kesenian	100%	2014	100%	100%	100%	
7.2	Sarana dan Prasarana	a. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian	25%	2014	300%	300%	300%	
		b. Cakupan Tempat	100%	2014	0	0	0	
		c. Cakupan Organisasi		2014	98.04	196.08	294.12	
8	Perhubungan							
8.1	Angkutan Jalan							
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100%	2014	80.00	-	-	
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	100	100.00	100	100
	c. Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	60%	2014	-	16	30	40
	d. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	100%	2014	20	20	20	40

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	e. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.	100%	2014	-	12	40	50
8.2	Angkutan Sungai dan Danau.		75%	2014	100.00	100.00	100.00	-
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.	60%	2014	25.00	25.00	25.00	-
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari	100%	2014	86.67	82.35	80.00	-
	c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	100.00	100.00	100.00	-

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.	75%	2014	100.00	100.00	100.00	-
8.3	Angkutan Penyeberangan		75%	2014	30.00	30.00	30.00	
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	100%	2014	86.67	82.35	80.00	100
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan	100%	2014	100.00	100.00	100.00	-
	c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	-	-	-	-
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT.	100%	2014	80	80	80	80
8.4	Angkutan Laut		100%	2014	-	-	-	

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	100%	2014	100	100	100	100
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100%	2014	80	80	80	80
	c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	-	-	-	-
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.	60%	2014	80.00	-	-	-

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Penanaman Modal							
9.1	Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun :	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	2014	Sektor	Sektor	Sektor	
		- Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)			8	0	8	
		- Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha)			8	0	8	
		- Ketersediaan Lahan (Ha)			8	0	8	
	Sektor bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) di daerahnya.	- Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya			0	0	0	
		- Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)			8	0	8	

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Informasi Peluang Usaha Mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, Kesesuaian dengan tata ruang, daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, Potensi Pasar, Perkiraan Investasi	- Potensi Pasar			8	0	8	
		- Perkiraan Investasi (Perkiraan nilai (Rp) investasinya)			1	0	3	
9.2	Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/ Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan:						
		- Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali/ tahun	2014	2 kali	3 kali	4 kali	
		- Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan di Kab/Kota	1 (satu) kali/ tahun	2014	2	3	4	
		- Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota			0	0	0	

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.3	Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusifdan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/kota tersebut	- Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal tingkat Kabupaten.	1 (satu) kali/ tahun	2014	1 kali	1 kali	1 kali	
		- Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Kabupaten (Jenis kegiatan Promosi)	1 (satu) kali/ tahun	2014	0	0	0	
9.4	a. Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal : Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM / 5 X 100%	100%	2014	20	40	100	
		Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM.			1	2	5	
		- Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri			0	0	1	

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri			1	1	1	
		- Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri			0	1	0	
		- Perpanjangan RPTKA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota			0	0	0	
		- Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota			0	0	0	
	b. Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%	100%	2014	0	0	0	
		Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%			0	0	0	
		- Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri						

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri						
		- Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri						
		- Jumlah TDP						
		- Jumlah SIUP						
		- Jumlah Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota						
9.5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan terhdap pelaksanaan	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun.	1 (satu) kali/ tahun	2014	3 kali	4 kali	4 kali	
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100%	100%	2014	25	25	50	
		Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE			1	1	2	
		- Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.			0	0	1	

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target			
					2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri			0	0	0	
		- Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.			0	0	0	
		- Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).			1	1	1	
9.7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	2014	10 kali	10 kali	10 kali	

Sumber : SKPD Pelaksana SPM

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pekerjaan Umum

Jalan nasional di NTB sepanjang 632,17 kilometer yang merupakan bagian dari jalur trans nasional Banda Aceh-Atambua, pada tahun 2009 dalam kategori mantap sebesar 72,43 % menjadi 99,69 % pada tahun 2013. Jalan provinsi pada tahun 2009 sebesar 45,40 % menjadi 67,56 % pada tahun 2013. Hal ini terlihat pada tabel 2.42.

Tabel 2.42

Kondisi Kemantapan Jalan Tahun 2009-2013

Jalan	2009	2010	2011	2012	2013
Nasional	72.43	76.74	85.57	99.66	99,69
Provinsi	45.40	46.32	53,15	66.02	67,56

Sumber: Dinas PU Provinsi NTB

Demikian pula dengan kondisi prasarana sumberdaya air, tahun 2011 jumlah bendung di Provinsi NTB sebanyak 379 buah dan belum ada penambahan bendunghingga tahun 2013, sebagaimana tabel 2.43.

Tabel 2.43

Kondisi Sarana Prasarana Sumberdaya Air Tahun 2009 – 2013

No	Infrastruktur	Satu-an	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Bendung	Bh	345	370	379	379	379
2	Bendungan	Bh	9	9	9	9	9
3	Embung (Embung Skala Bendungan)	Bh	166 (40)	260	248	250	263
4	Embung Rakyat/ Embung Peternakan	Bh	2,028	2,400	2,279	2,284	2,079
5	Saluran Suplesi/ Interkoneksi	Km	50.50	35.50	35.50	35.50	50,50
6	Luas Sawah Irigasi Potensial (Fungsional dan DI)	Ha	210,735	276,801	210,285 (178.471; 354 DI)	210,285 (178.471; 354 DI)	206,787 (335 DI)
	-Irigasi PU < 1000 Ha	Ha	97,528	136,587	97,601 (79.908; 304 DI)	97,601 (79.908; 304 DI)	94,976 (284 DI)

No	Infrastruktur	Satu-an	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
	- Irigasi PU 1000-3000 Ha	Ha	71,461	71,968	69,505 (59.514; 40 DI)	69,505 (59.514; 40 DI)	68,884 (41 DI)
	- Irigasi PU > 3000 Ha	Ha	41,746	68,246	43,179 (39.409; 10 DI)	43,179 (39.409; 10 DI)	42,927 (10 DI)
7	Luas Sawah Irigasi Non PU	Ha	25,281	25,281	100,600	100,600	45,391
8	Luas Tadah Hujan	Ha	35,193	Na	58,159	58,159	32,703
9	Jaringan Irigasi Lahan Kering	Ha	3.904,5	90,000	91,945	92,260	6,394
10	Pompa Air Tanah (JIAT)	Bh	479	470 (8.000)	502 (10.247)	506 (10,462)	9,769

Sumber: Dinas PU Provinsi NTB

Cakupan layanan air bersih perkotaan maupun perdesaan terus menunjukkan peningkatan mulai tahun 2010 sampai dengan 2013. Cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB sudah mencapai 73,91%, yang terdiri atas : perkotaan mencapai 80,23% bila dibandingkan terhadap kondisi tahun 2009sebesar75,56%, cakupan pelayanan air bersih perdesaan baru mencapai 72,15% % dari 75% atau mencapai peningkatan 7,15% dari kondisi tahun 2009 atau 66,23% dari target.

Tabel 2.44

Cakupan Air Bersih Tahun 2009-2013

Air Bersih	2009	2010	2011	2012	2013
Perkotaan	75.56	76.85	78.30	79.35	80,23
Perdesaan	66.23	69.00	70.25	71.42	72,15

Sumber: Dinas PU Provinsi NTB

b. Perumahan

Dari total jumlah rumah sebanyak 1.045.648 unit, jumlah rumah layak huni meningkat dari tahun 2011 sebanyak 734.794 unit menjadi 759.361 unit pada tahun 2012 dengan distribusi per Kabupaten/Kota sebagimana tabel 2.45.

Tabel 2.45

Proporsi Jumlah Lingkungan Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2013

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk	Jumlah Rmh	Jumlah rumah Tangga	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Ling-kungan Kumuh	Jumlah Backlog
		(jiwa)	(unit)	(RT)	(Unit)	(Ha)	(KK/Unit)
1	Lombok Barat	620.412	182.587	172.562	138.897	595	10.025
2	Lombok Tengah	881.686	189.932	262.683	117.728	430	72.751
3	Lombok Timur	1130.365	307.222	331.622	230.006	315	24.400
4	Sumbawa	426.128	72.995	110.772	45.414	472	37.777
5	Dompu	226.218	53.190	54.426	37.290	25	1.236
6	Bima	450.976	96.567	112.677	74.130	24	16.110
7	Sumbawa Barat	121.167	22.487	29.923	18.217	15	7.436
8	Kota Mataram	419.641	52.272	112.626	50.175	25	60.354
9	Kota Bima	148.645	19.858	36.362	17.787	15	16.504
10	Lombok Utara	205.064	54.099	56.779	40.232	260	2.680
	Jumlah	4.630.302	1.051.209	1.280.432	769.876	2.176	249.273

Sumber: Dinas PU Provinsi NTB

Sementara itu, penduduk yang mendapat akses sanitasi pada tahun 2009 sebesar 47,63% atau sebanyak 2.078.457 jiwa meningkat pada tahun 2013 sebanyak 2.362.737 jiwa atau 51,03%, sebagaiamana tabel 2.46.

Tabel 2.46

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2009-2013

Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi	2.078.457	2.145.175	2.210.349	2.294.920	2.362.737
2	Jumlah penduduk	4.363.756	4.434.012	4.505.400	4.577.937	4.630.302
3	Persentase penduduk berakses sanitasi (%)	47,63	48,38	49,06	50,13	51,03
4	Jumlah rumah berakses sanitasi	519.614	536.294	552.587	573.730	661.884

Sumber: Dinas PU Provinsi NTB

Tabel 2.47

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 – 2013

Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kab/Kota	Tahun														
		2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%	Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%	Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%	Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%	Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%
1	Lombok Barat	150,806	64,399	42.70	153,309	66,276	43.23	155,799	68,598	44.03	158,329	72,309	45.67	175,187	78,183	44.63
2	Lombok Tengah	211,026	98,570	46.71	214,169	101,259	47.28	217,668	102,870	47.26	221,225	107,007	48.37	265,183	126,468	47.69
3	Lombok Timur	267,122	138,529	51.86	270,059	140,836	52.15	274,487	144,259	52.56	278,987	147,985	53.04	334,397	174,625	52.22
4	Sumbawa	103,467	51,382	49.66	105,188	53,099	50.48	106,878	54,700	51.18	108,596	56,568	52.09	111,972	59,538	53.17
5	Dompu	53,296	19,347	36.3	54,370	20,351	37.43	55,217	21,054	38.13	56,077	22,055	39.33	55,351	24,570	44.39
6	Bima	104,112	39,021	37.48	105,052	40,434	38.49	106,740	41,863	39.22	108,456	44,185	40.74	114,077	47,014	41.21
7	Sumbawa Barat	24,764	9,353	37.77	25,272	9,634	38.12	25,636	10,106	39.42	26,006	10,459	40.22	30,798	15,975	51.87
8	Kota Mataram	90,561	70,674	78.04	93,877	73,912	78.73	95,379	76,256	79.95	96,906	78,349	80.85	114,926	94,209	81.97
9	Kota Bima	32,461	11,579	35.67	33,073	12,829	38.79	33,567	14,561	43.38	34,067	15,484	45.45	37,187	17,341	46.63
10	Lombok Utara	53,325	16,760	31.43	54,135	17,664	32.63	54,979	18,319	33.32	55,835	19,330	34.62	57,354	23,962	41.78
	Jumlah	**1,090,939**	**519,614**	**47.63**	**1,108,503**	**536,294**	**48.38**	**1,126,350**	**552,587**	**49.06**	**1,144,484**	**573,730**	**50.13**	**1,296,432**	**661,884**	**50.79**

Sumber: Dinas PU Provinsi NTB

c. Penataan Ruang

Provinsi NTB telah memiliki PERDA Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Demikian pula halnya dengan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se-NTB juga memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota, sebagaimana terlihat pada tabel 2.48.

TabeL 2.48

Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW Kabupaten/Kota se- NTB

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	NOMOR DAN TAHUN PERDA
Nusa Tenggara Barat	NO. 3 TAHUN 2010
Kota Mataram	NO. 12 TAHUN 2011
Kota Bima	NO. 4 TAHUN 2012
Kabupaten Lombok Barat	NO. 11 TAHUN 2011
Kabupaten Lombok Tengah	NO. 7 TAHUN 2011
Kabupaten Lombok Timur	NO. 2 TAHUN 2012
Kabupaten Lombok Utara	NO. 9 TAHUN 2011
Kabupaten Sumbawa	NO. 10 TAHUN 2012
Kabupaten Sumbawa Barat	NO. 2 TAHUN 2012
Kabupaten Dompu	NO. 2 TAHUN 2012
Kabupaten Bima	NO. 9 TAHUN 2011

Sumber: Dinas PU Provinsi NTB

d. Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilaksanakan dengan baik dan lancar mulai dari Rapat kerja kepala Bappeda Provinsi dengan kepala Bappeda kabupaten/Kota se NTB, Forum SKPD, Pra Musrenbang Provinsi, Musrenbang Provinsi, Musrenbang nasional dan Pasca Musrenbang Nasional. Disamping itu berbagai tugas perencanaan lainnya seperti penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran, Penyusunan Buku Profil Daerah,Buku NTB Dalam Angka, Buku Data Pokok, Buku PDRB, Buku Program PDT Tahun 2009, Master Plan pengembangan Industri Kreatif NTB, *Strategi Participatory Integrated Development in Rainfed Areas* (PIDRA) serta penyusunan studi – studi lainnya yang mendukung proses perencanaan dalam rangka perwujudan sasaran dan tujuan dari RPJMD tahun 2009 – 2013.

Telah diselenggarakan pula berbagai kegiatan strategis yang dihajatkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah di segala bidang, antara lain :

a. Mengembangkan kerjasama dengan Utrech University Belanda dalam bidang Good Governance dalam bentuk pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya perencana daerah yang dilakukan di dalam negeri maupun Negara Belanda.

b. Pembentukkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)yang diketuai oleh Wakil Gubernur ditingkat Provinsi dan Para Wakil Bupati/Wakil Walikota di Tingkat kabupaten/Kota. Pada tahun 2012 angka kemiskinan NTB menjadi sebesar 18,02%, jumlah ini menurun dari kondisi tahun 2008 sebesar 23,81%. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan penghargaan nasional terkait dengan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan lebih dari 1%.

c. Sesuai amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan berkeadilan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD-MDGs) Provinsi NTB Tahun 2011–2015.

d. Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB Loan 1964-IND Package C.2.46) Sustainable Capacity Building for Decentralization Project/SCBDP yang bertujuan untuk melakukan penguatan kelembagaan kapasitas dan sistim yang terdiri dari: 1) Pembuatan Regulasi, 2) Sistim informasi, melalui aplikasi SIPPD (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) , KUA-PPAS, GIS, Simpeg dan Simonev. 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Diklat. Salah satu program yang diharapkan utuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah adalah melalui sistem informasi berbasis internet/Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIPPD) dengan sasaran mengkoordinasikan perencanaan SKPD dalam rangka menyelaraskan program/kegiatan di Kabupaten/ Kota dengan Provinsi.

e. Implementasi Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Provinsi NTB.

f. Penetapan Lombok (Rinjani) sebagai Aspiring Geopark secara Nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

e. Perhubungan

Bandara Internasional Lombok mulai beroperasi yang ditandai dengan kedatangan penerbangan pertama dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta ke Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tanggal 1 Oktober 2011. Pada tahun 2009 maskapai yang beroperasi sebanyak 8 dengan 18 flight atau 52 pergerakan pesawat sedangkan sampai dengan tahun 2012 telah beroperasi 11 maskapai penerbangan. Tingkat aksesibilitas keadaan dari penerbangan Provinsi NTB, sebagaimana tabel 2.49.

Tabel 2.49

Perkembangan Frekuensi Penerbangan Domestik dan Internasional dan Interkoneksi Angkutan Umum Tahun 2009-2013

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI	CAPAIAN KINERJA				
		TAHUN 2007	2009	2010		2012	2013
Maskapai/frekuensi penerbangan domestik dan internasional yang melayani rute Prov. NTB	- Perusahaan - Kali	8	8/18	8/23	8/26	11/38	15/44

Sumber: Dinas Hubkominfo Provinsi NTB

Tabel 2.50

Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan, Ijin Trayek dan Uji KIR

No.	Angkutan		Ijin dan Uji Kendaraan			Jumlah Terminal	Jumlah Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan	Jumlah Bandar Udara
	Jumlah Angkutan Darat	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Biaya Pengujian Kelaikan Angkutan Umum				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	417 Kendaraan (AKDP)	8909 Org	123 Perusahaan (417 Kendaraan)	10 Unit	Tergantung dari Perda Masing-masing Kabupaten/Kota	Ada 8 Terminal	Ada 8 Pelabuhan Laut	Ada 3 Pelabuhan Penyebrangan	ada 3 (tiga) Bandara
2						1. Terminal Mandalika	1. Lembar	1. Penyebrangan Lembar	1. Bandara Internasional Lombok (BIL)
3						2. Terminal Tanjung	2. Badas	2. Penyebrangan Kayangan-Pototano	2. Bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa
4						3. Terminal Praya	3. Bima	3. Penyebrangan Sape	3. Bandara Sultan Salahuddin Bima
5						4. Terminal Pancor	4. Calabai		
6						5. Terminal Sumer Payung	5. Kempo		
7						6. Terminal Ginte	6. Carik		
8						7. Terminal Taliwang	7. Labuan Lombok		
9						8. Terminal Dara	8. Sape		

Sumber: Dinas Hubkominfo Provinsi NTB

f. Lingkungan Hidup

Sumber mata air berhasil diselamatkan pada akhir tahun 2013 sebanyak 336 titik meningkat dari tahun 2009 yang berjumlah 214 titik, demikian pula terhadap kabupaten kota yang memiliki ruang terbuka hijau, sampai tahun 2013 10 kabupaten/kota telah memiliki ruang terbuka hijau > 30%, sebagaimana tabel 2.51.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2009 – 2013

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
		2009	2010	2011	2012	2013
Sumber Mata Air	Sumber	214	284	305	321	336
Ruang Terbuka Hijau >30 %	Kab/Kota	1	2	8	8	10

Sumber: BLHP Provinsi NTB

Dari data proporsi penduduk yang mendapatkan akses air minum sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk yang terakses air minum dari 44,99% tahun 2009 menjadi sebesar 52,31% tahun 2013. Adapun rekapitulasi dan rincian jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum per kabupaten, sebagaimanatabel 2.52.

Tabel 2.52
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2009 s.d. 2013
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	1.963.254	2.130.543	2.228.371	2.394.719	2.560.906
2	Jumlah penduduk	4.363.756	4.434.012	4.505.400	4.577.937	4.651.641
3	Persentase penduduk berakses air minum (%)	44,99	48,05	49,46	52,31	55,05

Sumber: Dinas PU Provinsi NTB

Tabel 2.53

Data Pelayanan Air Minum PDAM Sampai dengan Tahun 2013

No.	Nama PDAM	Daerah Pelayanan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
			Administratif	Pelayanan
1	PDAM Giri Menang Mataram	Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara	1.232.934	1.136.300
2	PDAM Lombok Tengah	Lombok Tengah	868.890	678.638
3	PDAM Lombok Timur	Lombok Timur	1.139.776	283.231
4	PDAM Sumbawa Barat	Sumbawa Barat	114.951	79.419
5	PDAM Sumbawa	Sumbawa	430.451	260.699
6	PDAM Dompu	Dompu	Belum Audit Kinerja BPKP 2012	
7	PDAM Bima	Kab. Bima dan Kota Bima	784.231	523.176

Sumber: Dinas PU Provinsi NTB

Tabel 2.54

Proporsi Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum

Tahun 2009 – 2013

No	Kab/Kota	Tahun														
		2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapat Akses Air Minum	%	Jumlah penduduk		%	Jumlah penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapat Akses Air Minum	%	Jumlah penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapat Akses Air Minum	%	Jumlah penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapat Akses Air Minum	%
1	Lombok Barat	603,223	223,434	37.04	613,237	259,706	42.35	623,195	270,778	43.45	633,315	292,971	46.26	620.412	320.044	51,58
2	Lombok Tengah	844,105	332,388	39.38	856,675	368,542	43.02	870,674	386,753	44.42	884,902	419,532	47.41	881.686	453.114	51,39
3	Lombok Timur	1,068,486	521,528	48.81	1,080,237	552,109	51.11	1,097,947	574,007	52.28	1,115,948	623,703	55.89	1130.365	661.878	58,55
4	Sumbawa	413,869	219,268	52.98	420,750	225,270	53.54	427,512	231,455	54.14	434,384	242,126	55.74	426.128	241.695	56,71
5	Dompu	213,185	70,884	33.25	217,479	76,118	35.00	220,867	85,454	38.69	224,309	96,116	42.85	226.218	103.004	45,53
6	Bima	416,446	190,649	45.78	420,207	211,700	50.38	426,960	218,091	51.08	433,823	231,748	53.42	450.976	242.898	53,86
7	Sumbawa Barat	99,056	42,416	42.82	101,089	46,562	46.06	102,545	48,524	47.32	104,022	51,096	49.12	121.167	57.807	47,70
8	Kota Mataram	362,243	257,772	71.16	375,506	276,412	73.61	381,517	286,639	75.13	387,626	301,510	77.78	419.641	318.480	75,89
9	Kota Bima	129,843	41,459	31.93	132,292	45,482	34.38	134,266	49,061	36.54	136,270	52,968	38.87	148.645	66.006	44,40
10	Lombok Utara	213,300	63,457	29.75	216,540	68,643	31.70	219,916	77,608	35.29	223,338	82,948	37.14	205.064	95.980	46,80
	Jumlah	**4,363,756**	**1,963,254**	**44.99**	**4,434,012**	**2,130,543**	**48.05**	**4,505,400**	**2,228,371**	**49.46**	**4,577,936**	**2,394,719**	**52.31**	**4.630.302**	**2.560.906**	**55,30**

Sumber: Dinas PU Provinsi NTB

Cakupan TPA Perkotaan pada tahun 2012 sebesar 78% meningkat dari Tahun 2008 sebesar 75% sedangkan cakupan TPA Perdesaan mencapai 62,50% pada Tahun 2012 meningkat dari cakupan pada Tahun 2008 sebesar 58%, sebagaimana terlihat pada gambar 2.9.

Gambar 2.9

Cakupan TPA Tahun 2009-2012

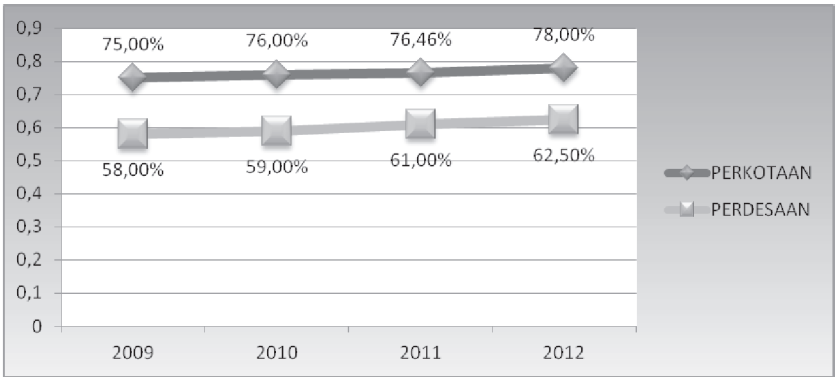

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2012

g. Pertanahan

Data tanah teridentifikasi terlantar Tahun 2009 seluas 18.719 Ha dengan jumlah Badan Hukum sebanyak 117 Badan Hukum. Pemerintah Provinsi NTB bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan NTBtelah mendata tanah terindikasi terlantar s/d Tahun 2012 seluas 25.022,9378 ha dengan distribusi sebagaimana terlihat pada tabel 2.55.

Tabel. 2.55

Jumlah Luas Tanah Terindikasi Terlantar s/d Tahun 2012

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BADAN HUKUM	LUAS BIDANG	LUAS (Ha)
1	Mataram	1	1	0,2000
2	Lombok Utara	17	26	402,9878
3	Lombok Barat	13	25	380,7333
4	Lombok Tengah	14	30	1.007,8713
5	Lombok Timur	12	15	389,5608
6	Sumbawa Barat	19	19	592,7818
7	Sumbawa	24	24	4.146,5093
8	Dompu	30	31	12.158,1908

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BADAN HUKUM	LUAS BIDANG	LUAS (Ha)
9	Bima	13	13	5.730,7837
10	Kota Bima	3	3	213,3190
Total		**146**	**187**	**25.022,9378**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, dan Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Tahun 2012

Dari data tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kanwil BPN NTB telah melaksanakan kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar terhadap 11 Badan Hukum seluas 744,2067 Ha dari 146 Badan Hukum pemegang hak seluas 25.022,9378 Ha. Selanjutnya dari 11 Badan Hukum yang menjadi obyek penertiban, terdapat 2 Badan Hukum yang diberikan Peringatan I seluas 119,1668 Ha dan 9 Badan Hukum lainnya masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan sesuai dengan peruntukannya seluas 625,0399 Ha.

h. Kependudukan dan Catatan Sipil

Perekaman e- KTP tahun 2012 di Provinsi NTB sebesar 84,11% dengan pencapaian 100% telah dilakukan di kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima, sebagaimana terlihat pada tabel 2.56.

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target Wajib KTP Nasional	Realisasi Pelaksanaan e-KTP		Target Wajib KTP Nasional	Realisasi Pelaksanaan e-KTP	
			Perekaman	%		Perekaman	%
1	Mataram	239.482	223.124	93,17	281.907	256.564	91,01
2	Lombok Barat	446.961	301.885	67,54	383.363	324.402	84,62
3	Lombok Utara	151.152	127.640	84,44	145.348	137.543	94,63
4	Lombok Tengah	433.275	434.924	100,38	564.918	452.330	80,07
5	Lombok Timur	612.645	474.104	77,39	593.841	512.247	86,26
6	Sumbawa Barat	96.902	72.919	75,25	90.360	74.104	82,01
7	Sumbawa	310.621	256.305	82,51	307.567	271.305	88,21
8	Dompu	168.207	126.524	75,22	148.790	128.540	86,39
9	Bima	89.596	82.166	91,71	354.650	265.420	74,84
10	Kab. Bima	263.833	265.420	100,60	94.917	83.840	88,33
Total		**2.811.674**	**2.365.011**	**84,11**	**2.811.639**	**2.506.295**	**89,14**

Sumber: Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013

i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah lingkup Pemerintah provinsi NTB tahun 2012 sebesar 35,97%, partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah 22,57%. Data tahun 2013 (semester I) jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang teridentifikasi se-NTB adalah sebanyak 227 kasus (46,61%). Rasio partisipasi angkatan kerja perempuan Tahun 2013 adalah 94,84%.

j. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pada tahun 2012, jumlah akseptor KB (jumlah pasangan usia subur)adalah 1.019.730 dengan peserta KB aktif sebanyak 622.934 (61,09%), dan yang teridentifikasi sebagai keluarga pra KS dan KS sebanyak 674.880 keluarga atau rasionya 66,18%. Sementara itu, pada tahun 2013 jumlah akseptor KB (jumlah pasangan usia subur) meningkat menjadi 1.066.823 dengan peserta KB aktif sebanyak 800.600 (75,05%).

k. Sosial

Penanganan masalah kesejahteraan sosial selama tahun 2009-2012 dilaksanakan melalui pendekatan dalam panti maupun luar panti, sebagaimana terlihat pada tabel 2.57.

Tabel 2.57

Kapasitas Daya Tampung Panti Tahun 2009-2013

NO.	NAMA PANTI	DAYA TAMPUNG	REALISASI				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Rumah Perlindungan Petirahan Sosial Anak (RPPSA) Putra Utama Selat Narmada	50/bulan	648	648	648	540	540
2.	Panti PSBL Suka Waras Selebung Loteng	100/tahun	100	100	100	100	100
3.	Panti PSBK Aikmel Lombok Timur	100/6 bulan	200	200	200	200	150
4.	Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) Puspa Karma Mataram	100/tahun	85	84	84	75	75
5.	Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) Meci Angi Bima	50/tahun	50	50	50	50	50
6.	Panti PSAA Harapan Mataram	100	100	80	80	80	80
7.	Panti Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Karya Putra Bengkel Lobar	75	75	75	70	75	75
8.	Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini Selagalas Mataram	50	123	93	103	100	50

Sumber: Dinas Sosial kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2012

Sedangkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) luar panti dari jumlah PMKS secara keseluruhan sebanyak 1.028.606 yang sudah tertangani sebanyak 171.550 atau 16.68%, sebagaimana terlihat pada tabel 2.58.

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Anak Terlantar	Jiwa	200.630	201.699	205.116	205.116	120.506
2.	Anak Jalanan	Jiwa	10.181	10.005	3.327	3.327	3.806
3.	Penyandang cacat	Jiwa	397.569	161.147	28.690	16.098	5.274
4.	Tuna Susila	Jiwa	446	440	508	508	438
5	Pengemis	Jiwa	558	339	274	274	342
5	Gelandangan	Jiwa	651	1.275	1.746	1.746	432
6	Korban Napza	Jiwa	2.238	1.530	2.707	2.707	766
7	Keluarga Fakir Miskin	KK	451.353	434.893	373.750	373.750	356.568
8	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	KK	117.492	178.904	172.825	172.825	Non PMKS
9	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	8.938	6.432	9.091	2.758	3.442
10	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	3	3	-	708	306

Sumber: Dinas Sosia kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2013

I. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik NTB, pada tahun 2013, jumlah penduduk NTB sebanyak 4.630.302 jiwa dan terdapat 3.200.474 jiwa termasuk penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Selanjutnya, sekitar 2.094.550 jiwa atau 65,44 persen penduduk usia kerja tersebut merupakan penduduk Angkatan Kerja yaitu penduduk baik yang terlibat aktif dalam bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Sisanya 34,56 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang mempunyai kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan merupakan besarnya jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja Apabila tingginya TPAK disebabkan oleh banyaknya penduduk yang

bekerja, maka kinerja partisipasi angkatan kerja dapat dikategorikan baik. Sebaliknya apabila tingginya TPAK tersebut diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja, berakibat penduduk yang mencari pekerjaan meningkat, bisa memicu tingginya angka pengangguran. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTB pada Tahun 2013 adalah 65,44% dengan tingkat pengangguran 5,38%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja partisipasi angkatan kerja dikategorikan baik sebagaimana terlihat pada tabel 2.59.

Tabel 2.59
Statistik Ketenagakerjaan NTB
Tahun 2011-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
TPAK (%)	65,92	66,02	66,12	66,02	65,44
Tingkat Pengangguran (%)	5,19	5,26	5,33	5,26	5,38
Bekerja (%)	94,81	94,74	94,67	94,74	94,61
Bekerja (Orang)	1.929.331	1.945.716	1.962.240	1.978.764	1.981.842
Setengah Pengangguran (Orang)	821.551	840.898	860.701	880.504	924.888
- Pengangguran Terpaksa	419.328	425.601	434.599	514.597	494.372
- Pengangguran Sukarela	402.216	415.907	426.102	365.907	430.516

Sumber : BPS Provinsi NTB

Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB tahun 2012menunjukkan bahwa pelaksanaan pengiriman Tenaga Kerja Ke luar Negeri sebanyak 31,357 orang menurun bila dibanding pengiriman tenaga kerja pada tahun 2011 sebesar meningkat sebanyak 58.230 orang. Pengiriman terbanyak tujuan Malaysia Barat untuk Tenaga Kerja (laki-Laki) dan Negara Saudi Arabia untuk Tenaga Kerja Wanita, sebagaimana terlihat pada tabel 2.60.

Tabel 2.60

Rekapitulasi Perkembangan Jumlah TKI

Tahun 2009-2013

NO.	NEGARA TUJUAN	2009		JML	2010		JML	2011		JML	2012		JML	2013		
		L	P		L	P		L	P		L	P		L	P	JML
1.	Malaysia Barat	32.430	433	32.863	37.043	1.096	38.139	43.282	578	43.860	30.774	738	31.512	36.512	667	37.179
2.	Malaysia Timur	198	50	248	171	7	178	654	71	725	706	53	759	0	0	0
3.	Uni Emirat Arab	1	372	373	29	624	653	1	1623	1624	-	1.951	1.951	1	4.067	4.068
4.	Yordania	2	59	61	-	243	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Taiwan	-	-	-	5	98	103	22	165	187	13	236	249	19	344	363
6.	Hongkong	-	38	38	-	46	46	-	227	227	-	284	284	0	480	480
7.	Singapura	-	32	32	-	15	15	-	141	1441	-	215	215	0	320	320
8.	Bahrain	-	-	-	-	71	71	-	348	348	-	429	429	0	441	441
9.	Oman	-	215	215	-	359	359	-	346	346	-	376	376	0	1.049	1.049
10.	Qatar	-	75	75	-	162	162	-	391	391	-	1.069	1.069	1	1.026	1.027
11.	Kuwait	-	72	72	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Brunei Darussalam	-	1	1	20	35	55	22	24	46	35	30	65	92	450	542
13.	Libya	-	-	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Saudi Arabia	272	19.480	19.752	89	15.565	15.654	406	9.916	10.022	2	96	98	16	148	164
15.	Makau	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Syria	-	-	-	-	414	414	1	312	313	-	-	-	-	-	-
17.	Swiss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
18.	Maladewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	3	3
19.	Timor Leste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-
20.	Austria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-
	JUMLAH	**32.903**	**20.828**	**53.731**	**37.405**	**18.745**	**56.150**	**44.088**	**14.142**	**58.230**	**31.537**	**5.483**	**31.537**	**36.641**	**8.995**	**45,636**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2013

m. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2009 jumlah koperasi aktif sebanyak 2.514 koperasi dan pada Tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 3.851, sebagaimana terlihat pada tabel 2.61 berikut.

Tabel 2.61
Data BPR dan Koperasi Aktif di Provinsi NTB
Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Jumlah BPR	Jumlah Koperasi aktif
1.	2009	53	2.514
2.	2010	32	2.848
3.	2011	32	3.003
4.	2012	32	3.225
5	2013	32	2.627

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2013

n. Penanaman Modal

Perkembangan investasi di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan. Nilai Investasi yang ditanamkan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)sampai akhir tahun 2013 sebesar Rp.1,54 triliundan Penamanan Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 3,37 triliun, sebagaimana tabel 2.62 berikut.

Tabel 2.62
Investasi PMDN dan PMA Tahun 2009 – 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
PMDN (Rp)	293.982.482	418.063.753.053	398.156.381.333	398.679.160.609	1.537.177.711.418
PMA ($ US)	220.619.000	260.075.015	143.058.143	115.447.250	336.983.000
PMA (Rp.000)	1.985.576.400,00	2.470.712.785,50	1.359.053.717,50	1.039.027.500,00	3.374.844.350,00
Total (Rp)	20.149.746.482	2.758.738.888.053	1.685.679.668.333	1.437.704.410.609	3.374.844.350.000

Sumber : Hasil Analisis
Kurs $US 1 = Rp. 9.000 s/d Rp. 10.500

Laju petumbuhan investasi PMDN pada tahun 2009 menurun sebesar 68,82% dan meningkat menjadi 289,71% pada tahun 2013. Sedangkan laju pertumbuhan investasi PMA mengalami perlambatan, pada tahun 2009 tumbuh sebesar 381,11% menjadi 256,46% pada tahun 2013 sebagaimana terlihat pada tabel 2.63.

Tabel 2.63

Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA

Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
PMDN (%)	-68,82	142,11	-90,46	0,13	289,71
PMA (%)	381,11	24,43	44,99	-23,54	223,21
Total	156,15	83,27	-22,74	-11,71	256,46

Sumber : BKPM & PT Provinsi NTB Tahun 2013

o. Kebudayaan

Inventarisasi situs cagar budaya tidak bergerak yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhimpun selama tahun 2012 sebanyak 377 situs cagar budaya. Bentuk-bentuk cagar yang terinventarisasi antara lain makam, situs, relief, benteng, rumah tradisional, megalitik, batu, rumah adat, sumur, bangunan bekas istana, gua, bangunan kolonial, bangunan pertahanan, monumen/tugu, pura, taman, kemalik, masjid dan lain-lain.

p. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan kompetisi berbagai cabang olahraga pelajar dan mahasiswa, baik di event nasional maupun internasional menunjukkan peningkatan prestasi yang menggembirakan dan mengangkat nama NTB diajang nasional dan mengharumkan nama bangsa ditingkat internasional yang dibuktikannya dengan perolehan medali dalam berbagai kejuaraan olahraga pelajar seperti POPNAS, POPWIL, Kejuaraan nasional antar Pelajar, Kejuaraan Sirkuit Yunior, Grand Jatim Sprint dan Asean School & Asean Yunior di Singapura, serta Arafura Youth Games di Australia ditingkat Internasional, sebagaimana terlihat pada tabel 2.64.

Tabel 2.64

Prestasi Atlet Tahun 2009 – 2013

Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Keterangan
2009	Nasional	Atletik	4	7	5	POPNAS X di Yogyakarta dan Kejurnas Atletik antar PPLP di Belitung
		Pencak Silat	4	2	2	POPNAS X di Yogyakarta dan Kejurnas Pencak Silat antar PPLP di Jakarta
		Voli	1	0	1	Kejurnas Voli Pantai U17 di Jatim dan Kejurnas KOP Bola Voli di Solo Jateng
	Internasional	Atletik	1	2	1	ASEAN School di Singapura
		Voli	1	0	0	Arafura Youth Games di Australia
2010	Nasional	Atletik	4	1	3	Kejurnas Atletik antar PPLP di Ambon
		Pencak Silat	0	3	2	POPNAS X di Yogyakarta, POPWIL dan Kejurnas Pencak Silat antar PPLP di Jakarta
2011	Nasional	Atletik	10	9	4	Sirkuit Junior dan SMP Jakarta, Grand Jatim Sprint dan PORNAS Riau
		Pencak Silat	1	0	0	POPNAS Riau
	Internasional	Atletik	1	2	4	ASEAN School di Singapura dan ASEAN Junior
2012	Nasional	Atletik	4	26	12	Kejurnas antar PPLP, Kejurnas Remaja, Jabar Open
		Pencak Silat	1	2	6	Kejurnas antar PPLP, Kejurnas Junior
	Internasional	Atletik	2	2	3	Arafura Youth Games di Singapura dan ASEAN School Games di Laos
2013	Nasional	Atletik	13	7	10	POPNAS XII di Jakarta, Kejurnas Remaja Yunior di Jakarta, Kejurnas Antar PPLM se Indonesia di Surabaya Jatim
		Pencak Silat	1	0	0	POMNAS
	Internasional	Atletik	0	1	0	Hongkong Intercitry, Kejuaraan Dunia di Bali, Kejuaraan ASEAN SCHOOL di Hanowi-Vietnam

Sumber : Dinas Dikpora Prov. NTB

Selama kurun waktu 2009-2013kondisi ketertiban, keamanan dan politik di Provinsi Nusa Tenggara Baratdapat terlihat sebagaimana terlihat pada tabel 2.65.

Tabel 2.65

Konflik, Partisipasi Politik dan Penegakan Hukum di Provinsi NTB

Tahun 2009-2013

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN									
			2009		2010		2011		2012		2013	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Konflik Vertikal	Kasus	138	107	124	96	112	61	98	43	89	11
2.	Konflik Horizontal	Kasus	104	82	76	65	59	36	49	50	39	43
3.	Parstisipasi masyarakat dalam Politik	%	70	75,70 (Pilpres)	68	73,42 (Pemilukada)	68	Tidak ada Pemilu/ Pemilukada	68	Tidak ada Pemilu/ Pemilukada	70	70,47
4.	Pemilu yang bebas dan adil	Pelanggaran	58	9	60	3	Tidak ada Pemilu		Tidak ada Pemilu		71	11
5.	Pelanggaran Hukum dan HAM	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bakesbangpoldagri Prov. NTB

q. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Beberapa keberhasilan yang telah diperoleh antara lainpembentukan Pokja akuntasi keuangan dan barang, pembentukan SIMDA barang milik daerah (BMD), kerjasama dengan KPKNL dalam penilaian asset daerah, kerjasama dengan Inspektorat untuk pemutakhiran data aset dengan cara melakukan cek fisik, penyusunan regulasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset melalui Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, Keputusan Gubernur. Penatausahaan aset melalui Inventarisasi, validasi dan rekonsiliasi asset, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset melalui sertifikasi asset dan peniliaian asset yang dikelola pihak ketiga, rekonsiliasi nilai saldo awal barang milik daerah Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebagai data awal Penyusunan Neraca Tahun 2011 dengan melibatkan semua Pengurus Barang pada masing-masing SKPD /UPTD.

Jumlah Peraturan Daerah meningkat dari 10 buah pada tahun 2009 menjadi 42 buah pada tahun 2012, sedangkan jumlah Peraturan Gubernur meningkat dari 44 buah pada tahun 2009 menjadi 180 buah pada tahun 2012 dan jumlah Keputusan Gubernur meningkat dari 629 buah pada tahun 2009 menjadi 659 buah pada tahun 2012, sebagaimana terlihat pada tabel 2.66.

Tabel 2.66.

Target dan Realisasi Legislasi Daerah 2009-2013

PRODUK HUKUM	2009		2010		2011		2012		2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Peraturan Daerah	2	10	4	10	6	14	8	9	14	11
2. Peraturan Gubernur	20	44	35	36	37	47	37	54	37	38
1. Keputusan Gubernur	400	629	600	722	650	683	650	709	650	787
Jumlah	**422**	**683**	**639**	**768**	**693**	**744**	**695**	**772**	**701**	**836**

Sumber: Biro Hukum Setda NTB, 2013

Tabel 2.67

Capaian Ketahanan Pangan Provinsi NTB

Tahun 2009-2013

No	Indikator RPJMD	Uraian	Kondisi 2008	Capaian					Peningkatan Per tahun (%)
				2009	2010	2011	2012	2013	
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	Target		74,20	75,70	77,20	78,70	80,30	1,99
		Realisasi	72,70	73,40	74,08	76,70	78,10	78,70	1,77
		(%)		98,92	97,86	99,35	99,24	98,01	
2	Desa Mandiri Pangan (Desa)	Target		102	132	162	192	222	21,57
		Realisasi	82	102	138	169	199	229	22,65
		(%)		100,00	104,55	104,32	103,65	103,15	
3	Cadangan Pangan (Ton)	Target	-	265	530	795	1.060	1.325	52,08
		Realisasi		521,00	594,92	798,55	1.161,85	1.373	28,02
		(%)		196,60	112,25	100,45	109,61	103,62	
	- Ketersediaan Energi (Kalori/ Kapita/Hari)	Target		3.083,12	3.088,67	3.094,23	3.099,80	3.105,38	0,18
		Realisasi	3.077,58	3.367,97	3.559,25	3.343,04	4.354,24	4.745,00	7,71
		(%)		109,24	115,24	108,04	140,47	152,80	
	- Ketersediaan Protein (gr/Kapita/ Hari)	Target		95,85	97,95	100,10	102,29	104,53	2,19
		Realisasi	93,80	111,90	117,08	114,49	129,54	126,56	4,14
		(%)		116,74	119,53	114,38	126,64	121,08	

Sumber : LKPJ AMJ 2013

r. Ketahanan Pangan

Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat tahun 2010 sebanyak 594,92ton meningkat signifikan pada tahun 2012 mencapai 1.161,85 ton (109,61%) melampaui target 1.060 ton. Ketersediaan energi tahun 2012 mencapai 4.354,24 Kalori/kapita/hari meningkat 41,48% dari kondisi tahun 2011 dan ketersediaan protein meningkat 38,1% dari kondisi tahun 2010 menjadi 129,54 gr/kapita/hari di tahun 2012, melampaui target tahun 2012 untuk energi 3.099,80 Kalori/kapita/hari dan protein 102,29 Gr/kapita/hari di dalam RPJM Provinsi NTB, sebagaimana terlihat pada tabel 2.67.

s. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penemuan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) yang telah dihasilkan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 183 jenis. Dari temuan tersebut yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat lebih dari 75%, sebagaimana terlihat pada tabel 2.68.

Tabel2.68

Pemanfaatan TTG di Provinsi NTB Tahun 2009-2013

NO	URAIAN	2008	2009		2010		2011		2012		2013	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Pemanfaatan TTG	73	84	89	96	128	108	134	108	166	130	168
2	Temuan TTG	95	106	110	115	156	125	173	120	183	145	186

Sumber: BPMPD Provinsi NTB, 2013

t. Kearsipan

Badan Perpustakaan daerah dan arsip sebagai instansi penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan urusan ini, selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu Tahun2009 – 2013 telah banyak mendukung pembangunan di Provinsi NTB dengan keberhasilan-keberhasilan yang telah diperoleh antara lain: hasil kajian sistem administrasi kearsipan sebanyak 4 dokumen/400 eksemplar, hasil penataan dokumen/ arsip daerah, akuisisi arsip dan pengolahan arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi 40 SKPD, hasil penilaian arsip inaktif dan statistik hasil akuisisi 5 SKPD, pengolahan dan pelayanan informasi khasanah arsip yang memiliki nilai sejarah 14 jenis, pengembangan model instansi pengelola kearsipan 30 SKP, pembinaan dan pengawasan kearsipan 46 SKP dan 40 Pondok pesantren, dan pelatihan kersipan 240 Sekretaris Desa dan Pengurus Pondok Pesantren.

u. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai instansi penanggungjawab urusan tersebut diperoleh jumlah jaringan komunikasi di Provinsi NTB,terdapat 8 operator jaringan

telekomunikasi antara lain milik PT. Telkom Mataram, PT. XL Axiata Mataram, PT. Telkomsel Mataram, PT. Indosat Mataram, PT. Smartfren Mataram, PT Axis Mataram, PT. Sampoerna Mataram dan PT. Hutchinson Mataram, sebagaimana terlihat pada tabel 2.69.

Tabel 2.69
Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2009-2013

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah jaringan telpon genggam (operator)	12	12	12	12	12
2	Jumlah jaringan telepon stationer (penyelenggara)	10	10	10	10	10
3	Jumlah jaringan telpon komunikasi 1+2	22	22	22	22	22

Sumber : Bidang Postel Dishubkominfo

Rasio Wartel/Warnet berdasarkan kondisi tahun 2008 terhadap penduduk adalah 1 : 1500 sebagaimana terlihat pada tabel 2.70.

Tabel 2.70

Rasio Wartel/Warnet per 1000 penduduk Tahun 2008 s.d. 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2008									
		Jumlah Penduduk	Jumlah Wartel	Jumlah Warnet	Rasio Wartel	Rasio Warnet	Jumlah Penduduk	Jumlah Wartel	Jumlah Warnet	Rasio Wartel	Rasio Warnet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(3)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)/(8)	(12)=(10)/(8)
1	Kota Mataram	362.243	55	13	0,15714	0,04	413.210	12	74	0,03000	0,18500
2	Lombok Barat	603.223	3	8	0,00500	0,013	61.161	5	34	0,08333	0,55738
3	Lombok Tengah	844.105	7	5	0,00875	0,006	875.231	5	27	0,00575	0,03103
4	Lombok Timur	1.068.486	4	7	0,00400	0,007	1.123.488	4	36	0,00357	0,03273
5	Lombok Utara	413.869	12	6	0,03000	0,015	423.029	3	29	0,00714	0,06905
6	Kab. Sumbawa	213.185	20	5	0,10000	0,025	223.678	8	10	0,03636	0,04545
7	Sumbawa Barat	416.446	14	3	1,03500	0,008	447.286	5	13	0,01136	0,02955
8	Kab. Bima	99.059	8	3	0,08000	0,030	118.608	3	22	0,02542	0,18644
9	Kota Bima	213.300	0	0	0,00000	0,000	203.564	3	17	0,01500	0,08500
10	Dompu	129.843	14	5	0,11667	0,042	146.307	9	22	0,00006	0,15172
	Jumlah	4.363.759	137	55	0,00003	0,00	4.035.562	57	284	0,00001	0,00007

Sumber : Bidang Postel Dishubkominfo

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal yang beredar di Provinsi NTB terdiri dari Surat kabar nasional sebanyak 3 media yaitu : Kompas, Tempo dan Media Indonesia, sedanggkan surat kabar lokal 8 media yaitu : Lombok Post, Suara NTB, Radar, Nurani Rakyat, KSB Post, Gaung, Suara Mandiri dan Bima Express sebagaimana terlihat pada tabel2.71.

Tabel 2.71

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal s.d 2013

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	3	3	3	3	4
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	6	6	7	8	9
Total surat kabar nasional dan lokal		9	9	10	11	12

Sumber : Bidang Postel Dishubkominfo

Jumlah penyiaran radio lokal/ TV Lokal terdiri dari radio lokal sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) stasiun radio dan 8 (delapan) siaran Televisi Lokal. sebagaimana terlihat pada tabel2.72.

Tabel 2.72

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2009 s.d. 2013

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penyiaran radio lokal	78	85	90	96	50
2	Jumlah penyiaran radio nasional	6	7	8	8	9
3	JUmlah penyiaran tv lokal	6	7	8	8	27
4	Jumlah penyiaran tv nasional	9	10	10	11	19
Total penyiaran radio/tv lokal		99	111	116	123	105

Sumber : Bidang Postel Dishubkominfo

v. Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Keliling pada tahun 2009 sebanyak 473 unit menjadi sebanyak 1.242 unit pada tahun 2013 atau meningkat 61,92% dari tahun 2009 dengan rata-rata perkembangan 15,48% atau 192 unit pertahun. Sedangkan perpustakaan rumah ibadah pada tahun 2009 sebanyak 108unitmeningkat menjadi 791 unit pada tahun 2013 atau naik86,35% dari tahun 2009 dengan rata-rata perkembangan 21,59% atau 171 unit pertahun;

Jumlah kunjungan ke perpustakaan pada tahun 2013 telah mencapai 935.165 orang dari kondisi awal tahun 2009 sebanyak 547.631 orang. Rata-rata kunjungan tiap tahun sebanyak 744.002 orang. Untuk menjangkau sebanyak mungkin pemustaka dilakukan melalui pelayanan Perpustakaan Keliling dan tercatat telah terlayani 170 pos pada tahun 2012 untuk pelayanan di Pulau Lombok dan Sumbawa sebagaimana terlihat pada tabel 2.73 dan 2.74.

Tabel 2.74

Jumlah Pengunjung perpustakaan

Pengunjung	2010	2011	2012	2013
Mahasiswa	495.368	586.858	642,858	636.489
Pelajar	75.897	90.222	116.523	115.070
Pegawai	48.493	60.482	80.904	97.257
Umum	57.897	71.551	90.976	97.257
TNI/Polri	2.975	2.106	1.897	1.579
Total Kunjungan	**680.630**	**811,219**	**933,158**	**935.165**

Sumber : Badan Arsip dan Perpustakaan Prov. NTB 2013

Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB masih tertinggi meskipun demikian setiap tahun mengalami penurunan seiring peningkatan kontribusi sektor lainnya.Pada tahun 2008 kontribusi sektor ini sebesar 23,56 persen, tahun 2009 sebesar 20,71 persen, tahun 2010 sebesar 20,23 persen, tahun 2011 sebesar 23,26 persen, dan pada tahun 2012 sebesar 25,69 persen. Adapun perkembangan produksi komoditi pertanian unggulan daerah sebagai berikut.

1. Sapi

Pada tahun 2009 jumlah populasi ternak Sapi di Nusa Tenggara Barat mencapai 592.875 ekor dan menjadi 1.002.731 ekor pada 2013, jumlah ini melampaui target populasi yang telah ditetapkan sebesar 102,09%. Perkembangan populasi sapi sebagaimana terlihat pada gambar 2.10.

Tabel 2.73

Jumlah perpustakaan Desa, Rumah Ibadah dan Kunjungan ke perpustakaan

Tahun 2009-2013

Indikator	Kondisi awal 2008	2009		2010		2011		2012		2013	
		target	real	target	Real	target	real	target	real	target	real
Perpustakaan Desa	253 Unit	350	398	500	760	890	890	910	920	1020	1057
Perpustakaan Keliling	40 Lokasi	75	75	100	110	125	140	160	170	180	185
Perpustakaan Rumah Ibadah	82 Unit	100	108	300	308	508	508	708	708	838	791
Kunjungan ke Perpustakaan	545.109 Orang	500.000	547.631	600.000	684.000	810.000	811.219	900.000	933.158	931.401	935.165

Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB

Gambar 2.10.
Populasi Sapi, Produksi Sapi Bibit, Produksi Daging dan Penyerapan Tenaga Kerja

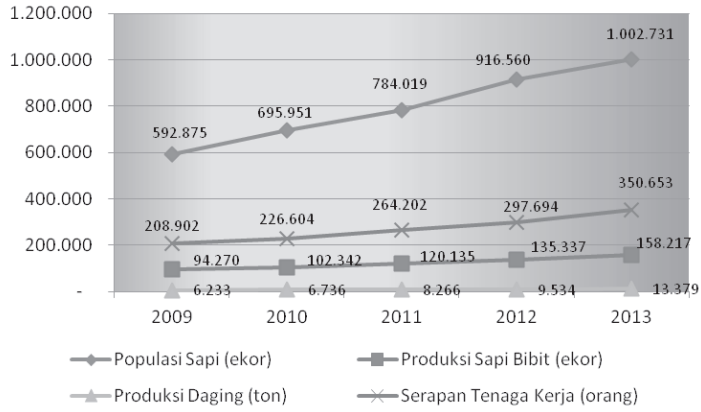

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2013

(2) Padi

Produksi padi di Nusa Tenggara Barat tiap tahunnya terus meningkat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2009 produksi padi Nusa Tenggara Barat mencapai 1.870.775ton dan meningkat menjadi 2.193.698 ton pada tahun 2013. Pada tahun 2009 produktivitas padi di Nusa tenggara Barat sebesar 49,98 persen, meningkat menjadi 50,08 persen pada tahun 2013.

(3) Jagung

Produksi jagung Nusa Tenggara pada tahun 2009 mencapai 308.863ton dan pada tahun 2013 produksi jagung meningkat menjadi 633.773 ton. Produkivitasnya pada tahun 2009 sebesar 37,88 kw/ton, meningkat cukup signifikan pada tahun 2013 menjadi 57,47 persen, sebagaimana terlihat pada gambar 2.11.

Gambar 2.11.
Target dan Produksi Jagung Provinsi NTB
Tahun 2008-2013

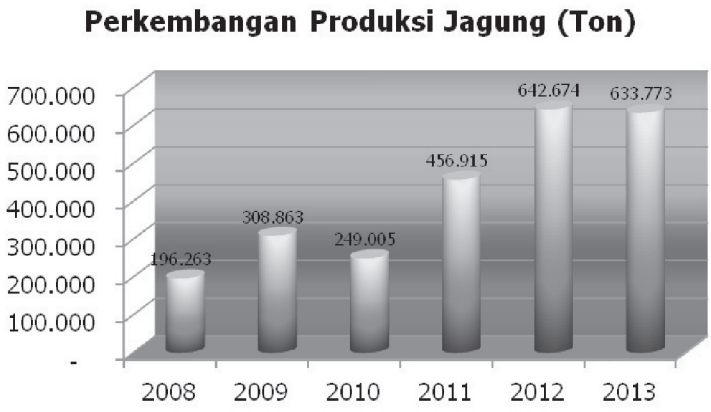

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB

(4) Kedelai

Pada tahun 2009 produksi kedelai mencapai 95.846ton, menurun pada tahun 2012 menjadi 74.156 ton. Hal ini disebabkan karena petani beralih ke tanaman tembakau terutama Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur yang dulunya merupakan penghasil komoditas kedelai. Sementara itu, pada tahun 2013 kembali naik menjadi 91.065 ton. Produktivitas kedelai pada tahun 2009 sebesar 10,90kw/ton turun menjadi 10,75kw/ton pada tahun 2010, meskipun produksi kedelai meningkat pada tahun 2013 tetapi produktivitasnya menurun menjadi 10,48 kw/ton dibandingkan dengan tahun 2012

(5) Kacang Tanah

Pada tahun 2009 produksi kacang tanah sebesar 38.615 ton, meningkat tahun 2013 menjadi 41.889ton. Produktivitas kacang tanah pada tahun 2009 sebesar 13,43 kw/ton, meningkat pada tahun 2013 menjadi 13,61kw/ton.

(6) Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi jalar

Perkembangan produksi tanaman pangan berupa padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009 – 2013, sebagaimana terlihat pada tabel2.75.

Tabel 2.75

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan

Provinsi NTB Selama tahun 2009 -2013

No.	KOMODITAS	URAIAN	CAPAIAN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	5	6	7	8	
1	PADI	Produksi (ton)	1.870.775	1.774.499	2.067.137	2.114.231	2.193.698
		Luas Panen (Ha)	374.279	374.284	418.062	425.448	438.057
		Produktivitas (Ku/Ha)	49,98	47,41	49,45	49,69	50,08
	- PADI SAWAH	*Produksi (ton)*	*1.653.811*	*1.620.666*	*1.898.279*	*1.900.141*	*1.969.252*
		Luas Panen (Ha)	*316.120*	*329.594*	*369.249*	*368.760*	*382.840*
		Produktivitas (Ku/Ha)	*52,32*	*49,17*	*51,41*	*51,53*	*51,44*
	- PADI LADANG	*Produksi (ton)*	*216.964*	*153.833*	*168.858*	*214.090*	*224.446*
		Luas Panen (Ha)	*58.159*	*44.690*	*48.813*	*56.688*	*55.217*
		Produktivitas (Ku/Ha)	*37,31*	*34,42*	*34,59*	*37,77*	*40,65*
2	JAGUNG	Produksi (ton)	308.863	249.005	456.915	642.674	633.773
		Luas Panen (Ha)	81.543	61.593	89.307	117.030	110.273
		Produktivitas (Ku/Ha)	37,88	40,43	51,16	54,92	57,47
3	KEDELAI	Produksi (ton)	95.846	93.122	88.100	74.156	91.065
		Luas Panen (Ha)	87.920	86.649	75.042	62.888	86.882
		Produktivitas (Ku/Ha)	10,90	10,75	11,74	11,79	10,48
4	KACANG TANAH	Produksi (ton)	38.615	33.666	37.964	38.890	41.889
		Luas Panen (Ha)	28.750	25.044	26.319	25.508	30.772
		Produktivitas (Ku/Ha)	13,43	13,44	14,42	15,25	13,61
5	KACANG HIJAU	Produksi (ton)	33.774	50.012	50.702	34.152	22.079
		Luas Panen (Ha)	34.536	45.511	45.351	27.775	19.374
		Produktivitas (Ku/Ha)	9,78	10,99	11,18	12,30	11,40
6	UBI KAYU	Produksi (ton)	85.062	70.606	75.366	79.472	59.085
		Luas Panen (Ha)	6.514	5.352	5.167	5.979	3.866
		Produktivitas (Ku/Ha)	130,58	131,92	145,86	132,92	152,83

No.	KOMODITAS	URAIAN	CAPAIAN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	5	6	7	8	
7	UBI JALAR	Produksi (ton)	11.276	13.134	11.970	13.232	11.335
		Luas Panen (Ha)	969	1.123	954	1.100	866
		Produktivitas (Ku/Ha)	116,37	116,95	125,47	120,29	130,89

Sumber : Dinas Pertanian TPH Prov. NTB

a. Kehutanan

Prov. NTB memiliki hutan seluas 1.071.722,83 ha (53,18% dari luas wilayah NTB) berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu hutan konservasi (173.636,40 ha), hutan lindung (447.272,86 ha) dan hutan produksi (450.813,57 ha), sebagaimana sebagaimana terlihat pada tabel2.76.

Tabel 2.76

Data Luas Hutan Tiap Kabupaten/Kota, Menurut Fungsinya

No.	Kabupa-ten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi (Ha)		Total Luas Kawasan Hutan (Ha)
					Terbatas (HPT)	Tetap (HP)	
1	Kota Mataram	6.130,00	-	-	-	-	-
2	Lombok Barat	105.392,00	6.557,27	25.078,94	10.041,00	304,67	41.981,88
3	Lombok Utara	80.953,00	13.164	11.198,22	6.984,38	5.171,52	36.518,12
4	Lombok Tengah	120.840,00	5.824,29	9.926,14	-	4.583,89	20.334,32
5	Lombok Timur	160.555,00	27.445	31.498,67	-	5.565,00	64.508,67
6	Sumbawa	664.398,00	30.279,65	168.667,68	137.036,14	53.691,88	389.675,35
7	Sumbawa Barat	184.902,00	5.062	66.230,71	35.391,94	18.651,11	125.335,76
8	Dompu	232.455,00	29.704,5	51.482,59	32.586,78	26.119,11	139.892,98
9	Bima	438.940,00	55.599,69	82.866,11	67.190,59	44.740,03	250.396,42
10	Kota Bima	20.750,00	-	323,80	1.497,00	1.258,53	3.079,33
TOTAL		**2.015.315,00**	**173.636,40**	**447.272,86**	**290.727,83**	**160.085,74**	**1.071.722,83**

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Prov. NTB, Tahun 2013

Tabel 2.77

Kinerja kehutanan di Provinsi NTB tahun 2009-2013

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Menurunkan lahan kritis ≤ 507.778,17 Ha	Target Realisasi	492.605 492.175	455.184 ***444.409***	412.889 ***396.179***	355.000 338.289	297.754 281.123
2	Mempertahankan kawasan hutan tetap seluas 1.069.997,78 Ha	Target Realisasi	1.069.997,78 1.069.997,78	1.069.997,78 1.069.997,78	1.069.997,78 1.071.722,83	1.071.722,83 1.071.722,83	1.071.722,83 1.071.722,83
3	Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 3 Unit	Target Realisasi	1 1	3 8	3 8	3 12	3 12
4	Membentuk Model Konservasi Keanekaragaman Hayati Daerah (MKKHD), 3 lokasi	Target Realisasi	0 0	1 1	3 3	3 3	3 4

Sumber : Dinas Kehutanan NTB

Pada tabel2.77 diatas, menunjukkan bahwa kondisi awal ***lahan kritis*** prov. NTB (tahun 2008 seluas 507.778,17 ha). Dari hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh instansi bidang kehutanan (Dinas Kehutanan Prov. NTB, Dinas Kehutanan Kab/Kota dan UPT Kementerian Kehutanan), LSM bidang Kehutanan, Masyarakat, Swasta dan anak-anak sekolah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan luas lahan kritis, sehingga tahun 2013 lahan kritis prov NTB seluas 272.697 ha (data luas lahan kritis berdasarkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan). Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan merehabilitasi hutan dan lahan dengan berbagai kegiatan seperti rehabilitasi sumber mata air, reboisasi pengayaan tanaman, bantuan bibit tanaman penghijauan, bibit bakti sosial, bantuan bibit melalui penguatan kelembagaan Ponpes, bibit di persemaian permanen dan pola konvensional, kebun bibit rakyat, khususnya ditanam pada lahan kritis yang terdapat di seluruh wilayah Kab/Kota se- NTB.

Kondisi awal luas hutan Prov NTB (tahun 2008 seluas 1.069.997,78 ha). Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kawasan

hutan agar tidak keluar dari fungsinya, seperti operasi gabungan, operasi intelijen, sosialisasi, pembinaan dan pertemuan dengan masyarakat sekitar hutan. Namun capaian ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan kehutanan melalui kesadaran dalam mempertahankan kawasan hutan dengan menjaga dan mengelola hutan secara lestari. Sehingga tahun 2013 terjadi perubahan luas kawasan hutan menjadi 1.071.722,83 ha (ada penambahan seluas 1.725,05 yaitu di KH. Gn Tunak (seluas 905,85 ha) dan KH. Danau Taliwang (seluas 819,20 ha).

Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan pengelolaan hutan secara lestari sesuai fungsinya di tingkat tapak, kondisi awal KPH Lintas Kab/Kota (tahun 2008, belum ada KPH yang operasional), Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain : mengadakanpertemuan dengan berbagai stakeholder, pembinaan dengan kelompok tani hutan di sekitar KPH dalam rangka penguatan kelembagaan, sosialisasi dsb. Pada tahun 2013 prov NTB sudah memiliki 12 unit KPH (termasuk KPH Kab/Kota yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kab/Kota). Namun capaian ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat disekitar hutan dalam mendukung pembentukkan Kesatuan Pengelolaan Huan (KPH)

Model Konservasi Keanekaragaman Hayati Daerah (MKKHD), kondisi awal RPJM (tahun 2008, belum ada terbentuk MKKHD). MKKHD merupakan kawasan ekosistem dengan karakteristik khas, yang perlu dilakukan pengawetan karena menyangkut perwakilan tipe ekosistem setempat, dilakukan perlindungan dengan menekan gangguan, rehabilitasi dan restorasi kawasan serta mengembangkan pemanfaatan yang mempertimbangkan kelestarian. Pada tahun 2013 capaian MKKHD sebanyak 4 lokasi yaitu MKKHD Tatar Sepang, MKKHD Tambora, MKKHD Parado dan ODTW Gunung Sasak. Upaya-upaya yang dilakukan untuk membentuk MKKHD yaitu dengan pertemuan-pertemuan kelompok dalam rangka penguatan kelembagaan serta tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan kehutanan.

b. Energi dan Sumber Daya Mineral

Selama kurun waktu 2009-2013, telah terbangun PLTS dan PLT Accu sebanyak 4,105 unit yang tersebar di 32 Desa pada 8 Kabupaten dengan total daya 208.250 watt, 8 unit PLTMH dengan total kapasitas 460 KW di 6 desa pada 6 kabupaten. Pada tahun 2012 NTB memperoleh bantuan dariKementerian ESDM untuk pembangunan PLTS Komunal dan PLT Hybrid dengan total daya 1090 KW di 7 desa pada 5 kabupaten. Khusus untuk medukung program konversi energi terutama untuk keperluan rumah tangga, selama kurun waktu 2011-2012 pemerintah NTB bekerjasama dengan HIVOS Biru telah membangun 1192 unit digester biogas yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan memasak. Berbagai upaya ini telah meningkatkan ratio elektrifikasi dari 39,96% pada tahun 2009 menjadi 53,88% pada tahun 2012.Seluruh upaya tersebut mempengaruhi rasio elektrifikasi sebagaimana terlihat pada tabel2.78.

Tabel 2.78.

Rasio Elektrifikasi NTB Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (RT)	RT Berlistrik Non PLN	RT Berlistrik PLN	Rasio Elektrifikasi (%)
2	3	4	5	*6= (4+5/3)x100*
Kota Mataram	117.103		114.855	98,08
Kab. Lombok Utara	57.305	1.470	34.644	63,02
Kab. Lombok Barat	177.967	1.188	88.552	50,43
Kab. Lombok Tengah	264.956	2.937	151.175	58,17
Kab. Lombok Timur	332.808	2.261	202.729	61,59
Kab. Sumbawa Barat	31.785	867	21.644	70,82
Kab. Sumbawa	111.547	2.096	78.994	72,70
Kab. Dompu	55.464	742	36.544	67,23
Kab. Bima	113.890	1.760	70.147	63,14
Kota Bima	37.848		25.381	67,06
Total	1.300.673	13.321	824.665	64,43

Sumber : Hasil Analisis

c. Pariwisata

Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok termasuk dalam lima besar daerah tujuan wisata di Indonesia. Kunjungan wisatawan pada tahun 2009 sebanyak 619.370 orang meningkat menjadi 1.357.602 orang pada tahun 2013sebagaimana terlihat pada tabel2.79.

Tabel 2.79
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
Tahun 2008 – 2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Kunjungan Wisatawan (orang)	619.370	725.388	886.880	1.163.142	1.357.602
- Wisatawan Mancanegara	232.525	282.161	364.196	471.706	565.944
- Wisatawan Nusantara	386.845	443.227	522.684	691.436	791.658

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, 2013

a. Kelautan dan Perikanan

Program unggulan di sektor kelautan dan perikanan adalah rumput laut. Pengembangan rumput laut tersebar di 10 Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Melalui pengembangan kawasan minapolitan rumput laut berdampak pada peningkatan produksi. Ada peningkatan produksi rumput laut yang sangat signifikan dari tahun ke tahun atau secara rata-rata mencapai 66,97%sebagaimana terlihat pada tabel2.80.

Tabel 2.80
Produksi Rumput Laut pada 10 Kabupaten/Kota di NTB
Tahun 2009-2013

No	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PRODUKSI (TON)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Lombok Barat	21.136,63	22.164,66	50.662,5	57.115,00	66.239,8
2	Lombok Tengah	23.579,08	27.000,00	21.602,7	42.498,20	43.566,5
3	Lombok Timur	60.471,00	93.069,00	152.348,0	114.206,20	148.482.0
4	Sumbawa	27.056,30	39.148,00	132.606,0	142.500,00	315.545.7
5	Dompu	1.100,17	270,00	25.323,2	12.842,50	53.710.08
6	Bima	6.215,80	13.032,26	70.403,2	44.415,20	73.664.50
7	Kota Mataram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Kota Bima	71,00	53,85	3.920,0	123,85	205.37
9	Sumbawa Barat	7.620,00	10.633,00	62.720,0	37.325,95	54.939,0
10	Lombok Utara	0,90	14,00	0,00	4,20	2
	TOTAL NTB	**147.250,88**	**221.508.0**	**370.359.4**	**451.031,10**	**756.355**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2013

b. Perdagangan

Pada tahun 2009, kontribusi sektor perdagangan sebesar 13,10 %, meningkat menjadi 16,76% pada tahun 2012. Volume dan nilai ekspor perdagangan Provinsi NTB tahun 2009 mencapai 648.652,85 ton dengan nilai mencapai 1.256.768.889,40 US Dollar. Salah satu jenis komoditi yang diekspor terbesar adalah konsentrat tembaga yang diproduksi oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Volume ekspor menunjukkan peningkatan sampai Tahun 2010, namun kondisi dalam 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tahun 2013 ada kecenderungan volume dan nilai ekspor perdagangan provinsi NTB mengalami penurunan, hal ini dipicu oleh berkurangnya produksi konsentrat tembaga dari PT. Newmont Nusa Tenggara yang memberikan kontribusi sebesar 99% terhadap volume dan nilai ekspor perdagangan Provinsi Nusa Tenggara. Adapun volume dan nilai ekspor perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Baratsebagaimana terlihat pada tabel2.81.

Tabel 2.81

Volume Dan Nilai Ekspor Perdagangan Provinsi NTB

Tahun 2009-2013

Tahun	Volume (ton)	Nilai (US Dollar)
2009	648.652,850	1.256.768.889,398
2010	776.364,628	1.998.460.764,912
2011	388.125,375	1.136.099.286,824
2012	321.068,317	586.189.585,321
2013	274.454,933	402.568.348,659

c. Industri

Tingkat pertumbuhan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan kondisi fluktuatif, pada tahun 2008 pertumbuhan sebesar 1,5 persen, tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 0,97 persen, tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 1,2 persen dan pada tahun selanjutnya stabil. Kinerja sektorindustri di Provinsi NTB tahun 2009-2013sebagaimana terlihat pada tabel2.82.

Tabel 2.82

Kontribusi industri Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	
1	Konsumsi Rumah tangga perkapita (dalam rupiah)	391.025	423.472	449.901	557.099	554.843
2	Nilai tukar petani	96,45	95,32	96,14	95,36	95,00
3	persentase konsumsi rumah tangga non pangan	40,88	39,72	44,18	43,28	41,93
4	produktivitas total daerah (dalam Rp. juta) ADHB*	44.014.619	70.122.726	68.176.692	69.022.234	73.605.028
5	Pertanian (dalam Rp. juta)	9.117.556	14.939.022	15.691.914	16.407.442	16.937.550
6	pertambangan dan penggalian (termasuk Tambang Bijih Logam)dalam Rp. juta	15.851.362	20.471.115	14.709.393	10.788.742	11.273.516

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	
7	Industri pengo-lahan (dalam Rp. juta)	1.491.345	3.210.934	3.298.049	3.453.862	3.610.835
8	Listrik (dalam Rp. juta)	178.450	34.905	34.737	39.787	37.344
9	Bangunan (dalam Rp. juta)	2.854.410	5.715.145	6.162.993	6.410.695	6.775.105
10	Perdagangan (dalam Rp. juta)	5.411.537	7.136.898	8.143.321	9.166.353	10.000.798
11	pengangkutan dan komunikasi (dalam juta)	3.027.482	5.352.163	5.863.315	6.481.508	7.363.449
12	Keuangan (dalam juta)	1.878.885	1.490.068	1.769.636	2.166.325	2.476.635
13	Jasa(dalam juta)	4.203.592	9.036.216	10.142.610	10.868.264	11.821.928

Sumber : Hasil Analisis
(Tahun 2008-2009 menggunakan Tahun Dasar 2000, Tahun 2010-2013 menggunakan Tahun Dasar 2010)

d. Ketransmigrasian

Selama periode 2009-2012, daerah tujuan transmigrasi asal provinsi NTB sebanyak 6 Provinsi yaitu : Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Jumlah Transmigrasi Keluar Provinsi pada tahun 2009, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 79 KK, sebagaimana terlihat pada tabel 2.83.

Tabel 2.83

Perkembangan Jumlah Transmigrasi Keluar Provinsi menurut Daerah Tujuan,Asal Transmigran Periode Tahun 2009-2013

NO	DAERAH TUJUAN	2009		2010		2011		2012		2013	
		DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)
1	Kalimantan Selatan	KLU	10	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kalimantan Barat	-	-	Mataram	5	Mataram	10	KLU	14	-	-
		-	-	Lobar	3	Lobar	5	-	-	-	-
		-	-	Loteng	5	Loteng	5	-	-	-	-
		-	-	Lotim	5	KLU	5	-	-	-	-
		-	-	KLU	7	-	-	-	-	-	-
3	Maluku Utara	Mataram	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lobar	9	-	-	-	-	-	-	-	-
		Loteng	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lotim	6	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gorontalo	Mataram	1	Loteng	18	-	-	-	-	-	-
		Lobar	4	Lotim	7	-	-	-	-	-	-
5	Sulawesi Tenggara	-	-	Mataram	5	Mataram	3		-	-	-
		-	-	Lobar	5	Lobar	10	-	-	-	-
		-	-	Loteng	5	Lotim	37	-	-	-	-
		-	-	Lotim	5	-	-	-	-	-	-
		-	-	KLU	5	-	-	-	-	-	-
6	Sulawesi Barat	-	-	-	-	Mataram	2	-	-	-	-
		-	-	-	-	Lobar	5	-	-	-	-
		-	-	-	-	KLU	18	-	-	-	-
		JUMLAH	**40**	**JUMLAH**	**75**	**JUMLAH**	**100**	**JUMLAH**	**14**	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2013

Jumlah transmigrasi dalam Provinsi pada tahun 2009 sebanyak 100 KK dan pada tahun 2012 sebanyak 75 KK, sebagaimana terlihat pada tabel 2.84.

Tabel 2.84

Perkembangan Jumlah Transmigrasi Dalam Provinsi menurut Kabupaten Tujuan,Kabupaten Asal Transmigran Tahun 2009-2013

NO	DAERAH TUJUAN	2009		2010		2011		2012		2013	
		DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)	DAERAH ASAL	JML (KK)
1	Kabupaten Bima	Mataram	11	-	-	-	-	Mataram	15	Mataram	15
		Lobar	12	-	-	-	-	Lobar	15	Lobar	15
		Loteng	15	-	-	-	-	Loteng	15	Loteng	15
		Lotim	12	-	-	-	-	Lotim	15	Lotim	15
		-	-	-	-	-	-	KLU	15	KLU	15
2	Kabupaten Sumbawa Barat	Mataram	11	Mataram	9	-	-	-	-	Mataram	4
		Lobar	12	Lobar	9	-	-	-	-	Lobar	4
		Loteng	15	Loteng	14	-	-	-	-	Loteng	4
		Lotim	12	Lotim	9	-	-	-	-	Lotim	4
		-	-	KLU	9	-	-	-	-	KLU	4
3	Kabupaten Dompu	-	-	Mataram	9	-	-	-	-	-	-
		-	-	Lobar	9	-	-	-	-	-	-
		-	-	Loteng	14	-	-	-	-	-	-
		-	-	Lotim	9	-	-	-	-	-	-
		-	-	KLU	9	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	**100**	**JUMLAH**	**100**	**JUMLAH**	**0**	**JUMLAH**	**75**	**JUMLAH**	**95**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2013

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB Provinsi NTB menurut pengeluaran yang mencapai 77,29% pada tahun 2013. Sebagian besar produk domestik dan produksi impor digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, terjadi pula peningkatan

pengeluaran masyarakat. Tahun 2013 pengeluaran perkapita penduduk NTB menurun sedikit dari tahun 2012, yaitu dari Rp557.099 perkapita perbulan menjadi Rp 555.843 perkapita perbulan (0,22 persen), artinya setiap bulan, penduduk Provinsi NTB menghabiskan dana sebesar Rp.555.834 untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun non makanan seperti sandang, perumahan dan pendidikan.

b. Nilai tukar petani

Ditinjau dari aspek daya beli petani yang dicerminkan oleh Nilai Tukar Petani atau kemampuan dalam tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.Nilai tukar petani (NTP) di Provinsi NTB pada tahun 2008 mencapai 98,83 persen, keadaan ini mengalamipenurunan menjadi 95,36 persenpada tahun 2012,bahkan pada tahun 2013 NTP Provinsi NTBkembali menurun menjadi 95,00 persen.Adanya penurunan disebabkan karena tingkat peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan tingkat peningkatan indeks harga yang dibayar petani.

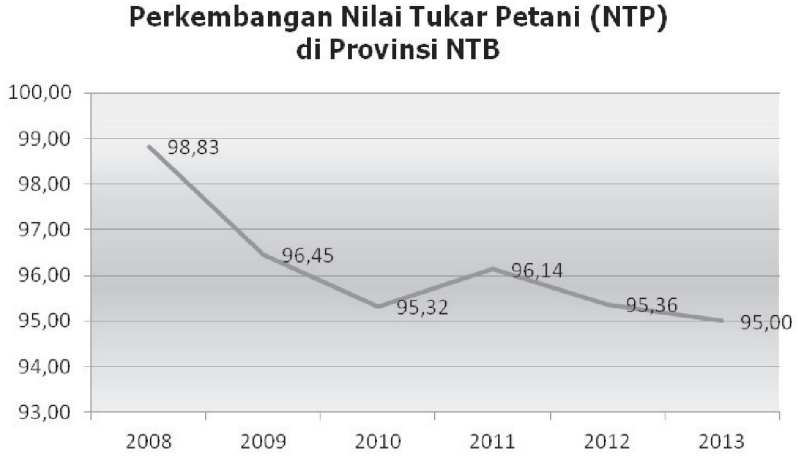

Dari Gambar terlihat bahwa NTP di Provinsi NTB selama tahun 2008-2013 selalu di bawah 100, dengan kata lain menggambarkan bahwa indeks penerimaan petani lebih rendah dibanding indeks pengeluaran.

c. Fasilitas listrik

Ketersediaan Listrik di Provinsi NTB pada tahun 2013 sebesar 378,65 mega watt dengan daya terpasang 499,89 mega watt meningkat dari tahun 2010 sebesar 182,29 mega watt dengan daya terpasang 172,14 mega watt.

2.4.2. Fokus iklim berinvestasi

a. Keamanan dan ketertiban

Dalam rangka menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif, faktor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi NTB telah diperkuat oleh aparat keamanan yang terdiri dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat Kepolisian (POLRI), dan dibantu oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat PolPP). Gangguan keamanan dan ketertiban di provinsi Nusa Tenggara Barat umumnya disebabkan oleh tindakan kriminalitas yang mencapai 7.821 kasus pada tahun 2008, dan meningkat menjadi 10.386 kasus pada tahun 2013. Peningkatan kasus kriminalitas sebagian besar merupakan kasus pencurian

Tabel 2.85

Rekapitulasi Kriminalitas di Provinsi NTB Tahun 2009-2013

Aparat	2009	2010	2011	2012	2013
Crime Total	9.415	11.393	11.454	11.186	10.386
Crime Cleardel	4.823	5.551	6.082	6.215	5.921
Clearence Rate	51,22	43,80	53,10	55,56	57,01
Crime Rate	215	223	199	238,8	231
Crime Clock	$0^0$6'0"	$0^0$48'0"	1°30'25"	$0^0$46'99"	0°84'50"

Sumber: Kepolisian Daerah NTB

b. Angka Kriminalitas

Total kejahatan 9.415 kasus pada tahun 2009 menjadi sebanyak 11.186 kasus tahun 2012, namun dapat ditekan menjadi 10.386 kasus pada tahun 2013. Pada tahun 2009 kejahatan yang timbul setiap $0^0$06'0" menjadi 0°46'99" pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 0°84'50". Kasus kejahatan yang dapat diselesaikan mengalami peningkatan diakhir

tahun 2012 menjadi 6.215 kasus dari kondisi 2009 sebanyak 4.823 kasus, sementara pada tahun 2013 sebanyak 5.921 kasussebagaimana terlihat pada tabel 2.86.

Tabel 2.86
Rekapitulasi Kriminalitas di Provinsi NTB Tahun 2009-2013

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
Crime Total	9.415	11.393	11.454	11.186	10.386
Crime Cleardel	4.823	5.551	6.082	6.215	5.921
Clearence Rate	51,22	43,80	53,10	55,56	57,01
Crime Rate	215	223	199	238,8	231
Crime Clock	$0^0$6'0"	$0^0$48'0"	1°30'25"	$0^0$46'99"	0°84'50"

Sumber: Kepolisian Daerah NTB

Jenis kejahatan didominasi oleh kasus pencurian terutama pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan. Kasus yang mengalami penurunan sejak tahun 2009-2013 adalah kasus penganiayaan berat, perkosaan, maupun illegal logging, sebagaimana terlihat pada tabel 2.87.

Tabel 2.87
Rekapitulasi Kriminalitas menurut Kasus Tahun 2009-2013

No	KASUS	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pencurian dengan Pemberatan	566	565	1.122	974	957
2	Pencurian dengan Kekerasan	76	198	394	422	314
3	Pencurian Kendaraan Bermotor	320	283	1.840	2.692	2.548
4	Penganiayaan Berat	118	187	98	97	86
5	Judi	72	117	176	189	157
6	Narkotika	10	10	158	163	174
7	Pembunuhan	40	27	7	24	21
8	Kebakaran	13	12	63	46	46
9	Perkosaan	46	93	85	53	40
10	Uang Palsu	9	-	8	13	4
11	*Illegal Logging*	26	152	53	45	31
12	Senpi/handak	11	20	19	5	20
JUMLAH		**3.244**	**4.054**	**4.023**	**4.723**	**4.398**

Sumber: Kepolisian Daerah NTB

Tabel.2.87

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
1	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1,1	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**							
1	Pertumbuhan PDRB	7,52	4,22	6,04	5,52	5,4	> 6%	Belum tercapai
2	Laju Inflasi	3,34	10,08	6,55	3,99	9,51	< 4%	Belum tercapai
3	PDRB Per Kapita (Juta)	11,38	11,38	11,9	12,38	12,87	12,87	Sesuai
4	Paritas Daya Beli (Rupiah)	637.980	639.890	642,80	645.720	648.660		Belum tercapai
5	Nilai PDRB Non Tambang	48.342.782	51.405.721	54.511.958	57.521.372	60.629.190	60.629.190	Sesuai
6	Rasio Indeks Gini	0,350	0,400	0,356	0,363	0,358	0	Belum tercapai
7	Indeks Williamson	2,22	1,65	1,50	1,00	0,98		Belum tercapai
8	Indeks Pembangunan Manusia	64,66	65,2	66,23	66,89	67,73		Belum tercapai
9	Angka Kemiskinan	22,78	21,55	19,67	18,63	17,25		Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
1,2	**Kesejahteraan Sosial**							
1.2.1	Pendidikan							
1	Angka Melek Huruf	83,8	81,05	83,24	83,68	85,19	100	Belum Tercapai
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,73	6,77	6,97	7,19	7,2	15	Belum Tercapai
1.2.2	Kesehatan							
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	61,8	62,11	62,41	62,73	63,21	85	Belum Tercapai
1.2.3	Sosial							
1	Anak Terlantar	200.630	201.699	205.116	205.116	120.506		
2	Anak Jalanan	10.181	10.005	3.327	3.327	3.806		
3	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	8.938	6.432	9.091	2.758	3.442		
1.2.4	Ketenagakerjaan							
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,12	5,29	5,33	5,26	5,38		Belum Tercapai
1,3	**Seni Budaya dan Olahraga**							
1	Rasio Lembaga Seni Budaya per 10.000 penduduk	0,5	0,57	0,64	0,71	0,77		
2	Rasio klub olahraga	3,38	3,38	3,39	3,4	3,38		
3	Rasio gedung & Lapangan olahraga	0,3	0,32	0,33	0,32	0,36		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
	Standar Pelayanan Minimal							
1	Sosial							
1,1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:							
1	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	0,67	0,67	0,91	9,06	0,31	80%	Belum Tercapai
2	Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	100	100	100	100	100	60%	Melampaui
1,2	Penyediaan sarana dan prasarana social :							
1	Presentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100	100	100	100	100	80%	Melampaui
2	Presentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	32,41	32,41	39,57	39,7	28,09	60%	Belum Tercapai
1,3	Penanggulangan korban Bencana:							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
1	Presentase (%) kabupaten/ kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	100	100	100	100	100	80%	Melampaui
2	Presentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	100	100	100	100	100	80%	Melampaui
1,4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:							
1	Presentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	100	100	100	100	100	40%	Melampaui
2	Lingkungan Hidup							
2,1	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	100	100	100	85,71	100	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
2,2	Persentase Jumlah Kabupaten/ Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya	-	-	-	100	50	100	Belum Tercapai
2,3	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	Sesuai
3	Perumahan Rakyat							
3,1	a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	69,30%	69,30%	69,03%	-	69,03%	100%	Belum Tercapai
	b. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	4,14%	4,14%	6,98%	-		70%	Belum Tercapai
3,2	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	38,72%	38,72%	38,40%	37,30%	37,30%	100%	Belum Tercapai
4	Perempuan dan Anak							
4,1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu			24,31	26,08	26,08	100%	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
	- Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/ laporan masyarakat			24,31	26,08	26,08		Belum Tercapai
4,2	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS						100%	Belum Tercapai
	a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)			24,31	16,37	16,37		
	b. Cakupan RSU Vertikal/ RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	-	-	-	-		
	c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas	-	-	-	-	-		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
	d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit	-	-	-	-	-		
4,3	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	-	-	2,69	2,62	2,62	75%	Belum Tercapai
	- Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	-	-	-	-	-		
	Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	-	-	-	-	-	75%	Belum Tercapai
	- Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	-	-	-	-	-		
4,4	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	-	-	52,34	24,98	24,98	80%	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
	a. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian	-	-	-	-	-		
	b. Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta	-	-	-	-	-		
	c. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA	-	-	-	-	-		
	d. Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender	-	-	-	-	-		
	e. Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-	-	-		
	f. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-	-	-		
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	-	-	52,34	24,98	24,98	50%	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
	- Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-	-	-		
4,5	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	-	-	-	50%	Belum Tercapai
	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	1,22	3,54	3,54	100%	Belum Tercapai
	- Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	-	-	-	-	-		
5	Ketenagakerjaan							
5,1	a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	-	57,63	40,66	81	75%	Melampaui
	b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	-	-	86,76	72,78	128	60%	Melampaui
	c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	-	-	59,52	75	29	60%	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
5,2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	-	91,36	93,75	102	70%	Melampaui
5,3	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-	-	100	29,55	94	50%	Melampaui
5,4	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	-	-	100	86,29	82	50%	Melampaui
5,5	a. Besaran pemeriksaan perusahaan	-	-	98,28	94,01	27	45%	Belum Tercapai
	b. Besaran pengujian peralatan di perusahaan	-	-	99,59	102,85	50	50%	Sesuai
6	Ketahanan Pangan							
6,1	Penguatan Cadangan Pangan	6,76	6,76	14,51	83,52	83,52	60%	Melampaui
6,2	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	-	-	-	92,69	97,31	100%	Belum Tercapai
6,3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-	-	-	61,11	100,00	80%	Melampaui
6,4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	31,25	31,25	39,06	100	100	60%	Melampaui
7	Kesenian							
7,1	a. Cakupan Kajian Seni	107	107	120	107	107	50%	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
	b. Cakupan Kajian Seni	286%	286%	286%	286%	286%	30%	Melampaui
	c. Cakupan Gelar Seni	133%	133%	133%	133%	133%	75%	Melampaui
	d. Misi Kesenian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7,2	a. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian	300%	300%	300%	300%	300%	25%	Melampaui
	b. Cakupan Tempat	0	0	0	0	0	100%	Belum Tercapai
	c. Cakupan Organisasi	98,04	98,04	196,08	294,12	294,12		Melampaui
8	Perhubungan							
8,1	Angkutan Jalan							
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	80	80	-	-	-	100%	Belum Tercapai
2	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100	100	100	100	100	100%	Sesuai
3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	-	-	16	30	40	60%	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
4	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	20	20	20	20	40	100%	Belum Tercapai
5	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.	-	-	12	40	50	100%	Belum Tercapai
8,2	Angkutan Sungai dan Danau.	100	100	100	100	100	75%	Melampaui
1	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.	25	25	25	25	25	60%	Belum Tercapai
2	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari	86,67	86,67	82,35	80	80	100%	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
3	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100	100	100	100	100	100%	Sesuai
4	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.	100	100	100	100	100	75%	Melampaui
8,3	Angkutan Penyeberangan	30	30	30	30		75%	Belum Tercapai
1	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	86,67	86,67	82,35	80	100	100%	Sesuai
2	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan	100	100	100	100	100	100%	Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
3	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi.	-	-	-	-	-	100%	
4	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT.	80	80	80	80	80	100%	Belum Tercapai
8,4	Angkutan Laut	-	-	-	-		100%	
1	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	100	100	100	100	100	100%	Sesuai
2	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	80	80	80	80	80	100%	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
3	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	-	-	-	-	-	100%	Belum Tercapai
4	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.	80	80	-	-	-	60%	Belum Tercapai
9	Penanaman Modal							
9,1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun :	Sektor	Sektor	Sektor	Sektor		1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	
	- Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)	8	8	0	8	8		Melampaui
	- Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha)	8	8	0	8	8		Melampaui
	- Ketersediaan Lahan (Ha)	8	8	0	8	8		Melampaui
	- Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya	0	0	0	0	0		Melampaui
	- Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)	8	8	0	8	8		Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
	- Potensi Pasar	8	8	0	8	8		Melampaui
	- Perkiraan Investasi (Perkiraan nilai (Rp) investasinya)	1	1	0	3	3		Melampaui
9,2	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka kerjasama kemitraan:							
	- Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	2 kali	2 kali	3 kali	4 kali	4 kali	1 (satu) kali/ tahun	Melampaui
	- Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan di Kab/Kota	2	2	3	4	4	1 (satu) kali/ tahun	Melampaui
	- Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0		
9,3	- Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal tingkat Kabupaten.	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 (satu) kali/ tahun	Sesuai
	- Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Kabupaten (Jenis kegiatan Promosi)	0	0	0	0	0	1 (satu) kali/ tahun	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
9,4	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal : Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM / 5 X 100%	20	20	40	100	100	100%	Sesuai
1	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM.	1	1	2	5	5		
	- Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri	0	0	0	1	1		
	- Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	1	1	1	1	1		
	- Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri	0	0	1	0	0		
	- Perpanjangan RPTKA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota	0	0	0	0	0		
	- Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota	0	0	0	0	0		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
2	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%	0	0	0	0	0	100%	
3	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%	0	0	0	0	0		
	- Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri							
	- Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri							
	- Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri							
	- Jumlah TDP							
	- Jumlah SIUP							
	- Jumlah Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
9,5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun.	3 kali	3 kali	4 kali	4 kali	4 kali	1 (satu) kali/ tahun	Melampaui
1	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100%	25	25	25	50	50	100%	Belum Tercapai
2	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE	1	1	1	2	2		
	- Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.	0	0	0	1	1		
	- Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	0	0	0	0	0		
	- Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.	0	0	0	0	0		
	- Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).	1	1	1	1	1		
9,7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	1 (satu) kali/ tahun	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
2	**PELAYANAN UMUM**							
2,1	**Pelayanan Wajib**							
2.1.1	**Pendidikan**							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	-TK/RA	35,68	36,98	39,32	51,24	50,06		Melampaui
	-SD/MI/Paket A	117,1	111,02	114,79	113,62	113,95		Melampaui
	-SMP/MTs/Paket B	103,74	104,28	104,81	104,85	106,76		Melampaui
	-SMA/MA/SMK	69,28	74,43	80,54	82,69	84,4		Melampaui
2	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	-SD/MI/Paket A	98,68	98,92	99,19	99,95	99,96		Melampaui
	-SMP/MTs/Paket B	90,53	92,87	94,83	95	96,61		Melampaui
	-SMA/MA/SMK	57,83	62,87	68,59	72,57	74,73		Melampaui
2.1.2	**Kesehatan**							
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	61,8	62,11	62,41	62,73	63,21	85	Belum Tercapai
2	Angka Kematian bayi (Per 1000 KH)	68,96	66,34	62,26	55,5	54,08	0	Belum Tercapai
3	Angka Kematian ibu (Per 100,000 KH)	305,5	294,3	280,5	242,9	240,9	0	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
4	Penanganan HIV dan AIDS (%)	100	100	100	100	100	100	sesuai
5	Prevalensi Gizi Buruk (%)	5,49	4,77	4,57	3,52	3,75	0	Belum Tercapai
6	Cakupan Jamban Keluarga (%)	61,53	64,19	74,4	69,83	72,35	100	Belum Tercapai
7	Rasio Posyandu Per satuan Balita	81	90	89	82	78		Belum Tercapai
8	Rasio Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Terhadap jumlah Penduduk	8.220	8.030	7.351	7.157	6.936		
9	Jumlah Tenaga Kesehatan	8.257	9.523	9.881	8.800	10.536		
2.1.3	**Pekerjaan Umum**							
1	Kondisi Kemantapan Jalan	45,4	46,32	53,15	66,02	67,56	100	Belum Tercapai
2	Bendung	345	370	379	379	379		Belum Tercapai
3	Jaringan Irigasi Lahan Kering	3.904,5	90.000	91.945	92.260	6.394		Belum Tercapai
4	Cakupan Air Bersih							
	Perkotaan	75,56	76,85	78,3	79,35	80,23	100	Belum Tercapai
	Perdesaan	66,23	69	70,25	71,42	72,15	100	Belum Tercapai
2.1.4	**Perumahan**							
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		69,30%	69,03%			100	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau		4,14%	6,98%			70	Belum Tercapai
3	Jumlah rumah berakses sanitasi	519,614	536,294	552,587	573,73	661,884		
2.1.5	**Perhubungan**							
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi			80	-	-	100%	Belum Tercapai
2	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).		20	20	20	40	100%	Belum Tercapai
3	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan		86,67	82,35	80	100	100%	Belum Tercapai
2.1.6	**Lingkungan hidup**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
1	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	100	100	100	85,71	100	Belum Tercapai
2	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	sesuai
3	Ruang Terbuka Hijau >30 %	1	2	8	8	10		
4	Sumber Mata Air (titik)	214	284	305	321	336		
2.1.7	**Kependudukan dan Catatan Sipil**							
1	Perekaman E-KTP				84,11	89,14	100	Belum Tercapai
2.1.8	**Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**							
1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu				24,31	26,08	100%	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
2	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			-	1,22	3,54	100%	Belum Tercapai
3								
2.1.9	**Keluarga berencana dan keluarga sejahtera**							
1	jumlah akseptor KB				1.019.730	1.066.823		
2	Persentase peserta KB aktif				61,09	75,05		
2.1.10	**Sosial**							
1	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.		0,67	0,91	9,06	0,31	80%	Belum Tercapai
2	Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.		100	100	100	100	60%	Melampaui
2.1.11	**Ketenagakerjaan**							
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		-	57,63	40,66	81	75%	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		-	91,36	93,75	102	70%	Melampaui
3	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek		-	100	86,29	82	50%	Melampaui
4	TPAK (%)	65,92	66,02	66,12	66,02	65,44		
5	Tingkat Pengangguran (%)	5,19	5,26	5,33	5,26	5,38		
2.1.12	**Koperasi dan UKM**							
1	Jumlah Koperasi aktif	2,514	2,848	3,003	3,225	2,627		
2.1.13	**Penanaman modal**							
1	Pertumbuhan PMDN (%)	-68,82	142,11	-90,46	0,13	289,71		
2	Pertumbuhan PMA (%)	381,11	24,43	44,99	-23,54	223,21		
2.1.14	**Kebudayaan**							
1	Rasio Lembaga Seni Budaya per 10.000 penduduk	0,5	0,57	0,64	0,71	0,77		
2.1.15	**Pemuda dan Olahraga**							
1	Rasio klub olahraga	3,38	3,38	3,39	3,40	3,38		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
2	Rasio gedung & Lapangan olahraga	0,30	0,32	0,33	0,32	0,36		
2.1.16	**Kesbangpoldagri**							
1	Konflik Vertikal	107	96	61	43	11		
2	Konflik Horizontal	82	65	36	50	43		
3	Parstisipasi masyarakat dalam Politik	75,70	73,42	73,42	73,42	70,47		
2.1.17	**Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian**							
1	Realisasi Legislasi Daerah:							
	Peraturan Daerah	10	10	14	9	11		
	Peraturan Gubernur	44	36	47	54	38		
	Keputusan Gubernur	629	722	683	709	787		
2.1.18	**Ketahanan pangan**							
1	Penguatan Cadangan Pangan		6,76	14,51	83,52	83,52	60%	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
2	Penanganan Daerah Rawan Pangan		31,25	39,06	100	100	60%	Melampaui
3	Pola Pangan Harapan	73,40	74,08	76,70	78,10	78,70		
2.1.19	**Pemberdayaan masyarakat dan desa**							
1	Pemanfaatan TTG	89	128	134	166	168		
2	Temuan TTG	110	156	173	183	186		
2.1.20	**Komunikasi dan informatika**							
1	Jumlah jaringan telpon genggam (operator)	12	12	12	12	12		
2	Jumlah jaringan telepon stationer (penyelenggara)	10	10	10	10	10		
3	Surat kabar nasional dan lokal	9	9	10	11	12		
4	Penyiaran radio/tv lokal	99	111	116	123	105		
2.1.21	**Perpustakaan**							
1	Perpustakaan Desa	398	760	890	920	1057		
2	Perpustakaan Keliling	75	110	140	170	185		
3	Perpustakaan Rumah Ibadah	108	308	508	708	791		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
4	Kunjungan ke Perpustakaan	547,631	684000	811,219	933,158	935,165		
2,2	**PELAYANAN PILIHAN**							
2.2.1	**Pertanian**							
1	Produktivitas Padi (Ku/Ha)	49,98	47,41	49,45	49,69	50,08		
2	Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	37,88	40,43	51,16	54,92	57,47		
3	Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	10,90	10,75	11,74	11,79	10,48		
4	Produktivitas Kacang Tanah (Ku/Ha)	13,43	13,44	14,42	15,25	13,61		
5	Produktivitas Kacang Hijau (Ku/Ha)	9,78	10,99	11,18	12,30	11,40		
6	Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha)	130,58	131,92	145,86	132,92	152,83		
7	Produktivitas Ubi Jalar (Ku/Ha)	116,37	116,95	125,47	120,29	130,89		
8	Jumlah Populasi ternak	592.875	695.951	784.019	916.960	1.002.731	1.000.000	Melampaui
9	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	20,71	21,30	23,02	23,77	23,01		
2.2.2	**Kehutanan**							
1	lahan kritis	492,175	***444,409***	***396,179***	338,289	281,123		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
2.2.3	**ESDM**							
1	ratio elektrifikasi	39,96			53,88	64,43	100	Belum Tercapai
2.2.4	**Pariwisata**							
1	Angka Kunjungan Wisatawan (orang)	619,37	725,388	886,88	1.163.142	1.357.602		
	- Wisatawan Mancanegara	232,525	282,161	364,196	471,706	565,944		
	- Wisatawan Nusantara	386,845	443,227	522,684	691,436	791,658		
2.2.5	**Kelautan dan Perikanan**							
1	Produksi Rumput Laut (Ton)	147.250,88	221.508.0	370.359.4	451.031,10	756,355		
2.2.6	**Perdagangan**							
1	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	12,29	10,18	11,94	13,28	13,59		
2.2.7	**Perindustrian**							
1	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	3,39	4,58	4,84	5,00	4,91		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
3	**DAYA SAING DAERAH**							
3,1	**Kemampuan Ekonomi**							
1	Konsumsi Rumah tangga perkapita (dalam rupiah)	391,025	423,472	449,901	557,099	554,843		
2	Nilai tukar petani	96,45	95,32	96,14	95,36	95,00	100	Belum Tercapai
3	persentase konsumsi rumah tangga non pangan	40,88	39,72	44,18	43,28	41,93	> 50%	Belum Tercapai
4	produktivitas total daerah (dalam Rp. juta) ADHB*	44.014.619	70.122.726	68.176.692	69.022.234	73.605.028		
5	Kriminalitas	9,415	11,393	11,454	11,186	10,386		
3,2	**Fasilitas Wilayah/Infrastuktur**							
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	80	80	-	-		100%	Belum Tercapai
2	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100	100	100	100	100	100%	Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	-	-	16	30	40	60%	Belum Tercapai
4	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	20	20	20	20	40	100%	Belum Tercapai
5	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.	-	-	12	40	50	100%	Belum Tercapai
6	Angkutan Sungai dan Danau.	100	100	100	100	100	75%	Melampaui
7	Angkutan Penyeberangan	30	30	30	30		75%	Belum Tercapai
8	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	100	100	100	100	100	100%	Sesuai

BAB III

GAMBAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3. Kerangka Pendanaan

RAPAT KO
PERCEPATAN PENYE
TAHUN

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kebijakan umum pendapatan daerah pada tahun 2009-2013, adalah:

1. Mendorong meningkatnya pendapatan daerah dari komponen-komponen penerimaan PAD yang masih memiliki peluang dan potensi intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
2. Mengupayakan tercapainya laju pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10% per tahun dari pencapaian tahun sebelumnya;
3. Dana Perimbangan diharapkan minimal sama besarnya dari realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan asumsi masih terjadi *fiscalgap* antara pendapatan-belanja daerah, dengan mengupayakan ketepatan dan kelancaran dalam realisasinya;

4. Optimalisasi dana APBN dan BLN untuk menunjang pembangunan daerah;

5. Optimalisasi aset daerah untuk peningkatan PAD.

Kebijakan pendapatan tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB Tahun 2009-2013, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan PAD, antara lain:

a. Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dan pada tahun 2011 dasar hukum pungutan Pendapatan Asli Daerah telah dirubah dengan diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan SKPD pengelola pendapatan daerah setiap triwulan.

c. Melakukan penyempurnaan sistem aplikasi Pajak Daerah dari manual ke sistem online.

d. Peningkatan penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah

e. Melakukan penyempurnaan data base obyek pajak dan retribusi daerah .

f. Melaksanakan operasi gabungan untuk menjaring kendaraan luar daerah yang telah berdomisili di wilayah NTB minimal 3 bulan berturut-turut dan kendaraan yang menunggak pajak bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.

g. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah.

h. Melakukan sosialisasi pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak/ masyarakat bekerjasama dengan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten/

Kota disamping itu melakukan sosialisasi melalui media elektronik dan media lainnya.

i. Pada tahun 2010, telah dilaksanakan pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan samsat keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak/masyarakat. Tahun 2011 telah dianggarkan penambahan kendaraan samsat keliling sebanyak 4 unit. Tahun 2012 penambahan kendaraan samsat keliling sebanyak 1 unit, sehingga sampai dengan tahun 2012 jumlah kendaraan samsat keliling berjumlah 8 unit.

j. Untuk mempercepat proses pembayaran PKB, secara bertahap telah dibentuk pelayanan Drive Thru :

- Tahun 2011 telah dibuka pelayanan Samsat Drive Thru berlokasi di Kota Mataram dan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Pada tahun 2012 telah dilakukan renovasi bangunan eks jembatan timbang di Saliperate Sumbawa yang dimanfaatkan sebagai tambahan sarana pelayanan Samsat Drive Thru, dan penambahan Drive Thru juga dilakukan pada Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Penambahan Samsat Drive Thru pada Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dan di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar dimana dana pembangunan gedungnya berasal dari bantuan PT. Bank NTB sebagai mitra kerja Dinas Pendapatan pada Kantor Samsat. Sampai dengan tahun 2012 jumlah Pelayanan Drive Thru telah berjumlah 6 titik layanan. Kedepannya telah direncanakan untuk menambah tempat pelayanan pada Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Kecamatan Kediri dengan memanfaatkan jembatan timbang Kediri dan pada daerah Sepapan Kecamatan Jerowaru untuk Samsat Pembantu dan di Paok Motong di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.

Dengan kebijakan tersebut diperoleh Pendapatan Daerah selama 5 tahun sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2009 – 2013

No.	Uraian	2009		2010		2011		2012		2013		Rata-Rata Pertum buhan
		Jml Penerimaan	Pertum buhan	Jml Penerimaan	Pertum-buhan	Jml Penerimaan	Pertum buhan	Jml Penerimaan	Pertum buhan	Jml Penerimaan	Pertum buhan	
1	PENDAPATAN											
1.1	**PAD**	**474.455.062.324,08**	**9,27**	**515.340.956.845,65**	**8,62**	**741.291.174.995,39**	**43,84**	**745.979.866.410,00**	**0,63**	**847.866.511.218,40**	**13,66**	15.48
1.1.1	Pajak Daerah	369.172.468.753,00	5,91	391.690.341.968,00	6,10	506.909.925.653,00	29,42	580.615.755.680,00	14,54	97.834.322.423,00	20,19	15.23
	a. PKB	107.767.730.515,00	21,53	121.518.483.332,00	12,76	142.684.620.853,00	17,42	165.096.438.321,00	15,71	196.252.904.352,00	18,87	17.26
	b. BBNKB	150.273.380.410,00	24,68	160.875.148.303,00	7,05	234.620.995.303,00	45,84	260.506.253.755,00	11,03	311.260.827.111,00	19,48	21.62
	c. PBBKB	109.960.739.667,00	(20,49)	108.067.238.072,00	(1,72)	129.411.168.657,00	19,75	154.797.146.194,00	19,62	190.055.092.858,00	22,78	7.99
	d. Pajak Air Permukaan	62.666.280,00	10,22	69.911.790,00	11,56	193.140.840,00	176,26	215.917.410,00	11,79	265.498.102,00	22,96	46.56
	e. Pajak Air Bawah Tanah	1.107.951.881,00	10,71	1.159.560.471,00	4,66		(100,00)		-	-		-16.93
1.1.2	Retribusi Daerah	50.047.842.702,10	20,29	54.900.839.090,63	9,70	59.564.965.781,72	8,50	10.129.107.556,00	(82,99)	12.929.180.980,14	27,64	-3.37
1.1.3	Laba Perusahaan Darah	25.192.762.479,00	46,80	40.937.454.515,00	62,50	135.639.075.065,00	231,33	53.821.735.694,00	(60,32)	52.715.118.386,00	-2,06	55.65
1.1.4	Lain-lain Penerimaan	30.041.988.389,98	11,86	27.812.321.272,02	(7,42)	39.177.208.495,67	40,86	101.413.267.480,00	158,86	94.675.473.198,32	-6,64	39.50
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**701.175.944.010,34**	**11,83**	**756.256.439.498,00**	**7,86**	**855.310.098.727,00**	**13,10**	**1.054.470.183.114,00**	**23,29**	**1.075.004.985.595,00**	**1,95**	11.61
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bkn Pajak	98.719.980.010,34	25,77	158.426.609.498,00	60,48	162.674.615.727,00	2,68	191.526.128.114,00	45,48	158,244,269,595.00	-17,38	23.41
1.2.2	DAU	554.431.964.000	8,44	573.065.430.000,00	3,36	646.671.083.000,00	12,84	809.617.715.000,00	25,20	859.353.026.000,00	6,14	11.20
1.2.3	DAK	48.024.000.000	29,04	24.764.400.000,00	(48,43)	45.964.400.000,00	85,61	53.326.340.000,00	16,02	57.407.690.000,00	7,65	17.98
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**341.325.000**	**(96,41)**	**620.662.500,00**	**81,84**	**92.749.975.000**	**14.843,71**	**442.367.135.000,00**	**376,95**	**446.134.509.718,00**	**0,85**	90.81
	Total Pendapatan	**1.175.972.331.334,42**	**9,83**	**1.272.218.058.843,65**	**8,18**	**1.689.351.248.722,39**	**32,79**	**2.242.817.184.524,00**	**32,76**	**2.379.555.590.300,46**	**6,10**	14.22

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari tabel 3.1 diatas terlihat bahwa pendapatan daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,22 % pertahun. Pertumbahan pendapatan ini diperoleh dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 15,48 % per tahun, kemudian pertumbuhan Dana Perimbangan rata-rata sebesar 11,61 % per tahun, dan pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar rata-rata 90,81 % per tahun.

Penjelasan lebih lanjut tentang pendapatan daerah, sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Selama periode 2009-2013 Pendapatan Asli Daerah rata-rata tumbuh sebesar 19,60 % per tahun, sebagaimana terlihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1
Trend Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2009-2013

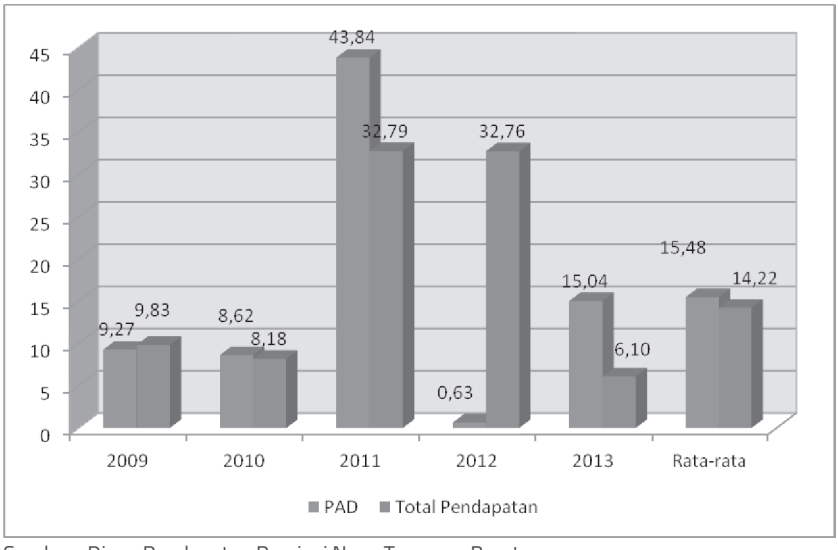

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah relatif sejalan dengan pertumbuhan total pendapatan, pada tahun 2011 terjadi pertumbuhan yang signifikan yakni dari 8,62 % pada tahun 2010 menjadi sebesar 43,84 % pada tahun 2011 dan kemudian menurun menjadi 0,63 % pada

tahun 2012. Sementara pada tahun 2013 dan tahun 2014, progres persentase pertumbuhan PAD jauh lebih tinggi dibandingkan dengan progres persentase pertumbuhan total pendapatan. Komponen pembentuk pendapatan asli daerah, yakni pajak daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,09 % per tahun. Pertumbuhan Pajak Daerah cenderung sama dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pertumbuhan Retribusi Daerah cenderung sama dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, kecuali pada tahun 2012 dimana pertumbuhan Retribusi Daerah mencapai titik terendah yakni mencapai -82,99 %. Pertumbuhan Retribusi Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2013 mencapai 53,44%. Sementara itu Lain-lain Penerimaan selama periode tahun 2009-2013 rata-rata tumbuh sebesar 90,81% per tahun.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan pada periode tahun 2009-2013 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 11,61 % per tahun yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak yang tumbuh sebesar rata-rata 23,41 % per tahun, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,20 % per tahun, dan Dana Alokasi Khusus yang tumbuh sebesar rata-rata 17,98 % per tahun.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun termasuk pada periode tahun 2009-2013. Dari Rp.341 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 446 milyar lebih pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 90,81 % per tahun

3.1.2. Neraca Daerah

Selama tahun 2009 - 2013 aset mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 51,87%, kewajiban tumbuh rata-rata sebesar 48,42% per tahun, ekuitas dana yang merupakan kekayaan bersih pemerintah (selisih antara aset dan utang pemerintah) tumbuh rata-rata sebesar 34,167% pertahun, sebagaimana table 3.2 berikut.

Tabel 3.2

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2013

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
1.	ASET	51,87
1.1	ASET LANCAR	87,66
1.1.1	Kas	4,25
1.1.2	Piutang	88,23
1.1.3	Persediaan	170,50
1.2	ASET TETAP	36,41
1.2.1	Tanah	141,31
1.2.2	Peralatan dan mesin	5,39
1.2.3	Gedung dan bangunan	10,39
1.2.4	Jalan, irigasi dan jaringan	10,02
1.2.5	Asset tetap lainnya	11,22
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	261,32
1.2.7	Dst.	
1.3	ASET LAINNYA	31,55
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	(24,16)
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	(6,46)
1.3.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	178,36
1.3.4	Aset tak berwujud	134,61
1.3.5	Aset Lain-lain	59,22
	JUMLAH ASET DAERAH	33,03
2	KEWAJIBAN	48,42
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48,42
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	49,34
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	-
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	-
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	48,44
3	EKUITAS DANA	34,16
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	(34,21)
3.1.1	SILPA	(3,87)
3.1.2	Cadangan piutang	42,52
3.1.3	Cadangan persediaan	88,23
3.1.4	Pendapatan yang ditangguhkan	161,69
3.1.5	Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	48,44
3.2	EQUITAS DANA INVESTASI	33,79
3.2.1	Diinvestasikan dalam asset tetap	36,41
3.2.2	Diinvestasikan dalam asset lainnya	31,55
3.2.3	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	31,55
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EQUITAS DANA	33,03

Sumber : BPKAD Prov. NTB

Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan kemampuan pemerintah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Pada tahun 2010 Provinsi NTB berada pada posisi 119,5 %, menjadi 70,23 % pada tahun 2012 dan 63,76% pada tahun 2013.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) merupakan kemampuan pemerintah membayar kewajiban jangka pendek hanya berdasar aktiva lancar dengan mengabaikan (mengurangi) persediaan. Provinsi NTB memiliki Rasio Cepat 108,55 % pada tahun 2010 dan 59,43 % pada tahun 2012 serta 49,54% pada tahun 2013.

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukan porsi hutang dibandingkan dengan total aset. Semakin kecil ratio hutang terhadap aset menunjukan kemandiran yang baik suatu daerah. Provinsi NTB memiliki ratio hutang terhadap aset 2,52 % pada tahun 2010, 1,6 % pada tahun 2012 dan 1,41% pada tahun 2013.

Rasio Hutang terhadap Modal juga menunjukan posisi hutang terhadap modal, di mana rasio hutang terhadap modal Provinsi NTB adalah 1,63 % pada tahun 2010 dan 5,5% pada tahun 2012 serta 1,43% pada tahun 2013. Secara rinci analisis rasio keuangan sebagaimana terlihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Rasio Lancar (*currentratio*) (%)	119,34	42,05	70,23	63,76
2	Rasio Quick (*quickratio*) (%)	108,55	34,04	59,43	49,54
3	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (%)	2,52	1,50	1,61	1,41
4	Rasio Hutang terhadap Modal (%)	1,63	5,55	5,55	1,43

Sumber : BPKAD Prov. NTB

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Rata-rata realisasi Belanja Langsung adalah sebesar 90,92 % pertahun, sedangkan Belanja Tidak Langsung memiliki realisasi rata-rata sebesar 92,29 % pertahun, sebagaimana terlihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.4

Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Provinsi NTB

Tahun 2010-2013

No.	Uraian	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**385.403.837.784,00**	**426.228.698.897,00**	**436.435.436.469,00**	**472.161.629.250,50**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	266.875.185.400,00	299.600.681.140,00	324.641.906.099,00	335.731.291.230,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	87.463.713.057,00	92.416.353.762,00	89.743.674.059,00	110.275.514.646,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	4.764.000.000,00	4.872.300.000,00	4.836.000.000,00	4.783.800.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	11.454.196.600,00	14.188.489.058,00	932.261.650,00	832.691.440,00
5	Biaya jasa pelayanan kesehatan	14.846.742.727,00	15.141.624.937,00	210.614.510,00	559.406.994,50
6	Insentif pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	15.894.868.551,00	19.756.586.550,00
7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	9.250.000,00	176.111.600,00	222.338.390,00
B	**Belanja Langsung**	**285.780.721.889,00**	**573.773.701.803,11**	**537.372.188.569,00**	**571.623.511.129,16**
1	Belanja Honorarium PNS	26.951.597.288,00	19.745.592.180,00	25.906.464.420,00	28.370.066.900,00
2	Belanja Uang Lembur	426.080.500,00	885.510.000,00	723.010.000,00	587.704.000,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	300.450.000,00	200.600.000,00	45.500.000,00	390.400.000,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.827.797.062,00	10.201.724.540,00	3.269.039.700,00	1.449.924.100,00

No.	Uraian	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)
5	Belanja premi asuransi kesehatan	0,00	963.495.000,00	984.262.500,00	980.289.000,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	24.070.577.359,00	24.360.072.156,00	22.579.968.657,00	254.292.100,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	3.874.362.560,00	861.937.000,00	468.287.500,00	958.317.650,00
8	Belanja Pakaian khusus dan Hari-hari Tertentu	1.187.658.200,00	1.324.556.750,00	935.863.075,00	1.121.963.750,00
9	Belanja perjalanan dinas	73.532.647.017,00	65.166.462.134,00	77.442.743.833,00	87.186.998.393.00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	52.150.300,00	0,00	21.872.800,00	44.365.000,00
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	2.000.000,00	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	144.557.401.603,00	450.063.752.043,11	404.993.176.084,00	450.279.190.236,16
	Total	**671.184.559.673,00**	**1.000.002.400.700,11**	**973.807.625.038,00**	**1.043.785.140.379,66**

Sumber : BPKAD Prov. NTB

Realisasi Belanja Pegawai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah Pegawai melalui rekrutmen CPNS baru, adanya kenaikan gaji dan kenaikan pangkat dan berkala PNS. Namun demikian secara proporsi terhadap total belanja, belanja pegawai di Pemerintah Provinsi NTB terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari proporsi belanja pegawai pada tahun 2010 mencapai 57,42% dari total belanja pada tahun 2010, menurun menjadi 45,24% pada tahun 2013. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi terus melakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam tubuh birokrasi. Sedangkan pada pos Belanja langsung, pertumbuhan Belanja Urusan Wajib memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 21,46 per tahun sedangkan Urusan Pilihan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 15,93% per tahun. Peningkatan porsi belanja pegawai dan belanja per urusan selain dari semakin tingginya kebutuhan pengelolaan birokrasi, juga dampak dari terjadinya inflasi yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.5

Analisa Proporsi Belanja Kebutuhan Aparatur Tahun 2009-2013

Tahun	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2009	775.856.157.499,67	724.513.298.909,00	93,38	419.112.856.266,63	375.984.593.964,00	89,71
2010	962.514.399.365,52	859.304.825.384,85	89,28	483.366.608.420,47	416.441.760.014,50	86,15
2011	932.831.504.605,00	886.085.265.058,00	94,99	817.505.219.461,00	764.516.009.528,27	93,52
2012	1.462.938.528.069,04	1.344.576.248.294,53	91,91	901.500.342.680,00	844.713.400.480,00	93,70
2013	1.643.406.589.100,00	1.482.115.888.579,15	90,19	942.632.537.400,00	892.788.269.385,66	94,71
Rata-rata			91,95			91,56

Sumber : BPKAD Prov. NTB

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Realisasi pendapatan tahun 2010 sebesar Rp. 1.272.218.058.843,65 dengan posisi belanja daerah sebesar Rp. 1.275.746.585.399,35 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 3.528.526.555,70. Kondisi ini mengalami perbaikan pada tahun 2012, dimana dengan pendapatan daerah sebesar Rp.2.242.817.184.524,64 belanja daerah sebesar Rp.2.189.181.696.292,53 terjadi surplus pendapatan sebesar Rp. 53.635.488.232,11. Adapun defisit anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 3.528.526.555,70 imbangi oleh penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 3.387.539.579,- dan SILPA sebesar Rp. 70.127.301.342,62. Sementara untuk tahun 2011 dan tahun 2012 terjadi surplus pendapatan, bila dikalkulasi dengan SILPA dan penerimaan pinjaman pada tahun yang sama akan memberikan kemampuan pendanaan pembangunan yang lebih besar khusunya investasi daerah serta penyertaan modal di sektor swasta. SILPA pada tahun 2011 terealisasi sebesar 145,6% dan SILPA tahun 2012 sebesar 160,6% jauh melampaui realisasi SILPA tahun 2010, sebagaimana ditunjukkan tabel-tabel berikut.

Tabel 3.7

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi NTB

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil							
		2010		2011		2012		2013	
		Target (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Target (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Target (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Target (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	70.127.301,34	11.698.162,56	11.699.958,73	17.031.799,85	17.031.799,85	27.348.512,36	27.348.512,36	27.348.512,36
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00		0,00		0,00			0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00		0,00		0,00			0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00		0,00		0,00			0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.387.539,58		5.581.866,98		681.224,28		650.100,34	786.267,32
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Sumber: Sumber : BPKAD Prov. NTB

Tabel 3.6

Defisit Riil Anggaran Provinsi NTB

No.	Uraian	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.272.218.058.843,65	1.689.351.248.722,39	2.242.817.184.524,64	2.379.555.590.300,46
2	Belanja Daerah	1.275.746.585.399,35	1.650.601.274.586,27	2.189.181.696.292,53	2.374.904.157.964,81
	Surplus / (Defisit) Riil	**(3.528.526.555,70)**	**38.749.974.136,12**	**53.635.488.232,11**	**4.651.432.335,65**

Sumber : BPKAD Prov. NTB

3.3. Kerangka Pendananaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1. Analisis pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Biaya yang dikeluarkan setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam kebutuhan pelayanan dasar pemeritah daerah disebut belanja periodik prioritas utama. Pada tahun 2013-2014, belanja tidak langsung mengalami peningkatan rata-rata 0,33%, sedangjkan belanja langsung meningkat rata-rata 3,15%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.8

Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi NTB

No.	Uraian	2012 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan dari Tahun 2011 (%)	2013 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan dari Tahun 2012 (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	324.641.906.099	8,36	335.731.291.230,00	3,42
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	4.836.000.000	-0,75	4.783.800.000,00	-1,08
3	Belanja Bunga	0	0	0	0
4	Belanja Bagi Hasil	195.501.620.900	10,66	215.435.739.516,67	10,20

No.	Uraian	2012 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan dari Tahun 2011 (%)	2013 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan dari Tahun 2012 (%)
B	**Belanja Langsung**				
1	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	0	0	0	0
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	45.500.000	-77,32	390.400.000,00	758,02
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti l,istrik, air, telepon dan sejenisnya)	26.183.932.410	-2,64	18.422.201.296,00	11,06
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.294.597.500	-22,05	0	0
C	**Pembiayaan Pengeluaran**				
1	Pembiayaan Dana Cadangan	0	0	0	0
2	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0
3	Badan usaha milik daerah (BUMD)	42.000.000.000	31,25	19.630.000.000,00	-53,26
4	Pemberian Dana Bergulir	2.000.000.000	-71,43	0	0
	Total (A+B+C)	**596.503.556.909,00**	**8,67**	**594.393.432.042,67**	**1,50**

Sumber: BPKAD Prov. NTB

Tabel 3.9

Belanja Periodik Prioritas Utama Tahun 2013-2014

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
1	Belanja Tidak Langsung	1.648.323.561.600	1.699.164.493.500	0,3
2	Belanja Langsung	919.606.734.900	1.135.040.248.300	3,15
3	Pembiayaan Penerimaan	27.998.612.700	10.650.000.000	(61,96)
4	Pembiayaan Pengeluaran	36.767.745.000	40.000.000.000	8,79

Sumber: Hasil Analisa

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

a. Proyeksi Data pendapatan daerah masa lalu

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2009-2013 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Total Pendapatan Daerah Tahun 2009-2013

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2009	1.175.972.331.334	474.455.062.324	701.175.944.010	341.325.000
2010	1.333.663.646.344	515.340.956.846	756.256.439.498	620.662.500,00
2011	1.689.351.248.722	741.291.174.995	855.310.098.727	92.749.975.000
2012	2.242.778.381.168	745.941.063.054	1.054.470.183.114	442.367.135.000
2013	2.505.931.307.749	858.849.520.116	1.144.390.537.533	502.691.250.100

Sumber: Data Dispenda Prov. NTB (Diolah)

Pendapatan Daerah pada tahun 2009 tercatat Rp 1,17 trilyun lebih mengalami peningkatan menjadi Rp 2,5 trilyun lebih pada tahun 2013, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,55%. Hal ini sebagai akibat terjadinya pertumbuhan beberapa instrumen pembentuk PAD seperti pajak daerah (11,66%), retribusi daerah (4,94%), laba perusahaan daerah (5,07%) dan lain-lain penerimaan (43,06%). Kondisi ini akan tercapai bila perangkat daerah mampu mempertahankan kinerja dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pencermatan dalam menggali potensi PAD dan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan penarikan PAD. Di samping itu, masuknya pajak rokok sebagai bagian dari PAD menyebabkan nilai PAD terus mengalami peningkatan beberapa tahun ke depan.

Dana Perimbangan memiliki *trend* peningkatan sampai dengan tahun 2015. Karena merupakan transfer pusat maka salah satu faktor penentu besar kecilnya dana perimbangan akan bersumber dari kinerja perekonomian nasional. Dari tahun 2009-2013 Dana perimbangan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 11,97%. Peningkatan nilai dana perimbangan sebagai akibat dari peningkatan beberapa instrumen pembentuknya, yaitu dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Pada rentang tahun 2009-2013 dana bagi hasil pajak/ bukan pajak diproyeksi tumbuh rata-rata sebesar 12,70%, DAU tumbuh

rata-rata 11,20 % atau bahkan lebih dan DAK tumbuh rata-rata 17,98%, ini seiring perubahan formulasi pendanaan pembangunan didaerah dari Dana Dekonsentrasi ke Dana Alokasi Khusus untuk beberapa kegiatan. Ini berdampak pada perkembangan Dana Perimbangan dari sebesar Rp. 701 Milyar pada tahun 2009 meningkat sebesar Rp.1,14 Triliyun lebih pada tahun 2013.

Sumber lain pembentuk Pendapatan Daerah adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dimana terjadi lompatan drastis di tahun 2012. Karena terjadinya fluktuasi yang tinggi dalam porsi Pemasukan Lain-Lain Daerah Yang Sah sehingga analisis trend tidak dapat dilakukan, artinya varibel *trend* (series waktu) tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor tersebut. Sungguhpun demikian, pendapatan daerah yang sah akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana terlihat pada tabel 3.10.

b. Proyeksi data pendapatan daerah masa yang akan datang

Proyeksi Pendapatan Daerah yang dikotribusikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014-2018. Berdasarkan trend Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016-2018 dapat diproyeksikan, sebagaimana terlihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11

Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2018

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2014	2.923.616.362.119	1.194.261.581.800	1.226.208.396.981	503.146.383.338
2015	3.555.737.341.478	1.420.471.239.378	1.491.849.894.000	643.416.208.100
2016	3.802.933.445.799	1.450.044.930.319	2.333.604.004.580	19.284.510.900
2017	4.791.397.359.569	1.501.611.335.359	3.222.521.202.310	67.264.821.900
2018	5.327.961.697.386	1.590.322.845.658	3.718.354.340.828	19.284.510.900

Sumber: Data Dispenda Prov. NTB (Diolah)

Pendapatan Daerah pada tahun 2014 tercatat Rp.2,92 trilyun lebih mengalami peningkatan menjadi Rp.3,56 trilyun lebih pada tahun 2015, dengan pertumbuhan sebesar 21,62%. Hal ini sebagai akibat terjadinya pertumbuhan beberapa instrumen pembentuk PAD seperti pajak daerah (16,79%), retribusi daerah (4,94%), pengelolaan kekayaan daerah (13,58%) dan lain-lain penerimaan (103,21%), dan proyeksi tahun 2016 pendapatan daerah sebesar Rp.3,80 trilyun lebih, mengalami peningkatan menjadi Rp.5,33 trilyun lebih pada tahun 2018. Kondisi ini akan tercapai bila perangkat daerah mampu mempertahankan kinerja dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pencermatan dalam menggali potensi PAD dan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan penarikan PAD. Di samping itu, masuknya pajak rokok sebagai bagian dari PAD menyebabkan nilai PAD terus mengalami peningkatan beberapa tahun ke depan.

c. Proyeksi belanja daerah

Seperti halnya Pendapatan Daerah, sisi belanja juga mengalami pertumbuhan (*trend*) yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini dapat disebabkan semakin bertambahnya pembiayaan daerah dan juga pergerakan indeks harga konsumen (IHK) yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir.

Total belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009 adalah lebih dari Rp 1 trilyun, hasil proyeksi menunjukan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 5,79 trilyun lebih. Rata-rata pertumbuhan Total Belanja pemerintah pada tahun prediksi (2014-2018) adalah sebesar 9.52 %.

Tingginya Total Belanja adalah sebagai akibat dari tingginya Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pemerintah. Di mana diproyeksikan belanja tidak langsung yang pada tahun 2008 sebesar Rp. 590 Milliar lebih akan melonjak menjadi Rp. 2,4 trilyun lebih pada tahun 2018. Belanja Langsung juga diprediksi mengalami peningkatan, pada tahun 2009 belanja langsung tercatat sebesar Rp. 376 milliar lebih diproyeksikan sebesar Rp. 1,6 trilyun lebih di tahun 2018. Tabel Proyeksi Pendapatan Total, Pendapatan

Tidak Langsung dan Pendapatan Langsung disajikan sebagaimana terlihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.12

Proyeksi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Tahun 2014-2018

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
2014	1.698.205.258.840,80	1.184.457.839.498,00	2.882.663.098.338,80
2015	1.872.085.564.581,33	1.567.362.901.626,00	3.439.448.466.207,33
2016	2.127.197.357.608,21	1.707.511.194.880,00	3.834.708.552.488,21
2017	2.921.302.635.531,00	2.119.276.870.066,00	5.040.579.505.597,00
2018	3.155.415.820.612,00	2.602.592.287.540,00	5.758.008.108.152,00

Sumber: Bappenda Prov. NTB dan Bappeda Prov. NTB (Diolah)

3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mengukur kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan untuk mendanai program pembangunan jangka menengah daerah. Kapasitas keuangan daerah adalah total penerimaan daerah dikurangi berbagai belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, sebagaimana sebagaimana terlihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13. menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan setelah mempertimbangkan pendapatan, penerimaan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan meningkat, maka trend kapasitas riil tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar Rp.2.226.519.244.677,96 ,- menjadi Rp. 4.198.999.754.458,79,- pada tahun 2018

Tabel 3.13

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Proyeksi				
		2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Pendapatan Daerah	2.923.616.362.119,00	3.555.737.341.478,00	3.802.933.445.799,00	4.791.397.359.569,00	5.327.961.697.386,00
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	13.156.212.010,80	149.355.598.294,33	196.754.592.443,75	130.949.597.710,00	5.527.800.000,00
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	106.650.000.000,00	106.650.000.000,00
	Total Penerimaan	2.937.422.574.129.80	3.705.742.939.772,33	4.000.338.038.242,75	5.028.996.957.279.00	5.440,139.497.386,00
	Dikurangi :					
5	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Riil serta Prioritas Utama	710.903.329.452	811.214.449.551	889.986.661.154	1.162.945.570.130	1.241.139.742.927
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.226.519.244.677,96	2.894.528.490.221,13	3.110.351.377.088,70	3.866.051.387.149,00	4.198.999.754.458,79

Tabel 3.14

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi NTB

Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Proyeksi				
		2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.226.519.244.677,96	2.894.528.490.221,13	3.110.351.377.088,70	3.866.051.387.149,00	4.198.999.754.458,79
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	-	-	-	-	-
II.a	Belanja Langsung	1.184.457.839.498,00	1.567.362.901.626,00	1.707.511.194.880,00	2.119.276.870.066,00	2.602.592.287.540,00
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi :					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	306.067.740.777	313.548.788.041	429.237.414.548	622.306.530.723	858.534.898.143
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	40.000.000.000	85.675.203.000	47.004.046.051	20.000.000.000	58.564.000.000
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	838.390.098.721,00	1.168.138.910.585,00	1.231.269.734.281,00	1.476.970.339.343,00	1.285.493.389.397,00
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	1.388.129.145.957	1.726.389.579.636	1.879.081.642.808	2.389.081.047.806	2.913.506.365.062
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	1.698.205.258.840,80	1.872.085.564.581,33	2.127.197.357.608,21	2.932.374.112.829,00	3.155.415.820.612,00
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	310.076.112.884	145.695.984.945	248.115.714.801	543.293.065.023	641.909.455.550
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	1.388.129.145.957	1.726.389.579.636	1.879.081.642.808	2.389.081.047.806	2.913.506.365.062
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	0	0	0	0	0

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan
4.2. Isu Strategis

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Memasuki usianya yang ke-55 pada tahun 2013, provinsi NTB telah mencatat sejumlah kemajuan dalam mensejahterakan masyarakatnya, melalui program pembangunan yang terarah, terencana, sistematis dan sinergis. Indikator pembangunan pada 5 tahun terakhir menunjukkan kemajuan di berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu ukuran kesejahteraan telah berada pada momentum percepatan yang signifikan, dengan *shortfall* (progress) terbaik ke-4 pada tahun 2012. Sejumlah tantangan pembangunan masih dihadapi ke depan dan perlu penanganan lebih baik. Permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh masyarakat NTB secara umum, adalah bagaimana membangun masyarakat yang berkarakter, mengembangkan budaya dan kearifan lokal, melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, mengembangkan SDM yang berdaya saing, pengentasan kemiskinan, pengembangan konektivitas antar wilayah dan tata ruang, serta pengelolaan lingkungan hidup.

4.1.1. Masyarakat yang Beriman dan Berkarakter

Permasalahan penguatan keimanan dan pengembangan karakter masyarakat NTB adalah :

1. Sistem pendidikan berkarakter kurang terbangun. Sistem pendidikan yang berjalan saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan anak didik yang hidup di era globalisasi. Selama tahun 2013, ada 58 laporan kasus korban kekerasan terhadap anak, sedangkan pada tahun 2014 kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 826 kasus. Disamping itu, di Lembaga Pemasyarakatan terdapat 22 anak yang ditahan karena tersangkut pencurian, pencabulan, penganiayaan, hingga pembunuhan. Sex pra nikah juga terlaporkan mulai merebak di perkotaan dan lokasi wisata, dimana diantaranya dilakukan oleh siswa dan mahasiswa.

2. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat. Posisi Provinsi NTB sebagai daerah tujuan wisata dan mobilitas tenaga kerja ke luar negeri telah memungkinkan pesatnya perkembangan peredaran NAPZA. Saat ini tercatat 59.350 warga NTB yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, diantaranya seribu orang sudah terindikasi menjadi pecandu narkoba. BNN juga mencatat, sebanyak 19 ribu warga NTB telah terindikasi mejadi pemakai narkoba teratur.

3. Perkelahian pelajar, antar kampung, antar RT, bahkan antar desa masih terjadi sebagai akibat dari interaksi dan kesenjangan di bidang ekonomi dan sosial. Meskipun terus menurun, ancaman konflik baik vertikal maupun horizontal akan berdampak pada kinerja pembangunan di daerah ini. Pada tahun 2008 jumlah konflik sebanyak 285 kasus, tahun 2009 sebanyak 189 konflik, tahun 2010 sedikitnya 161 konflik serta tahun 2011 sampai dengan Agustus sebanyak 64 konflik. Adapun pada tahun 2012 secara umum konflik yang terjadi di NTB terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012 jumlah konflik yang terjadi sebanyak 93 kasus menurun menjadi 56 kasus pada tahun 2013.

4.1.2. Pengembangan Budaya dan Kearifan Lokal

Pengembangan budaya dan kearifan lokal dihadapkan kepada beberapa permasalahan :

1. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra asli NTB belum optimal. Pesan, petuah adat, hikmah dan kearifan lokal yang tergali dari kisah-kisah sejarah lokal NTB, seperti yang tertuang dalam lontar (*takepan sasak), ….sumbawa* dan kitab Bo Sangaji Kai (kitab sejarah kerajaan Bima dan Dompu) belum dilestarikan secara memadai.
2. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa. Sejumlah kasus penjualan benda bersejarah asal NTB berhasil diselamatkan. Diantaranya yang dijual kepada turis asing dan menjadi koleksi sejumlah artshop di luar negeri.
3. Sarana dan prasarana pengembangan kebudayaan belum memadai.
4. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan belum optimal. Budaya Sasak, Samawa dan Mbojo berkembang dalam lingkup yang terbatas, seperti pada even-even budaya (festival, temu budaya, pameran, kurikulum lokal bahasa daerah, dll), dan belum secara sistematis diaktualisasi dalam program pembangunan di daerah ini.

4.1.3. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan penegakan hukum di provinsi NTB, permasalahan yang dihadapi, adalah:

1. Partisipasi politik rendah

   Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun. Pada Pilpres tahun 2009 tercatat tingkat partisipasi politik sebesar 75,7 %, pada Pemilukada 2010 sebesar 73,42 %, pada Pemilukada 2013 sebesar 70,47%, sedangkan tingkat

partisipasi politik pada Pemilihan Presiden dan anggota legislatif pada Pemilihan Umum tahun 2014 mencapai 73,05%.

2. Kualitas pelayanan publik belum optimal
   Kualitas pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial dan beberapa sektor publik lainnya) masih dirasakan belum optimal. Keluhan masyarakat melalui berbagai media cetak, elektronik, dan media sosial masih terjadi dan telah direspon oleh pemerintah daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sarana prasarana, SDM dan prosedur pelayanan publik. Peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government) belum optimal.

3. Gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang masih sering terjadi disebabkan oleh adanya kasus kriminalitas. Jumlah kasus kriminalitas di NTB pada tahun 2011 sebanyak 3.775 kasus, pada tahun 2012 meningkat menjadi 4.484 kasus, pada tahun 2013 menurun menjadi 4.190 kasus, sedangkan pada tahun 2014 dapat ditekan lagi menjadi 3.643 kasus

4. Ketidakpastian hukum
   Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata. Di sisi pemerintah, kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang, dan di sisi masyarakat, pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal. Contohnya kasus curanmor di wilayah NTB tergolong tinggi, dan sepanjang 2012 tercatat dalam laporan kepolisian sebanyak 2.450 kasus, dari total kejahatan konvensional sebanyak 10.689 kasus. Penyelesaian kasus curanmor itu juga belum signifikan, karena baru 499 kasus yang terselesaikan sampai ke pengadilan, dari 2.450 kasus yang mencuat sepanjang 2012 atau sebanyak 20,3 %.

4.1.4. Sumberdaya Manusia yang Berdayasaing

1. Peran perempuan belum optimal

   Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal. Khususnya peran perempuan perlu terus diupayakan peningkatannya, karena permasalahan seperti *trafficking* (perdagangan) perempuan dan anak, dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi.

2. Derajat kesehatan ibu dan bayi masih rendah

   Derajat kesehatan ibu dan bayi di Nusa Tenggara Barat masih tergolong rendah yang ditandai dengan masih tingginya jumlah kasus kematian ibu dan bayi. Pada tahun 2012 jumlah kasus kematian ibu mencapai 106 kasus dalam 94.189 kelahiran hidup, sedangkan kasus kematian bayi mencapai 1.426 kasus dalam 102.954 kelahiran hidup. Sementara pada tahun 2013, jumlah kasus kematian ibu meningkat menjadi 114 kasus dalam 103.396 kelahiran hidup, sedangkan kasus kematian bayi menurun menjadi 1.299 kasus dalam 103.396 kelahiran hidup. Adapun prevalensi gizi buruk mencapai 3,52% pada tahun 2012, sedangkan tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 3,75%.

3. Pengangguran tenaga terdidik masih tinggi

   Pengangguran tenaga terdidik menunjukkan masih lemahnya kualitas SDM di provinsi NTB. BPS Provinsi NTB mencatat pada 2013 tingkat pengangguran terbuka (TPT) terendah penduduk berpendidikan SMP, yaitu sebesar 3,27 persen dan yang tertinggi pada jenjang pendidikan universitas, yakni 8,73 persen. Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di pihak lain, dirasakan belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.

4. Kualitas sarana prasarana pendidikan masih kurang

   Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau

masyarakat belum terwujud sepenuhnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh belum optimalnya sarana prasarana pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal diantaranya pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai.

5. Angka kelahiran total masih tinggi
   Angka kelahiran total provinsi NTB relatif masih tinggi, yaitu 2,8 (SDKI, 2012), sedangkan hingga tahun 2015 diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menurun menjadi 2,653. Angka kelahiran total sebesar 2,8 dan 2,653 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya. Dengan tingginya angka kelahiran total Provinsi NTB merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi) di Provinsi NTB. Persoalan ini akan berdampak pada pertambahan dan kualitas penduduk serta penyediaan pemenuhan kebutuhan pokok penduduk.

6. Penyandang masalah kesejahteraan sosial masih tinggi
   Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi NTB masih cukup tinggi mencapai 356.568 jiwa dan 532.835 kepala keluarga (KK). Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar. Sementara itu, sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal.

7. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika meningkat
   Dengan meningkatnya intensitas migrasi sosial antar daerah dan antar negara, berimplikasi pada makin meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Daerah NTB sebagai salah satu tujuan wisata dan tingginya *turnover* TKI/TKW turut berkontribusi pada meluasnya penggunaan dan peredaran NAPZA ini.

4.1.5. Kemiskinan

1. Ketimpangan struktur ekonomi daerah dari sektor pertanian ke sektor jasa (sektor industri olahan belum berkembang)

   Seiring dengan berkembangnya sektor jasa, sektor produksi (pertanian, peternakan, pangan, dan lain-lain) mendapat tantangan yang serius, terutama dari para pesaing luar daerah, bahkan luar negeri di era APEC. Sektor industri olahan perlu ditopang dengan pengembangan keterampilan, bantuan modal dan pemasaran sehingga dapat bersaing dengan daerah lain dan mempunyai nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat.

2. Nilai tukar petani rendah

   Secara nasional, nilai tukar petani (NTP) mengalami penurunan dari 104,58 persen per Juli 2013 menjadi 104,32 persen per Agustus 2013. Penurunan NTP diakibatkan oleh penurunan pada empat subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Untuk provinsi NTB, besar nilai tukar petani adalah 93,66. Ini berarti mengalami peningkatan 0,55 persen bila dibandingkan dengan bulan Juli 2013 dengan nilai tukar petani sebesar 93,11. Angka ini berfluktuatif dari waktu ke waktu, dan perlu diantisipasi untuk menjamin kesejahteraan petani. Namun demikian NTP di Provinsi NTB selama tahun 2011-2013 selalu di bawah 100, dengan kata lain menggambarkan bahwa indeks penerimaan petani lebih rendah dibanding indeks pengeluaran.

3. Pengembangan produk olahan lokal masih kurang

   Saat ini, terjadi pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat dari pangan lokal (ubi kayu, jagung dan sagu) ke beras. Masuknya produk pangan olahan dari luar mempengaruhi pola konsumsi serta produksi pangan lokal. Pengembangan produk olahan lokal di NTB memerlukan dukungan pengembangan teknologi proses dan pengolahan serta strategi pemasaran yang baik untuk mengubah *image* pangan *inferior* menjadi pangan normal bahkan *superior*.

4. Mekanisme penyaluran modal yang belum tepat
   Pelaku UMKM di Provinsi NTB masih dihadapi kendala seperti minimnya dukungan pembiayaan karena aksesnya yang terbatas kepada lembaga perbankan. Keterbatasan akses ini dipicu oleh terbatasnya akses informasi permodalan, SDM, birokrasi dan manajemen UMKM, sehingga penyaluran modal menjadi tidak tepat sasaran.

5. Database Industri Kecil dan Menengah
   Sampai dengan saat ini database IKM belum tersedia di semua kabupaten / kota.

6. Potensi peternakan untuk swasembada daging
   Provinsi NTB sebagai salah satu daerah produsen sapi nasional, akan bergerak menjadi daerah swasembada daging. Konsekuensinya, perlu terus dilakukan peningkatan populasi ternak melalui berbagai program inovasi dan teknologi.

7. Tidak sebandingnya antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja
   Provinsi NTB masih menghadapi permasalahan yang ditandai dengan angka pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan angka pertumbuhan angkatan kerja. Pengangguran terbuka tahun 2013 sebesar 3,52%. Keadaan ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 5,26 %.

8. Nilai tambah produk unggulan masih rendah
   Sub sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai produk unggulan telah tumbuh signifikan dalam 5 tahun terakhir. Namun demikian, nilai tambah komoditas ini masih rendah karena pada umumnya ekspor dilakukan dalam bentuk segar (produk primer) dan olahan sederhana. Peningkatan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan melalui proses pengolahan memerlukan investasi dan teknologi pengolahan yang lebih modern. Kondisi ini diperberat oleh semakin tingginya persaingan produk dari luar negeri, baik yang masuk melalui jalur legal maupun ilegal.

9. Ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau
   Pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas, terutama infrastruktur perhubungan. Namun demikian, layanan dan utilitas infrastruktur tersebut dirasakan masih belum optimal, terutama oleh masyarakat yang ada di pedesaan, wilayah pulau kecil terpencil. Layanan yang dirasakan masih kurang adalah layanan telekomunikasi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.

10. Ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kota, antar wilayah
    Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah. Beberapa indikator yang menunjukkan masih adanya ketimpangan tersebut, antara lain disparitas angka kemiskinan, ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih.

4.1.6. Konektivitas antar wilayah dan Tata Ruang

1. Keterhubungan antar kawasan, antar kota, antar daerah di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun keterhubungan antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan provinsi/daerah lainnya di Indonesia maupun keterhubungan dengan Negara lain yang berdekatan masih lemah. Keberadaan sarana prasarana transportasi udara bertaraf internasional adalah peluang mengembangkan konektivitas antar kawasan di luar Provinsi NTB, demikian pula keberadaan pelabuhan laut yang harus terus dikembangkan guna mendukung pergerakan barang dan orang menuju dan dari Provinsi NTB. Kemantapan jalan nasional dan jalan provinsi, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi darat, bandar udara serta keberadaan pelabuhan penyeberangan adalah modal penting dalam membangun konektivitas yang tinggi dalam wilayah Provinsi NTB sendiri.

2. Sarana prasarana pelayanan publik (sosial dasar) belum memadai
   Sarana prasarana pelayanan publik (sosial dasar) di provinsi NTB

masih perlu ditingkatkan. Sarana prasarana pendidikan (sekolah beserta kelengkapannya seperti buku, alat peraga), sarana prasarana kesehatan (Poskesdes, Puskesmas), pelayanan sosial (panti sosial), utamanya di daerah terpencil, pulau-pulau kecil, pegunungan masih terbatas. Disparitas antara kota dan perdesaan masih terlihat.

3. Kualitas lingkungan pemukiman masih rendah
   Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat dipenuhi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

4. Sengketa lahan dan tanah terindikasi terlantar

   Kasus pertanahan di NTB dibilang masih tinggi. Ragam kasus didominasi dengan sengketa kepemilikan atas areal pertanahan.

   Luas tanah terlantar di Nusa Tenggara Barat berdasarkan data inventarisasi dan verifikasi tahun 2012 seluas 25 ribu hektar lebih. Tanah yang terindikasi terlantar itu tersebar di seluruh wilayah kabupaten/ kota. Penelantaran ini sebagian besar disebabkan oleh belum berjalannya aktifitas perusahaan/ investor di lahan tersebut. Sejak 2002, tercatat sebanyak 146 perusahaan atau lembaga berbadan hukum menelantarkan 187 bidang tanah yang luasnya mencapai 25.022 ha lebih.

4.1.7. Lingkungan Hidup

1. Perilaku hidup bersih dan sehat masih kurang
   Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di NTB masih belum optimal. Data tahun 2009 menyebutkan bahwa baru 64,41% sarana yang telah dibina kesehatan lingkungannya, yang meliputi institusi pendidikan (67,52%), tempat kerja (59,15%), tempat ibadah (58,84%), dan fasilitas kesehatan (77,02%).

2. Degradasi hutan dan lahan (*illegal logging, illegal mining*)
   Degradasi hutan dan lahan antara lain disebabkan oleh aktifitas pertanian (agrikultur), pertambangan dan pembukaan lahan untuk jalan. Di NTB, degradasi hutan banyak disebabkan oleh aktifitas penebangan liar dan tambang yang berdampak pada menipisnya jumlah mata air. Aktifitas pertambangan di Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima dan Lombok Barat selain memberi dampak ekonomis bagi penduduk sekitar, juga telah mengurangi jumlah hutan tutupan serta hutan/lahan produktif lainnya.

3. Ruang kota belum tertata dengan baik
   Ruang terbuka hijau serta ruang publik di kota-kota di provinsi NTB, saat ini kondisinya belum tertata baik. Padahal ketersedian ruang terbuka hijau atau ruang publik seharusnya 30 persen dalam satu wilayah. Penataan yang perlu mendapat perhatian antara lain : kelengkapan kota (listrik, air, gas, limbah, sampah), tata air (pencegahan banjir), perhubungan, lingkungan perumahan/ pemukiman, tata ruang dan tata bangunan.

4. Daerah rawan bencana
   Wilayah provinsi NTB termasuk daerah rawan bencana. Selama kurun waktu lebih kurang tiga puluh tahun wilayah NTB telah kerap kali mengalami bencana geologi yang berupa gempa bumi dan tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, dan amblesan tanah (*subsidence).* Bencana banjir dan tanah longsor juga sering terjadi. Tercatat daerah yang selama ini rawan bencana seperti tanah longsor di Pulau Lombok yakni Sembalun dan Belanting (Lombok Timur), Pusuk (Lombok Utara) dan Sekotong (Lombok Barat), di Labuhan dan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, kawasan rawan banjir antara lain Lombok bagian selatan (Kabupaten Lombok Timur), Praya Barat (Lombok Tengah), Pogading (Lombok Timur), Taliwang (Sumbawa Barat), Dompu (Dompu), Raba (Kota Bima), dan Sape (Kabupaten Bima)

4.2. Isu Strategis

Untuk mengawal pemanfaatan sumber daya lokal bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat NTB dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, perlu dikaji perkembangan isu strategis yang menyertai dinamika pembangunan Provinsi NTB, baik dalam level global, nasional, regional maupun lokal.

4.2.1. Analisis Isu Strategis Global

Revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah mengubah wajah banyak negara pada berbagai sisi kehidupan. Perubahan itu antara lain dalam aspek sosial-politik, keamanan dan pertahanan, serta ekonomi dan budaya yang berdampak luas pada berbagai perubahan di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara dan Indonesia. Proses demokratisasi di Indonesia yang bergulir sejak tahun 1998 merupakan efek domino dari gelombang demokratisasi dunia yang terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Proses demokratisasi global telah membawa implikasi tersendiri bagi gerakan-gerakan islam di negara-negara timur tengah, yang pada bentuk paling ekstrim dipersepsikan sebagai terorisme. Demokratisasi juga melahirkan gerakan gender dan aktualisasi Hak Azasi Manusia (HAM), yang bergerak cepat mempengaruhi kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang.

Di bidang ekonomi, globalisasi ditandai munculnya WTO sebagai regulator ekonomi dunia, yang diikuti oleh berbagai aliansi strategis kekuatan-kekuatan ekonomi dunia, seperti Uni Eropa, aliansi ekonomi Amerika Utara (NAFTA), APEC, MEA, dan ASEM (Asia Europe Meeting). Globalisasi ekonomi yang tidak diimbangi oleh ketahanan sosial, budaya, pengetahuan dan tatanan nilai lainnya, telah menumbuh-suburkan sikap individualisme, konsumerisme dan hedonisme pada negara-negara berkembang.

Perubahan penting lainnya adalah laju pertumbuhan penduduk dunia yang cenderung meningkat, khususnya di negara kurang berkembang.

Pada Juli 2013, penduduk bumi ini telah mencapai 7,2 milyar jiwa, dimana Indonesia berada pada peringkat ke-4 terbanyak dengan penduduk 246 juta jiwa (2012). Implikasinya, secara global arus migrasi antar negara sulit dihindari. Migrasi tenaga kerja untuk kepentingan ekonomi dan pendidikan juga tumbuh dengan cepat. Berkembang pula implikasi sosial negatif berupa *cyber crime*, pembajakan hak cipta, klaim budaya, narkotika dan berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya. Pergerakan manusia antar negara yang diiringi perubahan iklim global akhir-akhir ini juga berimbas pada kualitas lingkungan hidup, dan berkembangnya penyakit baru (*pandemic*).

Disisi lain, Indonesia juga menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota *Open Working Group* (OWG) on *Sustainable Development Goals* (SDG). Adapun prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDG yaitu: (1) SDG tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui dan melanjutkan komitmen MDG yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDG akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDG akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environtment development*) secara berimbang dan terpadu;

Beberapa fokus dalam SDG adalah bahwa: (i) pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender yang sangat mewarnai MDGs akan tetap dilanjutkan. Dalam kaitan ini terdapat fokus baru yang menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan baik di dalam negara maupun antar negara. Selain itu, masalah gender dan anak-anak, tidak saja anak perempuan namun juga anak laki-laki; (ii) pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi tetap menjadi isu penting, dan akses terhadap energi merupakan fokus baru yang ditambahkan; (iii) untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang

akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian dan kota berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; dan terakhir adalah adanya rumusan cara pencapaian (*means of implementation*).

4.2.2. Analisis Isu Strategis Nasional

Indonesia memasuki periode RPJMN ke-3 (2015-2019) untuk selanjutnya menuju ke taraf akhir perjalanan RPJPN di tahun 2025. Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Ancaman Terhadap Wibawa Negara. Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik akan perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan untuk menegakkan wibawa negara semakin pudar ketika negara mengikat diri pada sejumlah perjanjian internasional yang mencederai karakter bangsa dan makna kedaulatan yang tidak memberi keuntungan pada kepentingan nasional.

Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa. Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan

lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (*tangible*) maupun bersifat non-fisik (*intangible*), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa. Politik penye-ragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghor-mati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk keben-cian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap "yang berbeda". Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan "dunia tanpa batas" (*borderless-state*) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (*culture shock*) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primodial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya. Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Disatu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh

kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primodial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagaimana yang dirumuskan Agenda Nawacita akan menghadapi sejumlah kendala dan persoalan, seperti konflik, baik vertikal maupun horizontal. Media

mempertontonkan konflik antar elit politik, gejolak separatisme di Aceh dan Papua, konflik horizontal antar warga masyarakat, baik yang bermotif komunal, bermotif radikalisme keagamaan, maupun bermotif kecemburuan sosial seperti konflik-konflik perburuhan. Implementasi otonomi daerah akhirnya menciptakan konflik otoritas antara kabupaten/kota dengan provinsi dalam pemanfaatan ruang, dan antara daerah dengan pusat, serta memicu munculnya kasus-kasus pelanggaran hukum di daerah.

Konflik yang tidak tertangani secara tuntas, tidak adanya kepastian hukum, berkembangnya mafia hukum serta masih lemahnya implementasi *good governance;* akan menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif. Di sisi lain, kecilnya minat investasi juga disebabkan oleh minimnya promosi dagang, terbatasnya infrastruktur penunjang, tidak adanya jaminan kepastian berusaha dan inkonsistensi kebijakan.

Selama 1 dekade terakhir, stabilitas ekonomi makro tercapai dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan, namun masih terjadi fenomena ketidakterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi nasional belum berkualitas, masih bertumpu pada sektor yang miskin serapan tenaga kerja (pertambangan, jasa telekomunikasi, dan konsumsi). Akibatnya secara nasional tenaga kerja yang terserap masih sedikit. Masih tingginya angka pengangguran merupakan dampak ikutan dari besarnya jumlah penduduk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang tidak diikuti oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup menyebabkan tingginya angka pengangguran.

Selain permasalahan diatas, dengan bergulirnya otonomi daerah telah melahirkan sejumlah persoalan seperti konflik otoritas, pembangunan daerah yang sekedar mengejar target PAD, ketidaksiapan SDM dan kapasitas kelembagaan daerah. Pada gilirannya, terjadi ketimpangan pertumbuhan antar daerah, intensitas pembangunan wilayah barat Indonesia, khususnya pulau Jawa relatif lebih tinggi daripada kawasan timur Indonesia, tingkat pengawasan pusat terhadap pulau-pulau terluar Indonesia menjadi lemah,

sehingga masih kita temukan kasus-kasus penjualan pulau kecil kepada pihak asing.

4.2.3. Analisis Isu Strategis Regional

Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam namun menghadapi tantangan pembangunan yang berat, antara lain: tantangan aksesibilitas antar kawasan, belum terpadu dan sinkronnya pola pengelolaan potensi SDA, iklim investasi kurang kondisif, ketimpangan infrastruktur, kualitas pelayanan dan penguatan pemerintahan belum optimal. Rendahnya tingkat aksesibilitas antar kawasan di KTI ditandai masih banyaknya kawasan-kawasan yang terisolasi dari pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, pesisir, dan daerah pedalaman. Sentra-sentra produksi yang terdapat di KTI belum memiliki aksesibiltas langsung ke pasar internasional.

Kondisi provinsi-provinsi di regional tengah dan timur masih menghadapi disparitas dalam berbagai aspek pembangunan seperti ekonomi, SDM, budaya, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Salah satu upaya untuk mengatasi disparitas itu adalah dengan menjalin kerjasama antar daerah.

Wilayah Nusa Tenggara yaitu Bali, NTB dan NTT adalah wilayah yang kaya akan khazanah budaya, dan pada era globalisasi saat ini telah mengalami akulturasi, seperti budaya Lombok dengan Bali, Sumbawa, Bima, Dompu dengan Makassar.

4.2.4. Analisis Isu Strategis Lokal

Ada 3 aspek yang perlu mendapat perhatian di Lingkungan Strategis Lokal, yaitu aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum dan aspek Daya Saing Daerah.

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menatap pembangunan 5 tahun yang akan datang, ada

beberapa isu yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Gangguan kamtibmas masih berpotensi terjadi. Demikian juga dengan konflik horizontal dan vertikal.
2. Peredaran NAPZA makin meluas baik kuantitas maupun secara kualitas
3. Makin tak terbendungnya pengaruh globalisasi terutama terhadap nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal NTB.
4. Pengangguran tenaga terdidik makin besar
5. Kualitas dan distribusi penduduk yang belum optimal.

b. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum, sejumlah isu yang masih akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi NTB adalah :

1. Sistem pendidikan yang sedang dijalankan belum mengarah pada pembentukan manusia NTB yang berkarakter
2. Tingkat partisipasi politik yang makin menurun
3. Kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan sosial masih belum optimal
4. Kualitas dan kuantitas sarana pelayanan sosial belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat
5. Ketidakpastian hukum masih dirasakan dalam banyak kasus hukum
6. Jumlah kasus sengketa lahan yang makin banyak
7. Peran perempuan belum optimal dalam menghadapi tantangan pembangunan
8. Derajat kesehatan ibu dan bayi masih rendah
9. Laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi
10. Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang makin besar
11. Perdagangan manusia (*trafikking)* masih terjadi dan cenderung meningkat.

c. Aspek Daya Saing Daerah

Dalam upaya meningkatkan kesjahteraan masyarakat di NTB, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh aspek daya saing daerah perlu mendapat perhatian. Sejumlah isu yang mengemuka terkait aspek daya saing daerah ini adalah :

1. Nilai tukar petani yang belum membaik secara signifikan
2. Kualitas produk olahan lokal belum mampu bersaing di level nasional maupun internasional
3. Mekanisme dan besaran penyaluran modal bagi UMKM belum sesuai target
4. Angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi
5. Perkembangan ekonomi antar kawasan belum seimbang
6. Iklim investasi belum didukung oleh regulasi dan sarana pendukung lainnya
7. Upah Minimum Regional (UMR) masih di bawah rata-rata di beberapa kabupaten/kota
8. Jumlah PAD belum tergali secara optimal
9. Pemanfaatan potensi SDA masih terbatas
10. Sejumlah sarana prasarana wilayah belum terbangun dengan baik serta utilitasnya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat
11. Kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan yang belum efektif menjawab kebutuhan masyarakat yang bergerak cepat
12. Akses antar kawasan di beberapa titik masih belum terbangun dan berfungsi dengan baik
13. Terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
14. Perubahan iklim dan pergeseran musim yang akan mempengaruhi produktifikas sejumlah komoditi masih terjadi
15. Kesiapsiagaan menghadapi bencana belum optimal.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi NTB ke depan disimpulkan sebagaimana terlihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1

Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018

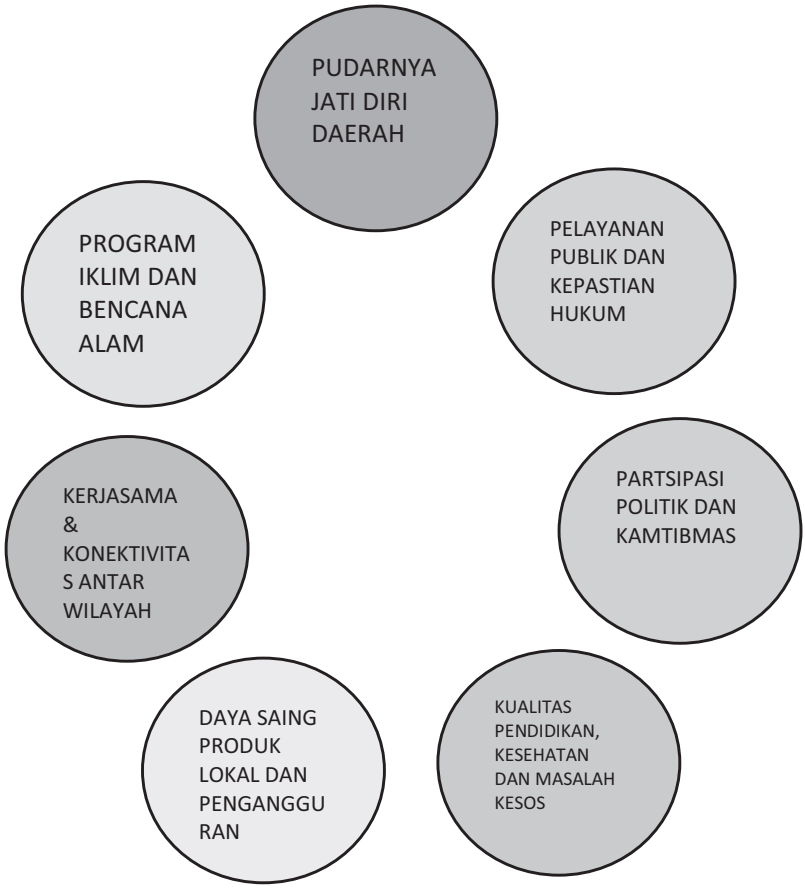

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah: **Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera.** Visi pembangunan tersebut mengandung 4 kata kunci, yakni:

1. **Masyarakat NTB,** artinya seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di wilayah Nusa Tenggara Barat.
2. **Beriman,** artinya masyarakat yang taat beragama, berbudipekerti luhur dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya.
3. **Berbudaya,** artinya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
4. **Berdayasaing,** artinya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global.

5. **Sejahtera,** artinya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan.

5.2. Misi

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 tersebut diwujudkan melalui 7 Misi pembangunan, yakni:

1. **Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter**

   Keberhasilan pembangunan dipengaruhi pula oleh seberapa besar kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Sumberdaya manusia yang berkualitas bukan saja dibentuk oleh kapasitas intelektual personal semata (*Intelektual Question/ IQ*), namun lebih juga dipengaruhi oleh kualitas moral/budipekerti atau sering dinamakan S*piritual Question/ SQ*. Meletakkan pondasi budipekerti/moral masyarakat yang kokoh adalah modal dasar pembangunan bagi kesejahteraan yang lebih baik. Hidup dalam atmosfir yang amat fluralitas secara sosial, budaya maupun agama memerlukan semangat dan komitmen yang kuat dalam toleransi dan kebersamaan, terlebih arus globalisasi telah menembus sekat-sekat geografis. lintas ruang dan waktu membuat masyarakat hidup dalam pergulatan sosial budaya yang bisa menggoyahkan jatidiri. *Cultural shock* dan kegamangan akan SDM yang memiliki kualitas spiritual dapat diantisipasi melalui pengembangan karakter masyarakat dengan membangun mental yang dilandasi nilai-nilai agama dan mengembangkan semangat toleransi/harmonisasi dengan mengakui kebersamaan dalam keberagaman.

2. **Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.**

   NTB terdiri dari 3 etnis besar yakni: Sasak ,Sumbawa dan Mbojo dan beragam etnis lainnya. Aneka ragam suku bangsa yang hidup bersama-sama di wilayah Nusa Tenggara Barat tentu membawa adat istiadat, budaya dan berbagai nilai-nilai kearifan dalam kehidupan sehari-hari. Aset budaya dan kearifan lokal ini harus dikelola sebagai sebuah kekuatan dalam pembangunan daerah. Daerah harus maju, masyarakat harus maju namun tidak harus melupakan budaya dan

kearifan lokal yang dimiliki. Kemajuan harus bercirikan budaya dan kearifan lokal. Nilai budaya dan kearifan lokal yang telah lama ada ditengah-tengah masyarakat bila diterus dipelihara, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari akan dapat memberi warna masyarakat yang khas/unik. Pada tingkat selanjutnya keunikan budaya dan kearifan lokal ini menjadi aset wisata alternatif melengkapi pesona keindahan alam pantai dan pegunungan yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat.

3. **Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.**

   Setelah pondasi budi pekerti/akhlak mulia yang ditopang oleh perkuatan sendi budaya dan kearifan lokal, maka menghadirkan kepemerintahan yang baik dan kuat adalah tahapan berikutnya dalam rangka merengkuh perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang kuat ditopang oleh birokrasi yang sehat, hukum yang ditegakkan, dan stabilitas keamanan bagi pembangunan. Reformasi birokrasi jalan menuju perkuatan hadirnya birokrasi yang kuat. Birokrasi ditempatkan sebagai institusi yang bersih dan melayani kepentingan masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang lebih baik, kualitas perencanaan yang makin partisipatif, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi unsur birokrasi bersih dan melayani. Fasilitasi terhadap upaya penegakan hukum di daerah dan penciptaan rasa aman masyarakat, terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban modal dasar lainnya pembangunan dapat berjalan lancar dan baik.

4. **Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing**

   Sumberdaya manusia yang berdayasaing adalah harapan semua pihak. Sumberdaya manusia yang berdayasaing harus sehat, cerdas, mampu memenuhi kebutuhan jasmani-rohani serta mampu memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia tanpa abai keadilan gender. Kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, kesempatan

memperoleh kehidupan yang layak menjadi fokus peningkatan mutu sumberdaya manusia daerah Nusa Tenggara Barat. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dengan memberdayakan posyandu, kaderisasi posyandu, mengembangkan motivator, meletakkan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya Generasi Emas NTB 2025, jaminan kesehatan pada masyarakat miskin yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan fokus bidang kesehatan. Pada bidang pendidikan perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, melanjutkan wajib belajar 9 tahun, meletakkan pondasi yang kuat bagi pendidikan universal, pengembangan pendidikan kejuruan dan non formal, pendidikan luar biasa dengan titik tolak peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan. Disamping hal tersebut, perhatian kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak kalah pentingnya.

5. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah**

   Pembangunan ekonomi berorientasi pada kemajuan ekonomi kerakyatan, mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal disamping kemajuan ekonomi skala besar berbasis potensi unggulan lokal. Menumbuh kembangkan usaha mikro kecil menengah, mengembangkan industri kecil dan menengah yang telah ada bagian penting memajukan ekonomi kerakyatan. Era industrialisasi berbasis pertanian dimulai setelah 5 tahun sebelumnya fokus pada peningkatan produk bahan baku. Pembangunan industri olahan, peningkatan kualitas kemasan dan perluasan pasar produk SDA dan industri olahan harus menjadi prioritas. Peningkatan kapabilitas lembaga ekonomi, peningkatan kapasitas teknologi industri, peningkatan kualitas pelaku industri, peningkatan investasi daerah perlu dilakukan. Seluruh upaya tersebut diharapkan berkontribusi menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat guna menurunkan angka pengangguran.

6. **Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang.**

   Pembangunan infrastruktur merupakan pendukung pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Sentra aktivitas ekonomi maupun kepentingan pembangunan sosial harus didukung oleh ketersediaan pelayanan infrastruktur. Upaya pembangunan infrastruktur 5 tahun terakhir telah menyediakan berbagai infrastruktur yang lebih baik, tinggal bagaimana memelihara dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dan mengembangkan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur yang telah tersedia.

7. **Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan**

   Memanfaatkan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan kehidupan yang baik. Daerah harus maju namun tetap juga harus lestari. Sebagai provinsi kepulauan yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil sekaligus daerah yang berada dalam *ring of fire* gunung berapi, perhatian terhadap ketersediaan, keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam harus dilakukan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dasar dalam mengalokasikan kegiatan pembangunan. Rehabilitasi hutan dan lahan, pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitasi dan konservasi daerah-daerah rawan bencana, upaya-upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam sekaligus menyiap siagakan masyarakat bila terjadi bencana adalah hal pokok dalam upaya pemantapan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Pertama: Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter	1. Meningkatkan kualitas akhlak dan budipekerti	a. Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam b. Berkembangnya kegiatan rumah ibadah c. Terwujudnya masyarakat yang tertib d. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama e. Tersedianya pemuka agama yang berkualitas f. Tersedianya informasi yang edukatif g. Pelaksanaan pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah
	2. Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat	a. Berkurangnya konflik sosial b. Meminimalisir berkembangnya paham radikal di Masyarakat c. Terwujudnya ketahanan ipoleksosbudhankam
Kedua: Mengembangkan budaya dan kearifan lokal	1. Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan lokal	a. Meningkatnya jumlah pranata adat b. Terwujudnya masyarakat/ budayawan/ seniman yang kreatif dan inovatif c. Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif d. Tersedianya sanggar seni dan budaya yang profesional e. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal
	2. Meningkatkan sinergitas pelestarian dan pemuliaan budaya dan kearifan lokal	a. Tersedianya informasi budaya dan kearifan lokal b. Terpeliharanya situs-situs dan peninggalan budaya lainnya c. Terpeliharanya bahasa dan sastra lokal d. Terlindungnya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal e. Tersedia, terpelihara dan tersebarnya koleksi daerah berupa naskah kuno, karya tulis, karya cetak dan karya rekam

Ketiga: Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	a. Meningkatnya tatakelola pengaduan pelayanan publik b. Terwujudnya aparatur yang profesional c. Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai d. Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah e. Meningkatnya masyarakat yang menggunakan layanan informasi berbasis IT f. Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel
	2. Meningkatkan stabilitas keamananan ketertiban masyarakat	a. Terwujudnya aturan hukum yang efektif b. Aparat hukum yang profesional c. Terfasilitasinya sarana prasarana penegakan hukum yang memadai d. Terwujudnya aparatur, masyarakat sadar hukum dan sadar bahaya narkotika e. Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkotika f. Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah secara utuh, efisien, efektif dan akuntabel
	3. Meningkatkan profesionalitas dunia usaha	a. Terwujudnya lembaga usaha yang akuntabel b. Tersedianya pelaku usaha yang profesional
	4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah	a. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
	5. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah	b. Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik
	6. Meningkatkan kualitas pengawasan aparatur	a. Terwujudnya pengawasan yang profesional
	7. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik	a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik b. Tertatanya otonomi daerah c. Terwujudnya ormas dan orpol yang aspiratif

	8. Meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah-masalah hukum	a. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum b. Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang bersih dan profesional c. Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang memadai (POL PP, PPNS, Polisi Kehutanan)
Keempat: Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing	1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender	a. Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas b. Terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Generasi Emas NTB 2025) d. Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten e. Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai f. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan g. Terwujudnya prestasi olahraga h. Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
	2. Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja	a. Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang memadai b. Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang lebih profesional c. Tersedianya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antar provinsi dan dunia usaha d. Terdistribusinya penduduk ke daerah transmigrasi
Kelima: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah	1. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam	a. Terwujudnya rencana pembangunan ekonomi yang berkualitas b. Tersedianya data dan informasi potensi daerah c. Termanfaatkannya Teknologi Tepat Guna d. Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan e. Meningkatnya kunjungan wisatawan f. Terwujudnya pengembangan atraksi dan daya tarik wisata g. Terwujudnya promosi dan pemasaran obyek pariwisata
	2. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan varietas komoditi.	a. Tersediannya sarana prasarana produksi yang memadai b. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah c. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat d. Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah

	3. Meningkatkan efektivitas pelayanan investasi	a. Tersedianya data dan informasi peluang investasi yang akurat b. Berkembangnya investasi c. Terwujudnya ekspor daerah
	4. Meningkatkan sumber pendanaan daerah	a. Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat b. Tersedianya sistem pelayanan PAD c. Tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya
	5. Meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah	a. Tersedianya sarana prasarana perekonomian yang memadai b. Tersedianya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah
Keenam: Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang	1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota dan antar wilayah	a. Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas b. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata c. Meningkatnya penumpang angkutan udara dan laut
	2. Meningkatkan efektivitas penataan ruang wilayah	a. Terwujudnya rencana, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang b. Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang c. Terwujudnya permukiman yang sehat dan nyaman
Ketujuh: Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH	a. Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas b. Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan c. Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup d. Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD) e. Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari
	2. Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana	a. Tersedianya data dan informasi daerah/ kawasan rawan bencana b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana c. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana d. Terwujudnya kawasan tangguh bencana

BAB VI

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan .

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang.

Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang akan mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan

Secara umum strategi dipetakan kedalam empat perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan, perspektif internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan.

1. **Perspektif Masyarakat/Layanan**: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisasi

2. **Perspektif Proses Internal**: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, sinergi.

3. **Perspektif Kelembagaan** : strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.

4. **Perspektif Keuangan** : strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*). Jenis strategi antara lain investasi, divestasi, mobilisasi deregulasi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu mengacu kepada Nawa Cita yang merupakan rangkuman progam-program yang tertuang dalam visi dan misi Presiden

sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terjemahan Nawa Cita dijabarkan melalui 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. **Dimensi Pembangunan Manusia** meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. **Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan** yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan nasional, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan dengan mencermati isu strategis pembangunan NTB 5 tahun kedepan, maka strategi, arah Kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Penjabaran dari Misi dan Tujuan

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Pertama: Mempercepat Perwujudan Masyarakat Yang Berkarakter	1.1	Meningkatkan kualitas akhlak dan budipekerti	Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam	Fasilitasi, edukasi dan revitalisasi sarana dan prasarana Islamic Center	Pembangunan sarana prasarana ibadah, aktivitas keagamaan dan pemberdayaan sosial ekonomi ummat
			Berkembangnya kegiatan rumah ibadah	Fasilitasi, mobilisasi, Edukasi dan revitalisasi kegiatan rumah ibadah	• Peningkatan kegiatan ibadah • Pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi ummat
			Terwujudnya masyarakat yang tertib	Sosialisasi , mobilisasi dan edukasi masyarakat	Pemasyarakatan budaya tertib
			Terwujudnya masyarakat yang taat beragama	Edukasi dan mediasi masyarakat	Pengembangan dan Peningkatan kualitas lembaga-lembaga keagamaan
			Tersedianya pemuka agama yang berkualitas	Edukasi pemuka agama	• Pengembangan metode dakwah dan ceramah • Pengembangan wawasan Pembangunan daerah
			Tersedianya informasi yang edukatif	Edukasi , mediasi dan Fasilitasi siaran/ informasi	Pengembangan Literasi Media

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			Pelaksanaan pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah	Koordinasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	Kurikulum sekolah berbasis muatan lokal
	1.2	Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat	Berkurangnya konflik sosial	Sosialisasi edukasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan kelompok masyarakat	Masyarakat rawan konflik
			Meminimalisir berkembangnya paham radikal di Masyarakat	Sosialisasi, koordinasi dan deradikalisasi kepada masyarakat	Nilai-nilai keagamaan
			Terwujudnya ketahanan ipoleksosbudhankam	Sosialisasi, koordinasi, fasilitas dan edukasi kepada masyarakat	Ideologi nasional dan budaya daerah
Kedua: Mengembangkan Budaya Dan Kearifan Lokal	2.1	Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya jumlah pranata adat	Koordinasi , revitalisasi dan fasilitasi pranata-pranata adat	Awig-awig dan seluruh aspek kehidupan masyarakat
			Terwujudnya masyarakat/ budayawan/ seniman yang kreatif dan inovatif	Fasilitasi, edukasi dan promosi masyarakat/ budayawan/ seniman	Nilai-nilai Budaya Lokal
			Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif	Koordinasi , revitalisasi dan fasilitasi pusat kebudayaan daerah	Museum, Taman Budaya maupun lokasi peninggalan budaya lainnya

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			Tersedianya sanggar seni dan budaya yang profesional	Koordinasi , revitalisasi dan fasilitasi sanggar seni dan budaya	Penciptaan kreasi seni dan budaya
			Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal	Fasilitasi, mobilisasi dan demontrasi adat budaya dan kearifan lokal	Ragam adat istiadat dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari
	2.2	Meningkatkan sinergitas pelestarian lingkungan budaya, pemuliaan budaya dan kearifan lokal	Tersedianya informasi budaya dan kearifan lokal	Koordinasi dan inventarisasi informasi	Khasanah budaya
			Terpeliharanya situs-situs dan peninggalan budaya lainnya	Rehabilitasi dan renovasi situs-situs dan peninggalan budaya lainnya	Pada wilayah obyek-obyek wisata budaya
			Terpeliharanya bahasa dan sastra lokal	Koordinasi, edukasi, fasilitasi dan regulasi bahasa dan sastra lokal	Kajian, pengembangan dan pemanfaatan Bahasa Sasak, Samawa dan Mbojo
			Terlindunginya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal	Koordinasi, fasilitasi dan regulasi kekayaan seni budaya dan kearifan lokal	Karya seni budaya dan nilai kearifan lokal
			Tersedia, terpeli-hara dan ter-sebarnya koleksi daerah berupa naskah kuno, karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Inventarisasi, dokumentasi dan publikasi koleksi daerah	Naskah kuno/klasik dan koleksi deposit daerah NTB

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Ketiga: Melanjutkan Ikhtiar Reformasi Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Dan Memantapkan Stabilitas Keamanan	3.1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tatakelola pengaduan pelayanan publik	Koordinasi, konsultasi, regulasi dan fasilitasi SPM dan SOP	SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
			Terwujudnya aparatur yang profesional	Sosialisasi, edukasi dan fasilitasi aparatur	• Peningkatan kompetensi pelayan publik • Penerapan RAD PPK
			Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai	Renovasi, revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana pelayanan publik	Peningkatan kualitas sarana prasarana termasuk layanan informasi
			Terselamatkan nya dokumen/ arsip daerah	Sosialisasi, inventarisasi, fasilitasi dan duplikasi dokumen/ arsip daerah	Naskah khasanah NTB
			Meningkatnya masyarakat yang menggunakan layanan informasi berbasis IT	Fasilitasi, sosialisasi dan publikasi data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi	pengembangan e-government

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	3.2	Meningkatkan stabilitas keamananan ketertiban masyarakat	Terwujudnya aturan hukum yang efektif	Koordinasi perkuatan aturan hukum	Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
			Terfasilitasinya aparat hukum yang profesional	Edukasi aparat hukum	Aparat penegak hukum Peraturan Daerah/Perundangan lainnya
			Terfasilitasinya sarana prasarana penegakan hukum yang memadai	Konsultasi, koordinasi dan revitalisasi sarana prasarana penegakan hukum	Sistem komunikasi terpadu antar aparat penegak hukum
			Terwujudnya aparatur, masyarakat sadar hukum	Sosialisasi, koordinasi edukasi dan rehabilitasi aparatur dan masyarakat	Penyadaran perbuatan melanggar hukum
				Inventarisasi dan fasilitasi aparatur serta masyarakat	Pencegahan dan penanganan masalah tanah terlantar dan tanah konflik
			Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkotika	Koordinasi dan mobilisasi pencegahan dan penanganan penyebaran dan penggunaan narkotika	Kalangan generasi muda, aparatur dan masyarakat
	3.3	Meningkatkan profesionalitas dunia usaha	Terwujudnya lembaga usaha yang akuntabel	Koordinasi, promosi, sosialisasi, edukasi dan fasilitasi lembaga usaha	koperasi, UMKM dan Badan Usaha Milik Daerah

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			Tersedianya pelaku usaha yang professional	Edukasi, fasilitasi dan sosialisasi pelaku usaha	kualitas pengelolaan usaha
	3.4	Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan sosialisasi rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah	Proses perencanaan dan proses monitoring evaluasi program/kegiatan utama dan program/kegiatan terobosan serta kegiatan pendataan/ informasi pembangunan daerah
	3.4	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik	Edukasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi tata kelola keuangan daerah dan BMD	Administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah
	3.5	Meningkatkan kualitas pengawasan aparatur	Terwujudnya pengawasan yang professional	Edukasi dan fasilitasi pengawasan	Peningkatan kualitas SDM auditor
	3.6	Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik	Edukasi , matrikulasi dan fasilitasi perwujudan suasana politik yang santun dan bertanggung jawab	Pendidikan kesadaran politik masyarakat
			Tertatanya otonomi daerah	Sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi otonomi daerah	Penyelenggaraan pemerintahan daerah

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif	Matrikulasi, mobilisasi dan fasilitasi organisasi masyarakat dan organisasi politik	Kepekaan terhadap masalah sosial politik
	3.7	Meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah-masalah hukum	Terwujudnya masyarakat yang taat hukum	Sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kamtibmas dan tertib hukum
			Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang bersih dan profesional	Edukasi aparat penegak hukum	Pendidikan mental dan spiritual
			Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang memadai (POL PP, PPNS, Polisi Kehutanan)	Edukasi dan promosi aparat penegak hukum	Rekruitmen Satpol PP, PPNS dan Jagawana/PolHut
Keempat: Meningkatkan Mutu Sumberdaya Manusia Yang Berdayasaing	4.1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender	Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan	Sinergi kegiatan pembangunan sosial
			Terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas	Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi layanan sosial dasar	Standart pelayanan sosial dasar

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Generasi Emas NTB 2025)	Koordinasi, sinkronisasi edukasi, fasilitasi dan mobilisasi GENERASI EMAS 2025	Pendidikan pra nikah, Kesehatan anak dan ibu melahirkan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, gizi buruk, sanitasi, air bersih layak minum, penderita gangguan jiwa, penyandang cacat, pendidikan universal, PAUD, pendidikan non formal, keaksaraan usaha mandiri dan keluarga berencana
			Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten	Edukasi tenaga pelayanan sosial dasar	Tenaga medis, tenaga pendidik dan pekerja sosial
			Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai	Revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana layanan sosial dasar	Sarana Prasarana: pendidikan dan kesehatan termasuk RSU Provinsi dan UPT sosial dan tenaga kerja
			Meningkatnya usia kawin pertama perempuan	Sosialisasi dan edukasi perempuan di perdesaan	PHBS
			Terwujudnya prestasi olahraga	Fasilitasi dan edukasi pembentukan atelit berprestasi	Cabang olah raga unggulan
			Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Fasilitasi dan revitalisasi layanan sosial	Layanan kesehatan, pendidikan, latihan kerja dan kesempatan kerja

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	4.2	Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja	Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang memadai	Revitalisasi sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja	BLK, KLK dan lembaga pendidikan keterampilan usaha lainnya
			Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang lebih profesional	Koordinasi dan mobilisasi Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	Kualitas pelayanan
			Tersedianya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antar provinsi dan dunia usaha	Koordinasi dan negosiasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama	Jenis usaha pariwisata dan agroindustri
			Terdistribusinya penduduk ke daerah transmigrasi	Inventarisasi, identifikasi, fasilitasi dan relokasi penduduk	Transmigrasi luar daerah
Kelima: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mempercepat Penurunan Kemiskinan, Dan Mengembangkan Keunggulan Daerah	5.1	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam	Terwujudnya rencana pembangunan ekonomi yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan	Sinergi kegiatan pembangunan ekonomi
			Tersedianya data dan informasi potensi SDA	Identifikasi dan inventarisasi data informasi	Database potensi SDA

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			Termanfaatkannya Teknologi Tepat Guna	Mobilisasi dan fasilitasi Teknologi Tepat Guna	Pemanfaatan TTG oleh masyarakat
			Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan	Inventarisasi, sosialisasi, fasilitasi, dan reklamasi SDA	Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan
			Meningkatnya kunjungan wisatawan	Fasilitasi, koordiinasi, rehabilitasi dan regulasi pengembangan destinasi wisata	Obyek wisata unggulan
			Terwujudnya pengembangan atraksi dan daya tarik wisata	Penguatan,fasilitasi atraksi dan daya tarik wisata dan pemanfaatan industri kreatif	Meningkatkan kualitas atraksi dan daya tarik wisata
			Terwujudnya promosi/ pemasaran obyek pariwisata	Koordinasi, fasilitasi dan promosi/ pemasaran obyek wisata	Pasar wisata dunia
	5.2	Meningkatkan produktivitas, kualitas dan varietas komoditi	Tersediannya sarana prasarana produksi yang memadai	Revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana produksi	Peralatan industri kecil menengah
			Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Intensifikasi produk SDA berkualitas	Tanaman padi dan palawija

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
				Ekstensifikasi lahan produk SDA berkualitas	Lahan kering dan sawah
				Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi tanaman dan hasil ikutannya	Padi, jagung, kentang, kedelai, kopi, kakao dan jambu mete
				Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	Komoditi gaharu, ketak, kemiri, madu dan rotan
				Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk budidaya perikanan dan kelautan	Komoditas ekspor rumput laut, udang dan kerapu
				Ekstensifikasi dan intensifikasi ternak	Komoditi sapi
				Ekstensifikasi pemasaran produk SDA berkualitas	Komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta hasil hutan bukan kayu
				Fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas	Hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta hasil hutan bukan kayu

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
				Fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif	Kerajinan industri dan makanan olahan
				Fasilitasi kelompok masyarakat	Pendampingan petani, peternak, nelayan dan masyarakat pesisir serta masyarakat sekitar kawasan hutan
			Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat	Edukasi dan fasilitasi tenaga kerja terampil	Pengembangan ekonomi kreatif
			Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah	Investasi dan fasilitasi modal usaha / kerja	UMKM dan IKM
				Divestasi dan fasilitasi dana penyertaan modal	BUMD dan swasta
	5.3	Meningkatkan efektivitas pelayanan investasi	Tersedianya data dan informasi peluang investasi yang akurat	Identifikasi , inventarisasi dan publikasi data dan informasi	Database investasi
			Berkembangnya investasi	Promosi layanan investasi	PTSP ONLINE
			Terwujudnya ekspor daerah	Fasilitasi dan regulasi ekspor daerah	Komuditi unggulan daerah

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	5.4	Meningkatkan sumber pendanaan daerah	Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat	Identifikasi dan evaluasi data dan informasi	Database sumber-sumber PAD
			Tersedianya sistem pelayanan PAD	Sosialisasi dan fasilitasi sistem pelayanan PAD	Sistem pelayanan Online
			Tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya	Identifikasi, fasilitasi dan negosiasi dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya	Database dana non pemerintah daerah
	5.5	Meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah	Tersedianya sarana prasarana perekonomian yang memadai	Revitalisasi sarana prasarana perekonomian	Sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran
			Tersedianya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah	Koordinasi dan sinkronisasi dokumen penunjang kerjasama ekonomi	Penyiapan bahan baku, olahan dan pemasaran

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Keenam: Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Wilayah Berbasis Tata Ruang	6.1	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infra struktur antar kawasan, antar kota, antar wilayah	Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan	Sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
			Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata	Koordinasi, konsultasi, revitalisasi dan konstruksi sarana prasarana wilayah	Sistem perhubungan udara, sistem perhubungan darat, sistem perhubungan laut, sumber air baku dan air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan/limbah
			Meningkatnya penumpang angkutan udara dan laut	Koordinasi, regulasi, konstruksi dan fasilitasi sistem jaringan transportasi	Sistem jaringan lokal, nasional dan internasional
	6.2	Meningkatkan efektivitas penataan ruang wilayah	Terwujudnya rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Koordinasi, regulasi, implementasi dan evaluasi rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas Kabupaten/Kota
			Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang	Sosialisasi, regulasi dan fasilitasi masyarakat	Aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			Terwujudnya permukiman yang sehat dan nyaman	Sosialisasi dan revitalisasi lingkungan permukiman	Rumah tidak layak huni dan kampung kumuh
Ketujuh: Memantapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	7.1	Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH	Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan	Sinergi kegiatan pembangunan lingkungan hidup
			Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan	Sosialisasi, regulasi dan fasilitasi masyarakat	Masyarakat perkotaan
			Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup	Sosialisasi, edukasi dan regulasi masyarakat	Masyarakat kawasan hutan, bantaran sungai, kawasan rawan bencana pesisir laut dan pulau-pulau kecil
			Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)	Identifikasi dan inventarisasi data informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)	Dampak penambangan liar terhadap lingkungan hidup
			Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari	Sosialisasi , rehabilitasi , reboisasi, regulasi dan konservasi sumberdaya alam	Kawasan Geopark, Kawasan hutan, kawasan bantaran sungai, kawasan rawan bencana, kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, KSP fungsi lindung dan konservasi serta berbagai sumber daya hayati, keanekaragaman hayati dan plasma nutfah

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	7.2	Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana	Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana	Identifikasi dan inventarisasi data dan informasi	Database daerah rawan bencana dan perubahan iklim
			Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana	Revitalisasi sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana	Early Warning System, Pusdalops
			Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana	Sosialisasi , edukasi dan simulasi masyarakat	Masyarakat disekitar kawasan rawan bencana, dan organisasi kemasyarakatan
			Terwujudnya kawasan tangguh bencana	Indentifikasi, sosialisasi, fasilitasi dan mobilisasi kawasan tangguh bencana	Kawasan rawan bencana

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 adalah: *Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur*. Visi pembangunan jangka panjang nasional tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yakni:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Arah kebijakan RPJP Nasional tahun 2005-2025 terbagi dalam 5 tahun periodisasi RPJM Nasional. Berikut arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dalam periodisasi yang mengarahkan RPJMD dalam kurun waktu 2013-2018.

1. RPJM Nasional Periode 2 (2010 – 2014)

RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik, meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju

pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.

3. RPJM Nasional Periode 3 (2015 – 2019)

Tujuan tahap ini adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh

wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri makin menguat. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial.

Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi

perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya

Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

7.2. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Visi Indonesia 2015 - 2019 Adalah Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Perwujudan visi indonesia dijabarkan dalam beberapa misi pemerintah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

Misi II : Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hokum;

Misi III : Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;

Misi IV : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

Misi V : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

Misi VI: Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan

Misi VII : Mewujudkan masyarakat yangberkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2015-2019, ditetapkan 9 (Sembilan) agenda utama pembangunan nasional (nawa cita) tahun 2005-2019, yaitu:

Agenda I: Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa aman Pada Seluruh Warga Negara dengan sub agenda meliputi:

1. Politik Luar Negeri Bebas-Aktif
2. Melindungi Hak Dan Keselamatan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Khususnya Pekerja Migran
3. Kedaulatan Maritim
4. Meningkatkan Anggaran Pertahanan 1,5 Persen Dari GDP Dalam 5 Tahun Ke Depan
5. Mengembangkan Industri Pertahanan Nasional
6. Menjamin Rasa Aman Warganegara Dengan Membangun Polri Yang Profesional

Agenda II: Membuat Pemerintah Tidak absen Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya dengan sub agenda meliputi:

1. Memulihkan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Sistem Kepartaian, Pemilu Dan Lembaga Perwakilan
2. Meningkatkan Peranan Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Dan Pembangunan
3. Memperkuat Kantor Kepresidenan Untuk Menjalankan Tugas-Tugas Kepresidenan Secara Lebih Efektif
4. Membangun.Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
5. Menjalankan Reformasi Birokrasi
6. Membuka Partisipasi Publik

Agenda III: Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan dengan sub agenda meliputi:

1. Desentralisasi Asimetris
2. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Desa, Kawasan Timur Indonesia Dan Kawasan
3. Perbatasan Penataan Daerah Otonom Baru Untuk Kesejahteraan Rakyat
4. Implemenifrasl, UU Desa

Agenda IV: Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya dengan sub agenda meliputi:

1. Membangun Politik Legislasi Yang Kuat: Pemberantasan Kortipsi, Penegakan HAM, Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Reformasi Lembaga Penegak Hukum
2. Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
3. Memberantas Mafia Peradilan
4. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Llar~Dan,Penambangan Liar
5. Pemberantasan Narkoba Dan Psikotropika
6. Pemberantasan Tindak Kejahatan Perbankan Dan Pencucian Uang
7. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah
8. Melindungi Anak, Perempuan Dan Kelompok Masyarakat Marjinal
9. Menghormati HAM Dan Penyelesaian Secara Berkeadilan Terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Pada Masa Lalu
10. Membangun Budaya Hukum

Agenda V: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia dengan sub agenda meliputi:

1. Program "Indonesia Pintar" Melalui Wajib Belajar 12 Tahun Bebas Pungutan

2. Program Kartu " Indonesia Sehat " Melalui Layanan Kesehatan Masyarakat
3. Program "Indonesia Kerja" Dan "Indonesia Sejahtera" Melalui Reformasi Agraria 9 Juta Ha Untuk Rakyartani Dan Buruh Tani, Rumah Susun Bersubsidi Dan Jaminan Sosial

Agenda VI: Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional dengan sub agenda meliputi:

1. Membangun Infrastruktur Jalan Baru Sepanjang Sekurang-kurangnya 2000 Kilometer
2. Membangun Sekurang-Kurangnya 10 Pelabuhan Baru Dan Merenovasi Yang Lama
3. Membangun Sekurang-Kurangnya 10 Bandara Baru Dan Merenovasi Yang Lama
4. Membangun Sekurang-Kurangnya 10 Kawasan Industri Baru Berikut Pengembangan Untuk Hunian Buruhnya
5. Membangun Sekurang-Kurangnya 5000 Pasar Tradisional Di Seluruh Indonesia Dan Memodernisasikan Pasar Tradisional Yang Telah Ada
6. Menciptakan Layanan Satu Atap Untuk Investasi, Efisiensi Perijinan Bisnis Menjadi Maksimal 15 Hari
7. Membangun Sejumlah Science And Technopark Di Kawasan Politeknik Dan Smk-Smk Dengan Prasana Dan Sarana Dengan Teknologi Terkini

Agenda VII: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor Sektor Strategis Ekonomi Domestik dengan sub agenda meliputi:

1. Membangun Kedaulatan Pangan
2. Mewujudkan Kedaulatan Energi
3. Mewujudkan Kedaulatan Keuangan
4. Mendirikan Bank Petani/Nelayan Dan UMKM Termasuk Gudang Dengan Fasilitas Pengolahan Paska Panen1TiapSentraProduksi Tani/ Nelayan

5. Mewujudkan Penguatan Teknologi Melalui Kebijakan Penciptaan Sistem Inovasi Nasional

Agenda VIII: Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Memperteguh Ke-Bhineka-An dengan sub agenda meliputi:

1. Membangun Pendidikan Kewarganegaraan
2. Mengevalusi Model Penyeragaman Dalam Sistem Pendidikan Nasional
3. Jaminan Hidup Yang Memadai Bagi Para Guru Terutama Bagi Guru Yang Ditugaskan Di Daerah Terpencil
4. Memperbesar Akses Warga Miskin Untuk Mendapatkan Pendidikan Tinggi
5. Memprioritaskan Pembiayaan Penelitian Yang Menunjang IPTEK

Agenda IX: Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia dengan sub agenda meliputi:

1. Memperkuat Pendidikan Ke-Bhinneka-An Dan Menciptakan Ruang Dialog Antar Warga
2. Restorasi Sosial Untuk Mengembalikan Ruh Kerukunan Antar Warga
3. Membangun Kembali Gotong Royong Sebagai Modal Sosial Melalui Rekonstruksi Sosial
4. Mengembangkan Insentif Khusus Untuk Memeerkenalkan Dan Mengangkat Kebudayaan Lokal
5. Meningkatkan Proses Pertukaran Budaya Untuk Membangun Kemajemukan Sebagai Kekuatan Budaya

Penjabaran Nawa Cita melalui 10 (se pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi;
2. Pembangunan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
3. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
4. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat;

5. Pembangunan Wilayah; dan
6. Pembangunan Kelautan.

7.2.1 Prioritas Nasional

Untuk mendukung agenda tersebut telah ditetapkan 9 (Sembilan) Prioritas Nasional mensikapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

7.2.2. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

Sesuai dengan RTRWN, pengembangaan wilayah Nusa Tenggara diarahkan pada:

1. *Mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu* sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air;

2. *Mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil* sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;

3. *Meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir* yang menghubungkan poros Banda Aceh – Atambua, sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat;

4. *Meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan* (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan *mengembangkan jalur wisata terpadu Bali – Lombok – Komodo – Tana Toraja;*

5. *Menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya*, yang berorientasi ekspor, dengan mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama baik antarwilayah maupun antarkawasan;

6. *Memanfaatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional* baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerjasama ekonomi sub-regional;

7. *Meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional* di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara;

8. Mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai 'beranda depan' Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. *Pusat pengembangan di Wilayah Nusa Tenggara yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)* diarahkan untuk mendorong pengembangan *kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer* yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

7.3.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 2013-2018

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan tersebut diatas, kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018, sebagaimana tabel 7.1.

Mencermati tabel kebijakan umum dan program prioritas 2013-2018, dirumuskan ada 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan tersebut, adalah:

1. Budi pekerti Luhur
2. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Kesejahteraan Sosial
6. Agroindustri dan Ketahanan Pangan
7. Wirausaha dan Iklim Investasi
8. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
10. Lingkungan Hidup, Perubahan iklim dan Bencana Alam

Adapun sinergi antara prioritas pembangunan tersebut dengan arah kebijakan dan program pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 – 2018 sebagaimana tabel 7.2.

7.3.2 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

a. Struktur Ruang Wilayah

Fungsi Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2009-2029 sebagai kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata. Kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata diwujudkan melalui:

a. Revitalisasi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
b. Akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
c. Akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya;
d. Akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga dan kerajinan;
e. Akselerasi pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan; dan
f. Pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

Berdasarkan struktur ruang wilayah, Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan: *pertama*, Wilayah Pengembangan Pulau Lombok mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Pulau Lombok dengan pusat pengembangan di Kota Mataram sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Praya, *kedua* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat mencakup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan pusat pengembangan di Kota Sumbawa Besar sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), *ketiga* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur mencakup Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima dengan pusat pengembangan di Kota Bima sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan ibukota kabupaten lainnya dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha. Sedangkan PKL berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur,Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, PotoTano, Jereweh, Alas, Empang,

Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera dan Sape.

Sistem jaringan transportasi nasional yang ada di wilayah provinsi meliputi:

a. sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
b. jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
c. jaringan jalan nasional terdiri dari jalan arteri primer dan jalan kolektor primer;
d. jaringan prasarana terdiri dari Terminal Penumpang Kelas A berada di Mataram, Gerung, Sumbawa Besar dan Raba;
e. pelabuhan pengumpul berada di Lembar, Labuhan Lombok, dan Bima;
f. pelabuhan penyeberangan lintas provinsi berada di Lembar, Bima dan Sape;
g. pelabuhan perikanan nusantara (PPN) berada di Teluk Awang;
h. bandar udara pusat pengumpul skala sekunder berada di Selaparang/Praya; dan
i. bandar udara pusat pengumpul skala tersier berada di Muhammad Salahuddin Bima.

Sistem jaringan transportasi provinsi meliputi:

a. Sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jaringan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
b. Jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
c. Jaringan jalan provinsi, meliputi: jalan lintas utama Pulau Lombok, jalan lintas utama Pulau Sumbawa, jalan lintas utara Pulau Lombok, jalan lintas selatan Pulau Lombok, jalan lintas utara Pulau Sumbawa

dan jalan lintas selatan Pulau Sumbawa;

d. Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, meliputi: terminal penumpang Kelas B berada di Tanjung, Praya, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha;

e. Pelabuhan pengumpan berada di Bangsal Pemenang, Labuhan Haji, Tanjung Luar, Benete, Badas, Calabai, Kempo, Waworada, Cempi, dan Sape;

f. Pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota berada di Labuhan Lombok, Telong-elong, Pototano, Benete, Pulau Moyo, Lua Air;

g. Pelabuhan khusus penumpang berada di pesisir pantai Kota Mataram; dan

h. Bandar udara pusat pengumpan berada di Brang Biji dan Sekongkang.

i. Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang melintasi Selat Lombok.

Sistem jaringan energi dan kelistrikan terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE).

Sistem prasarana sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi :

a. Wilayah Sungai (WS) strategis nasional adalah WS Pulau Lombok yang meliputi Daerah Aliran sungai (DAS) Dodokan, DAS Menanga, DAS Putih dan DAS Jelateng;

b. Sistem jaringan irigasi nasional meliputi: Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, Bendungan Mamak, Bendungan Batu Bulan,

Bendungan Tiu Kulit, Bendungan Gapit, Bendungan Pelaparado, Bendungan Sumi, dan Bendungan Plara; dan

c. Daerah Irigasi (DI) nasional meliputi : DI nasional lintas kabupaten/kota dan DI nasional utuh kabupaten/kota.

Sistem jaringan prasarana sumberdaya air provinsi terdiri dari :

1. WS Sumbawa meliputi: DAS Moyo Hulu, DAS Rhee, DAS Jereweh, DAS Beh, DAS Bako, DAS Ampang, dan DAS Moyo.
2. WS Bima-Dompu meliputi:DAS Baka, DAS Hoddo, DAS Banggo, DAS Parado, DAS Rimba dan DAS Sari.
3. Cekungan Air Tanah (CAT) di Pulau Lombok meliputi: CAT Tanjung-Sambelia seluas sekitar 1.124 km2, CAT Mataram-Selong seluas sekitar 2.366 km2; CAT di Pulau Sumbawa meliputi: CAT Pekat seluas sekitar 977 km2, CAT Sumbawa Besar seluas sekitar 1.404 km2, CAT Empang seluas sekitar 345 km2, CAT Dompu seluas sekitar 375 km2, CAT Sanggar-Kilo seluas sekitar 1.419 km2, CAT Bima seluas sekitar 1.102 km2 dan CAT Tawali-Sape seluas sekitar 363 km2.

Sistem jaringan prasarana persampahan provinsi meliputi:

a. Tempat Pembuangan Akhir Kebon Kongok (Kab. Lombok Barat) dengan sistem sanitary landfill.
b. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir lintas kabupaten/kota lainnya.

Sistem jaringan prasarana sanitasi wilayah meliputi :

a. Sistem perpipaan air limbah provinsi di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat);
b. Instalasi pengolahan air limbah di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat); dan
c. Pengembangan instalasi pengolahan air limbah lintas kabupaten/kota lainnya.

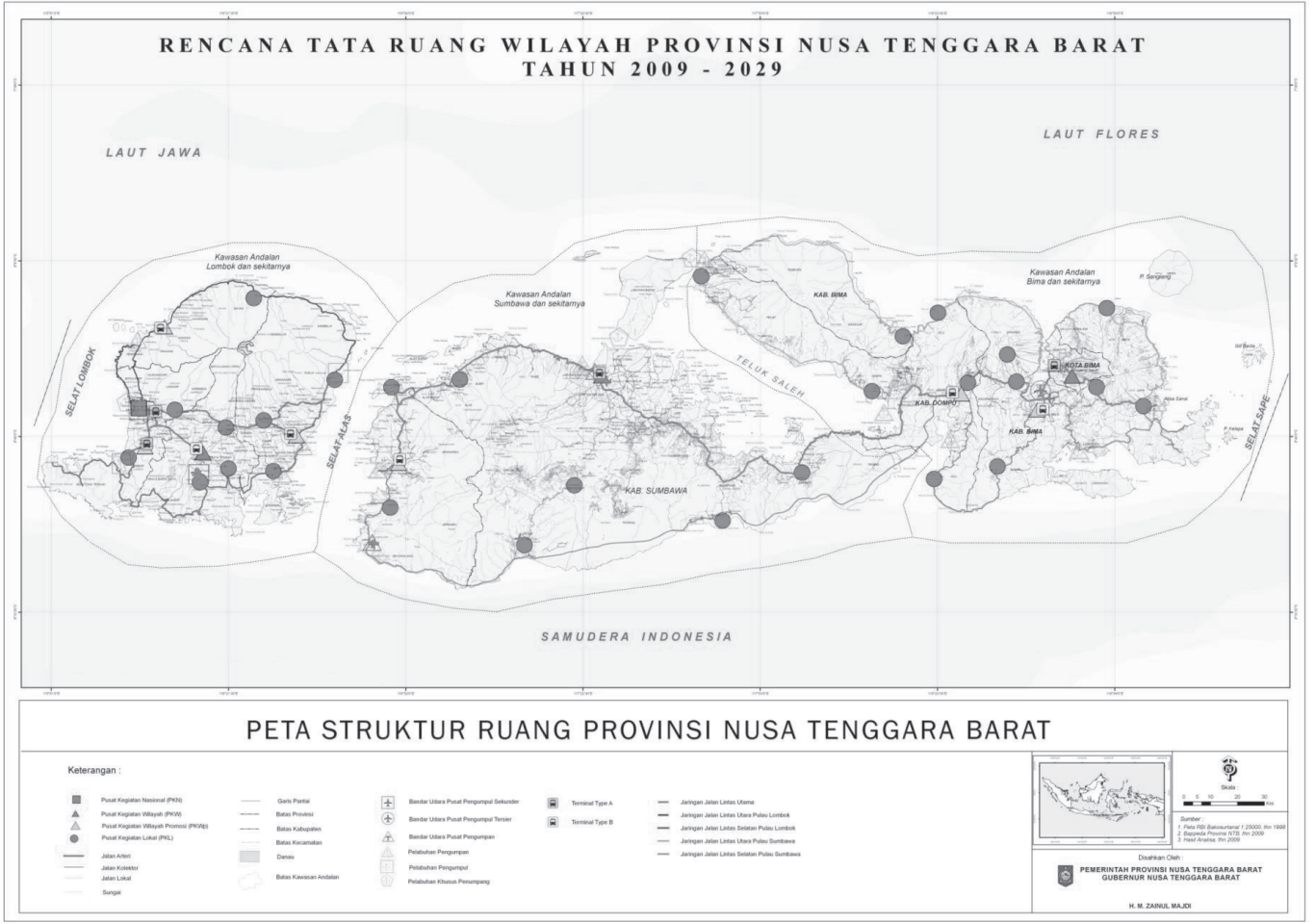
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2009 - 2029
LAUT JAWA
LAUT FLORES
Kawasan Andalan
Lombok dan sekitarnya
Kawasan Andalan
Sumbawa dan sekitarnya
Kawasan Andalan
Bima dan sekitarnya
SELAT LOMBOK
SELAT ALAS
TELUK SALEH
SELAT SAPE
KAB. BIMA
KOTA BIMA
KAB. DOMPU
KAB. SUMBAWA
SAMUDERA INDONESIA
PETA STRUKTUR RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Keterangan :
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lokal
Sungai
Garis Pantai
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Danau
Batas Kawasan Andalan
Bandar Udara Pusat Pengumpul Sekunder
Bandar Udara Pusat Pengumpul Tersier
Bandar Udara Pusat Pengumpan
Pelabuhan Pengumpan
Pelabuhan Pengumpul
Pelabuhan Khusus Penumpang
Terminal Type A
Terminal Type B
Jaringan Jalan Lintas Utama
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Lombok
Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Lombok
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Sumbawa
Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Sumbawa
Skala :
Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal 1:25000, thn 1998
2. Bappeda Provinsi NTB, thn 2009
3. Hasil Analisa, thn 2009
Disahkan Oleh :
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAINUL MAJDI

b. Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pola ruang wilayah provinsi meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya wilayah provinsi. Kawasan lindung nasional yang terkait dengan wilayah provinsi meliputi :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya nasional meliputi Hutan Lindung, dan Kawasan resapan air;
b. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional meliputi: Cagar Alam (CA.), Suaka Margasatwa (SM.), Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani, Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa dan Taman Wisata Alam (TWA); dan
c. Kawasan lindung nasional lainnya adalah Taman Buru (TB) Pulau Moyo dan Taman Buru (TB) Tambora Selatan.

Kawasan lindung provinsi meliputi :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi: hutan lindung dan kawasan resapan air;
b. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional;
c. Kawasan lindung lainnya provinsi meliputi : rencana pengembangan cagar biosfer/ramsar/taman buru/kawasan perlindungan plasma nutfah/kawasan pengungsian satwa/ terumbu karang/kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut;
d. Kawasan perlindungan setempat meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan ruang terbuka hijau kota; dan
e. Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan wilayah provinsi meliputi :

a. Kawasan Andalan terdiri dari:

1. Kawasan Andalan Lombok dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, dan pertambangan;
2. Kawasan Andalan Sumbawa dan sekitarnya dengan sektor unggulan: pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan perikanan;
3. Kawasan Andalan Bima dan sekitarnya dengan sektor unggulan: pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan pertambangan.

b. Kawasan Andalan Laut adalah Kawasan Andalan Perairan Selat Lombok dengan sektor unggulan : perikanan laut dan pariwisata.

Kawasan budidaya provinsi meliputi :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan terbatas;
b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berada di kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan kawasan pertanian hortikultura;
c. Kawasan peruntukan perkebunan berada di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBun):Sekotong, Gerung, Gangga, Bayan, Kopang, Pujut, Terara,Pringgabaya, Utan Rhee, Batulanteh, Sorinomo, Tambora, Sumbawa,Kayangan, dan Wera dan kawasan pengembangan tanaman komoditi unggulan;
d. Kawasan peruntukan peternakan berada tersebar di wilayah provinsi untuk alokasi peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak,penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak;
e. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan berada pada zona tertentu di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa;
f. Kawasan peruntukan pariwisata sebanyak 16 (enam belas) kawasan berada di:a. Pulau Lombok, meliputi: Senggigi dan sekitarnya, Suranadidan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Benang Stokel

dansekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya; Selong Belanak dansekitarnya, Kuta dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya; GiliIndah dan sekitarnya, Gunung Rinjani dan sekitarnya; dan di Pulau Sumbawa, meliputi: Maluk dan sekitarnya; Pulau Moyodan sekitarnya; Hu'u dan sekitarnya, Teluk Bima dan sekitarnya,Sape dan sekitarnya; Gunung Tambora dan sekitarnya;

g. Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil berada di Pulau Lombok, meliputi: Gili Indah dan sekitarnya, Senggigi dan sekitarnya, Lembar dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Teluk Sepi dan sekitarnya, Kuta, Awang dan sekitarnya, Tanjung Luar dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya, dan Labuhan Lombok dan sekitarnya; dan Pulau Sumbawa, meliputi: Alas - Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya ; Teluk Saleh dan sekitarnya;dan Labuhan Lalar, Maluk dan sekitarnya; Teluk Sanggar dan sekitarnya; Teluk Cempi dan sekitarnya; Waworadadan sekitarnya; Teluk Bima dan sekitarnya; dan Sape dansekitarnya;

h. Kawasan peruntukan industri meliputi:

   a. Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE; dan

   b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang.

C. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar,

Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamaan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pariwisata;

b. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;

c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri, dan pariwisata;

d. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;

e. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;

f. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;

g. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;

h. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri;

i. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;

j. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan;

k. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;

l. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

a. Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
b. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
c. Kawasan Ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima; dan
d. Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima.

Sesuai kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah pesisir dan laut Provinsi NTB dikelompokan ke dalam 18 (delapan belas) kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Gili Indah dan sekitarnya
2. Kawasan Senggigi dan sekitarnya
3. Kawasan Labuan Lembar dan sekitarnya
4. Kawasan Gili Gede dan sekitarnya
5. Kawasan Teluk Sepi dan sekitarnya
6. Kawasan Kuta dan sekitarnya
7. Kawasan Teluk Ekas dan Teluk Serewe dan sekitarnya
8. Kawasan Tanjung Luar dan sekitarnya
9. Kawasan Labuan Lombok dan sekitarnya
10. Kawasan Gili Sulat dan sekitarnya
11. Kawasan Maluk dan sekitarnya
12. Kawasan Pantura Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya
13. Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya
14. Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya
15. Kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya
16. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya
17. Kawasan Sape dan sekitarnya
18. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2009 - 2029
LAUT JAWA
LAUT FLORES
SELAT LOMBOK
SELAT ALAS
TELUK SALEH
SELAT SAPE
KAB. BIMA
KOTA BIMA
KAB. DOMPU
KAB. SUMBAWA
SAMUDERA INDONESIA
PETA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Keterangan :
Bandar Udara Pusat Pengumpul Sekunder
Bandar Udara Pusat Pengumpul Tersier
Bandar Udara Pusat Pengumpan
Pelabuhan Pengumpan
Pelabuhan Pengumpul
Pelabuhan Khusus Penumpang
Terminal Type A
Terminal Type B
Kawasan Lindung :
Kawasan Lindung
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya Alam
Kawasan Hutan Mangrove
Kawasan Budidaya :
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Pertanian
Kawasan Perkebunan
Kawasan Peternakan/BSS
Kawasan Pemukiman
Kawasan Pertambangan
Waduk/Danau
Kawasan Mataram Metro
Kawasan Pariwisata Pesisir Laut
Kawasan Pulau-pulau Kecil (PPK) :
A Kawasan PPK Gili Trawangan, Meno dan Air
B Kawasan PPK Gili Gede dan sekitarnya
C Kawasan PPK Gili Lawang dan Sulat
D Kawasan PPK Gili Indah, Tanjung Luar dan sekitarnya
E Kawasan PPK Pulau Panjang dan sekitarnya
F Kawasan PPK Pulau Moyo
G Kawasan PPK Pulau Sangiang
Kawasan Perikanan dan Kelautan :
1 Tiga Gili, Sengggigi dan sekitarnya
2 Gili Gede Sekotong dan sekitarnya
3 Kuta dan sekitarnya
4 Gili Lawang, Sulat dan sekitarnya
5 Gili Indah dan sekitarnya
6 Labuhan Lalar Maluk dan sekitarnya
7 Pantai Utara Kab. Sumbawa dan sekitarnya
8 Teluk Teluk Saleh dan sekitarnya
9 Teluk Sanggar dan sekitarnya
10 Teluk Cempi dan sekitarnya
11 Teluk Bima dan sekitarnya
12 Teluk Waworada dan sekitarnya
13 Sape dan sekitarnya
Skala :
0 5 10 20 30 Km
Sumber :
1 Peta RBI Bakosurtanal 1 25000, thn 1998
2 Bappeda Provinsi NTB, thn 2009
3 Dinas Kehutanan Provinsi NTB, thn 2009
4 Hasil Analisa, thn 2009
Disahkan Oleh :
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAINUL MAJDI

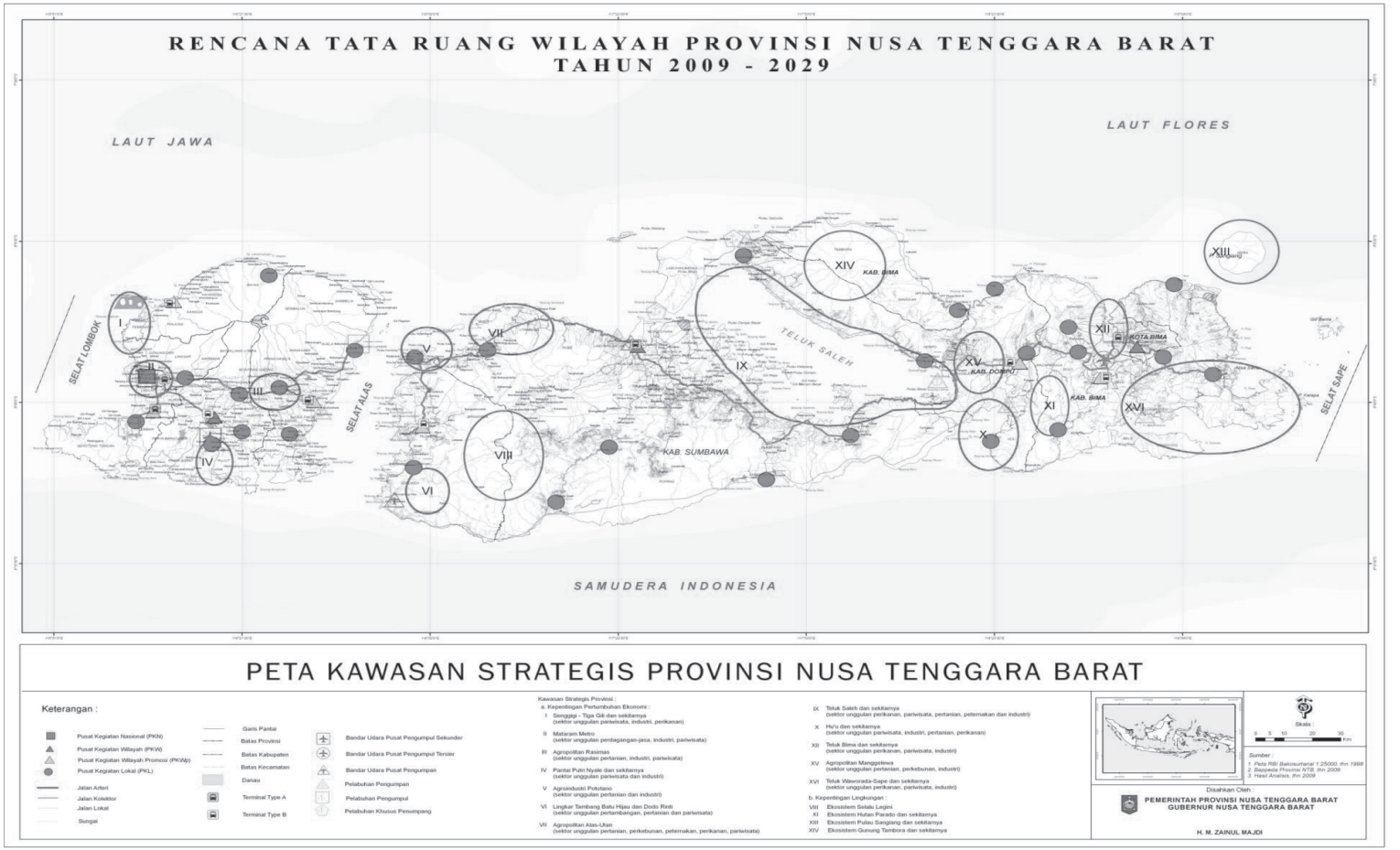
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2009 - 2029
LAUT JAWA
LAUT FLORES
SELAT LOMBOK
SELAT ALAS
SELAT SAPE
TELUK SALEH
KAB. BIMA
KAB. DOMPU
KOTA BIMA
KAB. SUMBAWA
SAMUDERA INDONESIA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Keterangan :
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lokal
Sungai
Garis Pantai
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Danau
Terminal Type A
Terminal Type B
Bandar Udara Pusat Pengumpul Sekunder
Bandar Udara Pusat Pengumpul Tersier
Bandar Udara Pusat Pengumpan
Pelabuhan Pengumpan
Pelabuhan Pengumpul
Pelabuhan Khusus Penumpang
Kawasan Strategis Provinsi :
a. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi :
I Sengggigi - Tiga Gili dan sekitarnya (sektor unggulan pariwisata, industri, perikanan)
II Mataram Metro (sektor unggulan perdagangan-jasa, industri, pariwisata)
III Agropolitan Rasanas (sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata)
IV Pantai Putri Nyale dan sekitarnya (sektor unggulan pariwisata dan industri)
V Agroindustri Pototano (sektor unggulan pertanian dan industri)
VI Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti (sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata)
VII Agropolitan Alas-Utan (sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata)
IX Teluk Saleh dan sekitarnya (sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan dan industri)
X Hu'u dan sekitarnya (sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan)
XII Teluk Bima dan sekitarnya (sektor unggulan perikanan, pariwisata, industri)
XV Agropolitan Manggelewa (sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri)
XVI Teluk Waworada-Sape dan sekitarnya (sektor unggulan perikanan, pariwisata, industri)
b. Kepentingan Lingkungan :
VIII Ekosistem Selalu Legiini
XI Ekosistem Hutan Parado dan sekitarnya
XIII Ekosistem Pulau Sangiang dan sekitarnya
XIV Ekosistem Gunung Tambora dan sekitarnya
Skala :
0 5 10 20 30 Km
Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal 1:25000, thn 1998
2. Bappeda Provinsi NTB, thn 2009
3. Hasil Analisis, thn 2009
Disahkan Oleh :
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAINUL MAJDI

Sinkronisasi Program Unggulan NTB dengan Nawa Cita Dan RPJM-N 2015-2019

Hasil pemetaan dan penyelarasan antara dokumen RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, beberapa hal perlu kami laporkan sebagai berikut:

I. Perbandingan dilakukan dengan mengidentifikasi uraian terkecil dari dokumen RPJMN yaitu pada tataran indikator sasaran pokok, strategi/dimensi pembangunan nasional dan subagenda prioritas nawacita. Berdasarkan hasil identifikasi, keterkaitan RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMN disampaikan sebagai berikut :

A. Visi :

VISI RPJMD 2013-2018	VISI RPJMN 2015-2019
Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera	Terwujudnya Indonesia Yg Berdaulat, Mandiri Dan Berkeribadian Berlandaskan Gotong Royong

B. Misi

Keterkaitan Misi RPJMD NTB 2013-2018 dengan MISI RPJMN 2015-2018 disajikan pada tabel berikut:

MISI RPJMD Prov. NTB 2013-208		RPJMN 2015-2018			
		MISI		9 AGENDA/ NAWACITA	
1	Mempercepat Perwujudan Masyarakat Yang Berkarakter	7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	8	Melakukan revolusi karakter bangsa
2	Mengembangkan Budaya dan Kearifan Lokal				

MISI RPJMD Prov. NTB 2013-208		RPJMN 2015-2018			
		MISI		9 AGENDA/ NAWACITA	
3	Melanjutkan Ikhtiar Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Melayani, Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dan Memantapkan Stabilitas Keamanan	1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara
				2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
		3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	4	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
		7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
4	Meningkatkan Mutu Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing	4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
		2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

MISI RPJMD Prov. NTB 2013-208		RPJMN 2015-2018			
		MISI		9 AGENDA/ NAWACITA	
5	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mempercepat Penurunan Kemiskinan, dan Mengembangkan Keunggulan Daerah	5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
		6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
		2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
6	Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah Berbasis Tata Ruang	5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
		6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic
7	Memantapkan Pengelolaan Lingkungan hidup Yang Berkelanjutan	6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic

Dari hasil pemetaan, terlihat bahwa seluruh Misi RPJMD NTB dapat menjawab misi dan agenda pembangunan/nawacita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2018.

II. Keterkaitan prioritas pembangunan NTB pada RPJMD Prov. NTB 2013-2018 dengan dimensi pembangunan dan kondisi perlu pada RPJMN 2015-2019

A. Prioritas Pembangunan NTB

Pada dokumen RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 terdapat 10 Prioritas Pembangunan Daerah yaitu :

1) Budi Pekerti Luhur
2) Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan
3) Pendidikan
4) Kesehatan
5) Kesejahteraan Sosial
6) Agroindustri dan Ketahanan Pangan
7) Wirausaha dan Iklim investasi
8) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9) Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
10) Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam

B. Dimensi Pembangunan dan Kondisi Perlu pada RPJMN 2015-2019

Dalam RPJMN 2015-2019, terdapat strategi pembangunan yang dijabarkan dalam tiga dimensi dan satu kondisi perlu, yang diuraikan sebagai berikut :

No	Dimensi dan Prioritas	Tertuang Dalam Strategi Pembangunan Nasional (Buku I RPJMN)	Tertuang Dalam Sasaran Pokok dan Indikator Pembangunan Nasional (Buku I RPJMN)	Prioritas Nasional (Tertuang dalam RKP)	Keterangan
a.	Dimensi Pembangunan Manusia, dengan prioritas :				
	1) Pendidikan	√	√	√	Prioritas 2016, 2017
	2) Kesehatan dan Perbaikan Gizi	√	√	√	Prioritas 2016, 2017
	3) Pembangunan mental dan karakter	√	√	X	
	4) Perumahan	X	X	√	Prioritas 2016, 2017
	5) Revolusi Karakter Bangsa	X	X	√	Prioritas 2016
	6) Revolusi Mental	X	X	√	Prioritas 2016, 2017
	7) Memperteguh Kebinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia	X	X	√	Prioritas 2016
b.	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, dengan Prioritas :				
	1) Kedaulatan Pangan	√	√	√	Prioritas 2016, 2017
	2) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan	√	√	√	Prioritas 2016, 2017 *(Kewenangan Pusat Berdasarkan Indikator yang ada)*
	3) Pariwisata dan Industri	√	√	√	Prioritas 2016, 2017
	4) Kemaritiman dan Kelautan	√	√	√	Prioritas 2016, 2017

No	Dimensi dan Prioritas	Tertuang Dalam Strategi Pembangunan Nasional (Buku I RPJMN)	Tertuang Dalam Sasaran Pokok dan Indikator Pembangunan Nasional (Buku I RPJMN)	Prioritas Nasional (Tertuang dalam RKP)	Keterangan
	5) Lingkungan	x	√	X	
	6) Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	X	√	X	
	7) Inovasi dan Teknologi	X	X	√	Prioritas 2016
	8) Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	X	x	√	Prioritas 2017
	9) Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha	X	X	√	Prioritas 2017
	10) Peningkatan Ekspor Non Migas	X	X	√	Prioritas 2017
	11) Reformasi Fiskal	X	X	√	Prioritas 2017
	12) Reformasi Agraria	x	X	√	Prioritas 2017
c.	Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan, dengan prioritas				
	1) Antar Kelompok Pendapatan	√	√	√	
	2) Antar Wilayah : (1) Desa; (2) Perbatsan; (3) Tertinggal; (4) Perkotaan	√	√	√	
	3) Ketimpangan antar kelompok masyarakat	X	X	√	Prioritas 2016
	4) Pengembangan Wilayah	X	X	√	Prioritas 2016
	5) Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	X	X	√	Prioritas 2016
	6) Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan	X	X	√	Prioritas 2016

No	Dimensi dan Prioritas	Tertuang Dalam Strategi Pembangunan Nasional (Buku I RPJMN)	Tertuang Dalam Sasaran Pokok dan Indikator Pembangunan Nasional (Buku I RPJMN)	Prioritas Nasional (Tertuang dalam RKP)	Keterangan
	7) Tata Ruang dan Pertanahan	X	X	√	Prioritas 2016
	8) Daerah Perbatasan	X	X	√	Prioritas 2017
	9) Daerah Tertinggal	X	X	√	Prioritas 2017
	10) Antar Kelompok Pendapatan	X	X	√	Prioritas 2017
	11) Desa dan Kawasan Pedesaan	X	X	√	Prioritas 2017
	12) Perkotaan	X	X	√	Prioritas 2017
	13) Reformasi Agraria	X	X	√	Prioritas 2017
d.	Kondisi Perlu, dengan Prioritas				
	1) Keamanan dan Ketertiban	√	√	√	
	2) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	√	√	√	
	3) Kepastian dan Penegaan Hukum	√	√	√	
	4) Politik dan Demokrasi				
	5) Sensus Ekonomi 2016	X	X	√	Prioritas 2016
	6) Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi	X	X	√	Prioritas 2017

- Penjabaran strategi pembangunan nasional melalui tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu, sebagaimana tertuang dalam Buku RPJMN mengalami banyak pengembangan pada tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun, yang diikuti dengan bertambahnya sasaran/indikator pokok pembangunan nasional.
- Hal tersebut berakibat banyaknya strategi pembangunan nasional yang tidak bisa dikaitkan dengan 10 prioritas pembangunan NTB yang dibatasi dengan 31 indikator.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan di RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 dengan Dimensi Pembangunan dan Kondisi Perlu RPJMN 2015-2019 pada sasaran pokok Buku I RPJMN, disajikan pada table berikut.

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018	DIMENSI PEMBANGUNAN DAN KONDISI PERLU RPJMN 2015-2019
1	Budi Pekerti Luhur	**Dimensi Pembangunan Manusia :** (Mental/ Karakter)
2	Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan	**Kondisi Perlu :** (Keamanan dan Ketertiban) **Kondisi Perlu :** (Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi) **Kondisi Perlu :** (Kepastian dan Penegakan Hukum) **Kondisi Perlu :** (Politik dan Demokrasi)
3	Pendidikan	**Dimensi Pembangunan Manusia** : (Pendidikan)
4	Kesehatan	**Dimensi Pembangunan Manusia** : (Kesehatan)
5	Kesejahteraan Sosial	**Dimensi Pembangunan Manusia :** (Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) **Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan** : (Antar Kelompok Pendapatan)
6	Agroindustri dan Ketahanan Pangan	**Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan :** (Pariwisata dan Industri) **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** : (Kedaulatan Pangan) **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** : (Kemaritiman dan Kelautan) **Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan** : (Antar Wilayah : (1) Desa; (2) Perbatsan; (3) Tertinggal; (4) Perkotaan))
7	Wirausaha dan Iklim investasi	**Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan** : (Antar Kelompok Pendapatan)

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018	DIMENSI PEMBANGUNAN DAN KONDISI PERLU RPJMN 2015-2019
8	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan :** (Pariwisata dan Industri) **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan :** (Pariwisata dan Industri) **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** : (Kemaritiman dan Kelautan)
10	Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam	**Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan :** (Lingkungan)

Jika hanya berfokus pada Startegi Pembangunan Nasional pada Dokumen RPJMN, seluruh Dimensi Pembangunan dan Kondisi Perlu dapat diselaraskan dengan 10 Prioritas Pembangunan NTB

III. Keterkaitan indikator RPJMD dengan sasaran pokok/indikator RPJMN **:**

1. RPJMD Provinsi NTB memuat 31 indikator kinerja pembangunan daerah.
2. RPJMN memuat 177 Sasaran/Indikator Pokok, yang terdiri dari :
    a. Sasaran/indikator pokok yang harus dijabarkan oleh daerah sebanyak 141 indikator
    b. Sasaran/indikator pokok yang tidak harus dijabarkan sebanyak 36 indikator, karena merupakan kewenangan pusat

Dari hasil identifikasi sementara, terdapat 33 sasaran/indikator pokok nasional (23,40%) yang telah dijabarkan dalam RPJMD, dengan rincian :

- 13 sasaran/indikator pokok (9,22) terdapat didalam 31 indikator kinerja daerah
- 20 sasaran/indikator pokok (14,18%) terdapat didalam program prioritas daerah

Sedikitnya indikator daerah yang dapat diselaraskan dengan sasaran/indikator pokok nasional disebabkan oleh besarnya berbedaan jumlah indikator.

Tabel 7.1

Prioritas Pembangunan Provinsi NTB tahun 2013-2018

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	Budipekerti Luhur	Pembangunan sarana prasarana Islamic Center sebagai pusat ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya serta pusat pemberdayaan ekonomi islam	Pembangunan sarana dan prasarana umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan pelayanan keagamaan	Adminstrasi Pemerintahan	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan aktivitas rumah ibadah	Peningkatan pelayanan keagamaan	Adminstrasi Pemerintahan	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemasyarakatan budaya tertib	Penataan peraturan perundang-undangan	Adminstrasi Pemerintahan	Biro Hukum
			Peningkatan kesadaran tertib masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
			Pengembangan wawasan kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
		Peningkatan kapabilitas lembaga-lembaga keagamaan dan kapasitas juru dakwah/ ceramah	Peningkatan pelayanan keagamaan	Adminstrasi Pemerintahan	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Peningkatan kualitas informasi yang edukatif	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Program kerjasama informasi dengan mas media		
		Peningkatan kerukunan hidup antar ummat beragama dan pencegahan berkembangnya paham radikal	Pengembangan wawasan kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
		Pemantapan Ipoleksosbudhankam masyarakat	Pendidikan politik masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
		Pengembangan kurikulum sekolah berbasis muatan lokal akhlak mulia dan budaya termasuk bahasa daerah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
			Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi		

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
		Pembentukan pranata-pranata adat	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengembangan masyarakat/budayawan/ seniman kreatif	Pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan pusat kebudayaan daerah	Pengelolaan kekayaan budaya		
		Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Pengembangan nilai budaya		
		Rehabilitasi dan renovasi situs-situs dan peninggalan budaya	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		
		Perlindungan hak kekayaan karya seni budaya daerah	Pengelolaan kekayaan budaya		
		Penyelamatan dan publikasi naskah kuno/ klasik daerah	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan
			Pengembangan nilai budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	
2	Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan stabilitas keamanan	Pemantapan Penerapan SOP dan SPM	Peningkatan pelayanan Publik	Adminstrasi Pemerintahan	Biro Organisasi

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
		Peningkatan kompetensi pelayan publik dan penerapan RAD PPK	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
			Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan	Inspektorat
		Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Adminstrasi Pemerintahan	Biro Organisasi
		Pengembangan e-government	Penataan administrasi kependudukan	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Komunikasi dan Informatika	
		Pengembangan keamanan informasi	Program optimalisasi keamanan informasi	Persandian	
		Perkuatan aturan hukum menangkal gangguan keamanan dan ketertiban	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Adminstrasi Pemerintahan	Biro hukum
			Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
		Fasilitasi peningkatan kompetensi penegak PERDA	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Satpol PP
		Pencegahan dan penanganan masalah tanah terlantar dan tanah konflik	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Pertanahan	Biro pemerintahan
		Pencegahan dan penanganan penyebaran dan penggunaan narkotika	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Sosial	Dinas Sosial
			Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
		Peningkatan kapabilitas koperasi, UMKM dan BUMD	Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		
		Edukasi,fasilitasi dan sosialisasi pelaku usaha yang diarahkan pada kualitas pengelolaan usaha	Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
			Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM		
			Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Peningkatan kualitas rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Perencanaan Tata Ruang		
			Pengembangan data/informasi		
			Kerjasama pembangunan		
			Program perencanaan pembangunan ekonomi		
			Program perencanaan sosial dan budaya		
		Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan BMD	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan aset	Keuangan	BPKAD
		Peningkatan kualitas pengawasan internal	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan	Pengawasan	Inspektorat
			Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Adminstrasi Pemerintahan	Biro Bina APP & LPBJP
		Pengembangan kehidupan politik yang santun dan demokrasi yang sehat	Pendidikan Politik masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
			Penataan daerah otonomi baru	Adminstrasi Pemerintahan	Biro Pemerintahan
			Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		Biro Umum dan Biro Humas
			Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Pendidikan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan		
		Peningkatan kamtibmas dan tertib hukum masyarakat	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Penataan peraturan perundang-undangan	Adminstrasi Pemerintahan	Biro Hukum
			Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan	Inspektorat
		Peningkatan kualitas aparatur sipil negara	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kepegawaian	BKD
			Pembinaan dan pengembangan aparatur		
3	Kesehatan	Pengembangan standar kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan Publik	Adminstrasi Pemerintahan	Biro Organisasi
			Obat dan perbekalan kesehatan	Kesehatan	Dinas kesehatan
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
		Peningkatan kesehatan anak dan ibu melahirkan	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas kesehatan
		Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk	Perbaikan gizi masyarakat		
		Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi	Pengembangan lingkungan sehat		
		Melanjutkan pembangunan RSU Provinsi, sarana prasarana kesehatan lainnya	Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSU Provinsi, RSJ Mutiara Sukma, RSUD HL. Manambai Abdulkadir
			Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD		
		Peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kesehatan	Dinas kesehatan, RSU Provinsi, RSJ Mutiara Sukma, RSUD HL. Manambai Abdulkadir
		Penyediaan layanan kesehatan yang murah dan terjangkau bagi semua	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas kesehatan, RSU Provinsi, RSJ Mutiara Sukma, RSUD HL. Manambai Abdulkadir
		Pengembangan pendidikan pra nikah bagi calon suami istri	Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
		Pengembangan keluarga sehat dan sejahtera			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
4	Pendidikan	Pengembangan pendidikan karakter	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penurunan angka putus sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
			Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi		
		Pengembangan pendidikan kejuruan/ keterampilan	Pendidikan non formal		
			Pendidikan luar biasa		
			Pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan RSBI/SBI		
		Peningkatan minat baca masyarakat dan keaksaraan usaha mandiri	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan kualitas tenaga pendidik	Peningkatan kapasitas sumberdaya pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
5	Kesejahteraan Sosial	Perlindungan anak dan Pemberdayaan perempuan	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan		

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
			Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Pendewasaan Usia Perkawinan	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Dikbud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Bakesbangpoldagri
		Pembentukan atelit berprestasi	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Penanganan masalah kesejahteraan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Dinas Sosial
			Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Ketenagakerjaan	Disnakertrans
			Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	sosial	Dinas Sosial
			Pembinaan anak terlantar		
			Pembinaan para penyandang cacat dan trauma		
			Pembinaan eks penyandang penyakit sosial		
			Pembinaan panti asuhan/panti jompo		
		Revitalisasi sarana prasarana Olahraga	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR
		Revitalisasi sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
		Koordinasi dan mobilisasi LTSP yang diarahkan pada kualitas pelayanan	Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Tenaga kerja	
		Peningkatan kualitas perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Tenaga kerja	
			Pengawasan ketenagakerjaan	Tenaga kerja	
		Relokasi penduduk dalam dan ke luar daerah	Penempatan dan pengembangan wilayah transmigrasi	Ketransmigrasian	
6	Agroindustri dan Ketahanan Pangan	Database potensi SDA	Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
				Penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Intensifikasi produk SDA berkualitas yang diarahkan pada tanaman padi dan palawija	peningkatan ketahanan pangan	Ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Ekstensifikasi lahan produk SDA berkualitas yang diarahkan pada lahan kering dan sawah	Peningkatan produksi hasil pertanian/ perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
		Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi tanaman dan hasil ikutannya yang di arahkan pada komoditi padi, jagung, kentang, kedelai, kopi, kakao dan jambu mete. Khusus komoditi perkebunan di Kawasan industri Masyarakat Perkebunan (KIMBun)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Peningkatan kesejahteraan petani	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
			Peningkatan ketahanan pangan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang diarahkan pada komoditi gaharu, ketak, kemiri, madu dan rotan	Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Dinas perindustrian

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
		Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk budidaya perikanan dan kelautan yang diarahkan pada komoditas ekspor rumput laut, udang dan kerapu pada kawasan peruntukan perikanan yang masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi.	Pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir		
			Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		
			Pengembangan perikanan tangkap		
		Ekstensifikasi dan intensifikasi ternak yang diarahkan pada komoditi sapi	Peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Disnakeswan
		Ekstensifikasi pemasaran produk SDA berkualitas yang diarahkan pada komoditi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan serta hasil hutan bukan kayu	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Pertanian	Dinas pertanian dan perkebunan, Dinas perindustrian dan Dinas Perdagangan
			Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri/lelang	Perdagangan	

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
			Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		
		Fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas yang diarahkan pada hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta hasil hutan bukan kayu	Pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	
			Pengembangan sentra-sentra industri potensial		
			Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komuditi unggulan daerah		
		Fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif yang diarahkan pada kerajinan industri dan makanan olahan	Pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	
		Fasilitasi kelompok masyarakat diarahkan pada pendampingan petani, peternak, nelayan dan masyarakat pesisir serta masyarakat sekitar kawasan hutan	Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan, penyuluh kehutanan, kelautan dan perikanan	Pertanian	Dinas pertanian dan perkebunan
		Revitalisasi sarana prasarana perekonomian yang diarahkan pada sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Dinas perindustrian

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
		Revitalisasi peralatan industri kecil menengah	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Dinas perindustrian
			Peningkatan kapasitas IPTEK system produksi		
			Penelitian dan pengkajian teknologi terapan	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Mobilisasi pemanfaatan TTG	Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penelitian dan pengkajian teknologi terapan	Lingkungan hidup	
		Koordinasi dan sinkronisasi dokumen penunjang kerjasama ekonomi yang diarahkan pada penyiapan bahan baku, olahan dan pemasaran	Pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Dinas perindustrian
			Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Adminstrasi Pemerintahan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Wirausaha dan Iklim Investasi	Pembentukan dan Pengembangan wirausaha yang diarahkan pada komoditi unggulan daerah	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi UKM
			Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan bagi Pemuda	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
		Investasi dan fasilitasi modal usaha kerja yang diarahkan pada UMKM dan IKM	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi UKM
			Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi dan UKM	
			Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (BUMDes/LKM & Pasar desa)	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Divestasi dan fasilitasi penyertaan modal yang diarahkan pada BUMD dan swasta	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Adminstrasi Pemerintahan	Biro Adm Perekonomian
		Promosi layanan informasi yang diarahkan pada PTSP Online	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Fasilitasi dan regulasi ekspor daerah yang diarahkan pada komoditi unggulan daerah	Peningkatan dan pengembangan ekspor	Perdagangan	Dinas Perdagangan
		Identifikasi dan evaluasi data dan informasi yang diarahkan pada database sumber-sumber PAD	Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
		Sosialisasi dan fasilitasi system pelayanan PAD yang diarahkan pada sistem pelayanan online	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
		Identifikasi, fasilitasi dan negosiasi dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya yang diarahkan pada database dana non pemerintah daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
8	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Promosi/pemasaran obyek wisata	Pengembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan kualitas produk ekonomi kreatif	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian
		Pengembangan destinasi wisata	Pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Pengembangan kemitraan		
9	Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Revitalisasi dan konstruksi sarana prasarana wilayah	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program pembangunan jalan dan jembatan		
			Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya		
			Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
			Pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Pengembangan dan pemanfaatan energi		
		Pengembangan system jaringan transportasi	Peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ		
			Pengendalian dan pengamanan lalu lintas		
		Pendayagunaan Rencana Tata Ruang	Perencanaan tata ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pemanfaatan ruang		
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
		Revitalisasi lingkungan permukiman	Pengembangan perumahan	Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Lingkungan sehat perumahan		
			Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
10	Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Pengendalian dampak penambangan liar terhadap lingkungan hidup	Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Perencanaan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral , Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Konservasi sumberdaya alam yang diarahkan pada Kawasan Geopark, Kawasan hutan, kawasan bantaran sungai, kawasan rawan bencana,kawasan pertambangan tanpa ijin, kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, KSP fungsi lindung dan konservasi serta berbagai sumber daya hayati, keanekaragaman hayati dan plasma nutfah	Perlindungan dan Konsevasi sumberdaya hutan	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral , adan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		
			Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Kelautan dan Perikanan	Dinas kelautan dan perikanan
			Pengembanga, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Revitalisasi sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	BPBD dan Dinas Sosial
			Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	BPBD
			Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	Dinas Sosial
			Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSJ Mutiara Sukma
			Penanganan tanggap darurat dan evakuasi/penyelamatan korban bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	BPMPD

No.	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
		Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat kawasan rawan bencana dan sekitarnya	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	BPBD
			Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	BPBD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengembangan kawasan tangguh bencana	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	BPBD

Tabel 7.2

Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI 1: MEMPERCEPAT PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG BERKARAKTER MELALUI PEMANTAPAN KETAATAN BERAGAMA, PENINGKATAN BUDI PEKERTI, DAN PENGEMBANGAN TOLERANSI									
a	Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam	Fasilitasi, edukasi dan revitalisasi sarana prasarana Islamic Center yang diarahkan pada pembangunan sarana prasarana ibadah, aktivitas keagamaan dan pemberdayaan sosial ekonomi ummat	Penyediaan bangunan masjid, kegiatan ibadah, kajian ilmu keagamaan, dan pemberdayaan sosial ekonomi ummat	Islamic Center Terbangun (%)	59,31	100	Pembangunan sarana dan prasarana umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pemuka/tokoh agama yang mendapatkan sosialisasi pembangunan daerah (Orang)	150	190	Peningkatan pelayanan keagamaan	Penunjang Adminstrasi Pemerintahan	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Sentra UMKM yang dikembangkan (Sentra)	32	160	Pengembangan Sistem pendukung usaha bagi UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
b	Berkembangnya kegiatan rumah ibadah	Fasilitasi, edukasi, mobilisasi dan revitalisasi kegiatan rumah ibadah yang diarahkan pada Kegiatan ibadah,	Meningkatkan aktivitas jamaah dalam beribadah dan kegiatan sosial-ekonomi setempat	Pemuka/tokoh agama yang mendapatkan sosialisasi pembangunan daerah (Orang)	150	190	Peningkatan pelayanan keagamaan	Penunjang Adminstrasi Pemerintahan	Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				BUMDes/LKM & Pasar desa	30 / 30	150/150	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (BUMDes/LKM & Pasar desa)	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Lokasi pengembangan wirausaha dan UMKM (Kab/Kota)	10	11	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
c	Terwujudnya masyarakat yang tertib	Sosialisasi, mobilisasi dan edukasi masyarakat yang diarahkan pada budaya tertib	Kerjasama dengan aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat/ budaya	Produk hukum daerah yg terbentuk	10 Perda, 30 Pergub dan 700 Kpts	50 Perda,150 Pergub dan 3500 Kpts	Penataan peraturan perundang-undangan	Penunjang Adminstrasi Pemerintahan	Biro Hukum
				Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (%)	45	100	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP
				Jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	-	2 Orang Petugas perlingkun-gan/dusun	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP
				Jumlah Masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan	3000	25000	Pengembangan wawasan kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
d	Terwujudnya masyarakat yang taat beragama	Edukasi dan mediasi masyarakat yang diarahkan pada lembaga-lembaga keagamaan	Mengembangkan aktifitas keagamaan	Jumlah TPA	6,674	8,474	Peningkatan pelayanan keagamaan	Penunjang Adminstrasi Pemerintahan	Biro Kesejahteraan Rakyat
e	Tersedianya pemuka agama yang berkualitas	Edukasi pemuka agama yang diarahkan pada metode dakwah dan ceramah serta wawasan pembangunan daerah	Keimanan, ketaqwaan dan pembangunan	Pemuka agama yang disosialisasi pembangunan daerah (Orang)	150	850			
f	Tersedianya informasi yang edukatif	Edukasi , mediasi dan Fasilitasi media masa melalui Pengembangan literasi media	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Aplikasi SIP-PPID Provinsi NTB dan Kab/Kota se NTB yang terbangun (SKPD)	5	45	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
g	Berkurangnya konflik sosial	Sosialisasi, edukasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan kelompok masyarakat yang diarahkan pada masyarakat rawan konflik	Kerjasama dengan aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat/ budaya	Penurunan Jumlah Konflik Sosial (Kasus)	54	27	Pengembangan wawasan kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
							Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
h	Meminimalisir berkembangnya paham radikal di Masyarakat	Sosialisasi, koordinasi dan deradikalisasi kepada masyarakat yang diarahkan pada nilai-nilai keagamaan	Mengembangkan fungsi lembaga dan majelis keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat/budaya	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi paham radikalisme	3000	25000	Pengembangan wawasan kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
i	Terwujudnya ketahanan ipolek-sosbudhankam	Sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan edukasi kepada masyarakat yang diarahkan pada ideologi nasional dan budaya daerah	Kerjasama antara Organisasi politik, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh adat/ budaya	Masyarakat yang dididik (%)	15	75	Pendidikan politik masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
j	Pelaksanaan pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah	Koordinasi, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat yang diarahkan pada kurikulum sekolah berbasis muatan lokal akhlak mulia dan budaya	Menanamkan pendidikan akhlak mulia dan budaya sebagai muatan lokal di sekolah	Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah (%)	10	75	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
							Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi		

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
a	Meningkatnya jumlah pranata adat	Koordinasi, revitalisasi dan fasilitasi pranata-pranata adat yang diarahkan pada awig-awig dan seluruh aspek kehidupan masyarakat	Kerjasama antara tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dalam membentuk pranata adat desa	Lembaga adat yang terbentuk dan terbina (Lembaga)	50	260	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b	Terwujudnya masyarakat/ budayawan/ seniman yang kreatif dan inovatif	Fasilitasi, edukasi dan promosi masyarakat/ budayawan/ seniman yang diarahkan pada nilai-nilai budaya lokal	Mengembangkan event-event budaya lokal di tingkat nasional maupun internasional	Rencana program pengelolaan keragaman budaya	7	30	Pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
c	Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif	Koordinasi , Revitalisasi dan fasilitasi pusat kebudayaan daerah yang diarahkan pada museum, taman budaya maupun lokasi peninggalan budaya lainnya	Membangun pusat kebudayaan daerah	Pusat Kebudayaan yang terbentuk	0	3	Pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
d	Tersedianya sanggar seni dan budaya yang profesional	Koordinasi, revitalisasi dan fasilitasi sanggar seni dan budaya yang diarahkan pada penciptaan kreasi seni dan budaya	Mengembangkan event-event seni lokal	Keragaman Budaya yang dikelola (Event)	8	60	Pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan	
e	Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal	Fasilitasi, mobilisasi dan demontrasi adat budaya dan kearifan lokal yang diarahkan pada ragam adat istiadat dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari	Mengembangkan event-event budaya lokal di tingkat nasional dan internasional	Nilai Budaya yang dikembangkan (Event)	13	85	Pengembangan nilai budaya	Kebudayaan	
f	Tersedianya informasi budaya dan kearifan lokal	Koordinasi dan inventarisasi informasi yang diarahkan khasanah budaya daerah pada khasanah budaya daerah	Menyusun dokumen dan kajian budaya dan kearifan lokal	Kekayaan Budaya yang di kelola (Event)	5	35	Pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	
g	Terpeliharanya situs-situs dan peninggalan budaya lainnya	Rehabilitasi dan renovasi situs-situs dan peninggalan budaya lainnya yang diarahkan pada obyek-obyek wisata	Kerjasama dengan lembaga arkeologi dan kepurbakalaan serta masyarakat setempat	Kekayaan budaya yang dikerjasamakan (Event)	3	11	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
h	Terpeliharanya bahasa dan sastra lokal	Koordinasi, edukasi, Fasilitasi dan regulasi bahasa dan sastra lokal yang diarahkan pada kajian, pengembangan dan pemanfaatan Bahasa Sasak, Samawa dan Mbojo	Kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, pemerintah dan lembaga kebudayaan	Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah (%)	10	75	Pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	
							Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Pendidikan menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
i	Terlindunginya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal	Koordinasi, fasilitasi dan regulasi kekayaan seni budaya dan kearifan lokal yang diarahkan pada karya seni budaya dan nilai kearifan lokal	Pengurusan hak kepemilikan karya seni budaya dan nilai kearifan lokal NTB	Jumlah pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah			Pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				- Desain industry	37	112			
				- Merek	42	20			
				- Hak CIpta	18	15			

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
j	Tersedia, terpelihara dan tersebarnya koleksi daerah berupa naskah kuno, karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Inventarisasi, dokumentasi dan publikasi koleksi daerah yang diarahkan pada naskah kuno/ klasik dan koleksi deposit daerah NTB	Menyusun, menghimpun naskah kuno, karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Bertambahnya khasanah dokumen/arsip daerah yang terselamatkan (berkas)	1,787	2,187	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Nilai Budaya yang dikembangkan (Event)	13	85	Pengembangan nilai budaya	Kebudayaan	
				Kekayaan Budaya yang di kelola (Event)	5	35	Pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	
MISI 3: MELANJUTKAN IKHTIAR REFORMASI BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI, PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN, DAN MEMANTAPKAN STABILITAS KEAMANAN									
a	Meningkatnya tatakelola pengaduan pelayanan publik	Koordinasi, konsultasi, regulasi dan fasilitasi SPM dan SOP yang diarahkan pada SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota	Penerapan reward dan punishment kepada SKPD dan Pemerintah kabupaten/kota	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik (%)	100	100	Peningkatan pelayanan Publik	Penunjang Adminstrasi Pemerintahan	Biro Organisasi
b	Terwujudnya aparatur yang profesional	Sosialisasi, edukasi dan fasilitasi aparatur yang diarahkan pada peningkatan kompetensi pelayan publik dan penerapan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Perkuatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat	Pembinaan dan pengembangan aparatur yang terlaksana secara optimal	250 jabatan fungsional, 89 jabatan struktural, 40 kasus PNS, 100 penghargaan SLKS, 190 rekomendasi Bapertarum, DP3 Eselon II 50 orang dan 200 rekomendasi tali asih	1.250 jabatan fungsional, 446 jabatan structural, 150 kasus PNS, 500 penghargaan SLKS, 950 rekomendasi Bapertarum, DP3 Eselon II 200 orang dan 1000 rekomendasi tali asih	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Jumlah penerima beasiswa s1,s2 dan s3 (org)	15	75	Pendidikan tinggi	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Upaya peningkatan pengawasan internal (Kegiatan)	3	3	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan	Inspektorat
c	Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai	Renovasi, revitalisasi dan fasilitasi prasarana pelayanan publik yang diarahkan pada peningkatan kualitas sarana prasarana termasuk layanan informasi	Penyediaan desk dan pos pengaduan	Pengaduan masyarakat yang tertangani (%)	100	100	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Penunjang Adminstrasi Pemerintahan	Biro Organisasi
d	Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah	Sosialisasi, inventarisasi, fasilitasi dan duplikasi dokumen/arsip daerah yang diarahkan pad naskah khasanah NTB	Mengembangkan digital arsip	Kemantapan pemeliharaan arsip daerah (Berkas)	20,500	162,100	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
e	Meningkatnya masyarakat yang menggunakan layanan informasi berbasis IT	Fasilitasi, sosialisasi dan publikasi data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diarahkan pada penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan e-government	Mengembang-kan kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, SDM, aplikasi dan perencanaan e- government	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB online (kali)	4.653	160,000	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Statistik	
		Optimalisasi, invetarisasi dan publikasi data pengelolaan dan pemanfaatan informasi pembangunan pembangunan daerah	Penyediaan desk layanan informasi	Tingkat kunjungan dan permintaan infromasi pembangunan daerah melalui desk layanan (kali)	0	12,000	Program pengelolaan data dan pelayanan informasi pembangunan daerah	Komunikasi dan Informatika	
		Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan fasilitasi sarana prasarana proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel	Optimalisasi pelayanan e-Procurement	Data dan layanan informasi pengadaan barang dan jasa berbasis TIK	0	2	Program Optimalisasi pelayanan e-Procurement	Komunikasi dan Informatika	
f	Terwujudnya aturan hukum yang efektif	Koordinasi perkuatan aturan hukum yang diarahkan pada Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Menyediakan produk hukum sesuai kondisi aktual	Produk hukum daerah yg terbentuk	54 Perda	104 perda	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penunjang Adminstrasi Pemerintahan	Biro hukum
					221 Pergub	371 pergub			
					3.529 Kpts	7.029 kpts			

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
g	Terfasilitasinya aparat hukum yang profesional	Edukasi aparat hukum yang diarahkan pada Aparat penegak hukum Peraturan Daerah/ Perundangan lainnya	Pendidikan dan pelatihan kemampuan aparat penegak hukum	Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (%)	45	100	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP
h	Terfasilitasiya sarana prasarana penegakan hukum yang memadai	Konsultasi, koordinasi, dan revitalisasi sarana prasarana penegakan hukum yang diarahkan pada Sistem komunikasi terpadu antar aparat penegak hukum	Kerjasama antar aparat penegak hukum						
i	Terwujudnya aparatur, masyarakat sadar hukum	Sosialisasi, koordinasi, edukasi dan rehabilitasi aparatur dan masyarakat yang diarahkan pada penyadaran perbuatan melanggar hukum	Kerjasama antara aparat penegak hukum, Toga, dan Toma	Produk hukum daerah yg terbentuk	10 Perda, 30 Pergub dan 700 Kpts	50 Perda, 150 Pergub dan 3500 Kpts	Penataan peraturan perundang-undangan	Penunjang Adminstrasi Pemerintahan	Biro Hukum
				Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang optimal	250 jabatan fungsional, 89 jabatan struktural, 40 kasus PNS, 100 penghargaan SLKS, 190 rekomendasi Bapertarum, DP3 Eselon II 50 orang dan 200 rekomendasi tali asih	1.250 jabatan fungsional, 446 jabatan structural, 150 kasus PNS, 500 penghargaan SLKS, 950 rekomendasi Bapertarum, DP3 Eselon II 200 orang dan 1000 rekomendasi tali asih	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Kepegawaian	BKD

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Inventarisasi dan fasilitasi aparatur serta masyarakat yang diarahkan pada pencegahan dan penanganan masalah tanah terlantar dan tanah konflik	Kerjasama antara BPN dan aparat penegak hukum	Pendataan tanah-tanah terindikasi terlantar dan penetapan status tanah. Tertibnya regulasi perijinan yang diberikan (Kab/Kota)	10	11	Penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pertanahan	Biro pemerintahan
j	Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkotika	Koordinasi dan mobilisasi pencegahan dan penanganan penyebaran dan penggunaan narkotika yang diarahkan pada kalangan generasi muda, aparatur dan masyarakat	Kerjasama antara aparat penegak hukum, Toga, Toma dan Lembaga Pendidikan	masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemberantasan penyakit masyarakat (%)	10	50	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
				Cakupan desa siaga aktif (%)	50	58	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan eks penyandang penyakit sosial yang dibina (%)	3,33	3,00	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Sosial	Dinas Sosial
				masyarakat yang mengikuti sosialisasi kamtibmas (%)	10	50	Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
k	Terwujudnya lembaga usaha yang akuntabel	Koordinasi, promosi, sosialisasi, edukasi dan fasilitasi lembaga usaha yang diarahkan pada koperasi, UMKM dan BUMD	Mengembangkan standart kualitas pelayanan lembaga usaha	Sentra UMKM yang dikembangkan (Sentra)	32	160	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Koperasi yang dibina kualitasnya (Koperasi)	200	1,000	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		
l	Tersedianya pelaku usaha yang profesional	Edukasi,fasilitasi dan sosialisasi pelaku usaha yang diarahkan pada kualitas pengelolaan usaha	Mengembangkan kapasitas pelaku usaha	Sentra UMKM yang dikembangkan (Sentra)	32	160	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Lokasi pengembangan wirausaha dan UMKM (Kab/Kota)	10	11	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM		
				Laju pertumbuhan investasi PMA/PMDN	4	13,5	Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
m	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, konsultasi dan sosialisasi rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang diarahkan pada proses perencanaan dan proses monitoring evaluasi program/kegiatan utama dan program/kegiatan terobosan, serta pendataan/ informasi pembangunan daerah	Mengembangkan perencanaan partisipatif	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD (%)	58,84	100	Perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Kegiatan perencanaan sektoral dan monitoring evaluasi yang diselenggarakan (keg)	26	26	Peningkatan perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah		
				Dokumen Kerjasama (Dok)	11	11	Pengembangan data/informasi Kerjasama pembangunan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
n	Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik	Edukasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi tata kelola keuangan daerah dan BMD yang diarahkan pada administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah	Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (asset)	Opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	WTP	WTP	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan aset	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
o	Terwujudnya pengawasan yang profesional	Edukasi dan fasilitasi pengawasan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan	Mengembangkan Profesionalisme pengawas/ Auditor	Pelatihan aparatur pengawas (orang)	23	136	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan	Pengawasan	Inspektorat
			Meningkatkan kualitas kinerja ULP	kualitas layanan pengadaan barang jasa (%)	45	85	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penunjang Adminstrasi Pemerintahan	Biro Bina APP & LPBP
p	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik	Edukasi, matrikulasi dan fasilitasi perwujudan suasana politik yang santun dan bertanggungjawab yang diarahkan pada pendidikan kesadaran politik masyarakat	Mengembangkan pola rekrutmen dan kaderisasi Orpol dan Ormas	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik (%)	70,47	73,00	Pendidikan Politik masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
q	Tertatanya Administrasi Pemerintahan	Sosialisasi, fasilitasi, koordinasi Administrasi Pemerintahan yang diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah, penataan batas wilayah dan urusan politik	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah	3 Perda 3 Pergub	10 Perda 10 Pergub	Penataan daerah otonomi baru	Administrasi Pemerintahan	Biro Adm Pemerintahan
				Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilaksanakan (Keg)	8	8	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		Biro Umum
r	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif	Matrikulasi, mobilisasi dan fasilitasi Ormas dan Orpol yang diarahkan pada Kepekaan terhadap masalah sosial politik	Kerjasama pemerintah dengan organisasi masyarakat dan organisasi politik	Pengembangan wawasan kebangsaan yang bermitra (%)	20	100	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
				Ormas yang terbina dan terdidik (%)	20	100	Pendidikan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan		
s	Terwujudnya masyarakat yang taat hukum	Sosialisasi dan edukasi masyarakat yang diarahkan pada kamtibmas dan tertib hukum	Mengembangkan Kesadaran hukum masyarakat	Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (%)	45	100	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Penerapan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Terbentuknya produk hukum daerah yg bernuansa HAM	10 Perda, 30 Pergub dan 700 Kpts	50 Perda, 150 Pergub dan 3500 Kpts	Penataan peraturan perundang-undangan	Administrasi Pemerintahan	Biro Hukum
				Kualitas Layanan Pengadaan Barang Jasa (%)	45	85	Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan	Inspektorat, Biro Bina APP & LPBJP
t	Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang bersih dan profesional	Edukasi aparat penegak hukum daerah yang diarahkan pada pendidikan mental dan spiritual	Pendidikan agama, motivasi, kewiraan, wawasan kebangsaan dan resolusi konflik	Meningkatnya kualitas pengetahuan, pemahaman dan keterampilan aparatur	105 orang pejabat struktural, 272 orang CPNS, 300 orang PNSD	515 orang pejabat struk-tural,1.388 orang CPNS, 1.710 orang PNSD	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kepegawaian	BKD
u	Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang memadai (POL PP, PPNS, Polisi Kehutanan)	Edukasi dan promosi aparat penegak hukum yang diarahkan pada rekruitmen Satpol PP, PPNS dan PolHut	Kerjasama antar aparat penegak hukum	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang optimal	250 jabatan fungsional, 89 jabatan struktural, 40 kasus PNS, 100 penghar-gaan SLKS, 190 reko-mendasi Baperta-rum, DP3 Eselon II 50 orang dan 200 reko-mendasi tali asih	1.250 jabatan fungsional, 446 jabatan structural, 150 kasus PNS, 500 penghargaan SLKS, 950 rekomendasi Bapertarum, DP3 Eselon II 200 orang dan 1000 rekomendasi tali asih	Pembinaan dan pengembangan aparatur		

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI 4 : MENINGKATKAN MUTU SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYASAING									
a	Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan sosial	Mengembangkan perencanaan partisipatif	Dokumen yang tersusun (Dok)	2	10	Perencanaan pembangunan sosial dan budaya	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Kegiatan yang tersusun (Keg)	2	3	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
b	Terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas	Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi layanan Pendidikan yang diarahkan pada standar pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	6,54	6,95	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penurunan buta huruf penduduk usia > 15 tahun (%)	15,04	10	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
c	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Generasi Emas NTB 2025)	Koordinasi, sinkronisasi, edukasi,fasilitasi dan mobilisasi GENERASI EMAS 2025 yang diarahkan pada Pendidikan pra nikah, kesehatan anak dan ibu melahirkan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, gizi buruk, sanitasi, air bersih layak minum, penderita gangguan jiwa, penyandang cacat, PAUD, pendidikan universal, pendidikan non formal, keaksaraan usaha mandiri dan keluarga berencana di lokasi yang teridentifikasi sebagai kantong-kantong masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial	Mengembangkan kesadaran dan perilaku hidup masyarakat sehat dan cerdas	pasung tertangani (%)	100	100	Upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Provinsi, RSUD HL. Manambai Abdulkadir, RSJ Mutiara Sukma

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				pasien gangguan jiwa tertangani (%)	100	100			
				NAPZA tertangani (%)	100	100			
				HIV/AIDS tertangani (%)	100	100			
				Persen balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	Perbaikan gizi masyarakat		
				prevalensi kurang gizi (%)	18,27	15,0	Perbaikan gizi masyarakat		
				ketersediaan obat dan vaksin (%)	90	95	Obat dan perbekalan kesehatan		
				Cakupan imunisasi dasar lengkap (%)	90	95	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		
				sarana pelayanan kesehatan ruijukan yang terakreditasi (%)	43	95	Pemeliharaan sarana dan prasarana RS/ RSJ/RS Paru/RS Mata		
				Cakupan Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan (%)	55	90	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehaatan masyarakat		
				Rumah sakit yang terbangun (Kegiatan)	2	2	Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD Provinsi, RSUD HL. Manambai Abdulkadir

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	90	90	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan Jamban Keluarga (%)	72.15	80	Pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Usia Harapan Hidup (Tahun)	62,73	67,70	Perbaikan gizi masyarakat, Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dan Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/paru/ rumah sakit mata	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Lembaga PAUD yang dibina	757	3,970	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Siswa yang dibelajarkan	726.141	3,658,198	Wajib Belajar dasar Sembilan tahun		
				Siswa yang dibelajarkan	6.808	35,860	Pendidikan menengah		
				Siswa yang dibelajarkan	3.906	19,530	Pendidikan non formal		

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Sekolah yang dibina	29	149	Pendidikan luar biasa		
				Kunjungan ke perpustakaan (org)	950,000	4,885,000	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Koleksi perpustakaan yang terpelihara (eks)	1.787	9,935			
d	Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten	Edukasi tenaga pelayanan sosial dasar yang diarahkan pada tenaga medis, tenaga pendidik dan pekerja sosial	Meningkatkan kapasitas tenaga strategis pelayanan sosial dasar	Ratio dokter umum terhadap penduduk (/100.000 Penduduk)	15	40	Sumberdaya kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
e	Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai	Revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana layanan sosial dasar yang diarahkan pada sarana prasarana: pendidikan dan kesehatan termasuk RSU Provinsi dan UPT sosial, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga	Mengembangkan kapasitas dan standar sarana pelayanan sosial dasar	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	48	48	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pendidikan, Kesehatan, Sosial, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSU, RSJ, Dinsos, Disnakertrans, Dispora
				Sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memadai (unit)	15	15	Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana pemuda dan olahraga	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
f	Meningkatnya usia kawin pertama perempuan	Sosialisasi dan edukasi perempuan diperdesaan yang diarahkan pada PHBS	Mengembangkan kapasitas sosial dan ekonomi perempuan di perkotaan dan perdesaan	Perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (SKPD)	19	45	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
				Kekerasan terhadap perempuan/anak (korban yang ditangani)	1100	550	Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
				Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (Tahun)	20.52	21,00	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
				Cakupan penyuluhan tentang Bahaya Narkoba dan Pendewasaan Usia Perkawinan (Sekolah)	20	40	Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Pendewasaan Usia Perkawinan	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Dikbud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Bakesbangpoldagri
g	Terwujudnya prestasi olahraga	Fasilitasi dan edukasi pembentukan atelit berprestasi yang diarahkan pada cabang olah raga berprestasi	Meningkatkan kualitas pelatih, mengembangkan event lomba dan mengembangkan sarana prasarana olahraga	Cakupan pembinaan atlet olah raga berprestasi (%)	100	100	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Dikbud

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
h	Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Fasilitasi dan revitalisasi layanan sosial yang diarahkan pada layanan kesehatan, pendidikan, latihan kerja dan kesempatan kerja	Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas	Cakupan Fakir Miskin, KAT dan PMKS yang diberdayakan (%)	2,24	2,75	Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Dinsos
				Tenaga Kerja yang ditingkatkan kualitas dan produktivitasnya (Orang)	2,750	4,000	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Cakupan penanganan kasus kesejahteraan sosial (%)	6,13	3,90	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	Dinas Sosial
				Cakupan anak terlantar yang dibina (%)	10,70	8,00	Pembinaan anak terlantar		
				Cakupan para penyandang cacat dan trauma yang dibina (%)	35,00	4,83	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma		
				Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, PMKS (%)	1,58	2,42	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial		
				cakupan pelayanan terhadap panti asuhan / panti jompo	10.95	8.51	Pembinaan panti asuhan/jompo		
i	Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang memadai	Revitalisasi sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang diarahkan pada BLK, KLK dan lembaga pendidikan keterampilan usaha lainnya	Mengembangkan kapasitas dan standar sarana prasarana diklat tenaga kerja	Tenaga Kerja yang ditingkatkan kualitas dan produktivitasnya (Orang)	2,750	4,000	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
j	Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang lebih profesional	Koordinasi dan mobilisasi LTSP yang diarahkan pada kualitas pelayanan	Perluasan akses pelayanan satu pintu	Lembaga Tenaga Kerja yang dibina (unit)	10	11	Perlindungan dan pengembangan lembaga Tenaga Kerja	Tenaga kerja	
				Kesempatan kerja yang diperluas dan dikembangkan (Org)	71,700	378,496	Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Tenaga kerja	
			Mengembangkan kapasitas pelayan pada LTSP	Tenaga Kerja yang ditingkatkan kualitas dan produktivitasnya (Orang)	2,750	4,000	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tenaga kerja	
k	Tersedianya Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama antar provinsi dan dunia usaha	Koordinasi dan negosiasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang diarahkan pada jenis usaha pariwisata dan agroindustri	Mengembangkan kerjasama usaha antar pemerintah dan pemerintah dengan dunia usaha	Perusahaan yang diawasi keselamatan dan kesehatan kerjanya (perusahaan)	90	90	Pengawasan ketenagakerjaan	Tenaga kerja	
l	Terdistribusinya penduduk ke daerah transmigrasi	Inventarisasi, identifikasi, fasilitasi dan relokasi penduduk yang diarahkan pada transmihgrasi luar daerah	Mengembangkan kawasan produktif terpadu mandiri	Transmigran yang direlokasikan dan yang masih dalam pembinaan (KK)	1,175	2,500	Penempatan dan pengembnagan wilayah transmigrasi	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI 5 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MEMPERCEPAT PENURUNAN KEMISKINAN, DAN MENGEMBANGKAN KEUNGGULAN DAERAH									
a	Terwujudnya rencana pembangunan ekonomi yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, konsultasi rencana pembangunan yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan ekonomi	Mengembangkan perencanaan partisipatif	Perencanaan yang diselenggarakan (keg)	8	8	Perencanaan pembangunan ekonomi	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Perencanaan yang disusun (dok)	2	3	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		
b	Tersedianya data dan informasi potensi daerah	Identifikasi dan inventarisasi data informasi yang diarahkan pada database potensi daerah	Mengembangkan sistem informasi SDA	Data.Informasi yang disusun (Keg)	0	27	Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
c	Termanfaatkan-nya Teknologi Tepat Guna	Mobilisasi dan fasilitasi Teknologi Tepat Guna yang diarahkan pada pemanfaatan TTG oleh masyarakat	Pengkajian dan pemasaran hasil-hasil teknologi tepat guna	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (%)	64	89	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				TTG yang dikaji (unit)	15	75	Penelitian dan pengkajian teknologi terapan	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
d	Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan	Inventarisasi, sosialisasi, fasilitasi dan reklamasi SDA yang diarahkan pada pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan di zona tertentu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	Merevitalisasi kelembagaan usaha pertam-bangan skala kecil dan meng-koordinasikan pengelolan usaha pertambangan	Kegiatan rakyat yang terawasi dan diterbitkan (Klp)	119	695	Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Intensifikasi produk SDA berkualitas yang diarahkan pada tanaman padi dan palawija	Kerjasama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi	Pola pangan harapan (PPH)	79.40	82.50	peningkatan ketahanan pangan	Ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
e	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Fasilitasi, koordiinasi, rehabilitasi dan regulasi pengembangan destinasi wisata yang diarahkan pada Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Geopark Rinjani, dan Taman Nasional Tambora	Mengembangkan daya tarik obyek wisata dan wisata halal	Destinasi yang dikembangkan	10 Pkt	30 Pkt	Pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Paket wisata yang dikembangkan (paket)	20	300	Pengembangan kemitraan		
				Kunjungan Wisatawan (Orang)	1.357.602	4,000,000	Pengembangan destinasi pariwisata		
				- Mancanegara (Orang)	565.944	*2,000,000*	Pengembangan kemitraan		
				- Nusantara (Orang)	791.658	*2,000,000*			
f	Terwujudnya pengembangan atraksi dan daya tarik wisata	Penguatan,fasilitasi atraksi dan daya tarik wisata dan pemanfaatan indus-tri kreatif	Meningkatkan kualitas atraksi dan daya tarik wisata	Rencana Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	0	10	Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata		
g	Terwujudnya promosi dan pemasaran obyek pariwisata	Koordinasi, fasilitasi dan promosi/ pemasaran obyek wisata yang diarahkan pada pasar wisata dunia	Mengembangkan jaringan promosi internasional	Event pemasaran wisata yang diikuti (event)	6	45	Pengembangan pemasaran pariwisata		
h	Tersediannya sarana prasarana produksi yang memadai	Revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana produksi yang diarahkan pada peralatan industri kecil menengah	Kerjasama dengan lembaga riset dan pengembangan	Pertumbuhan IKM yang memanfaatkan teknologi (%)	0	5	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian
				Pertumbuhan Produk IKM yang bersertifikat (%)	0	3.5	Peningkatan kapasitas IPTEK system produksi		

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				TTG yang dikaji (unit)	15	75	Penelitian dan pengkajian teknologi terapan	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
i	Terwujudnya produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar	Ekstensifikasi lahan produk SDA berkualitas yang diarahkan pada lahan kering dan sawah	Pencetakan sawah baru dan normalisasi lahan kering	Produksi Pertanian Tanaman Pangan:			Peningkatan produksi hasil pertanian/ perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Padi (ton)	2,193,598	2,470,813			
				Jagung (ton)	633,773	1,417,436			
				Kedelai (ton)	91,065	126,857			
		Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi tanaman dan hasil ikutannya yang di arahkan pada komoditi padi, jagung, kentang, kedelai, kopi, kakao dan jambu mete. Khusus komoditi perkebunan di Kawasan industry Masyarakat Perkebunan (KIMBun)	Pengembangan produksi pertanian, perkebunan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan:			Peningkatan produksi hasil pertanian/ perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Padi (ton)	2,193,598	2,470,813			
				Jagung (ton)	633,773	1,417,436			
				Kedelai (ton)	91,065	126,857			
				Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura:					
				Bawang Merah (ton)	109,313	113,729			
				Cabai (ton)	39,922	41,535			
				Petani, pelaku agribisnis dan penyuluh pertanian yang ditingkatkan pengetahuannya (Orang)	540	3,060	Peningkatan kesejahteraan petani	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
			Cadangan pangan	Pola pangan harapan (PPH)	78,70	82,50	Peningkatan ketahanan pangan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Kerjasama lembaga riset, perguruan tinggi dan perusaha an swasta/BUMN						
		Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang diarahkan pada komoditi gaharu, ketak, kemiri, madu dan rotan	Kerjasama lembaga riset, perguruan tinggi dan perusaha an swasta/BUMN	Produksi hasil hutan bukan kayu (jenis)	1	5	Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Pengembangan produksi hutan bukan kayu melalui pendekatan Pengelolan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pengembangan industri olahan						Dinas Perindustrian
		Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk budidaya perikanan dan kelautan yang diarahkan pada komoditas ekspor rumput laut, udang dan kerapu pada kawasan peruntukan perikanan yang masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi.	Kerjasama lembaga riset, perguruan tinggi dan perusaha an swasta/BUMN	Budidaya perikanan yang dikembangkan (Keg)	4	4	Pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengembangan produksi perikanan	Kelompok yang memiliki kemitraan dengan pengusaha	0	6	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir		
				Produksi Perikanan budidaya (ton)	876,402.67	1,126,173	Pengembangan budidaya perikanan		

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Produksi Hasil Olahan (ton)	165,000.75	222,854	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		
				Produksi Perikanan tangkap (ton)	142,187.00	221,321	Pengembangan perikanan tangkap		
		Ekstensifikasi dan intensifikasi ternak yang diarahkan pada komoditi sapi	Kerjasama lembaga riset, perguruan tinggi dan perusaha an swasta/BUMN	Pertumbuhan Populasi Ternak (%)	5.00	6.50	Peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Disnakeswan
			Pengembangan produksi peternakan						
		Ekstensifikasi pemasaran produk SDA berkualitas yang diarahkan pada komoditi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan serta hasil hutan bukan kayu	Kerjasama lembaga riset, perguruan tinggi dan perusaha an swasta/BUMN	Informasi produk pertanian dan olahannya yang dipromosikan (dok)	3	29	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Stabilitas harga (%)	4	8	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Informasi produk peternakan dan olahannya yang dipromosikan (dok)	2	12	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		
		Fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas yang diarahkan pada hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta hasil hutan bukan kayu pada kawasan peruntukan industri sesuai RTRW Provinsi NTB	Mengembangkan industri olahan	Pertumbuhan IKM (%)	0.00	1.50	Pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Dinas Perindustrian
				Pertumbuhan IKM yang memanfaatkan teknologi (%)	0	3.5	Peningkatan kemampuan teknologi industri		
				Produk yang dihasilkan (jenis)	6	14	Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komuditi unggulan daerah		

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif yang diarahkan pada kerajinan industri dan makanan olahan pada kawasan peruntukan industri sesuai RTRW Provinsi NTB	Mengembangkan sentra-sentra ekonomi kreatif	Pertumbuhan IKM (%)	0.00	1.50	Pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Dinas Perindustrian
		Fasilitasi kelompok masyarakat diarahkan pada pendampingan petani, peternak, nelayan dan masyarakat pesisir serta masyarakat sekitar kawasan hutan	Mengembangkan pola pendampingan				Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan, penyuluh kehutanan, kelautan dan perikanan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Pertumbuhan ekonomi non tambang (%)	5,61	6,25 – 6,50	Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komuditi unggulan daerah, Pengembangan industri kecil dan menengah	Administrasi Pemerintahan	Biro Perekonomian
j	Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat	Edukasi dan fasilitasi tenaga kerja terampil yang diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif	Kerjasama dengan perguruan tinggi dan perusahaan swasta	Pertumbuhan IKM yang memanfaatkan teknologi (%)	0	3.5	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,38	4.55	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
k	Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah	Pembentukan dan Pengembangan wirausaha yang diarahkan pada komoditi unggulan daerah	Pengembangan keberlanjutan dan kemitraan wirausaha	Wirausaha baru yang terbentuk (WUB)	150	350	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi UKM
		Investasi dan fasilitasi modal usaha kerja yang diarahkan pada UMKM dan IKM	Pengembangan prosedur penyaluran modal usaha	Sentra UMKM yang dikembangkan (Sentra)	32	160	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi UKM
				Koperasi yang dibina kualitasnya (unit)	200	1,000	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi UMKM
				Bumdes aktif (BUMDes/ LKM dan Pasar Desa)	30 / 30	150 / 150	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (BUMDes/LKM & Pasar desa)	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan bagi pemuda (kelompok)	20	40	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan bagi Pemuda	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Divestasi dan fasilitasi penyertaan modal yang diarahkan pada Perusahaan Daerah, BUMD dan swasta	Pengembangan prosedur penyertaan modal usaha	Kontribusi Perusahaan daerah dan BUMD pada PAD (%)	6.14	5.72	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Administrasi Pemerintahan	Biro Perekonomian
							Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		
				Pengeluaran Per Kapita (Rp. 000)	8,950	9,578	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Peningkatan kerjasama perdagangan internasional, Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Perdagangan	Dinas Perdagangan

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Angka kemiskinan	17,25	12,25	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
l	Tersedianya data dan informasi peluang investasi yang akurat	Identifikasi, inventarisasi dan publikasi data dan informasi yang diarahkan pada database investasi	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah	Promosi dan kerjasama investasi yang ditingkatkan (keg)	8	8	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
m	Tersedianya layanan investasi yang profesional melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Promosi layanan informasi yang diarahkan pada PTSP Online	Mengembangkan prosedur pelayanan investasi daerah	Laju pertumbuhan investasi PMA/PMDN (%)	8.30	13,50	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman modal	
n	Terwujudnya ekspor daerah	Fasilitasi dan regulasi ekspor daerah yang diarahkan pada komoditi unggulan daerah	Mengembangkan komoditi	Perkembangan nilai ekspor (%)	7,5	11,50	Peningkatan dan pengembangan ekspor	Perdagangan	Dinas Perdagangan
o	Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat	Identifikasi dan evaluasi data dan informasi yang diarahkan pada database sumber-sumber PAD	Mengembangkan sistem informasi PAD	Pertumbuhan PAD (%)	13.66	7.64	Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
p	Tersedianya sistem pelayanan PAD	Sosialisasi dan fasilitasi system pelayanan PAD yang diarahkan pada sistem pelayanan online	Memanfaatkan Tehnologi Informasi untuk meningkatkan PAD	Pertumbuhan PAD (%)	13.66	7.64	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
q	Tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya	Identifikasi, fasilitasi dan negosiasi dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya yang diarahkan pada database dana non pemerintah daerah	Mengembangkan sumber-sumber dana non pemerintah	Pertumbuhan PAD (%)	13.66	7.64	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
r	Tersedianya sarana prasarana perekonomian yang memadai	Revitalisasi sarana prasarana perekonomian yang diarahkan pada sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran	Mengembangkan kapasitas dan standar sarana prasarana produksi dan pemasaran	Pertumbuhan IKM yang memanfaatkan teknologi (%)	0	3.5	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian
s	Tersedianya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah	Koordinasi dan sinkronisasi dokumen penunjang kerjasama ekonomi yang diarahkan pada penyiapan bahan baku, olahan dan pemasaran	MoU dan Perjanjian Kerjasama	WUB yang dikembangkan (WUB)	150	350	Pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Dinas Perindustrian

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MISI 6: MELANJUTKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH BERBASIS TATA RUANG									
a	Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur	Mengembangkan perencanaan partisipatif	Dokumen yang tersusun (Dok)	1	19	Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Kegiatan yang terselenggara (Keg)	2	3	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		
b	Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata	Koordinasi, Konsultasi, revitalisasi dan konstruksi sarana prasarana wilayah yang diarahkan pada sistem perhubungan udara, sistem perhubungan darat, sistem perhubungan laut, sumber air baku dan air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan/ limbah sesuai pengembangan sistem jaringan infrastruktur dalam RTRW Provinsi NTB	Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah dan Swasta	Jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap (%)	100	100	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	67.56	83.65			
				Air yang terkonservasi (lt/dt)	200	400	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				cakupan air bersih Perkotaan (%)	82.18	87.56	Peningkatan ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai kuantitas & kualitas	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Cakupan air bersih Perdesaan (%)	75.12	81.87			
							Pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Sarana prasarana perhubungan darat yang dibangun	Halte : 0 unit,	Halte : 138 unit,	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Marka : 0 m	Marka : 2.760 m			
					Rambu : 0 unit	Rambu : 276 unit			
				Ratio Elektrifikasi (%)	65,68	75	Pembinaan dan pengem-bangan bidang ketenaga listrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							Pengembangan dan pemanfaatan energi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
c	Meningkatnya penumpang angkutan udara dan laut	Koordinasi, regulasi, konstruksi dan fasilitasi system jaringan transportasi yang diarahkan pada sistem jaringan lokal, nasional dan internasional sesuai RTRW Provinsi NTB	Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah dan Swasta	Terbangunnya koridor angkutan masal/Mataram metro (Koridor)	0	3	Peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Subsidi operasi angkutan umum masal (Koridor)	0	1			
				Terbukanya Rute Pelayaran Baru Aik Bari – Pulau Moyo sebagai pendukung MP3EI kawasan SAMOTA (Rute)	0	3			
				Terpeliharanya lapangan parkir Terminal Ginte Dompu, Terminal Wawo Kab. Bima, Lapangan Parkir Jembatan Timbang Tano	0	Overlay terminal wawo : 1500 m^2	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ		
					0	Taffic : 8 unit			
						Guadrail : 1000 m			
						Rambu : 400 buah			

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						RPPJ Portal : 9 unit			
						RPPJ : 250 unit			
						Marka : 1500 m			
						Paku jalan : 3.000 buah			
						PJU Solar Cell : 30 unit			
				Tersedianya fasilitas peralatan jalan, jalan Provinsi NTB	Traffic: 25 Unit, Guardrail: 5.000 m, rambu 1.200 buah, RPPJ 50 unit, Marka 600 m, Paku jalan 5.000 buah	Traffic: 35 Unit, Guard-rail: 6.000 m, rambu 4.000 buah, RPPJ 200 unit, Marka 5000 m, Paku jalan 7.500 buah	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ		
				Jumlah kendaraan angkutan umum, angkutan taxi, angkutan pariwisata yang memiliki legalitas (surat dan kelengkapan kelaikan jalan)	ngkutan umum: 300 unit, taxi : 600 unit, pari-wisata: 75 unit	Angkutan umum: 1500 unit, taxi : 3000 unit, pari-wisata: 375 unit	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas		

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Pengadaan lahan dan konstruksi jembatan timbang Lembar (Areal)	0	1			
				Sistem Informasi Manajemen (SIM) jembantan timbang Bertais dan Pototano (sistem)	0	1			
				Jumlah penumpang angkutan udara dan laut					
				- Angkutan udara (Orang)	2.145.290	3.626.000	Program Pengembangan Transportasi Udara	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				- Angkutan laut	125.794	227.502	Program Pengembangan Transportasi Laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan
d	Terwujudnya rencana, pemanfaatan dan pengendalian pemafaatan ruang	Koordinasi, regulasi, implementasi dan evaluasi rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diarahkan pada kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas Kabupaten/Kota	Mengembangkan dan memantapkan pengelolaan kawasan strategis provinsi	Penyimpangan pemanfaatan ruang yang di tangani (kasus)	2	20	Pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
e	Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang	Sosialisasi, regulasi dan fasilitasi masyarakat yang diarahkan pada aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rencana, pemanfaatan, konflik tata ruang dan sanksi pelanggaran tata ruang	KSP yang direncanakan (kawasan)	2	16	Perencanaan tata ruang		
				Masyarakat yang tersosialisasi tata ruang (%)	20	75	Pemanfaatan ruang		
				Penyimpangan pemanfaatan ruang yang di tangani (kasus)	2	20	Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
f	Terwujudnya permukiman yang sehat dan nyaman	Sosialisasi dan revitalisasi lingkungan permukiman yang diarahkan pada rumah tidak layak huni dan kampung kumuh	Pengembangan permukiman sehat	Penanganan Rumah Tidak layak huni (unit)	21.471	26.471	Pengembangan perumahan	Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Kelompok yang dibina (Kelompok)	10	50	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI 7 : MEMANTAPKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN									
a	Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan lingkungan hidup	Mengembangkan perencanaan partisipatif	Dokumen yang tersusun (Dok)	1 dok	19 dok	Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	4	36	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		
b	Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan	Sosialisasi, fasilitasi dan regulasi yang diarahkan pada masyarakat yang diarahkan pada masyarakat perkotaan	Pengembangan lingkungan perumahan sehat	Perumahan sehat (kawasan)	5	27	Lingkungan sehat perumahan	Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Indeks Air	54.13	54.50	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
c	Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup	Sosialisasi, edukasi dan regulasi masyarakat yang diarahkan pada masyarakat kawasan hutan,bantaran sungai,kawasan rawan bencana pesisir laut dan pulau-pulau kecil sesuai RTRW Provinsi NTB	Mengembangan percontohan pengelolaan lingkungan lestari berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim	Terlaksananya pemantauan inventarisasi dan identifikasi dampak PI dan PLO (Penanganan Lapisan Ozon)	1 Dok. 1 Kota	5 Dok. 5 Kota	Perlindungan dan konservasi SDA	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (HA)	281,123	292,510	Rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Kegiatan rakyat yang terawasi dan diterbitkan (Klp)	119	695	Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
d	Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)	Identifikasi dan inventarisasi data informasi LHD yang diarahkan pada dampak penambangan liar terhadap lingkungan hidup	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga Riset				Pengembangan data/ infor-masi/ statistik daerah	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
e	Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari	Sosialisasi, rehabilitasi, reboisasi, regulasi dan konservasi sumberdaya alam yang diarahkan pada Kawasan Geopark Rinjani, TN Tambora, Kawasan hutan, kawasan bantaran sungai, kawasan rawan bencana, kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, KSP fungsi lindung dan konservasi serta berbagai sumber daya hayati, keanekaragaman hayati dan plasma nutfah sesuai RTRW Provinsi NTB	Mengembangkan model pengelolaan kawasan berbasis adaptasi dan mitigasi bencana serta perubahan iklim	Areal hutan yang terlindungi dan dikonservasi (Ha)	250	1,636	Perlindungan dan Konsevasi sumberdaya hutan	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Terlaksananya pemantauan inventarisasi dan identifikasi dampak PI dan PLO (Penanganan Lapisan Ozon)	1 Dok. 1 Kota	5 Dok. 5 Kota	Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Terlaksananya pemantauan di PT NNT, di daerah pertambangan rakyat dan kawasan industry (sampel)	60	300	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		
				Terlaksananya penanganan titik mata air dan tersedianya informasi melalui buku dan peta (titik)	9	45	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Penyimpangan pemanfaatan ruang yang di tangani (kasus)	2	40	Pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
				Areal pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan (Ha)	5	25	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Air yang terkonservasi (lt/dt)	200	400	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,77	67,95	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Mata Air Terlindungi	334	438	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
f	Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana	Identifikasi dan inventarisasi data dan informasi yang diarahkan pada database daerah rawan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan sistem informasi tanggap bencana	Prasarana Komunikasi (unit)	0	2	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	BPBD

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
g	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana	Revitalisasi sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana yang diarahkan pada Early Warning System, Pusdalops	Kerjasama Pemerintah, Luar Negeri dan Swasta	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Lokasi)	10	10	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	BPBD dan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
				Satuan Reaksi Cepat (Unit)	1	1	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	BPBD
				Cakupan para penyandang cacat dan trauma yang dibina (%)	35.00	4.83	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Dinas Sosial
				Wilayah strategis yang dikelola (m^2)	7.515	15	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
				Korban bencana yang terlayani trauma center (%)	100	100	Upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSJ Mutiara Sukma
				Tenaga terlatih reaksi cepat (orang)	0	600	Penanganan tanggap darurat dan evakuasi/ penyelamatan korban bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	BPBD

No.	Misi / Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
h	Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana	Sosialisasi, edukasi, simulasi masyarakat yang diarahkan pada masyarakat disekitar kawasan rawan bencana, dan organisasi kemasyarakatan sesuai RTRW Provinsi NTB	Mengembangkan metode tanggap dini bencana	Sekolah/Madrasah aman bencana	0	35	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	BPBD
				Jumlah desa swadaya lanjut (desa siaga bencana salah satu indikator desa swadaya)	20	100	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
i	Terwujudnya kawasan tangguh bencana	Indentifikasi, sosialisasi, fasilitasi dan mobilisasi kawasan tangguh bencana yang diarahkan pada kawasan rawan bencana	Mengembangkan desa model tangguh bencana	Prasarana Desa siaga bencana (Desa/Kel)	0	30	Program Siaga Darurat Bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	BPBD
				Desa tangguh bencana (Desa/Kel)	0	20	Peningkatan Partisipasi Dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB		

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas pembangunan dan kebutuhan pendanaan pada APBD Provinsi NTB berdasarkan urusan dalam tahun 2013-2018 sebagaimana tabel berikut.

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR					697.433.489		936.876.287		959.543.157		1.375.033.715		1.654.399.580		5.623.286.228	
1.01	Pendidikan					22.492.397		47.359.960		68.125.381		76.988.414		83.917.371		298.883.522	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					22.492.397		47.359.960		68.125.381		76.988.414		83.917.371		298.883.522	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	95,53	100	2.549.199	100	2.197.454	100	3.986.609	100	3.849.578	100	4.196.040	100	16.778.879	Dinas Dikbud
	Dinas Dikbud		%	95,61	100	1.950.933	100	1.703.113	100	3.352.807	100	3.152.396	100	3.436.112	100	13.595.360	Dinas Dikbud
	Balai Teknologi Komunikasi dan pendidikan (BTKP)		%	97,48	100	408.108	100	256.420	100	382.583	100	420.841	100	458.717	100	1.926.669	BTKP
	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKBM)		%	96,72	100	190.158	100	237.922	100	251.219	100	276.341	100	301.211	100	1.256.850	BPKBM
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	87,92	100	828.826	100	1.355.768	100	3.515.629	100	5.847.691	100	6.373.983	100	17.921.898	Dinas Dikbud
	Dinas Dikbud		%	95,66	100	686.810	100	1.212.831	100	3.348.450	100	5.663.795	100	6.173.537	100	17.085.422	Dinas Dikbud
	Balai Teknologi Komunikasi dan pendidikan (BTKP)		%	97,55	100	37.644	100	37.991	100	40.557	100	44.612	100	48.627	100	209.431	BTKP
	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKBM)		%	100	100	104.372	100	104.947	100	126.622	100	139.284	100	151.820	100	627.045	BPKBM
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	80	100	32.568			100	40.200	100	44.220	100	48.200	100	165.188	Dinas Dikbud
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	4	4	284.580	4	249.500	4,00	289.400	4	296.260	4	322.923	4	1.442.664	Dinas Dikbud

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Dinas Dikbud		Doku-men	1	1	273.180	1	235.800	1	264.800	1	269.200	1	293.428	1	1.336.408	Dinas Dikbud
	Balai Teknologi Komunikasi dan pendidikan (BTKP)		Doku-men	1	1	6.000	1	6.500	1	12.050	1	13.255	1	14.448	1	52.253	BTKP
	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKBM)		Doku-men	1	1	5.400	1	7.200	1	12.550	1	13.805	1	15.047	1	54.002	BPKBM
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Doku-men	4	4	88.617	4	57.718	4	72.178	4	74.872	4	81.610	4	374.995	Dinas Dikbud
	Dinas Dikbud		Doku-men	1	1	61.160	1	29.918	1	26.938	1	29.632	1	32.299	1	179.947	Dinas Dikbud
	Balai Teknologi Komunikasi dan pendidikan (BTKP)		Doku-men	1	1	13.728	1	11.600	1	17.800	1	17.800	1	19.402	1	80.330	BTKP
	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKBM)		Doku-men	1	1	13.728	1	16.200	1	27.440	1	27.440	1	29.910	1	114.718	BPKBM
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUDNI	%	82,35	100	2.123.848	100	6.731.277	100	1.817.598	100	2.773.741	100	3.023.378	100	16.469.841	Dinas Dikbud
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI/ Paket A	%	114,79	112,29	5.430.824	110,29	21.527.245	100	34.273.232	100	11.611.929	100	12.657.003	100	85.500.233	Dinas Dikbud
		APK SMP/MTS/ Paket B	%	104,81	104.65		104.49		104.33		104,17		104,01		104,01		
		APM SD/MI/ Paket A	%	99,19	99,35		99,51		99,67		99,83		99,99		99,99		
		APM SMP/MTS/ Paket B	%	94,83	95.56		96,30		97,03		97,77		98,50		98,50		
8	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	APK SMA/SMK/ MA/Paket C	%	80,54	83.83	4.147.670	87.12	10.853.866	90.42	19.344.904	93.71	46.376.890	97.00	50.550.810	97.00	131.274.140	Dinas Dikbud
		APM SMA/SMK/ MA/Paket C	%	68,59	71.87		75.15		78.44		81.72		85.00		85.00		

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Pelaksana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
9	Program Pendidikan Non Formal	Buta Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun	%	15,04	13,86	528.581	12,77	604.431	11,77	950.720	10,85	1.838.292	10	2.003.738	10	5.925.762	Dinas Dikbud
	Dinas Dikbud									101.145		111.260		121.273		333.678	Dinas Dikbud
	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKBM)					528.581		604.431		849.575		1.727.032		1.882.465		5.592.083	BPKBM
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Manajemen pelayanan pendidikan	Dokumen	2	2	4.344.468	4	1.294.422	3	1.524.892	3	1.974.892	3	2.152.632	3	11.291.306	Dinas Dikbud
11	Program Peningkatan Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Satuan Pendidikan yang memanfaatkan media pembelajaran	%			679.067		705.390		667.350		667.280		727.335		3.446.423	BTKP
12	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Rencana program	Dokumen	6	6	706.599	6	951.868	6	905.200	6	789.694	6	860.766	6	4.214.128	Dinas Dikbud
13	Program Peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	1.750									100	1.750	Dinas Dikbud
14	Program Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan RSBI/SBI	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	%	79,07	81,40	745.800	86,05	831.020	90,70	737.470	95,35	843.075	100	918.952	100	4.076.316	Dinas Dikbud
1.02	Kesehatan					304.926.707		355.145.929		244.885.898		371.426.461		370.136.557		1.646.521.552	
	Dinas Kesehatan					19.150.381		16.189.597		24.903.890		29.733.700		46.116.178		136.093.746	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen laporan	Dokumen	1	1	1.621.876	1	1.313.330	1	1.574.973	1	2.436.280	1	2.679.908	5	9.626.368	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	80	100	2.240.555	100	1.019.521	100	1.392.318	100	825.049	100	907.554	100	6.384.997	Dinas Kes-ehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur	%	80	95	113.740	95	162.518	95	130.906	95	143.997	98	158.396	98	709.557	Dinas Kes-ehatan
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	Doku-men	2	2	41.800	2	41.800	2	45.750	2	50.325	2	55.358	10	235.033	Dinas Kes-ehatan
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1	1	-	1	18.360	1	23.680	1	26.048	1	28.653	5	96.741	Dinas Kes-ehatan
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat	%	94,10	90,00	340.788	91,00	984.935	92,00	847.770	93,00	1.269.136	95,00	1.072.429	95,00	4.515.058	Dinas Kes-ehatan
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Puskesmas yang terakreditasi	%	0,00	10	4.526.068	15	697.343	30	5.938.490	50	3.298.542	75	5.916.596	75	20.377.039	Dinas Kes-ehatan
		Cakupan Rumah Sakit yang terakreditasi	%	0,00	45		65		75		85		95		95		
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	%	88,51	88	5.466.435	89	7.772.781	90	8.347.842	91	11.335.638	92	23.234.702	92	56.157.398	Dinas Kes-ehatan
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100,00	100	1.366.382	100	677.903	100	1.885.157	100	3.247.500	100	3.347.600	100	10.524.541	Dinas Kes-ehatan
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Jamban Keluarga	%	72,15	73	534.745	74	947.700	76	1.407.150	78	1.736.223	80	1.909.845	80	6.535.663	Dinas Kes-ehatan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan imunisasi dasar lengkap	%	90,00	90	1.311.366	92	457.166	93	974.006	94	1.320.627	95	2.356.369	95	6.419.534	Dinas Kes-ehatan
12	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan Nasional	%	36,93	60	-	70	186.062	80	320.406	85	455.910	90	501.501	90	1.463.879	Dinas Kes-ehatan
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Puskesmas Santun Lansia	%	0,00	100	75.932	100	186.062	100	186.062	100	204.668	100	225.135	100	877.859	Dinas Kes-ehatan
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan	%	82,74	90	514.085	90	489.040	90	851.140	90	1.799.640	90	1.979.604	90	5.633.509	Dinas Kes-ehatan
15	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Dokumen Perencanaan Kesehatan	Doku-men	1	2	604.185	2	738.180	2	503.715	2	554.087	10	609.495	18	3.009.662	Dinas Kes-ehatan
16	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase pelatihan yang terakreditasi	%	85	85	392.424	87	496.896	90	474.525	95	1.030.030	100	1.133.033	100	3.526.908	Dinas Kes-ehatan
	Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Masyarakat Mataram					828.957		928.957		2.132.292		55.000.245		7.313.648		66.204.098	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen laporan	Doku-men	1	1	575.609	1	452.159	1	985.456	1	1.233.298	1	1.274.006	5	4.520.527	BPTKM
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	201.730	100	332.520	100	1.031.680	100	53.640.275	100	5.900.302	100	61.106.507	BPTKM
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur	%	80	95	51.618	95	144.278	95	84.403	95	92.843	98	102.127	98	475.269	BPTKM

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	Doku-men	2					2	12.704	2	13.974	2	15.372	6	42.050	BPTKM
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1					1	18.050	1	19.855	1	21.841	3	59.746	BPTKM
	Akademi Perawat Kesehatan Provinsi NTB					3.197.287		3.404.065		3.438.311		15.715.557		16.054.612		41.809.832	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen laporan	Doku-men	1	1	673.838	1	793.838	1	756.566	1	783.770	1	862.147	5	3.870.159	AKPER
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	134.762	100	50.940	100	414.870	100	12.325.000	100	12.325.000	100	25.250.572	AKPER
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur	%	80	95	141.900	95	327.000		-	95	327.000	98	359.700	98	1.155.600	AKPER
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	Doku-men	2	2	49.500	2	35.000	2	37.149	2	47.500	2	52.250	10	221.399	AKPER
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1	1	-	1	-	1	32.440	1	35.000	1	38.500	5	105.940	AKPER
6	Program pendidikan Tenaga Kesehatan	Persentase Kelulusan Mahasiswa	%	99	100	2.197.287	100	2.197.287	100	2.197.287	100	2.197.287	100	2.417.015	100	11.206.162	AKPER
	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok					2.109.659		1.771.195		4.649.550		10.209.304		11.230.234		29.969.942	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen laporan	Doku-men	1	1	550.507	1	559.203	1	639.365	1	767.422	1	844.164	5	3.360.661	Balabkes P.Lombok

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	195.703	100	227.585	100	2.601.760	100	2.861.936	100	3.148.130	100	9.035.114	Balabkes P.Lombok
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur	%	80	95	101.325	95	101.325	95	123.676	95	136.484	98	150.132	98	612.942	Balabkes P.Lombok
4	Program Peningkaatn Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	Doku-men	2	2	19.160	2	-	2	8.000	2	8.800	2	9.680	10	45.640	Balabkes P.Lombok
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1		-	1	19.160	1	20.910	1	23.001	1	25.301	4	88.372	Balabkes P.Lombok
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat	%	100	100	675.801	100	753.684	100	1.134.039	100	1.247.443	100	1.372.187	100	5.183.154	Balabkes P.Lombok
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	70	70	456.925	75	-	80		85	5.030.238	90	5.533.262	90	11.020.425	Balabkes P.Lombok
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase parameter pelayanan sesuai KALK	%	100	100	110.238	100	110.238	100	121.800	100	133.980	100	147.378	100	623.634	Balabkes P.Lombok
	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Sumbawa					1.164.710		1.771.195		1.380.502		8.193.433		8.193.433		20.703.274	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen laporan	Doku-men	1	1	359.974	1	559.203	1	537.617	1	601.317	1	601.317	5	2.659.428	Balabkes P. Sum-bawa
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	691.485	100	227.585	100	417.694	100	7.131.775	100	7.131.775	100	15.600.314	Balabkes P. Sum-bawa

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Program Peningkaatn Disiplin Aparatur	Kinerja Aparatur	%	80	95	-	95	-	95	8.000	95	8.000	98	8.000	98	24.000	Balabkes P. Sum-bawa
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur	%	80	95	-	95	101.325	95	106.004	95	136.004	98	136.004	98	479.337	Balabkes P. Sum-bawa
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	Doku-men	2	2	-	2	-	2	11.550	2	11.550	2	11.550	10	34.650	Balabkes P. Sum-bawa
6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1	1	-	1	19.160	1	33.360	1	37.010	1	37.010	5	126.540	Balabkes P. Sum-bawa
7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat	%	100	100	113.252	100	753.684	100	257.777	100	257.777	100	257.777	100	1.640.267	Balabkes P. Sum-bawa
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase parameter pelayanan sesuai KALK	%	100	100	-	100	110.238	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100	131.238	Balabkes P. Sum-bawa
9	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase institusi yang bekerjasama	%	70	71	-	78	-	85	1.500	93	3.000	100	3.000	100	7.500	Balabkes P. Sum-bawa
	Balai Kesehatan Mata Mataram					2.450.000		2.850.000		3.160.280		4.048.760		4.428.729		16.937.769	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen laporan	Doku-men	1	1	601.935	1	586.279	1	907.264	1	1.378	1	1.347	5	2.098.202	BKMM
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	362.630	100	302.606	100	708.676	100	965.000	100	990.000	100	3.328.912	BKMM
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur	%	80	95	10.000	95	47.800	95	90.000	95	120.000	98	150.000	98	417.800	BKMM

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	Doku-men	2	2	35.250	2	35.250	2	24.390	2	24.390	2	24.390	10	143.670	BKMM
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1	1	-	1	-	1	15.900	1	15.900	1	15.900	5	47.700	BKMM
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepuasan Masyarakat	%	70	70	542.817	75	546.417	80	528.750	85	2.330.000	90	2.630.000	90	6.577.983	BKMM
7	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase operasi katarak untuk masyarakat miskin	%	132	100	215.820	100	420.086	100	451.250	100	451.250	100	451.250	100	1.989.656	BKMM
8	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Ketersediaan Obat	%	100	100	482.599	100	752.563	100	399.050	100	40.842	100	40.842	100	1.715.895	BKMM
9	Program pemeliharaan sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/ RS Mata	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	%	100	100	198.950	100	129.000	100	35.000	100	50.000	100	50.000	100	462.950	BKMM
10	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Kemitraan dengan pihak lain	%	100	100	-	100	30.000	100	-	100	50.000	100	75.000	100	155.000	BKMM
	Rumah Sakit Umum Provinsi					237.383.668		282.130.359		146.563.034		177.871.120		185.136.569		1.029.084.750	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	257.489	100	3.478.159	100	3.895.989	100	4.045.315	100	6.220.264	100	17.897.215	RSU Provinsi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	20.000	100	400.000	100	12.000	100	600.000	100	750.000	100	1.782.000	RSU Provinsi

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	60	60	550.000	62	600.000	64	1.740.000	66	2.080.475	68	2.330.475	68	7.300.950	RSU Provinsi
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	-	-	-	-	-	1	52.330	1	52.330	1	52.330	3	156.990	RSU Provinsi
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Masyarakat miskin yang dilayani	%	100	100	6.723.147	100	10.067.645	100	1.535.535	100	6.000.000	100	7.683.500	100	32.009.827	RSU Provinsi
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan masyarakat yang menderita penyakit menular yang dilayani	%	100			100	41.151	100	86.000	100	100.000	100	200.000	100	427.151	RSU Provinsi
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tingkat kepuasan pelayanan pasien	%	71					78	1.972.240	80	2.000.000	83	1.000.000	83	4.972.240	RSU Provinsi
8	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani	%	100							100	920.000	100	920.000	100	1.840.000	RSU Provinsi
9	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana	%	-	70	168.472.848	75	191.543.405	78	51.903.940	80	59.073.000	83	48.980.000	83	519.973.193	RSU Provinsi
10	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Kecepatan Waktu Menanggapi Kerusakan	%	-	60	407.610	65	1.000.000	70	5.000.000	75	3.000.000	80	7.000.000	80	16.407.610	RSU Provinsi
11	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pendapatan Rumah sakit	%	92,07	100	60.952.575	100	75.000.000	100	80.365.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	426.317.575	RSU Provinsi

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma					21.379.715		25.913.141		30.945.944		38.103.783		36.208.972		152.551.555	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	36.100	100	87.400	100	748.924	100	879.200	100	999.600	100	2.751.224	RSJ Mutiara Sukma
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	12.664.883	100	11.796.366	100	3.509.686	100	1.783.712	100	13.823.125	100	43.577.772	RSJ Mutiara Sukma
3	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100					100	25.230	100	25.230	100	25.230	100	75.690	RSJ Mutiara Sukma
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Masyarakat yang ditangani(pasung,gangguan jiwa,Napza,HIV/AIDS)	%	100	100	593.252	100	738.625	100	715.081	100	790.215	100	790.215	100	3.627.388	RSJ Mutiara Sukma
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akerditasi	Pelay-anan	5	13	85.480			13	525.616	13	150.000	13	165.000	13	926.096	RSJ Mutiara Sukma
6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Bed Occupation Rate (BOR)	%	65			85	3.290.750	85	2.687.360	85	15.775.426	85	3.778.802	85	25.532.338	RSJ Mutiara Sukma
7	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Umur Teknis	Tahun	5					5	8.734.047	5	3.700.000	5	627.000	5	13.061.047	RSJ Mutiara Sukma
8	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pendapatan Rumah sakit	%	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	14.000.000	100	15.000.000	100	16.000.000	100	63.000.000	RSJ Mutiara Sukma

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	RSUD HL. Manambai Abdulkadir					17.262.331		20.187.419		27.712.095		32.550.560		55.454.181		153.166.586	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%		100	6.629.326	100	6.749.143	100	9.477.336	100	10.361.804	100	11.738.764	100	44.956.372	RSUD HL. Manambai Abdulkadir
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%		100	1.078.300	100	645.800	100	2.078.995	100	1.188.995	100	2.809.681	100	7.801.771	RSUD HL. Manambai Abdulkadir
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Pegawai	dokumen		1	77.000	1	530.000	1	540.000	1	540.000	1	660.000	5	2.347.000	RSUD HL. Manambai Abdulkadir
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Dokumen		5	36.000	5	36.000	5	57.000	5	57.000	5	62.700	25	248.700	RSUD HL. Manambai Abdulkadir
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen						1	36.910	1	36.910	1	40.601	3	114.421	RSUD HL. Manambai Abdulkadir
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat	%		100	1.762.379	100	2.454.000		3.014.000	100	4.000.000	100	4.400.000	100	15.630.379	RSUD HL. Manambai Abdulkadir
7	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani	%				100	1.300.000	100	3.100.000	100	3.100.000	100	4.400.000	100	11.900.000	RSUD HL. Manambai Abdulkadir

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
8	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana	%		65	7.599.325	65	8.322.476	70	9.241.855	75	13.099.851	80	14.409.836	85	52.673.343	RSUD HL. Manambai Abdulkadir
9	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana	%		100	80.000	100	150.000	100	166.000	100	166.000	100	182.600	100	744.600	RSUD HL. Manambai Abdulkadir
10	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pendapatan Rumah sakit	%										100	16.250.000	100	16.250.000	RSUD HL. Manambai Abdulkadir
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akerditasi	Pelay-anan											500.000		500.000	RSUD HL. Manambai Abdulkadir
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					300.461.860		433.514.593		540.592.648		827.697.548		1.079.140.041		3.181.406.691	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					242.022.084		367.254.634		463.324.768		735.416.244		979.114.706		2.787.132.436	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	2.145.632	100	2.428.785	100	2.674.070	100	3.979.586	100	4.337.749	100	15.565.821	Dinas PUPR
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	766.210	100	3.943.500	100	3.998.231	100	6.664.515	100	7.264.321	100	22.636.777	Dinas PUPR

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	114.040	100	106.500	100	89.694	100	179.985	100	196.184	100	686.402	Dinas PUPR
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	5	5	710.273	5	454.002	5	601.539	5	767.264	5	836.318	25	3.369.396	Dinas PUPR
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Doku-men	1	1	52.948	1	186.231	1	223.804	1	314.730	1	343.056	5	1.120.768	Dinas PUPR
6	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	68,92	71.581.377	72,67	50.657.954	72,9	190.246.180	75,39	250.000.000	83,65	450.000.000	83,65	1.012.485.510	Dinas PUPR
7	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	68,92	67.820.150	72,67	195.854.795	72,9	175.381.338	75,39	356.516.951	83,65	388.603.477	83,65	1.184.176.710	Dinas PUPR
8	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rencana program	Doku-men	2	2	200.000	2	208.000	2	197.250	2	350.000	2	381.500	10	1.336.750	Dinas PUPR
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Cakupan areal irigasi	ha	100	110	6.178.927	120	6.679.139	65	4.516.613	125	5.977.000	140	6.514.930	560	29.866.608	Dinas PUPR
10	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan areal irigasi	ha	180	198	5.033.362	218	9.202.924	240	7.311.568	264	8.472.611	290	9.235.146	1209	39.255.611	Dinas PUPR
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Bersih Perkotaan	%	80,23	82,18	3.496.012	83,53	4.649.125	84,87	4.065.000	86,22	27.730.852	87,56	30.226.629	87,56	70.167.618	Dinas PUPR
		Cakupan Air Bersih Perdesaan	%	72,15	75,12	5.238.450	76,81	20.791.400	78,5	24.926.214	80,18	25.855.000	81,87	28.181.950	81,87	104.993.014	Dinas PUPR

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
12	Program Pengendalian Banjir	Luas genangan areal banjir	%	10	10,81	2.002.706	11,74	893.959	12,75	2.679.957	13,85	3.578.361	15,04	3.900.413	15,04	13.055.396	Dinas PUPR
13	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis	%	12,23	16,84	22.980.947	18,29	11.902.875	19,86	24.596.010					19,86	59.479.832	Dinas PUPR
14	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Daya tampung	%	3,33	16,67	53.000.000	36,67	58.000.000	58,67	20.217.305	86,67	40.000.000	92,67	43.600.000	92,67	214.817.305	Dinas PUPR
15	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Daya serap	%								30	162.410	35	177.027	35	339.437	Dinas PUPR
16	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Daya serap	%								65	1.700.481	75	1.853.524	75	3.554.005	Dinas PUPR
17	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keter-paduan infra-struktur antar Kawasan	%								10	500.000	15	550.000	15	1.050.000	Dinas PUPR
18	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keter-paduan infra-struktur antar Sektor	%								10	400.000	15	440.000	15	840.000	Dinas PUPR
19	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keter-paduan infra-struktur antar Wilayah	%								5	200.000	10	220.000	10	420.000	Dinas PUPR
20	Program Perencanaan Tata Ruang	Rencana teknis KSP	Doku-men	1	1	600.000	1	1.109.530	2	1.140.157	2	1.275.106	2	1.389.866	8	5.514.659	Dinas PUPR
21	Program Pemanfaatan Ruang	Rumusan kebijakan tata ruang	Doku-men	1	1	51.050	1	31.832	1	313.179	1	530.796	1	578.568	5	1.505.424	Dinas PUPR
22	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penurunan Penyimpangan tata ruang	%	8,54	9,28	50.000	10,07	154.083	10,94	146.664	11,88	260.596	12,91	284.050	55,08	895.392	Dinas PUPR

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi					1.296.406		1.200.000		1.308.771						3.805.177	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	78.966	100	157.138	100	252.616					100	488.720	Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	18.400	100	52.700	100	44.336					100	115.436	Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	1	1	5.680	1	5.380	1	6.100					3	17.160	Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	1	1	13.305	1	13.800	1	25.450					3	52.555	Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Daya serap	%	10	15	110.551	25	124.931	5	46.291					5	281.773	Balai Pember-dayaan dan Penga-wasan Jasa Kon-struksi
6	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Daya serap	%	15	35	1.069.504	44,8	846.051	48	933.978					48	2.849.533	Balai Pember-dayaan dan Penga-wasan Jasa Kon-struksi
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok					5.159.214		6.088.139		10.995.831		12.094.301		13.182.788		47.520.273	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	311.017	100	230.924	100	280.470	100	390.260	100	425.383	100	1.638.054	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	155.050	100	246.450	100	97.500	100	77.318	100	84.277	100	660.595	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	1	1	6.000	1	4.996	1	15.503	1	8.443	1	9.203	1	44.144	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	1	1	14.400	1	48.972	1	45.372	1	82.763	1	90.212	1	281.718	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
5	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	68,92	4.572.747	72,67	5.452.768	72,9	10.421.750	75,39	11.359.708	83,65	12.382.082	83,65	44.189.055	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
6	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Umur teknis alat berat	%	10	20	100.000	30	104.029	40	135.237	50	175.809	60	191.632	60	706.707	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa					2.937.971		4.681.116		6.173.045		13.563.643		14.784.371		42.140.145	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	131.677	100	197.396	100	280.188	100	385.269	100	419.943	100	1.414.474	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sum-bawa

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	209.500	100	418.900	100	244.375	100	310.500	100	338.445	100	1.521.720	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	1	1	12.000	1	10.000	1	12.100	1	20.000	1	21.800	5	75.900	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	1			1	19.700	1	57.810	1	81.000	1	88.290	4	246.800	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
5	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	68,92	2.484.793	72,67	3.926.420	72,9	5.416.071	75,39	12.491.874	83,65	13.616.143	83,65	37.935.302	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
6	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Umur teknis alat berat	%	10	20	100.000	30	108.700	40	162.500	50	275.000	60	299.750	60	945.950	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sum-bawa
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Dompu dan Bima					1.851.076		3.773.265		6.649.243						12.273.584	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	120.295	100	129.662	100	230.754					100	480.712	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Dompu dan Bima
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	8.700	100	66.700	100	57.670					100	133.070	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Dompu dan Bima
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	1	1	6.273	1	8.612	1	10.068					3	24.953	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Dompu dan Bima
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	1	0	-	1	32.856	1	46.164					2	79.020	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Dompu dan Bima

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	68,92	1.615.808	72,67	3.407.435	72,9	6.178.712					72,9	11.201.955	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Dompu dan Bima
6	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Umur teknis alat berat	%	10	20	100.000	30	128.000	40	125.875					40	353.875	Balai Pemeli-haraan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Dompu dan Bima
	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok					20.147.133		22.760.938		23.484.443		27.483.096		29.956.575		123.832.184	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	128.794	100	96.442	100	198.622	100	162.201	100	176.799	100	762.858	Balai Penge-lolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	7.900	100	92.907	100	104.500	100	105.000	100	114.450	100	424.757	Balai Penge-lolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	1	1	6.000	1	4.500	1	9.800	1	10.000	1	10.900	5	41.200	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	1	1	16.200	1	47.276	1	45.350	1	46.000	1	50.140	5	204.966	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Cakupan areal irigasi	ha	2160	2.386	17.894.340	2.554	19.156.426	2.019	15.145.014	2.687	20.150.000	2.928	21.963.500	12.575	94.309.280	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok
6	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan areal irigasi	ha	198	254	1.903.188	269	2.014.788	691	5.178.799	437	3.274.325	476	3.569.014	2.125	15.940.113	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok
7	Program Pengendalian Banjir	Luas genangan	%	0,1	0,28	190.710	1,98	1.348.600	4,12	2.802.358	5,49	3.735.570	5,99	4.071.771	17,87	12.149.010	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa					12.036.406		12.423.126		10.504.299		36.133.500		39.385.515		110.482.845	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	123.194	100	171.591	100	221.573	100	318.800	100	347.492	100	1.182.649	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sumbawa
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	17.900	100	49.000	100	48.500	100	183.900	100	200.451	100	499.751	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sumbawa
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	1	1	6.310	1	4.703	1	8.796	1	29.500	1	32.155	5	81.464	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sumbawa
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	1	1	14.700	1	34.753	1	43.051	1	120.000	1	130.800	5	343.304	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sumbawa

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Cakupan areal irigasi	ha	1.060	1.260	9.449.993	1.422	10.665.748	1.132	8.491.608	4.260	31.950.000	4.643	34.825.500	12.718	95.382.849	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sumbawa
6	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan areal irigasi	ha	100	119	892.837	79	589.200	73	550.000	266	1.996.000	290	2.175.640	827	6.203.677	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sumbawa
7	Program Pengendalian Banjir	Luas genangan	%	1,5	2,25	1.531.472	1,34	908.133	1,68	1.140.770	2,26	1.535.300	2,46	1.673.477	9,98	6.789.152	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sumbawa
	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bima Dompu					10.097.166		10.870.011		13.870.730						34.837.907	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	161.906	100	145.329	100	176.797					100	484.033	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bima Dompu

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	25.700	100	70.171	100	134.700					100	230.571	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bima Dompu
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Dokumen	1	1	17.500	1	16.000	1	19.179					3	52.678	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bima Dompu
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	1	0	-	1	33.210	1	55.525					2	88.735	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bima Dompu
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Cakupan areal irigasi	ha	542	915	6.859.336	1253	9.401.128	1241	9.305.231					3409	25.565.694	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bima Dompu
6	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan areal irigasi	ha	100	115	861.070	30	225.698	151	1.130.174					296	2.216.942	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bima Dompu

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
7	Program Pengendalian Banjir	Luas genangan	%	1,7	3,19	2.171.655	1,44	978.475	4,48	3.049.125					9,12	6.199.254	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bima Dompu
	Balai Pengujian Material Konstruksi					1.032.497		1.463.364		1.300.275		1.757.764		1.354.676		6.908.576	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	314.944	100	286.219	100	393.580	100	472.166	100	311.979	100	1.778.889	Balai Pengujian Material Konstruksi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	40.498	100	81.900	100	67.000	100	425.000	100	89.271	100	703.669	Balai Pengujian Material Konstruksi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	0	-	100	35.000	100	16.000	100	20.895	100	38.150	100	110.045	Balai Pengujian Material Konstruksi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	1	1	4.125	1	5.025	1	13.055	1	14.040	1	15.304	5	51.548	Balai Pengujian Material Konstruksi
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	1	1	14.400	1	14.400	1	23.550	1	25.000	1	27.250	5	104.600	Balai Pengujian Material Konstruksi

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Pelaksana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
6	Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji	Jenis	71	80	658.530	80	1.040.820	90	787.090	110	800.663	110	872.723	110	4.159.826	Balai Pengujian Material Konstruksi
	Balai Informasi Sumber Daya Air (BISDA)					3.881.909		3.000.000		2.981.244						9.863.153	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	343.571	100	266.646	100	285.806					100	896.023	BISDA
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	209.530	100	128.975	100	53.500					100	392.005	BISDA
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Dokumen	1	1	3.000	1	4.500	1	10.118					3	17.618	BISDA
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	1	1	14.400	1	13.800	1	21.583					3	49.783	BISDA
5	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan areal irigasi	ha	240	442	3.311.407	345	2.586.079	348	2.610.237					1134	8.507.723	BISDA
	Balai Informasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BI-PIW)											1.249.000		1.361.410		2.610.410	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	360.000	100	392.400	100	752.400	BI-PIW

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%								100	60.000	100	65.400	100	125.400	BI-PIW
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men								1	11.000	1	11.990	2	22.990	BI-PIW
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men								1	18.000	1	19.620	2	37.620	BI-PIW
5	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Data/Informasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah	doku-men								3	800.000	3	872.000	6	1.672.000	BI-PIW
1.04	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman					41.126.033		59.838.449		52.418.768		31.949.993		34.825.493		220.158.735	
	Dinas Perumahan dan Permukiman					41.126.033		59.838.449		52.418.768		31.949.993		34.825.493		220.158.735	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	850.000	100	926.500	100	1.776.500	Dinas Perkim
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%								100	480.000	100	523.200	100	1.003.200	Dinas Perkim
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%								100	26.000	100	28.340	100	54.340	Dinas Perkim
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men								1	230.000	1	250.700	2	480.700	Dinas Perkim
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men								1	50.000	1	54.500	2	104.500	Dinas Perkim

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Pelaksana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
6	Program Pengembangan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	21.471	1000	41.126.033	800	59.838.449	1008	52.418.768	1073	28.260.000	1119	30.803.400	26.471	212.446.649	Dinas Perkim
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Daya tumbuh lingkungan sehat	Kawasan								0,5	900.000	8,5	981.000	8,5	1.881.000	Dinas Perkim
8	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Laporan mitigasi bencana	Dokumen								1	100.000	1	109.000	2	209.000	Dinas Perkim
9	Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Laporan pengendalian pembangunan perumahan	Dokumen								1	448.804	1	489.196	2	938.000	Dinas Perkim
10	Program Pengembangan Permukiman	Dokumen RP3KP	Dokumen								1	605.189	1	659.656	2	1.264.845	Dinas Perkim
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					12.398.728		22.594.488		25.833.526		37.504.992		47.443.941		145.775.675	
	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri					5.023.297		11.170.616		11.070.607		11.539.475		15.834.948		54.638.943	
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	935.589	100	1.136.849	100	1.200.816	100	1.227.850	100	1.651.122	100	6.152.226	Badan Kesbangpoldagri
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	480.258	100	3.159.219	100	2.660.311	100	1.459.200	100	1.846.713	100	9.605.701	Badan Kesbangpoldagri
3	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Dokumen	8	8	69.052	8	58.475	9	87.525	8	96.278	8	120.347	8	431.677	Badan Kesbangpoldagri
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	15					15	23.880	15	26.268	15	32.835	15	82.983	Badan Kesbangpoldagri

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	90	90	12.220	90	35.373	90	40.323	90	44.355	90	55.444	90	187.714	Badan Kes-bang-poldagri
6	Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Penurunan jumlah konflik sosial	Kasus	54					37	1.341.973	32	2.195.726	27	2.744.658	27	6.282.357	Badan Kes-bang-poldagri
7	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Tingkat pelaku penyakit masyarakat	%	28			-	4.456.318	20	64.761	20	71.237	20	389.046	20	4.981.362	Badan Kes-bang-poldagri
8	Pengembangan wawasan kebangsaan	Intensitas konflik SARA	%	20	10	581.375	10	1.258.585	10	1.289.259	10	1.289.259	10	2.083.155	10	6.501.633	Badan Kes-bang-poldagri
9	Pendidikan politik masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	70,47	71	468.172	71,5	1.065.797	72	982.633	72,5	1.412.261	73	2.265.327	73	6.194.190	Badan Kes-bang-poldagri
10	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kebijakan penanganan konflik	Doku-men	4	4	2.476.631			5	3.379.128	6	3.717.041	8	4.646.301	23	14.219.101	Badan Kes-bang-poldagri
	Satuan Polisi Pamong Praja					5.530.000		5.481.036		6.336.202		5.678.168		9.076.041		32.101.446	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	2.019.260	100	1.728.599	100	1.196.184	100	1.285.564	100	2.533.300	100	8.762.907	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	452.390	100	666.770	100	636.543	100	432.000	100	827.600	100	3.015.303	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	100	195.861	100	195.161	100	228.369	100	281.032	100	323.186	100	1.223.608	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	173.332	100	56.030	100	60.157	100	90.157	100	323.186	100	702.862	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Dok	5	6	86.075	6	101.850	7	94.538	7	94.538	7	220.000		597.001	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dok	1	1	14.400	2	14.400	2	25.200	2	19.044	3	21.901		94.945	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat kesiap-siagaan personel Satlinmas	%	100	20	368.759	40	388.789	60	262.082	80	474.123	100	653.815	100	2.147.567	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	%	45	55	1.769.179	65	1.755.205	100	3.216.607	100	2.251.085	100	2.962.000	100	11.954.077	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat kesiap-siagaan personel Satpolpp	%	100	100	252.069	100	225.619	100	373.442	100	313.500	100	376.200	100	1.540.829	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tingkat penanganan Pekat	%	100	100	111.145	100	247.732	100	158.146	100	166.476	100	480.000	100	1.163.499	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Program Reformasi Birokrasi	Tingkat penanganan disiplin aparatur	%	100	100	36.952	100	47.302	100	31.996	100	72.000	100	72.000	100	260.249	Satuan Polisi Pamong Praja
12	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tingkat Kompetensi kesiap-siagaan personel Satpolpp dalam Bencana Alam	%	100	100	50.580	100	53.580	100	52.939	100	52.939	100	108.000	100	318.037	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
13	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Masyarakat yang diberdayakan	orang								375	145.710	375	174.852	750	320.562	Satuan Polisi Pamong Praja
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					1.845.432		5.942.837		8.426.718		20.287.349		22.532.952		59.035.287	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	Tahun	0	1	733.574	1	1.461.646	1	1.098.468	1	1.263.239	1	1.452.725	5	6.009.651	BPBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	Paket	0	1	530.195	1	1.193.481	1	2.970.125	1	3.420.125	1	3.933.144	5	12.047.070	BPBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	Tahun	0	1	36.800	1	100.650	1	24.637	1	100.000	1	110.000	5	372.087	BPBD
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	5	5	57.254	5	79.400	5	83.120	5	95.588	5	109.926	25	425.288	BPBD
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	0	0	0	0	0	1	50.780	1	58.397	1	67.157	3	176.334	BPBD
6	Program Siaga Darurat Bencana	Prasarana Desa siaga bencana	desa/ tahun	0	0	0	0	366.405	10	977.444	10	1.000.000	10	1.100.000	30	3.443.849	BPBD
7	Program Tanggap Darurat Bencana	Laporan kebencanaan	lapo-ran/ tahun	0	0	0	0	109.170	1	84.320	1	100.000	1	110.000	3	403.490	BPBD
8	Program Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan	Prasarana Darurat desa terkena bencana	unit/ tahun	0	0	0	9	532.533	0	0	10	1.000.000	10	1.100.000	29	2.632.533	BPBD
9	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sekolah/ Madrasah aman bencana	unit/ tahun	0	15	151.775	5	570.471	5	1.196.970	5	1.200.000	5	1.300.000	35	4.419.216	BPBD
10	Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana	Tenaga terlatih reaksi cepat	orang/ tahun	0	150	310.834		36.642	150	606.065	150	750.000	150	850.000	600	2.553.541	BPBD

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Pelaksana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
11	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penangggulangan Bencana	Sarana prasarana terdampak	lokasi/ tahun	0	0	0	4	793.146	0	478.800	5	10.000.000	5	11.000.000	14	22.271.946	BPBD
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Desain sarana prasarana terdampak	dokumen/ tahun	0	0	25.000	1	84.569	0	0	5	250.000	5	250.000	11	609.569	BPBD
13	Peningkatan Partisipasi Dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB	Desa tangguh bencana	desa/ tahun	0	0	0	7	571.085	5	491.764	4	500.000	4	550.000	20	2.112.849	BPBD
14	Pengembangan Data / Informasi	Informasi bencana	Laporan/ tahun	0	0	0	1	43.640	0	0	1	100.000	1	100.000	3	243.640	BPBD
15	Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahaan bencana	Tim reaksi cepat penanggulangan bencana	tim/ tahun	0	0	0	0	0	1	290.400	1	350.000	1	400.000	3	1.040.400	BPBD
16	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan	Prasarana komunikasi	unit/ tahun	0	0	0	0	0	0	73.825	1	100.000	1	100.000	2	273.825	BPBD
1.06	Sosial					16.027.764		18.422.867		27.686.937		29.466.307		38.936.178		130.540.052	
	Dinas Sosial					6.664.999		7.858.664		12.212.444		12.978.731		14.961.565		54.676.403	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	860.575	100	835.849	100	1.062.259	100	761.538	100	875.769	100	4.395.990	Dinas Sosial
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	765.880	100	1.388.944	100	1.039.460	100	360.240	100	450.300	100	4.004.824	Dinas Sosial
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%	100	100	95.221	100	99.862	100	182.195	100	16.700	100	19.205	100	413.183	Dinas Sosial
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	77.948	100	70.405	100	105.130	100	99.765	100	114.730	100	467.978	Dinas Sosial

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	Dok	1	1	-	1	-	1	22.680	1	21.000	1	24.150	5	67.830	Dinas Sosial
6	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya yang diberdayakan	%	2,24	0,16	3.049.640	0,52	3.326.375	1,15	7.081.228	1,88	8.844.383	2,75	10.171.040	2,75	32.472.666	Dinas Sosial
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan penanganan kasus kesejahteraan sosial	%	6,13	0,20	707.046	0,98	1.132.231	1,77	1.390.523	2,73	1.726.208	3,90	1.985.139	3,90	6.941.147	Dinas Sosial
8	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Cakupan para penyandang cacat dan trauma yang dibina	%	35,00	0,65	120.750	1,44	71.550	2,36	79.422	3,47	323.122	4,83	371.590	4,83	966.434	Dinas Sosial
9	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	%	15,22	13,40	211.806	8,26	409.347	7,87	730.482	8,55	580.075	9,35	667.086	9,35	2.598.796	Dinas Sosial
10	Program Jaminan Sosial	Cakupan Jaminan Sosial yang diberikan	%								-	245.700	9,35	282.555	9,35	528.255	Dinas Sosial
11	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan dokumen kependudukan	%	95,14	75,84	776.133	79,63	524.101	83,61	519.065	87,79	-	-	-	87,79	1.819.299	Dinas Sosial
	Balai Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"					1.250.000		1.590.910		1.799.033		2.013.107		2.306.198		8.959.249	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	126.616	100	139.148	100	259.143	100	296.912	100	341.449	100	1.163.268	BSBR
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	100.235	100	48.622	100	78.090	100	177.500	100	195.250	100	599.697	BSBR

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	0	100	0	100	16.800	100	16.800	100	19.320	100	52.920	BSBR
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	Dok	1	1		1	-	1	27.160	1	11.100	1	12.765	5	51.025	BSBR
5	Pembinaan Anak Terlantar	Cakupan anak terlantar yang dibina	%	0,06	0,06	1.023.149	0,06	1.403.140	0,06	1.417.840	0,06	1.510.795	0,06	1.737.414	0,30	7.092.338	BSBR
	Balai Sosial Karya Wanita Mirah Adi					900.000		1.050.000		1.341.861		1.376.804		1.579.668		6.248.333	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	159.401	100	155.367	100	132.709	100	298.648	100	343.446	100	1.089.570	BSKW
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	115.471	100	238.766	100	60.445	100	73.128	100	80.441	100	568.251	BSKW
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	0	100	0	100	6.300	100	13.800	100	15.870	100	35.970	BSKW
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	Dok	1	1		1	-	1	21.480	1	15.780	1	18.147	5	55.407	BSKW
5	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang bina	%	0,27	0,27	625.128	0,28	655.868	0,28	1.120.927	0,28	975.447	0,28	1.121.765	0,28	4.499.135	BSKW
	Balai Sosial Lanjut Usia “ Mandalika “					1.300.000		1.290.260		1.708.309		1.601.310		2.252.504		8.152.383	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	252.750	100	242.648	100	420.839,40	100	421.466,40	100	484.686	100	1.822.390	BSLU

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	100.522	100	62.323	100	127.676	100	162.960	100	598.401	100	1.051.882	BSLU
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	-	100	-	100	12.950	100	13.850	100	15.928	100	42.728	BSLU
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	%	100	100	-	100	-	100	20.830	100	9.800	100	11.270	100	41.900	BSLU
5	Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Cakupan jompo yang dibina	%	3,97	0,16	946.728	1,24	985.289	2,5	1.126.013,85	5,13	993.233,60	10,80	1.142.219	10,80	5.193.483	BSLU
	Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak "SASAMBO MATUPA"					1.151.999		1.301.998		1.687.935		2.037.424		5.843.038		12.022.394	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	170.949	100	175.355	100	197.813	100	293.853	100	337.931	100	1.175.901	BSPPA
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	62.087	100	203.337	100	395.775	100	461.130	100	4.030.300	100	5.152.629	BSPPA
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	7.750	100	8.350	100	12.430	100	13.080	100	15.042	100	56.652	BSPPA
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	Dok	-	-	-	-	-	1	22.680	1	12.930	1	14.870	3	50.480	BSPPA
5	Pembinaan Anak Terlantar	Cakupan anak terlantar yang dibina	%	5,32	0,45	875.513	0,90	881.100	1,82	1.016.104	3,70	1.211.239	7,68	1.392.925	7,68	5.376.881	BSPPA
6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Cakupan anak terlantar yang dibina	%	35,00	0,06	35.700	0,12	33.856	0,18	43.133	0,24	45.192	0,30	51.971	0,30	209.852	BSPPA
	Balai Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan"					1.545.999		1.616.448		1.828.608		1.739.941		2.000.932		8.731.928	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	185.872	100	287.159	100	327.254	100	375.295	100	431.589	100	1.607.169	BSAA Gen-erasi Harapan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	83.434	100	232.178	100	156.178	100	79.405	100	91.316	100	642.511	BSAA Gen-erasi Harapan
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	18.900	100	13.000	100	15.175	100	15.175	100	17.451	100	79.701	BSAA Gen-erasi Harapan
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	Dok	-	-	-	-	-	1	24.280	1	13.905	1	15.991	3	54.176	BSAA Gen-erasi Harapan
5	Pembinaan Anak Terlantar	Cakupan anak terlantar yang dibina	%	5,32	0,07	1.257.793	0,13	1.084.111	0,20	1.305.721	0,27	1.256.161	0,33	1.444.585	0,33	6.348.371	BSAA Gen-erasi Harapan
	Balai Sosial Bina Laras “Muthmainnah “ Selebung					1.249.999		1.299.999		3.982.008		1.597.307		1.836.903		9.966.216	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	185.889	100	200.849	100	197.725	100	215.801	100	248.171	100	1.048.435	BSBL
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	71.250	100	27.950	100	2.507.877	100	52.250	100	60.088	100	2.719.415	BSBL
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BSBL
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	Dok	-	-	-	-	-	1	27.960	1	18.300	1	21.045	3	67.305	BSBL
5	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	%	3,06	0,55	992.860	1,11	1.071.200	1,68	1.248.446	2,27	1.310.956	2,91	1.507.599	2,91	6.131.061	BSBL

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Balai Sosial Bina Karya "Madani " Lombok Timur					1.134.999		1.596.588		2.073.700		2.050.742		6.858.353		13.714.382	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	79.137	100	94.688	100	145.863	100	190.939	100	219.580	100	730.207	BSBK
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	62.494	100	122.004	100	201.969	100	106.594	100	4.622.583	100	5.115.644	BSBK
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	3.600	100	4.200	100	6.300	100	12.600	100	14.490	100	41.190	BSBK
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	Dok	-	-	-	-	-	1	64.440	1	10.100	1	11.615	3	86.155	BSBK
5	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang bina	%	3,06	0,55	989.768	1,11	1.375.696	1,68	1.655.128	2,27	1.730.509	2,91	1.990.085	2,91	7.741.186	BSBK
	Balai Sosial Lanjut Usia "Meci Angi " Bima					829.769		818.000		1.053.038		4.070.941		1.297.017,15		8.068.765	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	160.919	100	162.599	100	240.731	100	378.230	100	434.965	100	1.377.444	BSLU
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	160.919	100	157.500	100	55.477	100	2.980.204	100	42.670	100	3.396.770	BSLU
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	-	-	-	-	100	7.525	100	13.650	100	15.698	100	36.873	BSLU
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	Dok	-	-	-	-	-	1	33.360	1	19.330	1	22.230	3	74.920	BSLU
5	Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Cakupan jompo yang dibina	%	0,37	0,37	507.931	0,74	497.901	1,12	715.945	1,51	679.527	3,07	781.456,05	3,07	3.182.760	BSLU

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					92.899.928		95.596.075		142.732.285		150.550.696		201.034.622		682.813.607	
2.01	Tenaga Kerja					16.698.644		15.068.171		29.915.253		15.405.085		18.819.336		95.906.489	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					13.411.288		11.153.171		17.877.189		8.268.413		9.095.255		59.805.316	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	2.566.172	100	2.344.105	100	2.542.132	100	1.278.375	100	1.406.212	100	10.136.997	Dis-naker-trans
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	3.094.660	100	2.724.270	100	4.598.761	100	601.189	100	661.308	100	11.680.187	Dis-naker-trans
3	Peningkatan disiplin aparatur	Kinerja Aparatur	%	100	100	31.980	100	17.000	100	28.150	100	25.150	100	27.665	100	129.945	Dis-naker-trans
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%	100	100	105.524	100	121.940	100	135.545	100	96.427	100	106.070	100	565.506	Dis-naker-trans
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	596.518	100	457.624	100	782.527	100	454.456	100	499.901	100	2.791.026	Dis-naker-trans
6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1	1	230.110	1	30.410	1	81.216	1	68.582	1	75.440	5	485.758	Dis-naker-trans
7	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen laporan	Doku-men	0	0	-	0	-	1	178.468	1	448.970	1	493.867	3	1.121.304	Dis-naker-trans
8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	tenaga kerja yang mendapat pelatihan	orang	60	65	1.162.581	70	1.765.872	75	6.684.588	3.000	930.375	3.500	1.023.413	95	11.566.828	Dis-naker-trans
9	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (AKL,AKAD,AKAN)	orang	64	66	4.906.981	68	2.958.125	70	1.870.763	73.000	3.449.268	75.388	3.794.194	74	16.979.330	Dis-naker-trans

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Lembaga yang dibina	pe-rusa-haan	30	37	716.762	43	733.827	50	975.041	55	358.598	60	394.458	60	3.178.686	Dis-naker-trans
11	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Perusahaan yang di awasi Keselamatan dan kesehatan kerja	pe-rusa-haan	-	-	-	-	-	-	-	70	557.024	90	612.726	90	1.169.750	Dis-naker-trans
	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi					773.035		1.410.000		1.735.465		1.569.072		1.725.980		7.213.552	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	264.829	100	244.234	100	281.607	100	320.009	100	352.010	100	1.462.690	Balai Latihan Ma-syarakat dan Trans-migrasi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	390.575	100	1.052.760	100	864.165	100	676.764	100	744.440	100	3.728.704	Balai Latihan Ma-syarakat dan Trans-migrasi
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	12.600	100	19.950	100	24.997	100	27.487	100	30.236	100	115.270	Balai Latihan Ma-syarakat dan Trans-migrasi
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1	1	13.800	1	13.800	1	18.830	1	12.400	1	13.639	5	72.469	Balai Latihan Ma-syarakat dan Trans-migrasi

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Program Pengembangan wilayah Transmigrasi	warga kimtrans yang dilatih	orang	-	-	-	-	-	30	269.993	-	-	-	-	-	269.993	Balai Latihan Ma-syarakat dan Trans-migrasi
6	Program Penempatan dan dan pembinaan transmigrasi	warga kimtrans yang dilatih	orang	30	30	91.231	30	79.256	30	275.873	-	-	-	-	-	446.360	Balai Latihan Ma-syarakat dan Trans-migrasi
7	Program Penempatan dan Pengembangan wilayah transmigrasi	warga kimtrans yang dilatih	orang	-	-	-	-	-	-	-	180	532.413	210	585.654	210	1.118.067	Balai Latihan Ma-syarakat dan Trans-migrasi
	Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja					959.770		771.000		910.000		800.000		1.095.425		4.536.195	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	333.065	100	254.621	100	260.274	100	267.083,80	100	293.792	100	1.408.836	Balai Hyper-kes dan Kese-lamatan Kerja
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	420.546	100	243.320	100	464.518	100	287.376,10	100	316.114	100	1.731.874	Balai Hyper-kes dan Kese-lamatan Kerja
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%	100	100	15.354	100	21.000	100	16.000	100	15.100,00	100	16.610	100	84.064	Balai Hyper-kes dan Kese-lamatan Kerja

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	24.755	100	19.417	100	11.463	100	13.974,65	100	15.372	100	84.982	Balai Hyper-kes dan Kese-lamatan Kerja
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1	1	13.800	0	-	1	19.685	1	20.624,40	1	22.687	4	76.796	Balai Hyper-kes dan Kese-lamatan Kerja
6	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	jumlah pekerja yang di uji kesehatan dan lingkungan kerjanya	orang	30	30	152.250	50	232.642	50	138.060	240	195.841,00	300	215.425	300	934.218	Balai Hyper-kes dan Kese-lamatan Kerja
7	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	jumlah pekerja yang di uji kesehatan dan lingkungan kerjanya	orang										300	215.425	300	215.425	Balai Hyper-kes dan Kese-lamatan Kerja
	Balai Latihan Kerja					1.052.400		1.209.000		8.616.660,00		4.767.599,00		5.244.359		20.890.018	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	271.921	100	286.164	100	505.143	100	622.092	100	684.301	100	2.369.621	BLK
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	657.095	100	790.498	100	2.047.032	100	2.559.320	100	2.815.252	100	8.869.197	BLK
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%	0	0	-	0	-	0	11.900	100	25.000	100	27.500	100	64.400	BLK
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	6.900	100	6.000	100	28.811	100	29.000	100	31.900	100	102.611	BLK

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1	1	33.800	0	-	0	29.800	1	21.680	1	23.848	3	109.128	BLK
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	angkatan kerja yang mendapat pelatihan	orang	32	32	82.684	64	126.338	256	5.993.974	208	1.510.507	240	1.661.558	240	9.375.061	BLK
	Balai Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja Daerah (BP2TKD)					502.151		525.000		775.939						1.803.090	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	217.327	100	256.715	100	227.316					100	701.358	BP2TKD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	45.869	100	93.802	100	112.691					100	252.362	BP2TKD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%	100	100	8.000	100	8.000	100	-					100	16.000	BP2TKD
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	3.000	100	6.488	100	14.205					100	23.693	BP2TKD
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1	1	13.800	1	16.610	1	20.632					2	51.042	BP2TKD
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	angkatan kerja yang mendapat pelatihan	orang	32	20	214.155	20	143.385	20	401.095					20	758.635	BP2TKD
	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok												100	804.159	100	804.159	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	0									100	267.084	100	267.084	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	0									100	287.376	100	287.376	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%	0									100	15.100	100	15.100	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	0									100	13.975	100	13.975	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	0									1	20.624	1	20.624	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang di periksa dan diuji obyek K3nya (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Pulau Lombok	pe-rusa-haan	0									25	200.000	25	200.000	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa												100	854.159	100	854.159	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	0									100	267.084	100	267.084	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	0									100	287.376	100	287.376	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%	0									100	15.100	100	15.100	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	0									100	13.975	100	13.975	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	0									1	20.624	1	20.624	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang di periksa dan diuji obyek K3nya (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Pulau Sumbawa	pe-rusa-haan	0									25	250.000	25	250.000	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1.464.113		2.480.608		6.086.104		7.220.000		5.535.000		22.785.825	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					1.464.113		2.480.608		6.086.104		7.220.000		5.535.000		22.785.825	
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	438.459	100	506.128	100	481.022	100	654.500	100	750.000	100	2.830.108	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	164.598	100	211.062	100	368.720	100	450.000	100	575.000	100	1.769.379	
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	4.350	100	8.400	100	21.000	100	38.000	100	25.000	100	96.750	
4	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	%	100	100	45.567	100	48.862	100	100.303	100	142.500	100	150.000	100	487.232	
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Doku-men	1	1	17.902	1	17.902	1	25.280	1	50.000	1	50.000	5	161.084	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
6	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	SKPD yang melaksanakan PRG	%	26,67	42,22	146.928	57,78	224.189	73,33	417.155	86,67	450.000	100	1.060.000	100	2.298.272	
7	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Deklarasi Provinsi/ Kabupaten/Kota layak anak	Prov/ Kab/ Kota	1	1	511.609	3	1.125.115	5	1.605.449	8	2.050.000	10	1.841.000	11	7.133.173	
8	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Cakupan penanganan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	62,10	64,20	65.321	75,25	278.991	84,30	2.674.246	93,35	2.400.000	100	600.000	100	6.018.557	
9	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (sasaran pelatihan PEKKA, mantan TKW, korban kekerasan sebanyak 3205 orang)	Perempuan yang terlatih	%	0	0,94	69.380	1,98	59.960	2,98	392.930	7,93	985.000	21,16	484.000	34,99	1.991.270	
2.03	Pangan					5.421.998		7.363.109		9.550.402		7.267.849		7.994.635		37.597.994	
	Dinas Ketahanan Pangan					5.421.998		7.363.109		9.550.402		7.267.849		7.994.635		37.597.994	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	726.441	100	584.300	100	1.642.845	100	1.098.911	100	1.208.802	100	5.261.299	Dinas Ketah-anan Pangan dan UPTD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	553.700	100	3.013.145	100	949.480	100	799.545	100	879.500	100	6.195.370	Dinas Ketah-anan Pangan dan UPTD

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	12.000	100	11.383	100	10.140	100	9.998	100	10.998	100	54.519	Dinas Ketah-anan Pangan dan UPTD
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	4	4	401.418	4	438.686	4	322.742	4	228.562	4	251.418	20	1.642.826	Dinas Ketah-anan Pangan dan UPTD
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Doku-men	1	1	55.883	1	50.339	1	49.822	1	42.496	1	46.746	5	245.286	Dinas Ketah-anan Pangan dan UPTD
6	Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH)	Point	78,7	79,4	3.351.614	80,2	2.862.252	80,9	6.089.418	81,7	4.779.462	82,5	5.257.408	82,5	22.340.153	Dinas Ketah-anan Pangan dan UPTD
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Informasi produk pangan dan olahannya yang dipromosikan	Doku-men	7	7	320.943	100	403.006	7	485.955	7	308.875	7	339.763	128	1.858.542	Dinas Ketah-anan Pangan dan UPTD
2.04	Pertanahan					897.357		1.446.811,60		1.336.778		1.315.000		1.605.000		6.600.947	
	Brio Pemerintahan					897.357		1.446.812		1.336.778		1.315.000		1.605.000		6.600.947	
1	Program Peningkatan Tertib Adminstrasi	Penegasan batas wilayah administrasi	%	100	100	897.357	100	1.446.812	100	1.336.778	100	575.000	100	685.000	100	4.940.947	Biro Pemer-intahan
2	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Tingkat penyelesaian sengketa pertanahan	%								100	740.000	100	920.000	100	1.660.000	Biro Pemer-intahan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2.05	Lingkungan Hidup					6.120.516		13.381.553		24.292.363		27.824.460		59.060.233		130.679.125	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					2.913.223		7.610.469		15.414.528		27.824.460		59.060.233		112.822.913	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	1.118.313	100	1.955.719	100	3.270.413	100	8.934.412	100	9.597.125	100	24.875.982	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			100	100	1.118.313	100	1.574.499	100	1.826.333	100	5.494.564	100	5.769.292	100	15.783.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	UPTB Laboratorium												100	44.000	100	44.000	UPTB Laboratorium
	Tahura Nuraksa										100	44.477	100	48.924	100	93.401	Tahura Nuraksa
	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura						100	195.727	100	427.337	100	517.500	100	569.250	100	1.709.814	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura
	KPH Ampang Riwo Soromandi						100	68.498	100	348.292	100	411.920	100	453.112	100	1.281.821	KPH Ampang Riwo Soromandi
	KPH Tambora						100	58.498	100	282.320	100	292.030	100	321.233	100	954.080	KPH Tambora
	KPH Maria Donggomasa						100	58.498	100	386.132	100	614.170	100	675.587	100	1.734.387	KPH Maria Donggomasa

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	KPH Rinjani Timur										100	156.198	100	171.818	100	328.015	KPH Rinjani Timur
	KPH Matayang Sejorong Brang Rea										100	239.822	100	263.804	100	503.626	KPH Ma-tayang Se-jorong Brang Rea
	KPH Batu Lanteh Puncak Ngengas										100	196.323	100	215.955	100	412.278	KPH Batu Lanteh Puncak Ngen-gas
	KPH Ampang Plampang										100	245.995	100	270.594	100	516.589	KPH Ampang Plam-pang
	KPH Orong Telu Brang Beh										100	232.323	100	255.555	100	487.878	KPH Orong Telu Brang Beh
	KPH Ropang										100	181.341	100	199.475	100	380.817	KPH Ropang
	KPH Toffo Pajo Waworada Madapangga Rompu										100	307.751	100	338.526	100	646.277	KPH Toffo Pajo Wawo-rada Mada-pangga Rompu
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Tugas Aparatur	%	100	100	991.300	100	3.970.774	100	8.505.362	100	13.131.220	100	32.901.509	100	59.500.165	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			100	100	991.300	100	3.321.292	100	5.365.301	100	7.640.947	100	8.022.994	100	25.341.833	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan
	UPTB Laboratorium												100	14.000.000	100	14.000.000	UPTB Labora-torium
	Tahura Nuraksa										100	963.650	100	1.060.015	100	2.023.665	Tahura Nuraksa
	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura						100	62.300	100	190.900	100	1.030.000	100	1.733.000	100	3.016.200	KPH Rinjani Barat Pelan-gan Tastura
	KPH Ampang Riwo Soromandi						100	8.050	100	502.700	100	419.000	100	800.000	100	1.729.750	KPH Ampang Riwo Soro-mandi
	KPH Tambora						100	8.550	100	494.262	100	885.500	100	885.500	100	2.273.812	KPH Tam-bora
	KPH Maria Donggomasa						100	7.600	100	206.616	100	197.500	100	800.000	100	1.211.716	KPH Maria Dong-gomasa
	KPH Rinjani Timur										100	18.359	100	800.000	100	818.359	KPH Rinjani Timur
	KPH Matayang Sejorong Brang Rea										100	635.813	100	800.000	100	1.435.813	KPH Ma-tayang Se-jorong Brang Rea

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	KPH Batu Lanteh Puncak Ngengas										100	76.770	100	800.000	100	876.770	KPH Batu Lanteh Puncak Ngen-gas
	KPH Ampang Plampang										100	40.603	100	800.000	100	840.603	KPH Ampang Plam-pang
	KPH Orong Telu Brang Beh										100	542.003	100	800.000	100	1.342.003	KPH Orong Telu Brang Beh
	KPH Ropang										100	521.405	100	800.000	100	1.321.405	KPH Ropang
	KPH Toffo Pajo Waworada Madapangga Rompu										100	159.671	100	800.000	100	959.671	KPH Toffo Pajo Wawo-rada Mada-pangga Rompu
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%			148.100		416.461		537.259		776.403		1.038.173		2.916.396	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			100	100	77.650	100	214.230	100	251.480	100	655.403	100	688.173	100	1.886.936	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan
	UPTB Laboratorium												100	25.000	100	25.000	UPTB Labora-torium

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Kehutanan			100	2,35	70.450	29,41	202.230	50,59	229.780	7,06		10,59	25.000	100	527.460	Kehuta-nan
	Tahura Nuraksa												100	25.000	100	25.000	Tahura Nuraksa
	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura								100	15.800	100	15.000	100	25.000	100	55.800	KPH Rinjani Barat Pelan-gan Tastura
	KPH Ampang Riwo Soromandi												100	25.000	100	25.000	KPH Ampang Riwo Soro-mandi
	KPH Tambora										100	56.000	100	25.000	100	81.000	KPH Tam-bora
	KPH Maria Donggomasa								100	40.200	100	50.000	100	25.000	100	115.200	KPH Maria Dong-gomasa
	KPH Rinjani Timur												100	25.000	100	25.000	KPH Rinjani Timur
	KPH Matayang Sejorong Brang Rea												100	25.000	100	25.000	KPH Ma-tayang Se-jorong Brang Rea
	KPH Batu Lanteh Puncak Ngengas												100	25.000	100	25.000	KPH Batu Lanteh Puncak Ngen-gas

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	KPH Ampang Plampang												100	25.000	100	25.000	KPH Ampang Plam-pang
	KPH Orong Telu Brang Beh												100	25.000	100	25.000	KPH Orong Telu Brang Beh
	KPH Ropang												100	25.000	100	25.000	KPH Ropang
	KPH Toffo Pajo Waworada Madapangga Rompu												100	25.000	100	25.000	KPH Toffo Pajo Wawo-rada Mada-pangga Rompu
4	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%			287.664		769.435		653.229		1.961.525		2.087.309		5.759.162	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			100	100	195.564	100	379.448	100	83.292	100	1.215.675	100	1.276.459	100	3.150.438	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan
	UPTB Laboratorium												100	65.000	100	65.000	UPTB Labora-torium
	Tahura Nuraksa										100	34.500	100	34.500	100	69.000	Tahura Nuraksa

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura						100	18.659	100	56.447	100	65.000	100	65.000	100	205.106	KPH Rinjani Barat Pelan-gan Tastura
	KPH Ampang Riwo Soromandi						100	7.500	100	75.763	100	115.000	100	115.000	100	313.263	KPH Ampang Riwo Soro-mandi
	KPH Tambora						100	24.300	100	64.590	100	64.200	100	64.200	100	217.290	KPH Tam-bora
	KPH Maria Donggomasa						100	24.300	100	61.558	100	67.500	100	67.500	100	220.858	KPH Maria Dong-gomasa
	KPH Rinjani Timur										100	57.086	100	57.086	100	114.171	KPH Rinjani Timur
	KPH Matayang Sejorong Brang Rea										100	57.086	100	57.086	100	114.171	KPH Ma-tayang Se-jorong Brang Rea
	KPH Batu Lanteh Puncak Ngengas										100	57.086	100	57.086	100	114.171	KPH Batu Lanteh Puncak Ngen-gas
	KPH Ampang Plampang										100	57.111	100	57.111	100	114.221	KPH Ampang Plam-pang

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	KPH Orong Telu Brang Beh										100	57.086	100	57.086	100	114.171	KPH Orong Telu Brang Beh
	KPH Ropang										100	57.086	100	57.086	100	114.171	KPH Ropang
	KPH Toffo Pajo Waworada Madapangga Rompu										100	57.111	100	57.111	100	114.221	KPH Toffo Pajo Wawo-rada Mada-pangga Rompu
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	Doku-men	1	1	28.800	1	33.625	8	289.386	16	670.900	17	716.117	33	1.738.829	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			1	1	28.800	1	33.625	1	95.587	1	365.661	1	383.944	1	907.617	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan
	UPTB Laboratorium												1	23.800	1	23.800	UPTB Labora-torium
	Tahura Nuraksa										1	23.800	1	23.800		47.600	Tahura Nuraksa
	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura								2	33.652	2	36.000	2	36.000	2	105.652	KPH Rinjani Barat Pelan-gan Tastura

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	KPH Ampang Riwo Soromandi								1	28.490	1	31.339	1	34.473	3	94.302	KPH Ampang Riwo Soro-mandi
	KPH Tambora								1	33.850	1	33.850	1	33.850	3	101.550	KPH Tam-bora
	KPH Maria Donggomasa								2	34.190	2	35.000	2	35.000	6	104.190	KPH Maria Dong-gomasa
	KPH Rinjani Timur										1	20.750	1	20.750	2	41.500	KPH Rinjani Timur
	KPH Matayang Sejorong Brang Rea										1	20.750	1	20.750	2	41.500	KPH Ma-tayang Se-jorong Brang Rea
	KPH Batu Lanteh Puncak Ngengas										1	20.750	1	20.750	2	41.500	KPH Batu Lanteh Puncak Ngen-gas
	KPH Ampang Plampang										1	20.750	1	20.750	2	41.500	KPH Ampang Plam-pang
	KPH Orong Telu Brang Beh										1	20.750	1	20.750	2	41.500	KPH Orong Telu Brang Beh
	KPH Ropang										1	20.750	1	20.750	2	41.500	KPH Ropang

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	KPH Toffo Pajo Waworada Madapangga Rompu										1	20.750	1	20.750	2	41.500	KPH Toffo Pajo Wawo-rada Mada-pangga Rompu
6	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Kebijakan yang dihasilkan	Doku-men	1	1	35.270	1	56.989	1	78.476	1	400.000	1	10.000.000	5	10.570.735	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan
7	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Air		54,13	54	149.893	54,15	219.933	54,20	1.763.903	54,30	900.000	54,50	1.200.000	54,50	4.233.728	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan
8	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Mata Air terlindungi	Titik	334	354	127.655	375	182.054	396	186.088	417	500.000	438	650.000	438	1.645.797	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan
9	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Penanganan kasus lingkungan hidup	%	100	100	26.229	100	5.480	100	56.545	100	100.000	100	220.000	100	408.253	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan
10	Program peningkatan pengendalian polusi	Indeks Udara		86,20	86	-	86	-	86	73.867	86	450.000	86	650.000	86	1.173.867	UPTB Labora-torium

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian					3.207.293		5.771.085		8.877.835	-	-	-	-	-	17.856.212	
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	595.364	100	686.223	100	1.038.105	-	-	-	-	-	2.319.692	BLHP
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelancaran Tugas Aparatur	%	100	100	561.500	100	2.758.310	100	3.619.717	-	-	-	-	-	6.939.527	BLHP
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%			7.200		12.000		21.700	-	-	-	-	-	40.900	BLHP
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	%			103.464		64.219		83.292	-	-	-	-	-	250.975	BLHP
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Aset	doku-men			0		33.625		31.969	-	-	-	-	0	65.594	BLHP
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Air		54,13		344.355		485.911		2.177.040	-	-	-	-	-	3.007.305	BLHP
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Mata Air terlindungi	Titik			335.824		487.586		530.161	-	-	-	-	-	1.353.571	BLHP
8	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Kebijakan yang dihasilkan	Doku-men			35.270		56.989		78.476	-	-	-	-	0	170.735	BLHP
9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penanganan kasus lingkungan hidup	%			139.829		140.725		117.974	-	-	-	-	-	398.528	BLHP

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
10	Penelitian dan pengkajian teknologi terapan	Hasil penelitian dan Pengkajian	Doku-men			1.084.488		1.045.497		1.105.535	-	-	-	-	0	3.235.520	BLHP
11	Program peningkatan pengendalian polusi	Indeks Udara		86,20		0				73.867	-	-	-	-	-	73.867	BLHP
2.06	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					776.363		524.101		519.065		569.415		683.298		3.072.242	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil											569.415		683.298		1.252.713	
1	Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan dokumen kependudukan	%	95,14							87,79	569.415	92,18	683.298	92,18	1.252.713	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil					776.363		524.101		519.065						1.819.529	
1	Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan dokumen kependudukan	%	95,14	75,84	776.363	79,63	524.101	83,61	519.065						1.819.529	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa					3.519.167		3.593.440		3.890.115		4.368.842		4.805.726		20.177.291	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil					3.519.167		3.593.440		3.890.115		4.368.842		4.805.726		20.177.291	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	879.190	100	790.991	100	859.817	100	844.165	100	928.582	100	4.302.744	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	227.327	100	133.749	100	101.219	100	154.517	100	169.969	100	786.781	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	.	100	36.450	100	40.500	100	45.000	100	50.000	100	55.000	100	226.950	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	6	6	108.200	6	108.200	6	54.000	6	190.080	6	209.088	6	669.568	
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Doku-men	1	1	-	1	-	1	30.080	1	30.080	1	33.088	1	93.248	
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	%	64	5	364.500	5	405.000	5	450.000	5	500.000	5	550.000	89	2.269.500	
7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	BUMDES yang aktif	%	5	5	255.150	5	283.500	5	315.000	5	350.000	5	385.000	30	1.588.650	
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Lembaga adat yang aktif	%	10	10	218.700	10	243.000	10	270.000	10	300.000	10	330.000	60	1.361.700	
		Desa Swadaya lanjut	%	25	5	255.150	5	283.500	5	315.000	5	350.000	5	385.000	50	1.588.650	
9	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tingkat Kapasitas Aparatur Desa	%	40	5	364.500	5	405.000	5	450.000	5	500.000	5	550.000	65	2.269.500	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
10	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Tingkat partisipasi PKK dalam pembangunan	%	100	100	810.000	100	900.000	100	1.000.000	100	1.100.000	100	1.210.000	100	5.020.000	
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					702.761		1.952.403		2.027.693		4.810.000		4.458.000		13.950.857	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil					702.761		1.952.403		2.027.693		4.810.000		4.458.000		13.950.857	
1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Sekolah yang sudah disosialisasikan	%	1,36	11,87	275.896	10,31	423.060	8,37	263.040	38,91	850.000	29,18	1.260.000	100,00	3.071.996	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Keluarga Berencana	Rencana program KB	Dokumen			0	1	200.130	1	261.378	1	450.000	1	990.000	4	1.901.508	
3	Program Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Aparatur PLKB yang terlatih	%	0,00	15,66	79.398	11,97	427.630	8,61	349.415	23,49	850.000	40,27	185.000	100,00	1.891.443	
4	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	Dokumen						1	373.260	1	450.000	1	835.000	3	1.658.260	
5	Program kebijakan dan manajemen pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB	Penyelarasan perencanaan pembangunan Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB	Dokumen				1	52.446	1	151.050	1	200.000	1	225.000	4	628.496	
6	Pengembangan model operasional BKB-Poyandu-PAUD	Model operasional BKB-Poyandu-PAUD	Dokumen	1	1	296.727	1	803.240	1	448.535	1	1.775.000	1	763.000	5	4.086.502	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
7	Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Keterpaduan perencanaan pembangunan terkait PMS dan HIV/AIDS	Doku-men	1	1	50.740	1	45.897	1	181.015	1	235.000	1	200.000	5	712.652	
2.09	Perhubungan					10.114.276		6.800.450		10.322.904		12.614.497		14.853.613		54.705.740	
	Dinas Perhubungan					10.114.276		6.800.450		10.322.904		12.614.497		14.853.613		54.705.740	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	1.441.926	100	1.769.006	100	1.766.596	100	1.758.440	100	2.139.000	100	8.874.968	Dinas Per-hubun-gan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	498.035	100	781.935	100	1.691.106	100	430.400	100	900.000	100	4.301.476	Dinas Per-hubun-gan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	6,67	6,67	25.000	26,67	63.445	26,67	100.696	80,00	277.200	100	170.000	100	636.341	Dinas Per-hubun-gan
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	4	5	78.187	4	102.187	4	106.552	5	98.609	4	110.000	22	495.534	Dinas Per-hubun-gan
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	1	1	563.850	1	20.600	1	45.770	1	95.370	1	100.000	5	825.591	Dinas Per-hubun-gan
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rencana program Kebijakan	Doku-men	1	3	1.251.613	1	843.988	1	567.615	1	624.247	1	1.000.000	7	4.287.463	Dinas Per-hubun-gan
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang terpelihara	%	2,74	2,74	312.300	6,84	175.000	23,26	307.802	28,96	150.000	50,17	1.650.000	50,17	2.595.102	Dinas Per-hubun-gan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
8	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Kelayakan angkutan	%	0	46,55	490.000	46,55	736.338	53,45	3.366.693	53,45	1.976.970	53,45	1.350.000	100	7.920.001	Dinas Per-hubun-gan
9	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Daya tampung	orang	0	600	3.788.255	20	192.342	180	602.470	950	3.603.968	150	1.000.000	1900	9.187.035	Dinas Per-hubun-gan
10	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Cakupan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas	%	5,55	10,15	1.361.510	16,26	1.432.290	17,03	932.578	27,78	2.541.399	47,56	5.156.000	47,56	11.423.777	Dinas Per-hubun-gan
11	Program Pengembangan Transportasi Udara	Penumpang angkutan Udara	Orang	2.145. 290	2.451. 000	129.400	2.843. 000	240.119	3.298. 000	164.252	3.476. 000	106.507	3.626. 000	347.000	3.626. 000	987.278	Dinas Per-hubun-gan
12	Program Pengembangan Transportasi Laut	Penumpang angkutan Laut	Orang	125,794	138, 373	174.200	153, 594	405.200	172, 025	638.649	197, 828	675.011	227, 502	671.613	227. 502	2.564.673	Dinas Per-hubun-gan
13	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Kebijakan Pengendalian Polusi	Doku-men	0	0	0	1	38.000	1	32.125	1	60.900	1	70.000	4	201.025	Dinas Per-hubun-gan
14	Program Peningkatan SDM Perhubungan Darat	Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang berkualitas	orang	0	0	0	0	0	0	-	20	61.400	30	100.000	50	161.400	Dinas Per-hubun-gan
15	Program Peningkatan Manajemen Transportasi Darat	Kebijakan Andalalin	Doku-men	0	0	0	0	0	0	-	5	154.075	3	90.000	8	244.075	Dinas Per-hubun-gan
2.10	Komunikasi dan Informatika					4.613.861		3.607.655		3.116.552		4.149.048		6.957.347		22.444.462	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					-		-		-		4.149.048		6.957.347		11.106.395	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Pelaksana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	907.900	100	953.295	100	1.861.195	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%								100	420.550	100	441.578	100	862.128	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%								100	21.760	100	22.848	100	44.608	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Dokumen								3	87.860	3	92.253	6	180.113	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen								1	44.133	1	46.340	2	90.472	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6	Program Fasilitasi Komisi Informasi	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi dan layanan informasi	dokumen								1	384.472	1	403.696	2	788.168	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7	Program Optimalisasi Pelayanan E-Procurement	Data dan layanan informasi daerah berbasis TIK	dokumen								1	250.000	1	262.500	2	512.500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
8	Program Optimalisasi Keamanan Informasi	Operasional dan Tata Kelola Persandian	dokumen								1	415.871	1	436.665	2	852.536	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9	Program Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	dokumen								1	208.046	1	218.449	1	426.495	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pelayanan informasi	%	10,87							100	1.244.000	100	3.454.725	100	4.698.725	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kebijakan Pengembangan Informasi dan Komunikasi	Dokumen	0								0		-	0	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
12	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Tingkat Kompetensi Pejabat PPID	%	0							88,61	164.455	100	525.000	100	689.455	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
13	Program kerjasama informasi dengan mas media	Tingkat penyebaran informasi kepada masyarakat	%	100												-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
14	Program Pengembangan Informasi Komunikasi Publik	Masyarakat yang dapat menyaring tayangan televisi	orang	0									60	100.000	100	100.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi					3.339.047		1.882.842		1.336.468						6.558.357	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pelayanan informasi	%	10,87	100	2.667.047	100	1.229.504	100	1.212.012,70					100	5.108.564	Dishub-kominfo
2	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kebijakan Pengembangan Informasi dan Komunikasi	Doku-men				2	46.852							2	46.852	Dishub-kominfo
3	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Tingkat Kompetensi Pejabat PPID	%				10,13	33.851	73,42	124.455					73,42	158.306	Dishub-kominfo
4	Program kerjasama informasi dengan mas media	Tingkat penyebaran informasi kepada masyarakat	%	100	100	672.000	100	517.253							100	1.189.253	Dishub-kominfo
5	Program Pengembangan Informasi Komunikasi Publik	Masyarakat yang dapat menyaring tayangan televisi	orang				40	55.382							40	55.382	Dishub-kominfo
	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)					1.274.813		1.724.813		1.780.084		-		-		4.779.711	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	701.053	100	788.766	100	648.210					100	2.138.029	KPID
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	154.510	100	78.230	100	178.600					100	411.340	KPID
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	2.400	100	3.000	100	6.000					100	11.400	KPID
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	4	5	36.750	5	33.547	5	43.047					15	113.344	KPID

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Doku-men	0	0	-	-	-	1	18.500					1	18.500	KPID
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rencana Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Doku-men	8	6	380.100	8	821.270	9	885.728					23	2.087.098	KPID
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					13.390.615		13.444.210		21.753.053		23.820.123		22.712.462		95.120.462	
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					13.390.615		13.444.210		21.753.053		23.820.123		22.712.462		95.120.462	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	94,63	100	1.874.339	100	1.135.814	100	1.534.007	100	1.467.763	100	1.614.539	100	7.626.462	Diskop UKM
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	89,95	100	257.724	100	1.027.317	100	461.952	100	6.051.350	100	1.268.984	100	9.067.327	Diskop UKM
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%	28,97	100	43.500	100	44.750	100	24.900	100	68.328	100	75.161	100	256.639	Diskop UKM
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	97,47	100	715.328	100	722.784	100	819.995	100	719.725	100	791.698	100	3.769.529	Diskop UKM
5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	Doku-men	1	1	31.956	1	21.660	1	40.405	1	17.005	1	18.706	5	129.732	Diskop UKM
6	Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Pertumbuhan KUMKM yang bersertifikat	%	2,89	9,8	366.720	7,08	531.292	6,34	407.255	6,80	520.507	7,26	350.000	10,64	2.175.774	Diskop UKM
7	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM dan WUB	%	17,16	0,17	6.658.657	0,17	6.631.207	0,17	7.264.938	0,17	7.153.143	0,17	9.988.841	17,98	37.696.786	Diskop UKM
8	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Sentra UMKM yang dikembangkan	%	38,14	16,67	932.541	16,67	1.090.659	16,67	9.362.697	16,67	4.396.541	16,67	4.836.195	89,69	20.618.632	Diskop UKM

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
9	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi berkualitas	%	52,25	5,04	2.509.850	4,91	2.238.727	4,78	1.836.905	4,65	3.425.762	4,54	3.768.339	68,3	13.779.583	Diskop UKM
2.12	Penanaman Modal					3.109.001		3.497.640		4.638.096		5.065.435		7.687.759		23.997.931	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					3.109.001		3.497.640		4.638.096		5.065.435		7.687.759		23.997.931	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	823.498	100	912.210	100	1.173.192	100	886.905	100	1.255.645	100	5.051.451	DPMPT-SP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Tugas Aparatur	%	100	100	160.925	100	296.875	100	636.925	100	363.732	100	331.525	100	1.789.982	DPMPT-SP
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%	100	100	20.236	100	40.150	100	92.807	100	31.650	100	140.009	100	324.852	DPMPT-SP
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	%	100	100	100.077	100	93.626	100	115.949	100	127.514	100	124.616	100	561.781	DPMPT-SP
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Doku-men	3	3	20.996	3	20.996	2	39.550	2	20.250	2	27.946	12	129.739	DPMPT-SP
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kebijakan Investasi	Doku-men	1	1	1.522.989	1	1.586.303	1	1.371.295	1	2.017.366	1	3.179.294	5	9.677.246	DPMPT-SP
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Laju Investasi	%	8,28	8,30	410.280	8,4	497.479	8,5	908.236	11,5	1.567.876	13,5	2.507.724	13,5	5.891.595	DPMPT-SP
8	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Kebijakan Potensi Penanaman Modal	Doku-men	1	1	50.000	1	50.000	1	300.143	1	50.143	1	121.000	5	571.286	DPMPT-SP
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga					3.568.078		5.202.194		4.311.207		8.972.488		10.763.894		32.817.861	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Dinas Pemuda dan Olah Raga					-		-		-		8.972.488		10.763.894		19.736.382	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	1.000.252	100	776.273	100	1.776.525	Dispora
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%								100	178.640	100	194.718	100	373.358	Dispora
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men								1	14.355	1	15.647	2	30.002	Dispora
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Doku-men								1	25.230	1	27.501	2	52.731	Dispora
5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan pembinaan Atlet Olah raga yang berprestasi	%								100	2.883.275	100	3.157.763	100	13.195.320	Dispora
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Pemuda dan Prasarana Olah Raga	Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga yang memadai	Unit								15	1.701.797	15	2.863.808	15	6.539.151	Dispora
7	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kelompok Pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan	%								100	959.680	100	1.046.051	100	4.318.455	Dispora
8	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan bagi Pemuda	Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan bagi Pemuda	Ke-lom-pok								20	398.800	20	500.000	40	1.198.800	Dispora

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
9	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Pendewasaan Usia Perkawinan	Cakupan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba dan Pendewasaan Usia Perkawinan bagi Pemuda	Seko-lah								75	900.000	75	1.200.000	150	2.100.000	Dispora
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	%								80	256.660	90	269.493	100	526.153	Dispora
11	Program peningkatan Kepemimpinan, Kepramukaan dan peran serta kepemudaan	Pemuda/ Pelajar yang berprestrasi	%								100	653.799	100	712.641	100	3.007.367	Dispora
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga					3.568.078		5.202.194		4.311.207						13.081.479	
1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan pembinaan Atlet Olah raga yang berprestasi	%	100	100	1.876.375	100	2.888.958	100	2.388.949					100	7.154.282	Dinas Dikpora
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga	Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga yang memadai	Unit	15	15	540.582	15	609.555	15	823.409					45	1.973.546	Dinas Dikpora
3	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kelompok Pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan	%	94,79	100	583.211	100	857.077	100	872.436					100	2.312.724	Dinas Dikpora
4	Program peningkatan Kepemimpinan, Kepramukaan dan peran serta kepemudaan	Pemuda/ Pelajar yang berprestrasi	%	75	100	567.910	100	846.604	100	226.413					100	1.640.927	Dinas Dikpora
2.14	Statistik							563.790		1.586.490		628.714		2.743.500		5.522.494	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					-		-		-		628.714		2.743.500		3.372.214	
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rencana Program perencanaan	Doku-men	-	-	-	-	-	-	-	3	478.714	9	2.586.000	12	3.064.714	Dinas Komu-nikasi, Informa-tika dan Statistik
2	Program Pengembangan Data/ Informasi Sektoral Daerah	Rencana Program perencanaan	Doku-men								1	150.000	1	157.500	2	307.500	Dinas Komu-nikasi, Informa-tika dan Statistik
	Bappeda					-		563.790		1.586.490		-		-		2.150.280	
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rencana Program perencanaan	Doku-men	-	-	-	6	563.790	9	1.586.490					15	2.150.280	Bappeda
2.15	Persandian											415.871,00		436.664,55		852.536	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik											415.871,00		436.665		852.536	
1	Program Optimalisasi Keamanan Informasi	Operasional dan Tata Kelola Persandian	Doku-men								5	415.871,00	5	436.665	10	852.536	Dinas Komu-nikasi, Informa-tika dan Statistik
2.16	Kebudayaan					9.209.003		11.400.060		13.857.202		16.234.879		17.858.367		68.559.511	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											16.234.879		17.858.367		34.093.246	
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rencana program pengembangan nilai budaya	doku-men	9							19	5.633.520	21	6.196.872	40	11.830.392	Dinas Dikbud

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	DINAS	Rencana program pengembangan nilai budaya	doku-men	9							3	3.191.870	5	3.511.057	8	6.702.927	Dinas Dikbud
	UPT TAMAN BUDAYA	Rencana program pengembangan nilai budaya	doku-men	0							8	1.560.000	8	1.716.000	16	3.276.000	UPT TAMAN BUDAYA
	UPT MUSEUM	Rencana program pengembangan nilai budaya	doku-men	0							8	881.650	8	969.815	16	1.851.465	UPT MU-SEUM
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rencana program pengelolaan kekayaan budaya dan pranata adat	doku-men	15							11	1.234.903	13	1.358.393	24	2.593.296	Dinas Dikbud
		Jumlah Pranata Adat yang terbentuk	lem-baga	10	50		50		50		50		50		260		
	DINAS											592.775		652.053		1.244.828	Dinas Dikbud
	UPT MUSEUM											642.128		706.341		1.348.469	UPT MU-SEUM
3	Pengelolaan Keragaman Budaya	Rencana program penglolaan keragaman budaya	doku-men	7							14	8.523.346	16	9.375.681	30	17.899.027	Dinas Dikbud
	DINAS			3							10	8.323.346	10	9.155.681	20	17.479.027	Dinas Dikbud
	UPT TAMAN BUDAYA			2							2	200.000	3	220.000	5	420.000	UPT TAMAN BUDAYA

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	UPT MUSEUM			2							2	-		0	2	0	UPT MU-SEUM
4	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Rencana program pengembangan kerjasama pengeloaan kekayaan budaya	doku-men	2							9	843.110	11	927.421	20	1.770.531	Dinas Dikbud
	DINAS			1							2	250.910	3	276.001	5	526.911	Dinas Dikbud
	UPT TAMAN BUDAYA										2	150.000	3	165.000	5	315.000	UPT TAMAN BUDAYA
	UPT MUSEUM			1							5	442.200	5	486.420	10	928.620	UPT MU-SEUM
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					9.209.003		11.400.060		13.857.202		-		-		34.466.265	
1	Pengembangan Nilai Budaya	Rencana program pengembangan nilai budaya	doku-men	9	13	4.907.799	15	4.737.819	27	4.160.500					27	13.806.118	Disbud-par
	DINAS	Rencana program pengembangan nilai budaya	doku-men	9	8	3.237.803	6	2.437.949	12	2.437.949					12	8.113.701	Disbud-par
	UPT TAMAN BUDAYA	Rencana program pengembangan nilai budaya	doku-men	0	5	554.996	4	1.930.870	8	921.051					8	3.406.917	UPT TAMAN BUDAYA
	UPT MUSEUM	Rencana program pengembangan nilai budaya	doku-men	0	0	0	5	369.000	7	801.500					7	1.170.500	UPT MU-SEUM

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rencana program pengelolaan kekayaan budaya dan pranata adat	dokumen	15	5	2.071.945	7	2.301.731	6	1.191.440					6	5.565.115	Disbud-par
		Jumlah Pranata Adat yang terbentuk	lembaga	10	50		50		50								
	DINAS					1.758.425		1.857.056		607.687						4.223.168	Disbud-par
	UPT MUSEUM					313.520		444.675		583.753						1.341.948	UPT MU-SEUM
3	Pengelolaan Keragaman Budaya	Rencana program penglolaan keragaman budaya	dokumen	7	8	2.103.495	15	4.050.335	18	7.760.788					18	13.914.618	Dinas Pariwi-sata dan Kebu-dayaan
	DINAS			3	4	1.885.945	9	3.547.135	10	7.566.678					10	12.999.758	Disbud-par
	UPT TAMAN BUDAYA			2	2	194.750	3	333.200	3	194.110					3	722.060	UPT TAMAN BUDAYA
	UPT MUSEUM			2	2	22.800	3	170.000	5	0					5	192.800	UPT MU-SEUM
4	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Rencana program pengembangan kerjasama pengeloaan kekayaan budaya	dokumen	2	3	125.764	5	310.175	5	744.475					5	1.180.414	Disbud-par
	DINAS			1	1	69.375	3	92.825	3	228.100					3	390.300	Disbud-par

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	UPT TAMAN BUDAYA					0	1	98.750	1	114.375					1	213.125	UPT TAMAN BUDAYA
	UPT MUSEUM			1	1	56.389	1	118.600	1	402.000					1	576.989	UPT MU-SEUM
2.17	Perpustakaan					12.588.378		4.688.000		4.797.675		7.613.064		11.340.803		41.027.920	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					12.588.378		4.688.000		4.797.675		7.613.064		11.340.803		41.027.920	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	1.263.501	100	1.308.301	100	1.503.191	100	1.436.145	100	1.533.347	100	7.044.486	Dinas Per-pustakaan dan Kearsipan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	45	50	1.822.550	60	1.004.679	65	1.102.444	70	1.805.996	75	2.167.195	75	7.902.864	Dinas Per-pustakaan dan Kearsipan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	35	40	25.500	45	17.325	50	12.500	55	90.000	60	110.000	60	255.325	Dinas Per-pustakaan dan Kearsipan
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	5	6	160.040	6	169.040	7	179.530	8	188.380	8	209.989	8	906.979	Dinas Per-pustakaan dan Kearsipan
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Doku-men	2	1	-	1	-	1	24.800	2	60.000	2	70.000	2	154.800	Dinas Per-pustakaan dan Kearsipan
6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan minat baca	%	13,20	14,70	9.316.787	16,30	2.188.655	18,00	1.975.210	19,80	4.032.543	21,60	7.250.272	21,60	24.763.466	Dinas Per-pustakaan dan Kearsipan
2.18	Kearsipan					705.798		581.879		731.334		2.255.927		2.718.983		6.993.921	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					705.798		581.879		731.334		2.255.927		2.718.983		6.993.921	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Pelaksana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rencana Program	Dokumen	4	6	13.500,00	8	24.800,00	10	-	12	90.500	14	104.075	14	232.875	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kemantapan pemeliharaan arsip daerah	berkas	20500	21600	105.717,90	51600	304.482,00	81600	283.796,50	111 600	450.000	141 600	630.000	162 100	1.773.996	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Daya tampung arsip	Unit	503	503	273.997,50	617	93.145,00	703	104.370,00	714	750.000	726	825.000	100	2.046.513	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Program peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Intensitas pengendalian dan pembinaan kearsipan	%	19,08	24,1	63.017,00	31,08	88.607,00	41,12	113.775,50	53,2	330.624	62,3	512.000	62,3	1.108.024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Kecepatan pelayanan informasi kearsipan	Menit	30	30	249.566,05	30	70.845,05	3	229.391,65	1	634.803	1	647.908	1	1.832.514	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PILIHAN					190.508.746		237.330.739		279.876.021		260.313.400		335.803.327		1.303.832.233	
3.01	Kelautan dan Perikanan					20.807.021		33.979.719		18.821.003		28.809.199		48.367.771		150.784.713	
	Dinas Kelautan dan Perikanan					14.596.101		27.877.467		12.511.742		14.280.934		24.903.696		94.169.940	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	982.962	100	426.786	100	957.388	100	1.082.857	100	1.197.500	100	4.647.493	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	506.900	100	476.065	100	344.650	100	685.000	100	750.000	100	2.762.615	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	16.400	100	47.900	100	52.805	100	100.000	100	110.000	100	327.105	Dinas Kelautan dan Peri-kanan
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	5	5	88.290	5	139.795	5	127.075	5	330.000	5	360.000	5	1.045.160	Dinas Kelautan dan Peri-kanan
5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	1	1	54.540	1	150.647	1	55.080	1	55.000	1	60.000	1	375.267	Dinas Kelautan dan Peri-kanan
6	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Kelompok yang memiliki kemitraan dengan pengusaha	KLP	0	0	-	3	157.640	1	293.780	1	100.000	1	950.000	6	1.501.420	Dinas Kelautan dan Peri-kanan
7	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Yang Aktif	Ke-lom-pok	-	6	72.500	9	124.700	68	1.125.846	71	2.250.000	77	2.000.000	77	5.573.046	Dinas Kelautan dan Peri-kanan
8	Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Jumlah Ijin investasi di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	Ijin	1	1	942.120	1	581.778	26	1.411.923	54	1.750.000	79	2.000.000	79	6.685.821	Dinas Kelautan dan Peri-kanan
9	Pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Perikanan budidaya	Ton	876.403	844. 670	4.235.205	900. 945	9.055.280	1.082. 767	3.976.525	1.104. 092	2.540.000	1.126. 173	7.697.970	1.126. 173	27.504.980	Dinas Kelautan dan Peri-kanan
10	Pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan tangkap	Ton	142.187	145. 159	5.847.246	147. 921	10.653.650	212. 727	2.326.512	216. 982	3.757.367	221. 321	7.826.868	221. 321	30.411.643	Dinas Kelautan dan Peri-kanan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Pelaksana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
11	Pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan	Ton	165.001	166.720	1.822.938	178.520	5.820.882	214.200	1.698.329	218.484	1.445.470	222.854	1.747.358	222.854	12.534.977	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	Pengembangan aplikasi teknologi data dan informasi	Rencana program	Dokumen	1	1	27.000	1	163.100	1	82.480	1	90.000	1	100.000	5	462.580	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas kawasan konservasi perairan daerah	Ha	71.089	151.089	-	229.555	79.244	229.555	59.350	293.034	95.240	319.675	104.000	319.675	337.834	Dinas Kelautan dan Perikanan
	BPBIAT Aikmel					2.103.835		1.627.596		1.707.811		2.657.392		4.316.500		12.413.134	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	175.575	100	348.910	100	561.776	100	620.000	100	678.000	100	2.384.261	BPBIAT Aikmel
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	560.500	100	299.089	100	697.070	100	525.000	100	630.000	100	2.711.659	BPBIAT Aikmel
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	1	1	-	1	-	1	7.500	1	8.000	1	8.500	1	24.000	BPBIAT Aikmel
4	Pengembangan budidaya perikanan	Produksi benih ikan air tawar	Ekor	20.000.000	20.000.000	1.367.760	21.000.000	979.597	22.500.000	441.465	24.000.000	1.504.392	26.000.000	3.000.000	26.000.000	7.293.214	BPBIAT Aikmel
	BPBPP Sekotong					666.210		985.950		1.394.966		2.638.500		7.462.000		13.147.626	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	144.310	100	244.100	100	311.606	100	378.500	100	411.500	100	1.490.016	BPBPP Sekotong
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	76.500	100	214.500	100	736.160	100	850.000	100	1.040.000	100	2.917.160	BPBPP Sekotong

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	-	-	100	21.800	100	-	100	-	100	-	0	21.800	BPBPP Seko-tong
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	1	1	-	1	-	1	9.300	1	10.000	1	10.500	1	29.800	BPBPP Seko-tong
5	Pengembangan budidaya perikanan	Produksi benih ikan	ekor			445.400		505.550		337.900		1.400.000		6.000.000	2.000.000	8.688.850	BPBPP Seko-tong
		Produksi benih ikan air payau	ekor	1.108.000	1.108.000		1.050.000		1.100.000		1.150.000		1.200.000				
		Produksi benih ikan air laut	ekor	252.450	252.450		300.000		380.000		460.000		500.000				
	Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya					349.405		323.200		456.696		897.500		1.342.800		3.369.601	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	86.650	100	124.400	100	155.066	100	298.000	100	333.000	100	997.116	Balai Kes-ehatan Ikan dan Ling-kungan Peri-kanan Budi-daya
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	77.150	100	85.577	100	139.900	100	440.000	100	550.000	100	1.292.627	Balai Kes-ehatan Ikan dan Ling-kungan Peri-kanan Budi-daya

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	0	0	-	0	-	1	9.300	1	9.500	1	9.800	1	28.600	Balai Kes-ehatan Ikan dan Ling-kungan Peri-kanan Budi-daya
4	Pengembangan budidaya perikanan	Hama penyakit ikan penting yang terkendali	Jenis	2	4	185.605	5	113.223	7	152.430	9	150.000	10	450.000	10	1.051.258	Balai Kes-ehatan Ikan dan Ling-kungan Peri-kanan Budi-daya
	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Mataram					1.211.360		535.756		455.045		973.500		1.380.000		4.555.661	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	137.396	100	232.256	100	253.690	100	296.000	100	337.000	100	1.256.342	Balai Laora-torium Pengu-jian dan Penera-pan Mutu Hasil Peri-kanan Mata-ram

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	920.120	100	140.400	100	47.500	100	505.000	100	570.000	100	2.183.020	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Mataram
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	1	0	-	0	-	1	22.130	1	22.500	1	23.000	1	67.630	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Mataram
4	Program Pengembangan Kapasitas BLPMHP Mataram	Parameter uji yang terakreditasi	jenis	4	4	153.844	5	163.100	4	131.725	4	150.000	6	450.000	6	1.048.669	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Mataram
	Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok					760.106		1.595.540		1.314.363		3.686.000		4.320.000		11.676.009	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	148.971	100	427.990	100	467.526	100	568.000	100	646.500	100	2.258.987	Pelabu-han Peri-kanan Labuhan Lombok
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	611.135	100	1.167.550	100	839.337	100	1.360.000	100	1.665.000	100	5.643.022	Pelabu-han Peri-kanan Labuhan Lombok
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	0	0	-	0	-	1	7.500	1	8.000	1	8.500	1	24.000	Pelabu-han Peri-kanan Labuhan Lombok
	Pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan tangkap	ton	1.726	1.467	-	1.540	-	1.617	-	1.698	1.750.000	1.783	2.000.000	1.783	3.750.000	Pelabu-han Peri-kanan Labuhan Lombok
	Pelabuhan Perikanan Teluk Santong					846.244		462.545		564.082		1.070.800		1.232.600		4.176.271	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	167.649	100	197.700	100	193.161	100	413.000	100	524.500	100	1.496.010	Pelabu-han Peri-kanan Teluk Santong
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	678.595	100	264.845	100	363.421	100	650.000	100	700.000	100	2.656.861	Pelabu-han Peri-kanan Teluk Santong

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	0	0	-	0	-	1	7.500	1	7.800	1	8.100	1	23.400	Pelabuhan Perikanan Teluk Santong
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tanjung Luar					273.760		571.665		416.298		1.505.000		1.593.000		4.359.723	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	54.100	100	108.856	100	91.904	100	187.000	100	223.500	100	665.360	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tanjung Luar
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	219.660	100	71.229	100	198.944	100	650.000	100	850.000	100	1.989.833	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tanjung Luar
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	0	0	-		-	1	17.400	1	18.000	1	19.500	1	54.900	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tanjung Luar

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
4	Pengembangan perikanan tangkap	Jumlah SDM Perikanan Tangkap yang Terlatih	Orang	0	0	-	1	391.580	2	108.050	30	650.000	60	500.000	90	1.649.630	Balai Pendidi-kan dan Pela-tihan Kelautan dan Peri-kanan Tanjung Luar
	Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima					-		-		-		388.180,00		625.381,00		1.013.561	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	105.522	100	120.522	100	226.044	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Bima
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100							100	139.000	100	159.000	100	298.000	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Bima

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	6.300	1	8.500	1	14.800	Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima
4	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Yang Aktif	Kelompok								20	137.359	23	187.359	23	324.718	Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima
5	Perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas kawasan konservasi perairan daerah	Ha								142.979	-	142.979	150.000	142.979	150.000	Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima
	Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa					-		-		-		380.822		618.022		998.844	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	95.522	100	110.522	100	206.044	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Sum-bawa
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100							100	139.000	100	159.000	100	298.000	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Sum-bawa
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	0	0	-	0	-	0	-	1	6.300	1	8.500	1	14.800	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Sum-bawa

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
4	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Yang Aktif	Ke-lom-pok								17	140.000	20	190.000	20	330.000	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Sum-bawa
5	Perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas kawasan konservasi perairan daerah	Ha								112.189	-	138.830	150.000	138.830	150.000	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Sum-bawa
	Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok					-		-		-		330.572		573.772		904.344	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	85.622	100	105.622	100	191.244	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Lombok

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100							100	139.000	100	159.000	100	298.000	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Lombok
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	0	0	-	0	-	0	-	1	6.300	1	8.500	1	14.800	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Lombok
4	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Yang Aktif	Ke-lom-pok								34	99.650	34	150.650	34	250.300	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Lombok

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas kawasan konservasi perairan daerah	Ha								37.866	-	37.866	150.000	37.866	150.000	Balai Konser-vasi dan Penga-wasan Sum-berdaya Kelautan dan Peri-kanan Ka-wasan Lombok
3.02	Pariwisata					27.676.848		27.187.791		29.186.630		35.559.284		45.167.603		164.778.155	
	Dinas Pariwisata					27.676.848		27.187.791		29.186.630		35.559.284		45.167.603		164.778.155	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	3.544.586	100	5.935.714	100	5.771.532	100	1.993.675	100	2.193.043	100	19.438.550	Dispar
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Tugas Aparatur	%	100	100	3.329.343	100	4.246.552	100	4.155.947	100	447.450	100	671.175	100	12.850.467	Dispar
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	%	100	100	11.100									100	11.100	Dispar
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi aparatur	%		100	48.200	100	77.610	100	77.100	100	70.500	100	77.550	100	350.960	Dispar
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran Pelaporan Laporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	252.625	100	291.585	100	406.675	100	516.860	100	568.546	100	2.036.291	Dispar
6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Doku-men						1	65.052	1	30.700	1	33.770	3	129.522	Dispar

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
7	Pengembangan pemasaran pariwisata	Rencana Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Doku-men	4	6	6.388.945	6	5.233.036	10	7.062.392	30	12.222.299	40	15.277.874	92	46.184.546	Dispar
8	Pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	1.357. 602	1.469. 597	13.784.135	1.705. 400	10.725.327	1.979. 174	11.357.166	3.500. 000	13.884.272	4.000. 000	17.355.340	4.000. 000	67.106.240	Dispar
		- Wisatawan Mancanegara		565.944	595.020		697.363		817.310		1.750. 000		2.000. 000		2.000. 000		Dispar
		-Wisatawan Nusantara		791.658	874.577		1.008. 037		1.161. 864		1.750. 000		2.000. 000		2.000. 000		Dispar
9	Pengembangan Kemitraan	Rencana Program Pengembangan Kemitraan	Doku-men	10	6	317.914	13	677.967	8	290.766	15	2.399.948	20	2.999.935	72	6.686.530	Dispar
10	Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rencana Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Doku-men	-	0	0	0	0	0	0	4	3.993.580	6	5.990.370	10	9.983.950	Dispar
3.03	Pertanian					105.249.475		123.613.979		134.611.651		103.912.952		122.634.321		590.022.378	
	Dinas Pertanian dan Perkebunan					39.230.526		33.502.823		60.726.819		77.912.820		83.724.321		295.097.308	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%			913.322		1.464.455		314.742		4.474.566		4.487.396		11.654.481	
	- Dinas	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	423.100	100	451.518	100	870,088	100	868.963	100	935.514	100	2.679.965	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	- BPSB	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	131.585	100	152.043	100	241,496	100	186.170	100	204.787	100	674.826	BPSB

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	- BPTPH	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	124.658	100	154.018	100	280,835	100	226.183	100	248.801	100	753.941	BPTPH
	- BBI	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	233.979	100	138.766	100	292,006	100	264.337	100	290.771	100	928.145	BBI
	- BPTP/BPSB BUN	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	85	85	-	85,00	238.791,41	85	88.521,00	100	238.596,00	100	88.521,00	100	654.429	BPTP/ BPSB BUN
	- BLPTP/BPTP BUN	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	85	85	-	85,00	261.306,00	85	149.057,60	100	289.145,60	100	158.857,60	100	858.367	BLPTP/ BPTP BUN
	- BPPHP/BBI BUN	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	85	85	-	85,00	68.013,00	85	75.479,20	100	145.720,20	100	79.150,00	100	368.362	BPPHP/ BBI BUN
	- SMKPP Mataram	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	895.184,20	100	984.700,00	100	1.879.884	SMKPP Mata-ram
	- SMKPP Bima	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	725.158,29	100	797.674,12	100	1.522.832	SMKPP Bima
	- BPPSDMPP	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	635.109,00	100	698.619,90	100	1.333.729	BPPSD-MPP
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%			5.752.422		5.268.619		4.142.163		9.230.536		11.008.189		35.401.929	Dinas Perta-nian dan Perke-bunan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	- Dinas	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	508.750	100	425.920	100	492.770	100	1.338,480	100	1.472	100	1.430.251	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	- BPSB	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	2.317.332	100	1.374.108	100	978.171	100	136.636	100	150.300	100	4.956.547	BPSB
	- BPTPH	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	1.442.650	100	729.750	100	564.094	100	127.000	100	139.700	100	3.003.194	BPTPH
	- BBI	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	1.483.690	100	609.673	100	579.500	100	120.600	100	132.660	100	2.926.123	BBI
	- BPTP/BPSB BUN	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	85	85	-	85	1.561.735,00	85	1.445.063,80	100	227.970,00	100	1.410.690,00	100	4.645.459	BPTP/ BPSB BUN
	- BLPTP/BPTP BUN	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	85	85	-	85	530.232,50	85	48.864,50	100	395.160,00	100	82.455,00	100	1.056.712	BLPTP/ BPTP BUN
	-BPPHP/BBI BUN	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	85	85	-	85	37.200,00	85	33.700,00	100	81.200,00	100	136.217,50	100	288.318	BPPHP/ BBI BUN
	- SMKPP Mataram	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%								100	3.753.582,40	100	4.128.940,64	100	7.882.523	SMKPP Mataram
	- SMKPP Bima	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%								100	3.167.708,60	100	3.484.479,46	100	6.652.188	SMKPP Bima
	- BPPSDMPP	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%								100	1.219.340,71	100	1.341.274,78	100	2.560.615	BPPSD-MPP
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%			15.100		89.120		49.300		430.936		469.685		1.054.141	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	- Dinas	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	15.100	100	89.120	100	49.300	100	86.900	100	91.245	100	331.665	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	- SMKPP Bima	Tingkat Kompetensi Aparatur	%								100	326.836	100	359.519,60	100	686.356	SMKPP Bima
	- BPSDMPP	Tingkat Kompetensi Aparatur	%								100	17.200	100	18.920,00	100	36.120	BPSD-MPP
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men			123.535		208.205		245.757		276.752		334.946		1.189.195	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	- Dinas	Rencana program	Doku-men	8	8	123.535	8	208.205	8	245.757	8	265.077	8	322.103	40	1.164.677	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	- SMKPP Bima	Rencana program	Doku-men								2	7.475	2	8.222,50	4	15.698	SMKPP Bima
	- BPPSDMPP	Rencana program	Doku-men								2	4.200	2	4.620,00	4	8.820	BPPSD-MPP
5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men			100.554		137.854		261.014		254.507		240.431		994.359	
	- Dinas	Manajemen Aset	doku-men	1	1	48.354	1	48.354	1	54.854	1	69.854	1	76.839	5	298.255	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	- BPSB	Manajemen Aset	doku-men	1	1	17.800	1	17.800	1	27.160	1	16.360	1	17.996	5	97.116	BPSB
	- BPTPH	Manajemen Aset	Doku-men	1	1	18.600	1	55.900	1	26.160	1	15.360	1	16.896	5	132.916	BPTPH

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	- BBI	Manajemen Aset	dokumen	1	1	15.800	1	15.800	1	28.160	1	17.360	1	19.096	5	96.216	BBI
	-BPTP/BPSB BUN	Manajemen Aset	Dokumen	-	-	-	-	-	2	64.885,00	1	46.955	1	517,75	4	112.358	BPTP/ BPSB BUN
	-BLPTP/BPTP BUN	Manajemen Aset	Dokumen	-	-	-	-	-	2	37.285,00	1	31.572	1	37.950,00	4	106.807	BLPTP/ BPTP BUN
	-BPPHP/BBI BUN	Manajemen Aset	Dokumen	-	-	-	-	-	2	22.510,00	1	15.910	1	25.886,50	4	64.307	BPPHP/ BBI BUN
	- SMKPP Mataram	Manajemen Aset	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	21.031,60	1	23.134,76	2	44.166	SMKPP Mata-ram
	- SMKPP Bima	Manajemen Aset	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	10.504	1	11.554,40	2	22.058	SMKPP Bima
	- BPPSDMPP	Manajemen Aset	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	9.600	1	10.560,00	2	20.160	BPPSD-MPP
6	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertumbuhan petani pelaku usaha				6.306.151		9.445.479		9.163.011		4.422.661		4.864.928		34.202.230	Dinas Perta-nian dan Perke-bunan
	- Dinas	Pertumbuhan petani pelaku usaha	%	15	15	1.700.414	15	4.401.276	15	3638600	15	1.800.261	15	1.980.287	15	13.520.837	Dinas Perta-nian dan Perke-bunan
	- BPPSDMPP	petani dan penyuluh yang ditingkatkan pengetahuan nya	Orang	-	540	4.605.737	630	5.044.203	630	5.524.411	390	2.622.401	410	2.884.641	2600	20.681.393	BPPSD-MPP

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
7	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)					13.535.205		7.709.063		7.768.814		15.453.991		17.528.493		61.995.566	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	- Dinas	Produk Olahan Pertanian	Jenis	1	1	11.025.732	1	6.628.126	1	7255304	2	13.402.628	2	14.742.891	7	53.054.681	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	- BBI	Ketersediaan benih Tanaman Pangan	ton	153.436	154.970	1.058.738	156.520	695.602	158.085	522,339	94,90	682.109	94,90	762.617	161.263	3.199.588	BBI
		Ketersediaan benih Tanaman Hortikultura	Bibit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	275.000	20.000	275.000	
	- BPTP/BPSB BUN	Kualitas Benih	%	55,98	4,72	1.075.045	4,72	298.365	4,72	293.668	4,72	204.470	4,72	466.723	4,72	2.338.270	BPTP/ BPSB BUN
	- BLPTP/BPTP BUN	Rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	Reko-men-dasi	2	3	375.690,00	3	86.970,00	4	219.320,00	1	26.600	1	29.260,00	2	737.840	BLPTP/ BPTP BUN
	- SMKPP Mataram		Orang	-	0	-	0	-	0	-	400	733.724	420	807.096	820	1.540.820	SMKPP Mataram
	- SMKPP Bima		Orang	-	0	-	0	-	0	-	300	404.460	315	444.906	615	849.366	SMKPP Bima
8	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Informasi produk pertanian dan olahannya yang dipromosikan	Doku-men	3	4	413.000	4	563.149	6	614,807	6	304.735	6	319.972	26	1.601.471	Dinas Pertanian dan Perkebunan
9	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan					1.026.740		1.294.011		1.423.173		4.108.050		4.518.855		12.370.828	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	- Dinas	Jumlah Petani dan Petugas yang memahami teknologi sarana dan perkebunan	Orang	-	-	0	-	0	-	0	30	3.028.519	33	3.331.370	63	6.359.889	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	- BPTPH	Luas areal yang aman dari serangan OPT dan DPI	%	92	92,5	376.571	93	513.706	93,5	444.491	93,5	102.661	94	112.927	94	1.550.356	BPTPH
	- BLPTP/BPTP BUN	Kompetensi budidaya Petani Pekebun	%	1,12	1,2	156.100	1,2	80.100	2,4	156.100	30	78.050	30	85.855	60	556.205	BLPTP/ BPTP BUN
	- BPPHP/BBI BUN	Terpeliharanya sambung pucuk kopi	Ha	0	0,39	494.069	0,47	700.205	0,70	822.582	10	898.820	10	988.702	20	3.904.378	BPPHP/ BBI BUN
10	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan					11.044.497		7.322.868		37.358.230		38.656.809		39.622.222		134.004.625	
	- Dinas	Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Ton			11.010.500		7.270.500		37358000		38.581.216		39.352.840		133.573.056	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Padi	Ton	2.193. 598	2.316. 551	-	2.362. 882	-	2.398. 325	-	2.434. 299	-	2.470. 813	-	2.470. 813		
		Jagung	Ton	633.773	785.864	-	959.972	-	1.112. 460	-	1.264. 948	-	1.417. 436	-	1.417. 436		
		Kedelai	Ton	91.065	135.764	-	123.126	-	124.356	-	125.601	-	126.857	-	126.857		
		Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura															
		Bawang Merah	Ton	101.628	105.068	-	107.169	-	109.313	-	111.499	-	113.729	-	113.729		
		Cabai	Ton	46.454	38.372	-	39.140	-	39.922	-	40.721	-	41.535	-	41.535		

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
		Produksi hasil perkebunan	Ton	1,32	2,31	7.233.740	2,21	21.645.568	1,95	11.079.620.55					-		
		- Kopi	Ton	815,00	625,00	2.821.474	550,00	2.512.816	100,00	538.110	-	-	5.053.88	-	5.053.88		
				6,45	4,95	-	4,35	-	0,79	-							
		- Kakao	Ton	115,00	700,00	4.412.266	700,00	19.132.752	700,00	4.332.900	-	-	2.085.67	-	2.085.67		
				1,47	8,92	-	8,92	-	8,92	-							
		- Jambu Mete	Ton										12.186.31	-	12.186.31		
		- Kelapa	Ton										51.817.04	-	51.817.04		
		- Tembakau	Ton	-	-	-	-	-	570,00	6.620.339	-	-	36.557.03	-	36.557.03		
				-	-	-	-	-	2,01	-							
	- BPSB	Layanan sertifikasi Benih	Ton	281	325	33.997	331	52.368	414	229,664	435	75.593	444	269.382	444	431.570	BPSB
11	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	pertumbuhan penyuluh terlatih	orang	-	800	-	800	-	800	-	150	299.277,90	165	329.206		628.484	BPPSD-MPP
	Dinas Perkebunan					25.089.584		53.237.935		32.599.475						110.926.993	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	85	85	811.724	85	992.119	85	863.690						2.667.533	Disbun
	DINAS			85	85	811.724	85	424.008	85	550.632					85	1.786.365	Disbun

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	BPTP			85	85	0	85	238.791	85	88.521					85	327.312	BPTP
	BLPTP			85	85	0	85	261.306	85	149.058					85	410.364	BLPTP
	BPPHP			85	85	0	85	68.013	85	75.479					85	143.492	BPPHP
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	85	85	2.046.547	85	3.477.954	85	2.086.475						7.610.977	
	DINAS			85	85	2.046.547	85	1.348.787	85	558.847					85	3.954.181	Disbun
	BPTP			85	85	0	85	1.561.735	85	1.445.064					85	3.006.799	BPTP
	BLPTP			85	85	0	85	530.233	85	48.865					85	579.097	BLPTP
	BPPHP			85	85	0	85	37.200	85	33.700					85	70.900	BPPHP
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	85	85	52.800	85	32.575	85	43.200					85	128.575	Disbun
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	7	7	223.026	7	175.573	7	247.656					21	646.255	Disbun
5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	2	2	163.431	2	162.300	8	276.730					12	602.461	
	DINAS				2	163.431	2	162.300	2	152.050					2	477.781	Disbun
	BPTP				0	0	0	0	2	64.885					2	64.885	BPTP
	BLPTP				0	0	0	0	2	37.285					2	37.285	BLPTP
	BPPHP				0	0	0	0	2	22.510					2	22.510	BPPHP
6	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertumbuhan petani pelaku usaha	%	2,25	0,18	1.757.664	1,00	405.777	0,22	1.065.801					0,22	3.229.242	
7	Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/ perkebunan)					15.918.215		43.676.471		23.495.687					0	83.090.372	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	DINAS	Produktivitas hasil perkebunan	%	1,32	2,31	7.233.740	2,21	21.645.568	1,95	11.491.349					1,95	40.370.657	Disbun
		- Kopi		815	625	2.821.474	550	2.512.816	100	538.110					100	5.872.400	
		Kakao		115	700	4.412.266	700	19.132.752	700	4.332.900					700	27.877.918	
		- Jambu Mete	%	-	-	0	-	0	0	0					0	0	
		- Kelapa	%	-	-	0	-	0	0	0					0	0	
		- Tembakau	%	-	-	0	-	0	570	6.620.339					570	6.620.339	
		- Tebu	%	-	-	0	-	0	0	0					0	0	
	BPTP	Kualitas Benih	%	55,98	4,72	1.075.045	4,72	298.365	4,72	293.668					4,72	1.667.077	BPTP
	BLPTP	Pengendalian hama perkebunan	Jenis	2	3	375.690	3	86.970	4	219.320					4	681.980	BLPTP
8	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Informasi produk perkebunan dan olahannya yang dipromosikan	Doku-men	3	2	408.686	3	230.500	-	0					3	639.186	Disbun
9	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan			1,12	21,42	2.995.232	28,25	3.566.092	29,37	4.192.022					29,37	10.753.345	
	DINAS	Pemanfataan pupuk organik pada tanaman perkebunan	%	-	62,66	2.345.063	83,08	2.785.787	85,00	3.213.340					85,00	8.344.189	Disbun
	BLPTP	Kompetensi Aparatur dan petani terkait pemanfataan agensia hayati	%	1,12	1,20	156.100	1,20	80.100	2,40	156.100					2,4	392.300	BLPTP
	BPPHP	Kompetensi budidaya Petani Pekebun	%	-	0,39	494.069	0,47	700.205	0,70	822.582					0,70	2.016.856	BPPHP

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
10	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertumbuhan produksi Perkebunan (Kopi, Kelapa, Kakao, Mete, Tebu dan Tembakau)	%	2,91	4,85	712.259	5,99	518.574	1,73	328.216					1,73	1.559.048	Disbun
	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH)					15.072.827		16.726.152		16.247.177						48.046.156	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	1.545.403	100	2.283.174	100	2.549.578					100	6.378.154	Bakor-luh
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	2.547.418	100	6.243.756	100	4.071.761					100	12.862.934	Bakor-luh
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	53.000	100	223.000	100	252.971					100	528.971	Bakor-luh
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	8	8	114.380	8	94.495	8	144.660					24	353.534	Bakor-luh
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	4	4	83.224	4	67.224	4	124.564					12	275.012	Bakor-luh
7	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	pertumbuhan petani terlatih	%	607	31,80	3.264.475	31,80	4.721.571	31,80	5.234.499					31,80	13.220.545	Bakor-luh
8	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	pertumbuhan sumberdaya siswa SMKPP	%	777	3,22	569.653	14,54	759.660	15,83	1.184.810					15,83	2.514.122	Bakor-luh
9	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	pertumbuhan penyuluh terlatih	%	416	29,81	6.895.275	51,44	2.333.273	51,44	2.684.335					51,44	11.912.883	Bakor-luh
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					22.693.719		16.607.071		21.884.860		22.560.301		33.050.000		116.795.951	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.008.137	100,00	444.021	100,00	737.972	100,00	925.714	100,00	950.000	100,00	4.065.843	Disnakes wan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100,00	100,00	4.189.424	100,00	3.249.061	100,00	3.496.813	100,00	508.990	100,00	10.000.000	100,00	21.444.288	Disnakes wan
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100,00	100,00	100.900	100,00	156.520	100,00	91.800	100,00	197.550	100,00	250.000	100,00	796.770	Disnakes wan
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	3	3	2.046.298	3	1.986.788	3	1.494.784	3	1.236.284	3	1.500.000	3	8.264.154	Disnakes wan
5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	2	2	84.108	2	76.300	2	88.395	2	78.539	2	100.000	2	427.342	Disnakes wan
6	Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Tingkat pengendalian Pemotongan betina produktif	%	5,00	5,00	790.090	5,00	736.000	4,00	458.758	4,00	603.358	3,00	1.250.000	3,00	3.838.206	Disnakes wan
7	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Tingkat Kesehatan ternak	%	80,00	84,00	624.014	85,00	709.752	88,00	608.275	92,00	608.845	95,00	1.750.000	95,00	4.300.886	Disnakes wan
8	Peningkatan produksi hasil peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	5,00	5,60	12.469.726	5,80	7.588.158	6,00	13.992.928	6,30	17.239.367	6,50	15.000.000	6,50	66.290.179	Disnakes wan
9	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Informasi produk pertanian dan olahannya yang dipromosikan	Doku-men	2	2	1.058.360	2	1.274.560	2	602.535	2	844.555	2	1.500.000	2	5.280.010	Disnakes wan
10	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	SDM Kelompok Peternak	%	75,00	80,00	322.662	83,00	385.912	85,00	312.600	97,00	317.100	90,00	750.000	90,00	2.088.274	Dis-nakeswan (BP3TR)
	BPTHMT					1.236.885		1.125.850		1.131.010		1.181.632		2.225.000		6.900.377	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	329.750	100,00	69.250	100,00	143.610	100,00	193.132	100,00	175.000	100,00	910.742	BP-THMT
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100,00	100,00	247.550	100,00	94.550	100,00	68.571	100,00	191.300	100,00	950.000	100,00	1.551.971	BP-THMT
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	2	2	46.035	2	150.850	2	186.325	2	97.675	2	150.000	2	630.885	BP-THMT
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	-	-	0	-	0	2	60.225	2	44.925	2	75.000	2	180.150	BP-THMT
5	Peningkatan produksi hasil peternakan	Daya Serap Bibit & Benih	%	75,00	80,00	401.300	85,00	587.450	90,00	549.800	95,00	549.600	97,00	625.000	97,00	2.713.150	BP-THMT
6	Peningkatan Kapasitas UPTD	Kelancaran Pelayanan UPTD	%	100,00	100,00	212.250		223.750		122.479		105.000		250.000		913.479	BP-THMT
	BIB					1.034.001		1.576.260		1.184.310		1.148.553		2.220.000		7.163.124	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	299.287	100	110.575	100	229.980	100	259.442	100	300.000	100	1.199.284	BIB
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	47.850	100	177.078	100	82.880	100	67.255	100	750.000	100	1.125.063	BIB
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	2	2	40.550	2	154.300	2	142.970	2	39.500	2	165.000	2	542.320	BIB
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	-	-	0	-	0	2	38.770	2	37.295	2	55.000	2	131.065	BIB
5	Peningkatan produksi hasil peternakan	Tingkat Kelahiran Pedet	%	65	65,5	387.654	65,8	343.597	70	106.525	70,5	410.861	71,5	450.000	71,5	1.698.637	BIB

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
6	Peningkatan Kapasitas UPTD	Kelancaran Pelayanan UPTD	%	100	100	258.660	100	790.710	100	583.185	100	334.200	100	500.000	100	2.466.755	BIB
	BRSHLV					891.934		837.890		838.000		1.109.646		1.415.000		5.092.470	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	232.410	100	128.750	100	156.245	100	157.005	100	125.000	100	799.410	BRSHLV
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	74.300	100	155.949	100	77.200	100	396.750	100	500.000	100	1.204.199	BRSHLV
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	2	2	23.850	2	50.850	2	84.950	2	46.325	2	125.000	2	330.975	BRSHLV
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	-		-	-	0	2	43.300	2	37.420	2	65.000	2	145.720	BRSHLV
5	Peningkatan produksi hasil peternakan	Tingkat Kesehatan ternak	%	80	84	373.874	85	338.846	88	339.205	92	346.146	95	350.000	95	1.748.071	BRSHLV
6	Peningkatan Kapasitas UPTD	Kelancaran Pelayanan UPTD	%	100	100	187.500	100	163.495	100	137.100	100	126.000	100	250.000	100	864.095	BRSHLV
3.04	Kehutanan					1.690.293		9.766.611		15.658.870		47.146.509		59.774.573		132.478.130	
	Dinas Lngkungan Hidup dan Kehutanan					1.690.293		9.766.611		15.658.870		47.146.509		59.774.573		132.478.130	
1	Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Produksi hasil hutan bukan kayu	Jenis	1	2	162.735	3	1.319.131	4	6.784.983	5	11.852.279	5	21.061.630	5	41.180.758	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			1	2	162.735	3	1.319.131	4	1.263.016	5	1.888.354	5	2.077.190	5	6.710.425	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	UPTB Laboratorium																UPTB Labora-torium
	Tahura Nuraksa										2	78.400	3	86.240	3	164.640	Tahura Nuraksa
	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura								1	5.100.082	2	6.172.000	3	6.789.200	3	18.061.282	KPH Rinjani Barat Pelan-gan Tastura
	KPH Ampang Riwo Soromandi								1	231.766	2	1.050.000	3	1.500.000	3	2.781.766	KPH Ampang Riwo Soro-mandi
	KPH Tambora								1	150.420	2	530.000	3	583.000	3	1.263.420	KPH Tam-bora
	KPH Maria Donggomasa								1	39.700	2	1.160.000	3	1.276.000	3	2.475.700	KPH Maria Dong-gomasa
	KPH Rinjani Timur										1	139.075	2	750.000	2	889.075	KPH Rinjani Timur
	KPH Matayang Sejorong Brang Rea										1	139.075	2	1.500.000	2	1.639.075	KPH Ma-tayang Se-jorong Brang Rea
	KPH Batu Lanteh Puncak Ngengas										1	139.075	2	2.000.000	2	2.139.075	KPH Batu Lanteh Puncak Ngen-gas

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	KPH Ampang Plampang										1	139.075	2	1.500.000	2	1.639.075	KPH Ampang Plam-pang
	KPH Orong Telu Brang Beh										1	139.075	2	750.000	2	889.075	KPH Orong Telu Brang Beh
	KPH Ropang										1	139.075	2	750.000	2	889.075	KPH Ropang
	KPH Toffo Pajo Waworada Madapangga Rompu										1	139.075	2	1.500.000	2	1.639.075	KPH Toffo Pajo Wawo-rada Mada-pangga Rompu
2	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Luas hutan dan Lahan yang direhabilitasi	Ha	281.123	1.961	973.385	3.196	6.048.834	2.491	4.946.363	2.400	22.754.276	3.300	24.968.994	11.387	58.910.252	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			281.123	1.961	973.385	2.335	2.666.713	1.951	3.183.887					4.286	6.823.985	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan
	Tahura Nuraksa										50	605.173	100	665.691	150	1.270.864	Tahura Nuraksa
	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura						781	3.018.873	300	594.146	100	3.000.000	400	3.239.290	1.581	9.852.310	KPH Rinjani Barat Pelan-gan Tastura

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	KPH Ampang Riwo Soromandi								50	386.730	300	2.660.000	330	2.926.000	680	5.972.730	KPH Ampang Riwo Soro-mandi
	KPH Tambora						40	183.874	140	350.964	100	2.965.000	110	3.261.500	390	6.410.374	KPH Tam-bora
	KPH Maria Donggomasa						40	179.374	50	430.636	100	2.022.000	110	2.224.200	300	4.425.574	KPH Maria Dong-gomasa
	KPH Rinjani Timur										300	1.575.676	300	1.733.244	600	3.308.920	KPH Rinjani Timur
	KPH Matayang Sejorong Brang Rea										250	1.385.281	250	1.523.809	500	2.909.090	KPH Ma-tayang Se-jorong Brang Rea
	KPH Batu Lanteh Puncak Ngengas										250	1.499.406	400	1.649.346	650	3.148.752	KPH Batu Lanteh Puncak Ngen-gas
	KPH Ampang Plampang										250	1.878.118	400	2.065.930	650	3.944.047	KPH Ampang Plam-pang
	KPH Orong Telu Brang Beh										250	1.840.243	250	2.024.267	500	3.864.510	KPH Orong Telu Brang Beh
	KPH Ropang										200	1.445.262	250	1.589.788	450	3.035.050	KPH Ropang

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	KPH Toffo Pajo Waworada Madapangga Rompu										250	1.878.118	400	2.065.930	650	3.944.047	KPH Toffo Pajo Wawo-rada Mada-pangga Rompu
3	Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	Areal Hutan yang terlindungi	Ha	250	270	285.705	830	1.971.956	2.310	3.427.524	6.850	12.039.953	7.416	13.243.949	32.553	30.191.962	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			250	270	285.705	290	405.087	310	783.967	350	2.493.780	416	2.743.157	1.636	6.711.696	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan
	KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura						500	1.387.695	500	1.522.892	1500	2.770.000	2000	3.047.000	5.000	8.727.587	KPH Rinjani Barat Pelan-gan Tastura
	KPH Ampang Riwo Soromandi						40	179.174	500	343.540	500	841.000	500	925.100	1.500	2.288.814	KPH Ampang Riwo Soro-mandi
	KPH Tambora								500,00	590.875	500	2.180.000	500	2.398.000	9.917	4.578.000	KPH Tam-bora
	KPH Maria Donggomasa								500	186.250	500	905.000	500	995.500	500	1.900.500	KPH Maria Dong-gomasa
	KPH Rinjani Timur										500	407.168	500	447.884	2.000	855.052	KPH Rinjani Timur

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	KPH Matayang Sejorong Brang Rea										500	407.168	500	447.884	2.000	855.052	KPH Ma-tayang Se-jorong Brang Rea
	KPH Batu Lanteh Puncak Ngengas										500	407.168	500	447.884	2.000	855.052	KPH Batu Lanteh Puncak Ngen-gas
	KPH Ampang Plampang										500	407.168	500	447.884	2.000	855.052	KPH Ampang Plam-pang
	KPH Orong Telu Brang Beh										500	407.168	500	447.884	2.000	855.052	KPH Orong Telu Brang Beh
	KPH Ropang										500	407.168	500	447.884	2.000	855.052	KPH Ropang
	KPH Toffo Pajo Waworada Madapangga Rompu										500	407.168	500	447.884	2.000	855.052	KPH Toffo Pajo Wawo-rada Mada-pangga Rompu
4	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Rencana Program	Doku-men	2	2	268.468	-	-	-	-	-	-	-	-	2	268.468	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	rencana program	doku-men			-	2	426.690	2	500.000	2	500.000	2	500.000	8	1.926.690	Dinas Ling-kungan Hidup dan Kehuta-nan
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral					12.770.000		24.073.131		55.708.212		17.748.907		19.485.637		129.785.886	
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					12.770.000		24.073.131		55.708.212		17.748.907		19.485.637		129.785.886	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	98,32	100	637.615	100	811.483	100	1.012.836	100	899.085	100	988.994	100	4.350.013	Dinas ESDM
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	95,24	100	533.779	100	934.820	100	459.070	100	1.240.433	100	1.364.476	100	4.532.578	Dinas ESDM
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	92,75	100	148.059	100	32.687	100	101.587	100	152.012	100	167.213	100	601.558	Dinas ESDM
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	6	6	89.005	6	94.820	6	106.773	6	113.775	6	125.153	30	529.526	Dinas ESDM
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	doku-men	1	1	63.800	0	0	1	24.900	1	84.119	1	92.531	4	265.350	Dinas ESDM
6	Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Laporan Pengendalian Usaha Pertambangan	Doku-men	1	1	386.522	1	347.934	1	896.206	1	585.136	1	643.650	5	2.859.447	Dinas ESDM
7	Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Migas	Rasio Elektrifikasi	%	64,43	65,68	3.484.116	68,01	14.919.168	70,34	17.597.861	72,67	4.529.450	75,00	4.982.395	75,00	45.512.989	Dinas ESDM

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Pelaksana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
8	Program Pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih	KK	2.125	1.500	3.293.989	1.500	3.074.814	1.500	6.425.293					4500	12.794.096	Dinas ESDM
9	Program Pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih	Kegiatan								3	4.369.323	3	4.785.283	6	9.154.606	Dinas ESDM
10	Program Pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral	Rencana program	Dokumen	2	2	284.621	2	386.885	2	486.656	2	416.865	2	458.552	10	2.033.578	Dinas ESDM
11	Program Pengembangan kualitas pelayanan informasi energi dan sumberdaya mineral	Rencana Kebijakan	Dokumen	1	1	663.964	1	460.364	1	746.384	1	854.406	1	939.847	5	3.664.964	Dinas ESDM
12	Program Pencegahan kerusakan lingkungan	Kesiapan masyarakat terhadap resiko bencana	Dokumen	1	1	366.147	1	490.516	1	1.651.821	1	923.500	1	1.015.850	5	4.447.835	Dinas ESDM
13	Program Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Migas	Rencana Penyediaan BBM dan LPG	Dokumen	1	1	60.446	1	65.946	0	0	0	0	0	-	2	126.392	Dinas ESDM
14	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Rasio Elektrifikasi	%	64,43	65,68	2.757.939	68,01	2.453.694	70,34	26.198.825	0	0	0	-	75,00	31.410.457	Dinas ESDM
15	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Energi yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kegiatan								3	3.580.803	3	3.921.695	3	7.502.498	Dinas ESDM
3.06	Perdagangan					12.801.942		10.477.405		14.937.897		15.069.718		16.345.266		69.632.228	
	Dinas Perdagangan					12.801.942		10.477.405		14.937.897		15.069.718		16.345.266		69.632.228	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.256.332		1.968.228		3.966.302		833.585		1.133.266		9.157.713	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Dinas	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%		100	1.256.332	100	1.968.228	100	3.966.302	100	741.319	100	991.000	100	8.923.181	Dinas Perda-gangan
	BP3ED											92.266		142.266		234.532	BP3ED
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					6.136.800		1.408.383		1.281.822		285.397		920.000		10.032.403	
	Dinas	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%		100	6.136.800	100	1.408.383	100	1.281.822	100	272.897	100	622.000	100	9.721.903	Dinas Perda-gangan
	BP3ED											12.500		298.000		310.500	BP3ED
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					101.172		140.470		204.735		101.900		182.000		730.277	
	Dinas	Tingkat Kompetensi Aparatur	%		100	101.172	100	140.470	100	204.735	100	61.900	100	122.000	100	630.277	Dinas Perda-gangan
	BP3ED											40.000		60.000		100.000	BP3ED
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					305.631		591.580		614.501		381.211		681.000		2.573.923	
	Dinas	Rencana program	Doku-men		2	305.631	2	591.580	2	614.501	2	381.211	1	631.000	9	2.523.923	Dinas Perda-gangan
	BP3ED											0		50.000		50.000	BP3ED
5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Doku-men		1	20.025	1	15.850	1	30.600	1	39.900	1	79.000	5	185.375	Dinas Perda-gangan
6	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan					1.695.580		1.082.126		1.049.415		932.100		1.282.000		6.041.221	Dinas Perda-gangan
	DINAS	Tingkat penyelesaian pengaduan konsumen	%		5	847.790	10	524.027	15	567.816	20	932.100	25	1.282.000	25	4.153.733	Dinas Perda-gangan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	UPT METRO	Peralatan yang ditera	%		5	847.790	8	558.099	11	481.599	0	0	0	0	17	1.887.488	Dinas Perda-gangan
7	Peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Rencana Program Ekspor-impor	Doku-men		3	114.183	3	67.273	3	142.313	3	275.000	3	325.000	15	923.769	Dinas Perda-gangan
8	Peningkatan dan pengembangan ekspor	Rencana Program Ekspor-impor				376.484		407.251		508.366		1.347.784		2.147.000		4.786.884	
	Dinas	Rencana Program Ekspor-impor	Doku-men		3	376.484	3	407.251	3	508.366	3	1.097.784	3	1.597.000	15	3.986.884	Dinas Perda-gangan
	BP3ED											250.000	10	550.000		800.000	BP3ED
9	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Stabilitas harga	%		4	586.586	5	729.272	6	2.103.309	7	1.725.810	10	2.800.000	8	7.944.976	Dinas Perda-gangan
10	Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Pertumbuhan kesempatan kerja	%		1,2	1.568.430	1,3	3.485.520	1,4	3.671.288	1,5	7.331.600	1,6	4.131.000	1,6	20.187.838	Dinas Perda-gangan
11	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah					640.719		581.452		1.365.248		1.815.432		2.665.000		7.067.851	
	Dinas	Rencana program pengembangan usaha daerah	Doku-men		5	640.719	5	427.852	5	1.092.273	5	1.565.432	5	2.115.000	5	5.841.276	Dinas Perda-gangan
	BP3ED	Rencana program pengembangan usaha daerah	Doku-men				2	153.600	2	272.975	2	250.000	2	550.000	8	1.226.575	BP3ED
3.07	Perindustrian					7.412.228		7.271.410		9.991.065		11.534.418		23.442.503		59.651.624	
	Dinas Perindustrian					7.412.228		7.271.410		9.991.065		11.534.418		23.442.503		59.651.624	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											828.598		959.500		1.788.098	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Dinas	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	643.321	100	959.500	100	1.602.821	Dinas Perin-dustrian
	Balai kemasan Produk Daerah											185.277				185.277	Balai Kema-san
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											583.800		820.000		1.403.800	
	Dinas	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%								100	470.000	100	820.000	100	1.290.000	Dinas Perin-dustrian
	UPT Balai kemasan Produk Daerah											113.800		0		113.800	Balai Kema-san
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											95.370		95.000		190.370	
	Dinas	Tingkat Kompetensi Aparatur	%								100	59.000	100	95.000	100	154.000	Dinas Perin-dustrian
	Balai kemasan Produk Daerah											36.370				36.370	Balai Kema-san
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan											401.625		450.000		851.625	
	Dinas	Rencana program	Doku-men								2	368.325	2	450.000	4	818.325	Dinas Perin-dustrian
	Balai kemasan Produk Daerah											33.300		0		33.300	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen								1	19.200	1	25.000	2	44.200	Dinas Perindustrian
6	Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan Produk IKM yang bersertifikat	%		1		2	91.818	3	237.013	4	232.370	5	904.693	5	1.465.893	Dinas Perindustrian
7	Pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	%		1,1	1.930.056	1,2	2.712.094	1,3	3.756.428	1,4	1.376.340	1,5	4.325.103	1,5	14.100.022	Dinas Perindustrian
8	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Pertumbuhan IKM yang memanfaatkan teknologi	%		1,5	4.371.474	2	3.275.832	2,5	4.271.781	3	4.431.810	3,5	8.826.128	3,5	25.177.025	Dinas Perindustrian
9	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kompetensi SDM IKM	%		5	20.276	9	176.472	13	308.225	18	93.390	22	344.000	22	942.363	Dinas Perindustrian
10	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah					863.562		691.649		594.283		2.191.073		2.964.437		7.305.004	Dinas Perindustrian
	BPKUDK	Produk yang dihasilkan	jenis		6	863.562	8	691.649	10	594.283	12	844.283	14	1.604.180	14	4.597.957	Dinas Perindustrian
	Balai Kemasan Produk Unggulan Daerah											1.346.790		1.360.257		2.707.047	
11	Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP	Produk unggulan desa	jenis		2	226.860	2	223.360	2	573.335	3	239.250	4	2.241.642	4	3.504.447	Dinas Perindustrian
12	Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan					0		100.185		250.000		581.189		587.000		1.518.374	
	Dinas											281.189		284.000		565.189	Dinas Perindustrian

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	BPKUDK	Produk yang dihasilkan	jenis				2	100.185	4	250.000	6	300.000	8	303.000	8	953.185	BP-KUDK
13	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah	Penyelarasan dokumen	Doku-men								10	460.403		900.000	10	1.360.403	Dinas Perin-dustrian
3.08	Transmigrasi					2.100.940		960.694		960.694		532.413		585.654		5.140.394	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					2.100.940		960.694		960.694		532.413		585.654		5.140.394	
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah warga trans yang ditempatkan dan di bina	KK/lo-kasi	100/2	100/2	497.769	2500/8	519.954	1500/5	519.954					1500/5	1.537.677	Dinas Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
2	Program Penempatan dan pembinaan transmigrasi	Jumlah warga trans yang ditempatkan dan di bina	KK/lo-kasi	100/3	100/3	1.603.171	35/1	440.740	72/5	440.740					72/5	2.484.651	Dinas Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
3	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah warga trans yang ditempatkan dan di bina	KK/lo-kasi	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20/3	532.412,50	35/3	585.654	35/3	1.118.066	Dinas Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					203.615.676		297.559.801		325.359.732		337.372.638		419.223.292		1.583.131.140	
4.01	Administrasi Pemerintahan					123.584.176		150.497.175		199.734.957		184.651.122		248.647.776		907.115.206	
	Sekretariat Daerah					73.655.837		80.244.445		130.928.460		80.742.147		132.611.376		498.182.265	
	Biro Pemerintahan					2.027.151		2.251.618		2.348.934		3.701.129		4.618.650		14.947.483	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	683.871,00	100	645.676,90	100	648.385,30	100	909.204,00	100	1.021.750	100	3.908.887	Biro Pemer-intahan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	308.000,00	100	176.800,00	100	173.000,00	100	473.000,00	100	192.000	100	1.322.800	Biro Pemer-intahan
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	3	5	45.750,00	6	75.750,00	8	112.900,00	6	84.900,00	6	84.900	31	404.200	Biro Pemer-intahan
4	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rencana program kerjasama	Doku-men		1	73.500,00	2	467.000,00	2	240.451,50	2	175.455,00	2	250.000	9	1.206.407	Biro Pemer-intahan
5	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rencana pemekaran wilayah	Doku-men	2	2	342.400,00	2	237.810,70	2	316.650,90	2	500.000	2	570.000	10	1.966.862	Biro Pemer-intahan
			Doku-men reko-men-dasi								4	500.000	4	570.000	8		Biro Pemer-intahan
		Terseleng-garanya Lomba Kecamatan	Tema								8	620.000					
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Dokumen Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan yang Berprestasi ditingkat Nasional	Doku-men	1	1	481.580,40	1	405.080,40	1	444.640,00	1	533.570,00	1	620.000	5	2.484.871	Biro Pemer-intahan
7	Program Perbaikan Sistem dan Kearsipan	Kecepatan penemuan arsip	Menit	15	12	22.050,00	10	22.050,00	10	13.669,20						57.769	Biro Pemer-intahan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah	Rencana pengembangan kapasitas daerah	Doku-men	1	1	70.000,00			2	378.537,50	2	385.000,00	2	420.000	7	1.253.538	Biro Pemer-intahan
9	Penertiban pengelolaan keuangan dan asset	Manajemen Aset	doku-men					221.450,00	2	20.700,00	2	25.000,00	2	30.000	6	297.150	Biro Pemer-intahan
10	Program Pelayanan administrasi pejabat negara	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan	%								100	350.000,00	100	380.000	100	730.000	Biro Pemer-intahan
11	Program Fasilitasi Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah	Rencana Program kebijakan	Doku-men								1	175.000,00	1	190.000	2	365.000	Biro Pemer-intahan
12	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rencana Program kebijakan kependudukan	Doku-men								2	90.000,00	2	110.000	4	200.000	Biro Pemer-intahan
13	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Terseleng-garanya Lomba Kecamatan	Tema										8	750.000	8	750.000	Biro Pemer-intahan
	Biro Hukum					3.815.316		4.145.256		3.823.762		3.937.569		4.973.357		20.695.262	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	1.289.046	100	1.610.540	100	1.159.216	100	1.371.216	100	1.915.192	100	7.345.210	Biro Hukum
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	134.140	100	159.600	100	554.664	100	270.000	100	538.640	100	1.657.044	Biro Hukum
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	-	-	-	-			100	3.150	100	3.150	100	6.300,00	Biro Hukum

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	5	5	45.000	5	49.500	5	79.500	5	45.000	5	45.000	25	264.000	Biro Hukum
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	doku-men	1	1	12.800	1	19.400	1	23.531	1	16.484	1	16.484	5	88.699	Biro Hukum
6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terbentuknya produk hukum daerah	Doku-men	3804	740	2.334.330	740	2.306.217	740	2.006.852	740	2.231.719	740	2.454.891	7504	11.334.009	Biro Hukum
		- Perda		54	10		10		10		10		10		104	-	Biro Hukum
		- Pergub		221	30		30		30		30		30		371	-	Biro Hukum
		- SK Gubernur		3529	700		700		700		700		700		7.029	-	Biro Hukum
	Biro Organisasi					2.498.150		3.262.507		3.199.050		3.377.375		3.810.400		16.147.482	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rasio dokumen Adm Perkantoran, Kepegawaian dan Keuangan yg diselesaikan tepat waktu.	%	80	100	553.641	100	567.166	100	526.193	100	600.000	100	600.000	100	2.847.000	Biro Organ-isasi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana	%	50	50	534.357	100	419.429	100	376.777	100	42.100	100	42.100	100	1.414.763	Biro Organ-isasi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	%	-	100	12.600	100	5.300	100	5.000	100	10.000	100	10.000	100	42.900	Biro Organ-isasi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ketepatan waktu penyampaian laporan	%	75	100	83.500	100	59.914	100	76.590	100	90.900	100	90.900	100	401.804	Biro Organ-isasi

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Daya guna aset daerah	%	70	100	7.272	100	19.126	100	28.000	100	28.000	100	28.000	100	110.398	Biro Organ-isasi
6	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%	100	100	269.000	100	642.013	100	320.000	-		-	-	-	1.231.013	Biro Organ-isasi
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%								100	359.772	100	400.000	100	759.772	Biro Organ-isasi
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Perangkat Daerah Tertata Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	%	100	100	424.675	100	265.430	100	683.260	100	350.000	100	350.000	100	2.073.365	Biro Organ-isasi
9	Program Pengembangan Sistem Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	Informasi Jabatan Sebagai Pedoman Penataan Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Kelembagaan dan Pengawasan	%	100	100	435.705	100	492.660	100	442.781	100	500.000	100	500.000	100	2.371.147	Biro Organ-isasi
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu	%	100	100	53.400	100	88.735	100	97.376	100	115.000	100	120.000	100	474.511	Biro Organ-isasi
		Penanganan pelanggaran disiplin Kepegawaian	%	100	100	-	100	-	100	-	100	98.000	100	99.000	100	197.000	Biro Organ-isasi
11	Program Evaluasi Kinerja SKPD	SKPD berkinerja baik meningkat	%	-	-	-	-	-	-	-	25	160.400	50	350.000	50	510.400	Biro Organ-isasi

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Pelaksana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
12	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan yang berprestasi	Dokumen LAKIP/ LKjIP	1	1	124.000	1	118.906	1	220.949	1	402.803	1	600.000	1	1.466.658	Biro Organisasi
13	Program Percepatan Pembangunan	Ketepatan Target dan Waktu Pencapaian Program Pembangunan Prioritas, Unggulan dan Strategis	%	-	-	-	100	583.828	100	422.123	100	600.000	100	600.000	100	2.205.951	Biro Organisasi
14	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah yang mengakses layanan informasi publik	Kunjungan (Visitors)	-	-	-	-	-	20.000	-	25.000	20.400	30.000	20.400	100	40.800	Biro Organisasi
	Biro Perekonomian					3.206.841		4.023.058		4.070.189		4.483.874		5.931.337		21.715.300	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	316.385	100	341.936	100	391.500	100	311.220	100	373.464	100	1.734.504	Biro Perekonomian
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	266.920	100	240.450	100	557.349	100	447.873	100	537.448	100	2.050.040	Biro Perekonomian
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Dokumen	8	8	126.614	5	70.530	5	79.454	5	79.454	5	95.345	28	451.397	Biro Perekonomian
4	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	dokumen	1	1	11.086	1	11.086	1	10.298	1	10.504	1	13.298	5	56.272	Biro Perekonomian
5	Program Unggulan dan Strategis Lain Dana Bantuan Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)	Kebijakan program	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	-	0	1	550.000	4	2.050.000	Biro Perekonomian

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Doku-men	2		0	2	498.169	2	672.159	2	1.095.005	2	1.314.001	2	3.579.333	Biro Pereko-nomian
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Kebijakan penataan BUMD	Doku-men			0	1	673.756	1	215.847	1	643.097	1	771.716	4	2.304.416	Biro Pereko-nomian
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kebijakan pengelolaan BUMD	Doku-men	3	3	700.786	3	751.921	3	636.242	3	915.120	3	1.098.144	15	4.102.212	Biro Pereko-nomian
9	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kebijakan pengembangan investasi daerah	Doku-men			0	1	381.496	1	415.614	1	180.000	1	216.000	4	1.193.110	Biro Pereko-nomian
10	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Rencana program kebijakan perekonomian	Doku-men			0	3	553.715	3	591.726	3	801.602	3	961.922	3	2.908.965	Biro Pereko-nomian
11	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rencana Pengembangan Kebijakan Kerjasama antar daerah	Doku-men	3	3	1.285.051									3	1.285.051	Biro Pereko-nomian
	Biro Bina Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					3.670.000		3.405.261		4.043.260		5.412.883		6.049.651		22.581.056	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	910.020	100	883.475	100	703.753	100	983.638	100	1.129.087	100	4.609.973	Biro Bina APP & LPBJP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	679.788	100	141.170	100	422.570	100	187.808	100	206.588	100	1.637.923	Biro Bina APP & LPBJP
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	0	1,67	7.000	5	16.500	5	15.000	6,67	20.000	8,33	25.000	26,67	83.500	Biro Bina APP & LPBJP

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	1	1	55.047	1	39.584	1	57.950	1	67.020	1	77.896	5	297.497	Biro Bina APP & LPBJP
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyelesaian Dokumen Standar Satuan Harga	Bulan	3	3	41.570	3	48.705	3	105.115	3	115.626	3	127.151	15	438.167	Biro Bina APP & LPBJP
6	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	kualitas layanan pengadaan barang jasa	%	45	60	1.704.360	65	1.960.654	75	2.435.266	80	2.966.436	85	3.270.577	85	12.337.292	Biro Bina APP & LPBJP
		Rekomendasi	Doku-men	6	6		6		6		12		12		42	-	Biro Bina APP & LPBJP
7	Program Kerjasama Pembangunan	Rekomendasi	Doku-men	2	2	272.215	4	315.175							6	587.390	Biro Bina APP & LPBJP
8	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Rekomendasi	Doku-men	0	0	-	0	-	4	303.607	6	397.092	6	436.799	16	1.137.498	Biro Bina APP & LPBJP
9	Program percepatan pembangunan	Rekomendasi	Doku-men	-							4	675.263	4	776.553	8	1.451.816	Biro Bina APP & LPBJP
	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam					1.320.799		1.600.098		1.561.900						4.482.797	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	433.492	100	598.207	100	536.423	-	-	-	-	100	1.568.122	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	105.810	100	120.450	100	86.500	-	-	-	-	100	312.760	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	-	5	1.400	3	400	-	-	-	-	-	-	3	1.800	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam
4	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	doku-men	-	-	-	-	-	3	27.900	-	-	-	-	3	27.900	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam
5	Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	5	6	37.950	7	27.000	5	36.665	-	-	-	-	18	101.615	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Pelaksana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rencana Pengembangan Kebijakan Informasi	Dokumen	6	1	215.764	1	243.474	1	133.378	-	-	-	-	3	592.616	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam
7	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rencana Pengembangan Kebijakan Kerjasama antar daerah	Dokumen	30	30	144.232	20	126.382	29	107.050	-	-	-	-	29	377.664	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam
8	Program Pengendalian Kerjasama dan Sumber Daya Alam	Kebijakan Kerjasama & SDA yang terkendali	Dokumen	2	2	259.027	2	366.736	2	579.421	-	-	-	-	6	1.205.184	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam
9	Kerjasama Non Pemerintah	Rencana Pengembangan Kebijakan Kerjasama dengan pihak ketiga	Dokumen	-	-	-	-	-	26	54.563	-	-	-	-	26	54.563	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam
10	Program Kerjasama Pembangunan	Rencana Pengembangan Kebijakan Kerjasama dengan pihak ketiga	Dokumen	35	35	123.125	19	117.450	-		-	-	-	-	54	240.574	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam
	Biro Umum					49.420.337		38.066.249		65.922.272		26.566.452		69.219.480		249.194.790	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%		90	11.598.074	90	12.763.339	100	15.227.828	100	12.756.336	100	15.323.550	100	67.669.127	Biro Umum
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%		90	22.770.326	90	10.025.203	100	45.722.537	100	9.691.323	100	49.121.930	100	137.331.319	Biro Umum
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%		95	73.825	0	0	0	0	-	0	-	0	95	73.825	Biro Umum
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%		90	1.333.946	90	553.646	100	96.800	100	96.800	100	115.500	100	2.196.692	Biro Umum
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men		7	237.626	7	266.530	8	142.866	8	233.758	8	222.200	38	1.102.979	Biro Umum
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tingkat kelancaran pelayanan pimpinan daerah	%		90	6.531.060	90	7.199.408	100	2.371.900	100	3.143.135	100	3.750.000	100	22.995.504	Biro Umum
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	doku-men		6	2.347.499	5	1.391.990	2	247.250	2	258.000	2	299.200	17	4.543.939	Biro Umum
8	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online	Orang	4653	10000	975.100	20000	1.143.601	40000	1.293.668	0	0	-	0		3.412.369	Biro Umum
9	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan Upacara Pemerintahan	%		90	216.360	90	377.790	100	387.100	100	387.100	100	387.100	100	1.755.450	Biro Umum

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
10	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat kelancaran komunikasi informasi dan mass media	%		95	1.222.343	95	1.674.785	100	432.323	-	0	-	0	100	3.329.451	Biro Umum
11	Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Tingkat penyebaran informasi kepada masyarakat	%		90	2.114.178	90	2.669.959	-	0	-	0	-	0	90	4.784.136	Biro Umum
	Biro Kesejahteraan Rakyat					7.697.242		15.916.537		17.793.082		20.385.000		21.170.000		82.961.861	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	706.680	100	1.411.165	100	821.260	100	1.640.000	100	1.690.000	100	6.269.105	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur	Unit	4	4	82.269	4	83.500	4	94.352	4	100.000	4	150.000	4	510.121	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur	Orang	50	50	116.407	0	-	0	-	50	225.000	50	235.000	50	576.407	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan aparatur yang memiliki Kopetensi tertentu	Orang	4		-	4	32.000	4	42.000	4	50.000	4	60.000	4	184.000	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana Program	Doku-men	4	4	65.500	4	95.540	4	84.500	4	100.000	4	125.000	20	470.540	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset	Doku-men	2	2	17.104	2	12.304	2	35.473	2	30.000	2	35.000	10	129.881	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
7	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Peningkatan dan penghayatan agama dalam kehidupan bermasyarakat	Doku-men	8	8	5.062.020	8	12.391.074	8	13.145.448	8	14.950.000	8	15.375.000	40	60.923.542	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyebaran penyakit menular yang dicegah	Lo-kasi	10	10	169.824	10	122.200	10	215.490	10	250.000	10	300.000	10	1.057.514	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
9	Program Peningkatan Mutu pendidikan dan tenaga Kependidikan.	lingkungan Sekolah yang ditingkatkan kebersihannya	Lo-kasi	110	110	228.145	110	204.100	110	267.920	110	320.000	110	350.000	110	1.370.165	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
10	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Perempuan dan Anak Tindak Kekerasan yang dilindungi	Lo-kasi	10	10	35.000	10	28.000	10	59.800	10	50.000	10	75.000	10	247.800	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
11	Program Keluarga Berencana	Data Akseptor KB	Doku-men	1	1	23.750		-		-		-		-	1	23.750	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
12	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Pemuda Pelopor sesuai Bidangnya yang terpilih	Orang	5	5	383.178	5	584.054	5	971.140	5	950.000	5	975.000	5	3.863.372	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
	- Parade Senja	Kesenian Daerah	Ke-lom-pok								2	265.000	2	275.000	2	540.000	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
13	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Forum Politik yang terpantau	Kab/ Kota	10	10	32.000	10	27.000	10	27.000	10	50.000	10	75.000	10	211.000	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
14	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Adat Budaya Lokal di Daerah yang terpilah	Kab/ Kota	10	10	31.000	10	19.000	10	20.000	10	50.000	10	65.000	10	185.000	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
15	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	PJTKI yang berkualitas	Doku-men	2	2	100.025	2	41.000	2	60.000	2	145.000	2	75.000	10	421.025	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
16	Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi	Lokasi Tran yang subur	Lo-kasi	1	1	-		-		-	1	75.000	2	75.000	2	150.000	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kegiatan Partisipasi masyarakat yang terpantau	Kab/ Kota	10	10	61.250	10	45.350	10	55.000	10	95.000	10	105.000	10	361.600	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
18	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan	PMKS yang ikut-serta dalam sosialisasi	Orang	30	30	66.000	30	49.000	30	28.000	30	90.000	30	100.000	30	333.000	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
19	Program Peningkantan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	Kerjasama lintas sektor yang terbina	SKPD	4	4	292.828	4	398.950	4	497.000	4	550.000	4	580.000	4	2.318.778	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat
20	Program Peningkatan Iman dan Takwa (IMTAQ)	Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur	Orang	700	700	224.263	700	372.300	700	1.368.700	700	400.000	700	450.000	700	2.815.263	Biro Kes-ejahter-aan Rakyat

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Biro Humas dan Protokol							7.573.859		28.166.010		12.877.865		16.838.500		65.456.235	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%		-	-	90	950.132	90	1.531.353	90	1.849.724	100	2.303.500	100	6.634.709	Biro Humas dan Protokol
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%		-	-	90	106.473	90	579.644	90	796.727	95	1.256.000	95	2.738.845	Biro Humas dan Protokol
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%		-	-	-	-	-	41.000	90	147.200	92	150.000	92	338.200	Biro Humas dan Protokol
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men		-	-	6	70.500	6	103.466	6	125.000	6	138.000	24	436.966	Biro Humas dan Protokol
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	doku-men		-	-	0	-	0%	17.800	1	17.081	1	21.000	2	55.881	Biro Humas dan Protokol
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tingkat kelancaran pelayanan pimpinan daerah	%		-	-	95	3.980.200	95	20.230.412	95	4.437.812	98	5.920.000	98	34.568.423	Biro Humas dan Protokol
7	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan mass media	Tingkat kelancaran komunikasi informasi dan mass media	%		-	-	95	658.392	95	1.714.136	95	2.091.220	98	3.000.000	98	7.463.748	Biro Humas dan Protokol
8	Program Kerjasama Informasi dengan mass media	Tingkat penyebaran informasi kepada masyarakat	%		-	-	95	1.808.163	95	3.948.200	95	3.413.100	98	4.050.000	98	13.219.463	Biro Humas dan Protokol
	Sekretariat DPRD					44.445.957		65.208.950		63.725.708		98.029.525		107.832.474		379.242.614	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	18.939.476	100	21.795.427	100	23.815.948	100	45.330.413	100	49.863.454	100	159.744.717	Sekre-tariat DPRD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	3.435.013	100	15.468.171	100	15.623.729	100	2.616.542	100	2.878.195	100	40.021.650	Sekre-tariat DPRD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan Aparatur	%	100	100		100		100		100	394.242	100	433.666	100	827.908	Sekre-tariat DPRD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	182.828	100	311.823	100	200.493	100	439.238	100	483.162	100	1.617.544	Sekre-tariat DPRD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men		4	45.000	4	45.000	4	139.390	4	59.894	4	65.883	20	355.167	Sekre-tariat DPRD
6	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Doku-men		1	24.000	1	16.500	1	28.830	1	31.945	1	35.138	5	136.413	Sekre-tariat DPRD
7	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rencana program	Doku-men		8	21.819.640	8	27.572.029	9	23.917.319	9	49.157.252	9	54.072.976	43	176.539.215	Sekre-tariat DPRD
	Badan Penghubung Daerah					5.482.383		5.043.780		5.080.789		5.879.449		8.203.926		29.690.327	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	2.398.821	100	2.806.880	100	2.745.481	100	3.116.130	100	3.577.342	100	14.644.655	Badan Peng-hubung Daerah
2	Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas aparatur	%	100	100	2.004.675	100	1.235.745	100	1.586.095	100	1.904.564	100	2.992.584	100	9.723.663	Badan Peng-hubung Daerah

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	42.000	100	76.000	100	40.000	100	19.000	100	98.000	100	275.000	Badan Peng-hubung Daerah
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	%	100	100	32.250	100	52.500	100	48.900	100	74.984	100	59.895	100	268.529	Badan Peng-hubung Daerah
5	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	Manajeman Aset	Doku-men	0					2	69.150	2	128.714	2	130.000	6	327.864	Badan Peng-hubung Daerah
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Kinerja lembaga	Doku-men	1	1	-	2	334.970	1	28.663	1	60.094	2	530.622	7	954.349	Badan Peng-hubung Daerah
7	Program Koordinasi Pemasaran Pariwisata	Kinerja lembaga (Anjungan NTB)	Doku-men	12	12	1.004.636	12	537.685	13	562.500	13	575.963	20	815.483	70	3.496.267	Badan Peng-hubung Daerah
4.02	Pengawasan					9.602.964		10.316.511		11.363.596		11.327.277		12.460.004		55.070.352	
	Inspektorat					9.602.964		10.316.511		11.363.596		11.327.277		12.460.004		55.070.352	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	3.563.201	100	3.424.552	100	3.621.018	100	4.018.089	100	4.419.897	100	19.046.757	Inspe-ktorat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	853.184	100	229.683	100	711.737	100	331.310	100	364.441	100	2.490.354	Inspe-ktorat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	10.627	100	22.184	100	140.546	100	113.938	100	125.332	100	412.626	Inspe-ktorat

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	1	1	188.600	1	130.200	1	142.495	1	118.592	1	130.451	5	710.338	Inspe-ktorat
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Doku-men	0	0	-	0	-	1	39.380	1	36.928	1	40.621	3	116.929	Inspe-ktorat
6	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas SKPD rata - rata nilai > 60	%	32	43	3.744.250	57	5.151.147	68,18	351.580	80	351.580	100	386.738	100	9.985.295	Inspe-ktorat
		Pesantase Penyelesaian pengaduan masyarakat	%	80	80	447.829	80	497.588	80	86.650	80	86.650	80	95.315	80	1.214.032	Inspe-ktorat
		Persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan	%	20	30	531.924	40	680.802	50	684.170	60	684.170	70	752.587	70	3.333.652	Inspe-ktorat
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level						Level 2	24.900	Level 3	24.900	Level 3	27.390	Level 3	77.190	Inspe-ktorat
		Persentase penilaian Prestasi kinerja SKPD yang memuaskan	%						11,36	40.000	22,22	40.000	33,33	44.000	33,33	124.000	Inspe-ktorat
		Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	%						56,81	59.100	75,56	59.100	100	65.010	100	183.210	Inspe-ktorat
		Tingkat maturitas Pemda NTB	Per-ingkat						Pering-kat 2	528.600	Pering-kat 3	528.600	Pering-kat 3	581.460	Pering-kat 3	1.638.660	Inspe-ktorat

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
		Hasil Nilai PMPRB NTB 60	Nilai						60	20.000	60	20.000	60	22.000	60	62.000	Inspe-ktorat
		Persentase SKPD yang membangun WBK/WBBM/ZI	%						2,22	3.500.000	4,4	3.500.000	8,9	3.850.000	8,9	10.850.000	Inspe-ktorat
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi NTB	Nilai						60	28.550	65	28.550	70	31.405	70	88.505	Inspe-ktorat
		Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	%						100	138.530	100	138.530	100	152.383	100	429.443	Inspe-ktorat
		Opini BPK	Opini						WTP	1.071.340	WTP	1.071.340	WTP	1.178.474	WTP	3.321.154	Inspe-ktorat
7	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat Kompetensi APIP	%	25	52	263.350	63	180.356	20	175.000	28,33	175.000	38,33	192.500	100	986.206	Inspe-ktorat
		Persentase Aparatur Pengawas yangFungsional Auditor	%	25	52	263.350	63	180.356	30	175.000	37,56	175.000	45	192.500	45	986.206	Inspe-ktorat
		Persentase Aparatur Pengawas yang Fungsional P2UPD	%	-	-	-	-	-	30	175.000	37,56	175.000	45	192.500	45	542.500	Inspe-ktorat
4.03	Perencanaan					15.333.887		17.202.328		18.219.678		19.811.622		31.163.519		101.731.033	
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					15.333.887		17.202.328		18.219.678		19.811.622		31.163.519		101.731.033	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara	%	100	100	3.535.550	100	6.326.531	100	5.555.001	100	5.588.477	100	6.147.325	100	27.152.884	Bappeda
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100	100	2.639.210	100	2.189.734	100	974.120	100	1.513.950	100	1.665.345	100	8.982.359	Bappeda
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas sumber daya aparatur yang ditingkatkan	%	100	100	198.590	100	295.520	100	226.780	100	261.925	100	288.118	100	1.270.932	Bappeda
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan yang tersusun	dok	2	2	20.000	2	35.700	2	43.270	2	51.041	2	56.145	10	206.156	Bappeda
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersusun	dok	0	0	0	0	0	1	57.350	1	57.500	1	63.250	3	178.100	Bappeda
6	Program pengembangan data/ informasi	Data informasi yang tersusun	dok	2	2	368.400	5	152.620	6	225.340	5	433.043	5	900.000	23	2.079.403	Bappeda
7	Program pengembangan data/ informasi/Statistik Daerah	Data/informasi/ statistik daerah yang tersusun	dok	0	0	0	6	563.790	15	1.736.490	0	0	0	0	21	2.300.280	Bappeda
8	Program Kerjasama Pembangunan	Dokumen kerjasama pembangunan yang tersusun	dok	2	10	1.289.002	5	703.930	0	0	0	0	0	0	15	1.992.932	Bappeda
9	Program perencanaan pembangunan daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	dok	10	17	3.651.512	24	2.657.411	19	3.603.454	20	3.833.649	20	4.217.014	100	17.963.039	Bappeda

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
10	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang tersusun	dok	8	12	615.187	12	1.269.780	10	1.793.173	9	1.683.906	9	3.367.812	52	8.729.858	Bappeda
11	Program perencanaan sosial dan budaya	Dokumen perencanaan sosial dan budaya yang tersusun	dok	2	3	634.814	4	469.875	5	941.518	5	1.147.843	5	2.279.964	22	5.474.014	Bappeda
12	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Dokumen perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang tersusun	dok	1	7	2.381.621	4	2.537.438	10	1.979.886	9	2.201.015	9	2.900.000	39	11.999.960	Bappeda
13	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang tersusun	dok	2	0	0	0	0	2	1.083.299	3	1.673.911	3	3.347.822	8	6.105.032	Bappeda
14	Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Rawan Bencana yang tersusun	dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	400.000	2	400.000	Bappeda
15	Program Penelitian dan Pengembangan	Kajian Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	dok	0	0	0	0	0	0	0	10	1.365.362	10	2.730.724	20	4.096.086	Bappeda
16	Program Peningkatan Pelayanan Penelitian	Dokumen pelayanan, publikasi dan jaringan penelitian yang tersusun	dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2.800.000	3	2.800.000	Bappeda
4.04	Keuangan					39.305.279		54.206.600		63.862.294		88.380.349		88.231.439		333.985.961	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					17.295.487		30.563.401		32.116.892		50.817.199		45.033.816		175.826.795	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	95	95	1.158.671	95	3.454.084	95	3.623.151	95	5.064.998	95	5.607.650	100	18.908.555	BPKAD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	95	95	272.500	95	1.141.257	95	2.713.995	95	13.025.989	95	5.330.000	100	22.483.740	BPKAD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	95	95	61.260	95	64.860	95	242.040	95	201.478	95	214.200	100	783.838	BPKAD
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	6	6	357.488	6	603.270	6	465.455	6	516.105	6	556.500	30	2.498.817	BPKAD
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Doku-men	2	2	113.304	2	1.884.699	2	998.430	2	1.136.054	2	1.150.000	10	5.282.487	BPKAD
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu Penetapan APBD Prov. NTB	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	13.570.096	Tepat waktu	21.136.857	Tepat waktu	22.303.943	Tepat waktu	29.106.544	Tepat waktu	30.381.050	Tepat waktu	116.498.491	BPKAD dan UPT
		Opini Laporan Keuangan Provinsi	Jenis	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
7	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Ketepatan waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten/Kota	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	1.355.227	Tepat waktu	1.766.154	Tepat waktu	1.255.547	Tepat waktu	1.323.600	Tepat waktu	1.280.086	Tepat waktu	6.980.614	BPKAD
8	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang terselesaikan	%	66,67	92,31	406.941	93	512.221	94	514.330	95	442.431	98	514.330	100	2.390.253	BPKAD
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah					22.009.792		23.643.199		31.745.402		37.563.150		43.197.623		158.159.166	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	9.291.665	100	9.787.921	100	13.441.001	100	12.552.000	100	14.434.801	100	59.507.388	Bap-penda & UPTD se NTB

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	6.069.095	100	6.195.240	100	8.435.931	100	8.632.045	100	9.926.852	100	39.259.163	Bap-penda & UPTD se NTB
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	%	100	100	150.714	100	252.344	100	206.085	100	410.267	100	471.806	100	1.491.216	Bap-penda & UPTD se NTB
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Doku-men	4	4	259.487	4	220.769	4	261.417	4	515.975	4	593.371	20	1.851.019	Bap-penda & UPTD se NTB
5	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen aset	%	100	100	119.672	100	165.248	100	362.940	100	295.060	100	339.319	100	1.282.239	Bap-penda & UPTD se NTB
6	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pertumbuhan PAD	%	13,66	13,78	5.872.098	13,64	6.760.618	2,09	8.733.768	5,19	14.847.803	7,64	17.074.974	7,64	53.289.261	Bap-penda & UPTD se NTB
7	Reformasi birokrasi	Kinerja Pelayanan Aparatur	%	100	100	189.860	100	203.860	100	253.860	100	260.000	100	299.000	100	1.206.580	Bap-penda & UPTD se NTB
8	Penertiban pengelolaan keuangan dan asset	Kinerja aparatur	%	100	100	57.200	100	57.200	100	50.400	100	50.000	100	57.500	100	272.300	Bap-penda & UPTD se NTB
4.05	Kepegawaian					15.789.371		65.337.187		32.179.208		6.220.943		9.619.411		129.146.119	
	Badan Kepegawaian Daerah					14.403.619		63.671.941		30.728.597		6.220.943		9.619.411		124.644.510	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	2.838.652	100	7.997.148	100	10.056.680	100	2.813.323	100	4.800.000	100	28.505.804	BKD

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Pelaksana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	1.073.262	100	42.336.000	100	6.194.385	100	131.020	100	800.000	100	50.534.668	BKD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	1.000	100	2.900	100	2.900	100	169.011	100	6.000	100	181.811	BKD
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Dokumen	3	4	224.292	3	138.000	3	128.520	3	144.909	3	128.511	16	764.232	BKD
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	24.000	1	44.100	1	38.970	1	26.200	1	42.000	5	175.270	BKD
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Pelaporan LHKPN	Dokumen	28							50	204.800	24	243.900	74	448.700	BKD
7	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang optimal			250 SK jab fungsional, 89 SK jab struktural, 35 SK pembinaan disiplin	2.501.544	250 SK jab fungsional, 86 SK jab struktural, 40 SK pembinaan disiplin	2.739.691	250 SK jab fungsional, 107 SK jab struktural, 75 SK pembinaan disiplin	3.000.509	1750 SK jab fungsional, 400 SK jab struktural, 100 SK pembinaan disiplin	2.731.680	2000 SK jab fungsional, 400 SK jab struktural, 100 SK pembinaan disiplin	3.599.000	4500 SK jab fungsional, 1082 SK jab struktural, 350 SK pembinaan disiplin	14.572.424	BKD
8	Program Pendidikan Kedinasan	Kompetensi Widyaiswara	Dokumen	12	11	199.500	11	75.500	11	61.050					33	336.050	BKD
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	Dokumen	299	741	7.541.369	1496	10.338.601	1300	11.245.582					3537	29.125.552	BKD

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Sekretariat Korpri					1.385.752		1.665.246		1.450.611						4.501.609	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	568.552,51	100	747.553,76	100	504.541,10					100	1.820.647	Sekre-tariat Korpri
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	0		-	100	620.000,00	100	180.229,60					100	800.230	Sekre-tariat Korpri
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan instansi pemerintah dalam keikutsertaan dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan	%	95	100	80.362,50	100	142.424,90	100	195.733,20					100	418.521	Sekre-tariat Korpri
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men	1	1	70.586,70	1	55.717,50	1	56.770,00					3	183.074	Sekre-tariat Korpri
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Doku-men	0	0	0	0	0	1	20.730,00					1	20.730	Sekre-tariat Korpri
6	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Cakupan instansi pemerintah dalam keikutsertaan MTQ dan STQ anggota Korpri	%	81,00	100	666.250,00	100	99.550,00	100	492.607,10					100	1.258.407	Sekre-tariat Korpri
4.06	Penelitian dan Pengembangan											1.365.362		1.433.630		2.798.992	
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											1.365.362		1.433.630		2.798.992	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Per-angkat Daerah Pelak-sana
					Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Rencana Program									6	1.365.362	6	1.433.630	8	2.798.992	Bappeda
4.07	Pendidikan dan Pelatihan											25.615.965		27.667.513		53.283.478	
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah											25.615.965		27.667.513		53.283.478	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%								100	1.841.415	100	1.933.486	100	3.774.901	BPSDM
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%								100	15.448.170	100	16.220.578	100	31.668.748	BPSDM
3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%								100	9.900	100	10.395	100	20.295	BPSDM
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Doku-men								3	139.730	3	146.717	6	286.447	BPSDM
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Doku-men								1	51.750	1	54.338	2	106.088	BPSDM
6	Program Pendidikan Kedinasan	Kompetensi Widyaiswara	Doku-men								11	50.000	11	40.000	22	90.000	BPSDM
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur	Doku-men								990	8.075.000	1410	9.262.000	2400	17.337.000	BPSDM
	TOTAL					1.184.457.839		1.567.362.902		1.707.511.195		2.123.270.450		2.610.460.821		9.193.063.207	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tehadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTB

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016	2017	2018	Kondisi Kinerja Akhir 2018	Perangkat Daerah Pengelola	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target				Utama	Pendukung
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**												
1	Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	54		43		39	37	32	27	27	Bakesbangpoldagri	Satpol PP, Biro Pemerintahan, Dispora, Dinas Dikbud, Dinas PMPD Dukcapil
2	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	%	45	55	100	65	100	100	100	100	100	Sat Pol PP	Biro Hukum
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	70,47	71,00	78,5	71,5	73,43	72,00	72,50	73,00	73,00	Bakesbangpolgdari	Biro Pemerintahan, Sekretariat DPRD, KPU
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,38	5,30	5,75	5,19	5,69	5,03	4,82	4,55	4,55	Disnakertrans	Seluruh Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)	%	5,61	5,60 – 5,75	6,15	5,75-5,85	5,62	5,85 – 6,00	6,00 – 6,25	6,25 – 6,50	6,25 – 6,50	Biro Perekonomian	Seluruh Perangkat Daerah
6	Pola Pangan Harapan	point	78,70	79,40	79,9	80,2	81,3	80,90	81,70	82,50	82,50	Dinas Ketahanan Pangan	Disdag, Disperin, Distanbun, Dislutkan, Disnakeswan, Dinas LHK
7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	8.950		8.987		9.241	9.352	9.464	9.578	9.578	Dinas Perdagangan	Bappenda, Dinas PMPTSP, Disdag, Disperin, Diskop UKM, Bappeda, BPKAD, Dispar, Distanbun, Dislutkan, Disnakeswan, Biro Perekonomian, Dinsos, Disnakertrans
8.	Angka kemiskinan	%	17,25	16,25	17,05	15,25	16,54	14,25	13,25	12,25	12,25	Dinas PMPD Dukcapil	Seluruh Perangkat Daerah
9	Laju Investasi	%	8,28	8,30	26,81	8,4	60,53	8,50	11,5	13,50	13,50	DPMPTSP	Bappenda,Disperin, Disdag, Diskop UKM, Bappeda, Biro Keuangan, Biro Perekonomian
10	Pertumbuhan PAD	%	13,66	13,78	38,94	13,64	16,79	2,09	5,19	7,64	7,64	Bappenda	Seluruh Perangkat Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016	2017	2018	Kondisi Kinerja Akhir 2018	Perangkat Daerah Pengelola	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target				Utama	Pendukung
11	Kunjungan Wisatawan	Org	1.357.602	1.469.597	1.629.122	1.705.400	2.210.527	1.979.174	3.500.000	4.000.000	4.000.000	Dinas Pariwisata	Seluruh Perangkat Daerah
	- Mancanegara	*Org*	*565.944*	*595.020*	*752.306*	*697.363*	*1.149.235*	*817.310*	*1.750.000*	*2.000.000*	*2.000.000*		
	- Nusantara	*Org*	*791.658*	*874.577*	*876.816*	*1.008.037*	*1.061.292*	*1.161.864*	*1.750.000*	*2.000.000*	*2.000.000*		
12	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	1,58	1,58	2,2	1,82	3,69	2,00	2,20	2,42	2,42	Dinas Sosial	Seluruh Perangkat Daerah
B	**Aspek Pelayanan Umum**												
13	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
14	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB Online	Kali	4.653	10.000	25.347	20.000	736.363	40.000	80.000	160.000	160.000	Diskominfo dan Statistik	Seluruh Perangkat Daerah
15	Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	68,92	68,99	72,67	72,37	72,90	75,39	83,65	83,65	Dinas PUPR	Dishub, Bappeda
16	Ratio Elektrifikasi	%	64,43	65,68	66,91	68,01	72,24	70,34	72,67	75,00	75,00	Dinas ESDM	Dinsos, Dinas PMPD Dukcapil, Disnakertrans
17	Cakupan Air Bersih											Dinas PUPR	Dinsos, Dinas ESDM, BPBD, Dikes, Dinas LHK
	- Perkotaan	%	80,23	82,18	*82,09*	*83,53*	*83,25*	84,87	86,22	87,56	87,56		
	- Perdesaan	%	72,15	75,12	*74,8*	*76,81*	*75,57*	78,50	80,18	81,87	81,87		
18	Penanganan Rumah Tidak layak huni	Unit	21.471	1.000	1.000	1.000	800	1.008	1.073	1.119	26.471	Dinas Perkim	Dinsos, Dikes, Dinas PMPDK dan Capil
19	Cakupan Jamban Keluarga	%	72,15	73	74,02	74	75,06	76	78	80	80	Dinas Kesehatan	Dinsos, Dinas PUPR, Dinas PMPD Dukcapil, Disperkim

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016	2017	2018	Kondisi Kinerja Akhir 2018	Perangkat Daerah Pengelola	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target				Utama	Pendukung
C	**Aspek Daya Saing**												
20	Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun keatas	Tahun	6,54		6,67		6,71	6,79	6,87	6,95	6,95	Dinas Dikbud	Dinsos, Diskop UKM, Dinas PMPD Dukcapil, DP3AP2KB, Biro Kesra
21	Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas	%	15,04	13,86	13,04	12,77	13,04	11,77	10,85	10,00	10,00	Dinas Dikbud	Dinsos, Diskop UKM, Dinas PMPD Dukcapil, DP3AP2KB, Biro Kesra
22	Usia Harapan Hidup	Tahun	62,73	64,50	64,9	65,25	65,38	65,90	66,60	67,70	67,70	Dinas Kesehatan	RSUP, RSJ Mutiara Sukma, RSUD HL. Manambai Abdulkadir, Dinsos, Dinas PMPD Dukcapil, DP3AP2KB, Biro Kesra, Dinas Dikbud
23	Prevalensi Kurang Gizi	%	18,27	17,0	20,6	16,5	17,01	16,0	15,5	15,0	15,0	Dinas Kesehatan	RSUP, RSJ Mutiara Sukma, RSUD HL. Manambai Abdulkadir, Dinsos, Dinas PMPD Dukcapil, DP3AP2KB, Biro Kesra, Dinas Dikbud, DKP, Distanbun, Dislutkan, Disnakeswan
24	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,52	21,32	19,94	21,73	20,32	20,50	20,75	21,00	21,00	DP3AP2KB	Dikes, Dinas Dikbud, Dinas PMPD Dukcapil, Dinsos, Biro Kesra, Disnakertrans
25	Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah	%	10	20	20	40	40	50	65	75	75	Dinas Dikbud	Dinas PMPD Dukcapil, Dinsos, Disperpusda
26	Pranata Adat yang Terbentuk	Lembaga	10	50	54	50	53	50	50	50	260	Dinas Dikbud	Dinas PMPD Dukcapil
27	Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah											Dinas Perindustrian	Seluruh Perangkat Daerah
	- Desain Industri	Produk	37	15	2	15	2	15	15	15	112		
	- Merek	Produk	42	20	8	20	8	20	20	20	142		
	- Hak Cipta	Produk	18	15	1	15	0	15	15	15	93		

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016	2017	2018	Kondisi Kinerja Akhir 2018	Perangkat Daerah Pengelola	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target				Utama	Pendukung
28	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	78,58		82,35		84,67	88,00	95,00	100	100	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
29	Jumlah penumpang angkutan udara dan laut											Dishub	Dinas PUPR, Dispar, Badan Penghubung, DPMPTSP
	- Angkutan udara	org	2.145.290	2.451.000	2.495.695	2.843.000	2.747.664	3.298.000	3.476.000	3.626.000	3.626.000		
	- Angkutan laut	org	125.794	138.373	162.828	153.594	801.433	172.025	197.828	227.502	227.502		
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		67,77		69,39		66,42	67,84	67,89	67,95	67,95	Dinas LHK	Dishub, Dinas PUPR, Dikes
31	Mata Air Terlindungi	Titik	334	354	354	375	384	396	417	438	438	Dinas LHK	Dinas PUPR, Dispar

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023, maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, RKPD Tahunan dan perencanaan penganggaran. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Provinsi NTB

setiap tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gubernur berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku dunia usaha, untuk mewujudkan pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban melaksanakan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
3. Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
4. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun RAPBD;
5. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
6. Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
7. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dinilai tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
8. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 kepada masyarakat;

9. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI